KRONIK PERLAWANAN PALESTINA

Dari Akar Zionisme
hingga Badai Al-Aqsa

Pasal 113

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

UU No. 28 Tahun 2014

MUHAMMAD ILHAMI

KRONIK PERLAWANAN PALESTINA

Dari Akar Zionisme hingga Badai Al-Aqsa

AL FAHMU
INSTITUTE

KRONIK PERLAWANAN PALESTINA

Dari Akar Zionisme
hingga Badai Al-Aqsa

152 x 230 mm | xx + 276 halaman
Cetakan I, Mei 2025

Penulis:
Muhammad Ilhami

Penyunting:
Fahmi Salim, M.A.

Perwajahan dan Tataletak:
Irfan Fahmi

Desain Sampul:
Muchlis Umar

Diterbitkan oleh:
YAYASAN AL-FAHMU INTERNASIONAL INDONESIA
Jl. Pengukiran III Gg.I No.19 RT.004 / 003 Kel. Pekojan, Kec. Tambora
Jakarta Barat 11240

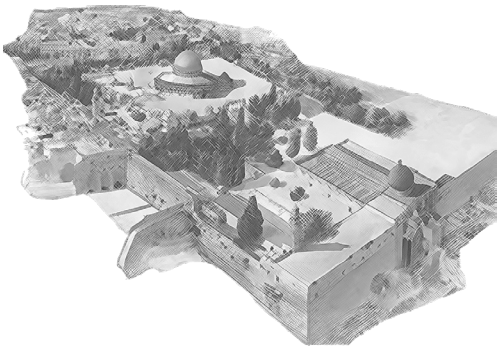

SEKAPUR SIRIH

EDISI BAHASA INDONESIA

Oleh: **Fahmi Salim, M.A.**
Direktur Utama Baitul Maqdis Institute, Indonesia

Buku "Kronik Perlawanan Palestina: Dari Akar Zionisme hingga Badai Al-Aqsa" karya Muhammad Ilhami adalah salah satu karya terbaru yang memberikan sorotan mendalam mengenai isu Palestina dari perspektif sejarah dan analisis yang komprehensif. Buku ini bertujuan untuk menyajikan narasi yang ringkas namun terpadu mengenai sejarah Palestina, dengan fokus pada akar ideologi dan politik Zionisme hingga peristiwa terkini seperti Operasi "Badai Al-Aqsa".

Buku ini terdiri dari pendahuluan dan sebelas bab yang membahas perkembangan isu Palestina, dimulai dari awal pemikiran Zionisme hingga peristiwa terkini di Gaza. Buku ini ditutup dengan kesimpulan dan pelajaran penting yang bertujuan meningkatkan kesadaran pembaca tentang pentingnya isu Palestina dan cara menghadapinya.

Muhammad Ilhami menggunakan pendekatan analisis yang menghubungkan peristiwa sejarah, politik, dan agama, dengan fokus pada:

1. **Akar Sejarah Zionisme:** Penulis menjelaskan bagaimana perubahan keagamaan dan politik di Eropa, seperti munculnya Pro-

testanisme dan invasi Napoleon ke Mesir, membuka jalan bagi lahirnya pemikiran Zionisme.
2. **Peran Rezim Arab:** Penulis mengkritik sikap beberapa rezim Arab yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada pendirian negara Zionis, baik melalui pengkhianatan maupun kolaborasi.
3. **Perlawanan Palestina:** Buku ini menyoroti perkembangan gerakan perlawanan, mulai dari gerakan non-Islam hingga gerakan Islam seperti Hamas, dengan fokus pada peran mereka dalam mempertahankan Palestina.

Setelah kami membaca dan menilai konten buku ini, kami mendapati keunggulan buku ini di banding buku referensi lain yang berkaitan dengan Palestina dan Baitul Maqdis sebagai berikut:
1. **Narasi yang Terpadu:** Buku ini menyajikan alur sejarah yang terstruktur sehingga memudahkan pembaca memahami perkembangan isu Palestina tanpa merasa terpecah-pecah.
2. **Analisis Mendalam:** Tidak hanya memaparkan fakta, buku ini juga memberikan analisis mendalam tentang sebab dan akibat dari setiap peristiwa.
3. **Kesimpulan dan Pelajaran:** Setiap bab diakhiri dengan kesimpulan dan pelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran pembaca akan pentingnya isu Palestina.

Selain itu buku ini, hemat kami, telah berhasil menghadirkan wawasan baru mengenai:
1. **Pengaruh Kebijakan Barat:** Penulis menyoroti bagaimana kebijakan Barat, khususnya Inggris, mempersiapkan jalan untuk pendirian negara Zionis.
2. **Transformasi Agama di Eropa:** Buku ini menjelaskan bagaimana perubahan agama, seperti munculnya Protestanisme, mengubah pandangan orang Eropa terhadap Yahudi, yang pada akhirnya mendukung proyek Zionis.
3. **Pentingnya Kesadaran Sejarah:** Penulis menekankan bahwa memahami sejarah adalah langkah penting untuk memahami masa kini dan merancang masa depan.

Kesimpulan

Adapun tentang kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan oleh penulisnya, semuanya sangat berharga dan membutuhkan pembacaan yang mendalam, perenungan, dan pengamatan yang lama. Sebuah pengantar singkat seperti ini tidak akan mampu memberikan keadilan yang layak bagi isi buku tersebut. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada diri sendiri dan para pembaca untuk membacanya berulang kali agar kita bisa mengambil manfaat darinya.

Di antara kesimpulan terpenting yang disebutkan, meskipun tidak semua, adalah bahwa, *"Pembebasan Palestina tidak akan dapat dicapai selama rezim-rezim Arab pro-Zionis yang ada saat ini tetap bertahan."*

Saya ingin menutup pengantar buku ini dengan sebuah kutipan dari penulis: *"Sesungguhnya inti dari konflik ini adalah konflik agama, dan tidak akan ada penyelesaian kecuali salah satu pihak menang secara mutlak atas pihak lainnya. Sebab, tempat-tempat suci tidak menerima sikap kompromi atau pembagian. Tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk bertindak atau menyerahkannya."*

Buku yang ada di tangan pembaca berbahasa Indonesia ini adalah referensi penting bagi siapa saja yang ingin memahami isu Palestina secara mendalam dan menyeluruh. Sangat direkomendasikan untuk peneliti, pelajar, dan siapa saja yang peduli dengan isu Palestina, karena buku ini berisi informasi dan analisis yang sangat berharga.

Terimakasih dan apresiasi yang tinggi dari Baitul Maqdis Institute kepada Muhammad Ilhami, sang penulis buku ini. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang mengalir berlipat ganda. Kepada sidang pembaca dan para perindu Baitul Maqdis di Indonesia tercinta, kami ucapkan selamat menikmati hidangan ilmu, wawasan dan hikmah yang bergizi ini. Karena literasi yang jujur dan benar akan membangun pemahaman yang kokoh dan pada akhirnya menggerakkan segenap potensi umat untuk meningkatkan amal usaha pembebasan Baitul Maqdis. Semoga. *Nashrun minallah wa fathun qoriib.*

Jakarta, 25 April 2025

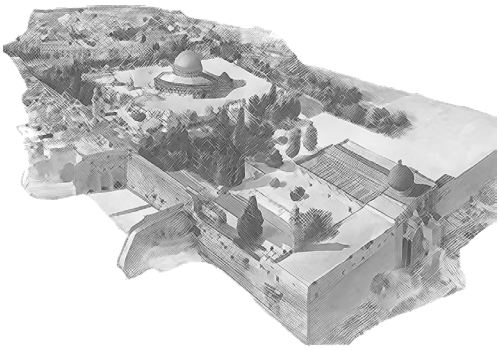

Pengantar
EDISI KETIGA

Bismillah, segala puji bagi Allah, shalawat dan salam kepada Rasulullah. Atas kehendak Allah, edisi pertama buku ini diterbitkan pada 7 Oktober 2024, tepat satu tahun setelah pecahnya peristiwa "Badai Al-Aqsa." Meskipun materi buku ini sebelumnya telah saya sampaikan dalam sejumlah ceramah dan pertemuan virtual, hal itu tidak mengurangi sambutan hangat terhadap buku ini. Bahkan, meski saya menyediakan buku ini untuk diunduh gratis di internet, beberapa penerbit tetap meminta izin untuk mencetak ulang, dan buku ini pun diterbitkan kembali. Saya juga menerima banyak sekali permintaan untuk menerjemahkan buku ini ke berbagai bahasa dunia. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah!

Saya terharu mengetahui bahwa beberapa warga Gaza mempelajari buku ini di tenda-tenda mereka, di tengah serangan bom, dingin, dan kelaparan. Gaza terus menghadirkan kejutan-kejutan luar biasa bagi kita, yang cukup menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi saya. Bahkan, beberapa tokoh terkemuka dan ulama di Gaza menyampaikan bahwa mereka menemukan wawasan baru dalam buku ini, sesuatu yang sebelumnya tak mereka sadari—meskipun mereka adalah pemilik langsung dari perjuangan ini. Saya anggap

hal ini sebagai bentuk kerendahan hati mereka, namun saya ingin mencatatnya di sini sebagai bukti bahwa saya telah berkontribusi dalam sesuatu yang berarti.

Dukungan besar terhadap buku ini membawa banyak komentar dan saran yang mendorong saya untuk membuat beberapa penambahan dan revisi. Selain itu, referensi baru yang saya temukan setelah edisi pertama juga memotivasi saya untuk menambahkan beberapa klarifikasi terhadap bagian yang mungkin terasa ambigu. Meski begitu, pandangan dasar dalam buku ini tidak mengalami perubahan.

Barangkali, saya seharusnya memperbarui informasi terkait "Badai Al-Aqsa," yang masih berlangsung saat saya menulis ini (12 Januari 2025). Misalnya, mencatat jumlah korban jiwa, luka-luka, atau tokoh-tokoh besar yang syahid seperti Saleh Al-Arouri, Ismail Haniyah, dan Yahya Al-Sinwar. Namun, saya memutuskan untuk tidak melakukannya. Sebab, peristiwa ini masih segar, penuh perkembangan baru, dan belum cukup matang untuk dijadikan bahan narasi sejarah yang utuh. Saya memilih menunggu hingga momen ini selesai agar penulisan sejarahnya lebih lengkap dan mendalam.

Akhirnya, segala keberhasilan datang dari Allah semata, dan segala kekurangan, kesalahan, atau kelalaian adalah dari saya dan dari setan. Allah adalah Penolong kita, dan hanya kepada-Nya kita bertawakal.

Muhammad Ilhami
Istanbul, 12 Januari 2025

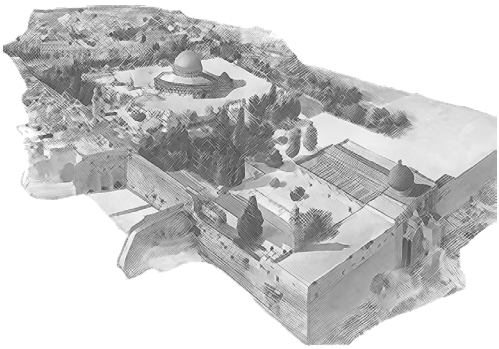

Pengantar
EDISI PERTAMA

Saya rasa penelitian ini adalah salah satu yang paling melelahkan dan sulit dibandingkan penelitian-penelitian lain yang pernah saya tulis. Sebelumnya, saya sudah mengetahui bahwa ini adalah tugas yang sangat sulit, tetapi semakin jauh saya melangkah, semakin saya menyadari bahwa kesulitannya jauh melampaui apa yang saya bayangkan. Sempat terpikir untuk menghentikan dan menundanya, tetapi saya segera menepis pikiran negatif ini. Betapa banyak penelitian yang menghabiskan waktu dan tenaga, namun akhirnya ditunda dan hanya tergeletak dalam arsip dan laci, tanpa pernah tiba waktu yang tepat untuk menyelesaikannya. Semakin waktu berlalu, semakin sedikit waktu luang yang tersedia, semakin bertambah tanggung jawab, semakin lemah semangat dan kesehatan, sehingga menunda pekerjaan adalah keputusan terburuk bagi seorang penulis—karena pekerjaan yang ditunda hampir tidak pernah selesai.

Sejak saya menyadari dunia ini, masalah Palestina selalu hadir, dan saya selalu peduli padanya dalam setiap tahap kehidupan saya. Hal ini menjadi bukti pertama bahwa masalah ini sangat kompleks dan penuh gejolak. Usaha untuk merangkum masalah ini dalam sebuah buku adalah petualangan yang menakutkan. Penelitian ini

seharusnya ditulis belakangan, setelah proyek *"Ringkasan Sejarah Islam"* mencapai periode modern dan kontemporer. Namun, ledakan peristiwa Taufan Al-Aqsa menuntut agar penelitian ini diprioritaskan untuk segera ditulis. Waktunya menjadi sangat mendesak.

Seperti yang saya ulangi sebelumnya, seri *"Ringkasan Sejarah Islam"* tidak ditulis untuk menyaingi para sejarawan atau untuk kalangan akademik, tetapi untuk para pekerja yang berjuang demi agama ini. Tujuannya adalah memberikan pemahaman mengenai garis besar sejarah, serta pelajaran dan hikmah utamanya. Tujuan ini menentukan cara penulisan, metode, dan bahkan nada bahasanya. Pendekatan ini menuntut untuk menyingkat, dan justru upaya penyederhanaan inilah yang menjadi sumber utama kesulitan dalam penelitian ini.

Bagaimana mungkin merangkum sejarah yang begitu kaya dan sarat dengan detail, dipenuhi oleh kejadian-kejadian besar, dan memiliki sumber yang sulit dihitung jumlahnya? Sebagian besar tokoh penting dalam masalah ini telah menulis memoar dan catatan harian mereka, atau setidaknya catatan tersebut dikumpulkan setelah mereka wafat. Hal ini mencakup tokoh-tokoh Palestina, Arab, Muslim, serta pihak Zionis, Inggris, dan Amerika. Hampir tidak ada tokoh yang tidak pernah menjadi subjek penelitian, setidaknya satu kali. Selain itu, para sejarawan dan peneliti telah mencurahkan upaya besar untuk memahami masalah ini. Mereka tak terhitung jumlahnya, begitu pula karya dan tulisan mereka. Ditambah lagi dengan lautan dokumen dan surat kabar yang tersebar selama lebih dari satu abad. Setiap peristiwa, masalah, atau tokoh selalu diwarnai dengan perbedaan pendapat, bahkan pertentangan. Selain itu, mayoritas pendapat itu tidak sepenuhnya murni untuk mencari kebenaran. Pemahaman penulis, motif, dan posisi politiknya selalu memengaruhi karya mereka. Bahkan, mereka yang berusaha jujur seringkali tidak dapat mengungkapkan semua yang mereka ketahui karena mempertimbangkan sensitivitas dan kepentingan tertentu.

Karena itu, tidak ada tugas yang lebih sulit daripada mengekstrak ringkasan sejarah masalah ini dari "lautan" yang luas ini. Saya menyadari bahwa sekeras apa pun saya berusaha, akan ada banyak hal yang terlewatkan. Tidak diragukan lagi, kesalahan juga mungkin

terjadi meskipun saya telah berusaha keras untuk menghindarinya. Penelitian ini selesai sementara daftar buku yang ingin saya tinjau jauh lebih panjang daripada yang benar-benar saya baca. Namun, saya telah berusaha semampu saya dalam menelusuri sejarah dan merangkum intisarinya.

Meskipun saya merasa telah peduli terhadap masalah ini sejak kecil melalui membaca, menulis, dan mengikuti perkembangannya, setiap kali saya menyelami sumber-sumber baru, saya selalu terkejut dan terguncang. Pengkhianatan para penguasa Arab ternyata lebih luas dari yang kita bayangkan, dan tragedinya lebih buruk dari yang pernah kita duga. Ini menunjukkan bahwa upaya yang diperlukan untuk membebaskan umat kita dan Palestina jauh lebih besar dari yang kita perkirakan.

Saya berusaha menyajikan cerita sejarah ini secara seimbang, dengan mempertimbangkan aspek-aspek agama, politik, dan sosial yang terlibat. Pada akhirnya, saya menyimpulkan cerita ini dengan pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik. Bagi yang tidak sabar membaca cerita secara penuh, mereka dapat langsung menuju bagian kesimpulan.

Tidak ada kebutuhan untuk membawa pembaca ke dalam rincian metodologi dan ilmiah yang rumit. Penelitian ini dimaksudkan sebagai ringkasan, sehingga tidak sesuai jika diperpanjang secara berlebihan. Saya menegaskan bahwa pembaca cukup membaca teks utama tanpa perlu memeriksa catatan kaki, kecuali jika ingin memperdalam atau merujuk informasi pada sumber aslinya. Sebagian besar catatan kaki berasal dari sumber primer, terutama memoar saksi mata. Saya tidak selalu merinci bagaimana seseorang menjadi saksi atau hubungannya dengan masalah ini, tetapi siapa pun yang mengenal nama-nama tersebut atau bersedia meneliti lebih jauh akan memahaminya. Jika saya memilih suatu narasi daripada yang lain, seringkali hal itu terkait dengan pertimbangan yang tidak bisa dijelaskan secara panjang lebar di sini. Saya juga menjauhkan diri dari sumber-sumber yang dapat dianggap emosional atau kurang kredibel secara ilmiah.

Bagi siapa pun yang merenungkan catatan kaki dan penyusunannya, mereka akan memahami bahwa saya mempertimbangkan

aspek-aspek teknis, akademis, dan historis yang tidak memungkinkan untuk dijelaskan secara rinci. Sebagai contoh, saya mungkin mengutip pendapat seorang pemimpin nasionalis Arab tentang era Kesultanan Utsmaniyah, bukan dari kalangan Islamis, atau menggunakan prinsip *"dan seorang saksi dari kaumnya sendiri telah bersaksi"* dengan menyajikan kesaksian seseorang yang tidak dapat diragukan kredibilitasnya terkait suatu peristiwa di atas orang lain.

Jika saya berbicara tentang peristiwa terkenal, saya tidak terlalu peduli untuk menyebutkan sumbernya. Namun, jika itu adalah tragedi atau pembantaian, saya lebih suka merujuk pembaca ke sumber seperti memoar daripada laporan resmi. Dalam memoar, ada jiwa kemanusiaan yang hidup, berbeda dengan angka-angka kering yang disajikan dalam laporan. Jika pembaca ingin menggali lebih dalam, akan lebih baik bagi mereka untuk pergi ke sumber yang menggambarkan peristiwa tersebut dengan emosinya, daripada laporan yang teratur, dingin, dan kaku.

Saya telah menambah dan memperbanyak catatan kaki serta referensi—yang sekali lagi saya tekankan tidak akan menarik bagi sebagian besar pembaca yang saya tuju dalam kajian ini—di tempat-tempat yang menurut saya berguna, dan menguranginya di tempat-tempat yang menurut saya lebih bermanfaat. Tidak ada ruang untuk menjelaskan metodologi ini secara rinci, tetapi siapa pun yang merenungkannya akan memahaminya.

Akhirnya, apa pun yang benar dalam penelitian ini berasal dari Allah semata. Segala kekurangan, kesalahan, atau kelalaian berasal dari saya dan dari godaan setan. Allah dan Rasul-Nya terbebas dari semua itu.

Muhammad Ilhami

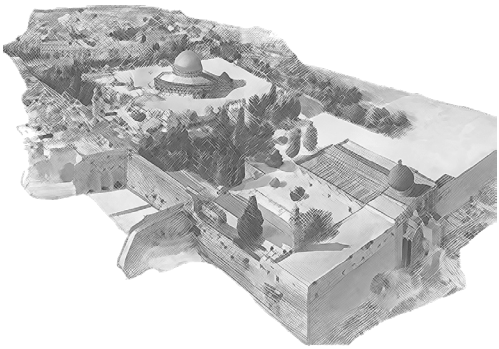

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih —v
Pengantar Edisi Ketiga —ix
Pengantar Edisi Pertama —xi
Daftar Isi —xv

Akar Zionisme —1

- Upaya Yahudi untuk Kembali ke Yerusalem —1
- Sensitivitas Konflik —3
- Zionisme Salib —3
- Periode Pendudukan/Kolonialisme Barat —4
- Hubungan Protestanisme dengan Yahudi —4
- Lahirnya Zionisme Salib —5
- Dampak terhadap Dunia Islam —5
- Sepuluh Tahun yang Menentukan dalam Kebangkitan Gagasan "Israel" —6
- Perlawanan Utsmaniyah terhadap Negara Yahudi —12

Pendirian Gerakan Zionisme —20

- Keadaan Yahudi di Eropa —20
- Herzl dan Pendirian Gerakan Zionisme —23
- Herzl dan Sultan Abdul Hamid II —28
- Gerakan Zionisme Setelah Kematian Herzl —33

Keadaan Palestina pada Akhir Kekuasaan Ottoman —36
- Keadaan Kekaisaran Ottoman: "Tidak Ada Penghalang"! —36
- Pertikaian yang Terjadi dan Keadaan Palestina setelah
- Kehancuran Kekaisaran Ottoman —38
- Kondisi Minoritas Yahudi —40

Era Pendudukan Inggris —47
- Perang Dunia I dan Hasilnya —47
- Penjajahan Palestina dan Yerusalem —52
- Mengapa Inggris Mendukung Proyek Zionis? —53
- Persiapan Inggris untuk Israel —54
- Inggris sebagai Fasilitator bagi Tumbuhnya Israel —56
- Implementasi Janji Balfour yang Bertentangan —57
- Perkembangan Komunitas Yahudi (1925-1935) —57
- Migrasi Massal dan Industrialisasi —57
- Pembentukan Sistem Intelijen Zionis —58
- Peran Zionis dan Inggris pada Akhir 1930-an hingga Akhir Perang Dunia II —58
- Perselisihan dengan Inggris —59
- Radikalisasi Kelompok Zionis —59
- Kondisi Palestina Pasca Perang Dunia II —59
- Dampak Strategi Zionis —60
- Transisi Kekuasaan Pasca Perang Dunia II dan Peran Zionisme —60
- Konflik Zionisme dengan Inggris —61
- Taktik Zionisme —61
- Dampak Pendudukan Inggris —62
- Tokoh Kunci Zionisme —63
- Peran Tiga Tokoh Zionis dalam Mewujudkan Negara Israel —63
- Keadaan Palestina di Bawah Pendudukan Inggris —63
- Transisi ke Pendudukan Inggris —64
- Munculnya Kesadaran Nasional Palestina —64
- Faktor-Faktor Penyebaran Ide Nasionalisme di Palestina —65
- Transformasi Identitas Palestina —66
- Kebijakan Inggris untuk Menghambat Pembentukan Negara Palestina —67

- Paradoks Kebijakan Inggris —67
- Dampak Kebijakan Inggris terhadap Masyarakat Palestina —68
- Kesimpulan —69
- Hubungan Sosial Palestina-Yahudi dan Dinamika Perlawanan—69
- Perlawanan Palestina: Pendekatan Islam dan Perlawanan Bersenjata —72
- Perlawanan Palestina: Dari Aksi Individual hingga Revolusi —74
- Perkembangan Politik dan Militer Revolusi Palestina —76
- Keterlibatan Muslim dari Negara-Negara Arab dalam Revolusi Palestina —78
- Represi Brutal Inggris —79
- Intervensi Militer Inggris —79
- Peran Milisi Zionis —80
- Kehilangan Besar dalam Revolusi —80
- Keberanian dan Kelemahan dalam Perlawanan —80
- Kesulitan Palestina Menghadapi Kekuasaan Inggris —81
- Perlawanan yang Tidak Sia-Sia —81
- Perjalanan Amin al-Husayni —81
- Kekalahan Jerman dan Kekuatan Baru Amerika —82
- Keadaan Amin al-Husayni yang Makin Sulit —82

Nakbah 1948 dan Deklarasi Negara Israel —83

- Keadaan Negara-negara Arab Sebelum 1948 —83
- Keputusan Pembagian Palestina —91
- Warisan Palestina dari Inggris kepada Zionis —96
- Dampak Keputusan Pembagian Palestina —96
- Rencana Inggris Mundur dan Penyerahan Palestina kepada Yahudi —97
- Kekejaman Zionis —97
- Jatuhnya Haifa dan Jaffa —97
- Jatuhnya Kota-Kota Palestina dan Deklarasi Israel —98
- Era Baru Dimulai: Nakba 1948 —99
- Ketiadaan Kepemimpinan Politik Palestina dan Peran Abdul Qadir al-Husseini —100
- Keterlambatan dan Kelemahan Tentara Arab —109

- Kurangnya Dukungan dan Koordinasi dalam Tentara Arab —110
- Pengkhianatan dan Keadaan Tentara Arab dalam Perang 1948 —112
- Perang 1948 dan Pengkhianatan Negara Arab —114
- Distribusi Pengungsi Palestina dan Ekspansi Wilayah Israel —117

Antara Dua Nakbah: Posisi Israel —119
- Keadaan Palestina antara Dua Nakbah —121
- Usaha Dewan Arab Tertinggi untuk Membentuk Pemerintah Palestina —123
- Pengkhianatan oleh Pemerintah Arab terhadap Palestina —125
- Dampak Nakbah terhadap Masyarakat Palestina —125
- Pengaruh Kebijakan Arab terhadap Perlawanan Palestina —126
- Kelahiran Gerakan Fatah —126
- Salah Satu Kekurangan dalam Studi Singkat Ini: Masalah Pengungsi —126
- Keadaan Negara-Negara Arab Setelah Nakbah 1948 —127

Nakbah 1967 dan Ledakan Ekspansi Israel —137
- Nakbah 1967 —137
- Kejatuhan Nasserisme dan Nasionalisme Arab —141
- Israel, Kekuatan Utama di Kawasan —143

Proses Penyerahan dan Normalisasi —146
- Perang Oktober —146
- Kudeta Mendadak Menuju "Perdamaian" —149
- Posisi Palestina Setelah Penarikan Mesir dari Perang —153

Era Perlawanan —157
- Gerakan Perlawanan Non-Islam —158
- Jawaban atas Pertanyaan Tersebut —160
- Adaptasi Islamis dan Fokus pada Dakwah —161
- Krisis dan Pembentukan Identitas Baru —161
- Kesamaan dan Perbedaan dengan Nasionalis —162
- Kemunculan Identitas Nasional Palestina —162
- Peran Fatah dan Gerakan Nasional Lainnya —163

- Intifada Pertama 1987 dan Kemunculan Perlawanan Islam —177
- Redupnya Gerakan Perlawanan Sekuler —180
- Perjanjian Oslo dan Pembentukan Otoritas Palestina —190
- Intifada Al-Aqsa —203

Pembebasan Jalur Gaza —211
- Lima Perang di Gaza —221
- Badai Al-Aqsa —232

Poin-poin Penting dalam Sejarah Palestina Modern dan Kontemporer —237
- Ringkasan Sejarah dan Pemikiran —237
- Kesimpulan dalam Situasi Internasional dan Regional —248
- Kesimpulan tentang Situasi Perlawanan —254

Referensi —261
- Referensi Bahasa Arab —261
- Referensi Bahasa Inggris —269

AKAR ZIONISME

Kaum Yahudi meyakini hak mereka atas Yerusalem dan Palestina berdasarkan keyakinan bahwa itu adalah tanah suci tempat tinggal para nabi mereka: Ibrahim, Ishaq, dan Yakub, serta tempat Musa dan Harun bermigrasi, bersama nabi-nabi lainnya. Di tanah ini pula terjadi puncak kejayaan mereka pada masa Nabi Daud dan Sulaiman, dua nabi sekaligus raja yang memerintah dari Yerusalem. Namun, setelah keduanya wafat, kerajaan mengalami kemunduran dan perpecahan, hingga akhirnya runtuh di bawah serangan bertubi-tubi dari kerajaan Babilonia, Mesir, dan Romawi. Sejak itu, kaum Yahudi hidup di tanah tersebut dalam kondisi tertindas dan kalah, atau bahkan diusir dari sana, dipaksa menjadi tawanan dan budak.

Upaya Yahudi untuk Kembali ke Yerusalem

Sejak masa itu, sekitar tiga ribu tahun yang lalu, kaum Yahudi terus bermimpi untuk kembali ke tanah suci dan membangun kembali negara mereka di sana. Sepanjang sejarah, terdapat sejumlah upaya dari mereka, meskipun semuanya berakhir dengan kegagalan. Bahkan, ada keraguan mengenai keseriusan dan realitas dari upaya-upaya tersebut.

Di antara upaya yang paling menonjol adalah:

1. **Percobaan David Reuveni (1523 M)**
   Sebuah usaha yang penuh dengan misteri dan diwarnai oleh unsur-unsur legenda.
2. **Upaya Yosef Nasi (1561 M)**
   Seorang Yahudi yang melarikan diri dari pengadilan inkuisisi Spanyol dan kemudian bergabung dengan istana Sultan Utsmani. Konon, ia berusaha memindahkan kelompok-kelompok Yahudi ke Tiberias, wilayah yang diberikan hak pengelolaan dan pembangunannya kepadanya. Namun, mengingat berbagai kondisi dan detail saat itu, sulit untuk percaya bahwa ini adalah bagian dari rencana besar untuk kembali ke tanah suci. Upaya ini lebih mungkin merupakan langkah untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari pengadilan inkuisisi agar mereka dapat hidup aman di bawah perlindungan seorang Yahudi kaya yang memiliki hubungan dengan Sultan Utsmani.

Kebanyakan dari usaha-usaha ini mungkin akan terlupakan seandainya tidak ada pendirian negara Israel yang memotivasi kaum Zionis dan para sejarawan untuk menggali dan menyoroti berbagai upaya tersebut dalam sejarah guna menciptakan narasi akar-akar historis perjuangan mereka.

Tiga dokumen Utsmani yang ditemukan pada tahun 989 H (1581 M), 991 H (1583 M), dan 993 H (1585 M) mengungkapkan bahwa pihak otoritas Utsmani berusaha mencegah kaum Yahudi menetap di wilayah Gunung Thur di Sinai.

Ketika kekuasaan Utsmani melemah pada masa yang sama dengan bangkitnya kekuatan-kekuatan imperialis Barat, kaum Yahudi mencoba memanfaatkan situasi tersebut. Perubahan di Eropa memberikan mereka posisi yang lebih baik dibandingkan dengan masa-masa Abad Pertengahan. Bahkan, muncul denominasi Kristen baru, yaitu Protestanisme, yang berhasil menguasai beberapa negara. Ajaran-ajaran Protestan membawa ide-ide baru yang secara tidak langsung mendukung kaum Yahudi—poin ini akan dibahas lebih lanjut nanti. Hal ini memperbarui harapan mereka untuk kembali ke

Palestina, yang kemudian diekspresikan melalui seruan, puisi, karya tulis, dan gerakan praktis yang bertujuan untuk mengumpulkan kembali kaum Yahudi di Palestina.

Sensitivitas Konflik

Ada satu hal yang membuat isu ini semakin sensitif dan kompleks: kaum Yahudi modern meyakini bahwa Bait Suci (Kuil Solomon) yang dibangun oleh Nabi Sulaiman—yang kini telah hancur total—dahulu terletak di lokasi Masjid Al-Aqsa. Keyakinan ini berarti bahwa pembangunan kembali kuil tersebut akan mengharuskan penghancuran Masjid Al-Aqsa, yang merupakan kiblat pertama dan masjid ketiga paling suci dalam Islam.

Dari sini, jelas bahwa konflik ini pada hakikatnya adalah konflik agama yang tidak dapat diselesaikan kecuali dengan kemenangan total salah satu pihak atas pihak lainnya. Hal ini karena tempat-tempat suci tidak bisa dinegosiasikan atau dibagi. Tidak ada seorang pun yang berhak mengelola atau melepaskannya.

Zionisme Salib

Kaum Nasrani meyakini bahwa Isa Al-Masih bin Maryam lahir di Palestina, di Betlehem. Di tanah ini pula ia diutus, disalib demi menebus dosa manusia, dan dimakamkan. Oleh karena itu, mereka memandang tanah Palestina sebagai tanah suci, tempat mereka berziarah, dan merasa memiliki kewajiban iman untuk "membebaskan makam Kristus" dari tangan kaum kafir (yang mereka maksud adalah Muslim).

Pada masa Kaisar Konstantin, tiga abad setelah wafatnya Isa Al-Masih, Kekaisaran Romawi memeluk agama Kristen. Setelah itu, Kekaisaran Romawi terpecah menjadi dua:

1. Kekaisaran Romawi Timur (Bizantium), berpusat di Konstantinopel (sekarang Istanbul), dengan gereja utamanya Aya Sofya, bahasa resminya Yunani, dan ajaran agamanya Ortodoks.
2. Kekaisaran Romawi Barat, berpusat di Roma, dengan gereja utamanya Vatikan, bahasa resminya Latin, dan ajaran agamanya Katolik.

Wilayah Syam dan Yerusalem secara umum berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur (Bizantium), kecuali dalam beberapa periode singkat di bawah kekuasaan Persia, hingga terjadi penaklukan Islam atas Syam dan Mesir. Setelah itu, Syam dan Yerusalem tetap berada di bawah kekuasaan Muslim selama sekitar dua belas abad.

Periode Pendudukan/Kolonialisme Barat

Satu abad di tengah-tengah periode tersebut, Yerusalem berada di bawah kendali Barat, yakni Katolik Latin yang berafiliasi dengan Vatikan. Masa ini dikenal sebagai periode Perang Salib. Kendati periode Perang Salib berlangsung dua abad di wilayah Syam, kontrol terhadap Yerusalem hanya berlangsung selama seratus tahun hingga akhirnya dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pembebasan total Syam dari Tentara Salib diselesaikan oleh Dinasti Mamluk.

Kondisi ini berlangsung hingga seratus tahun terakhir, ketika Inggris menduduki Yerusalem pada Desember 1917. Pada pagi hari setelah itu, sebuah surat kabar Inggris menulis: *"Kini Perang Salib telah berakhir."*

Namun, pendudukan terakhir ini tidak dilakukan oleh Ortodoks atau Katolik, melainkan oleh kelompok Protestan, cabang baru dari Kekristenan yang memisahkan diri dari Gereja Katolik. Protestanisme dipelopori oleh pendeta Jerman, Martin Luther (1483–1546), dan setelah melalui berbagai fase, kelompok ini akhirnya mendominasi kekuatan-kekuatan besar Barat, seperti Inggris dan Amerika Serikat.

Hubungan Protestanisme dengan Yahudi

Protestanisme membawa inovasi baru dalam banyak aspek, tetapi yang relevan bagi pembahasan ini adalah pandangan mereka tentang kaum Yahudi. Dalam doktrin Katolik, kaum Yahudi setelah kedatangan Isa Al-Masih dianggap menyimpang karena mereka tidak mengimani Isa. Oleh karena itu, mereka bukan kelanjutan sejati dari Yahudi yang disebutkan dalam Taurat, melainkan Gereja Katoliklah yang dianggap sebagai penerus sejati umat yang beriman kepada Taurat dan Injil. Dengan demikian, janji kembalinya Yahudi

ke tanah suci dalam Taurat dianggap sebagai peristiwa masa lalu atau hanya merujuk pada Gereja Katolik itu sendiri.

Namun, Protestanisme mengadopsi pandangan yang berbeda. Mereka menganggap bahwa kaum Yahudi modern adalah kelanjutan langsung dari kaum Yahudi yang disebut dalam Taurat, sehingga mereka dijanjikan untuk kembali ke tanah suci. Kembalinya mereka dianggap sebagai persiapan untuk kedatangan kedua Isa Al-Masih. Selain itu, Protestanisme menolak monopoli para imam dan pendeta dalam membaca dan menafsirkan Alkitab. Mereka membuka akses kepada setiap individu untuk membaca, memahami, dan menjalankan firman Tuhan secara mandiri. Hal ini mendorong penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa lokal Eropa, pencetakan, dan penyebarannya secara luas. Akibatnya, kisah-kisah Yahudi dalam Taurat dan sejarah nabi-nabi Bani Israil di tanah suci menjadi lebih populer, menggantikan fokus pada Gereja Katolik, sejarahnya, dan santo-santonya. Bahkan, kesadaran kolektif Eropa menemukan bahwa Isa—dalam konteks sejarah—adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israil!

Lahirnya Zionisme Salib

Pandangan ini berkembang, khususnya di wilayah-wilayah yang didominasi Protestanisme seperti Inggris, yang kelak menjadi kekuatan dunia. Sebagian besar masyarakat Protestan menyimpan ingatan sejarah bahwa Palestina adalah tanah kaum Yahudi, dan bahwa kaum Yahudi adalah orang Palestina yang tercerai-berai. Dalam pandangan mereka, Alkitab menjanjikan kembalinya Yahudi ke tanah suci. Buku-buku yang menegaskan pandangan ini mulai bermunculan sejak abad ke-17.

Dari sinilah lahir apa yang disebut sebagai *Zionisme non-Yahudi* atau *Zionisme Salib*, yang menyatukan dua keyakinan, Zionisme Yahudi dan Zionisme non-Yahudi, dalam gagasan bahwa kaum Yahudi harus kembali ke Palestina.

Dampak terhadap Dunia Islam

Sayangnya, kedalaman religius dari konflik ini kurang mendapat perhatian di dunia Islam akibat pengaruh pemerintah-pemerintah

sekuler dan produk-produk media, pendidikan, serta budaya yang lebih menonjolkan sisi politik dibandingkan dimensi religiusnya. Namun, siapa pun yang mempelajari topik ini akan dengan mudah menyadari bahwa Zionisme Salib adalah keyakinan yang kuat dan mengakar di kalangan elite Barat, baik di bidang politik, budaya, maupun ekonomi. Zionisme modern adalah versi baru dari Perang Salib di Abad Pertengahan.

Keyakinan ini memengaruhi dunia pemikiran dan politik, bersinggungan dengan perkembangan peristiwa. Mereka yang percaya padanya berusaha menerapkannya dan memengaruhi kebijakan politik. Sementara itu, para politisi sekuler memanfaatkan keyakinan ini untuk mencapai tujuan ekspansi dan politik mereka. Ada juga kelompok ketiga yang mendukung Zionisme sebagai cara untuk menyingkirkan kaum Yahudi dari Eropa dengan mengembalikan mereka ke Palestina.

Momen krusial untuk mewujudkan gagasan ini terjadi pada salah satu masa paling genting dalam sejarah dunia Islam, yaitu ketika Muhammad Ali Pasha menguasai wilayah Syam.

Sepuluh Tahun yang Menentukan dalam Kebangkitan Gagasan "Israel"

Sejarah kelemahan dan keruntuhan peradaban Islam di hadapan Barat sering ditandai dengan momen kampanye Napoleon ke Mesir dan Syam. Napoleon dengan pasukan Prancisnya berhasil menduduki Mesir dan meluaskan pengaruhnya ke Syam hingga Akka. Mamluk di Mesir yang berada di bawah kekuasaan Ottoman, serta Ottoman sendiri, tidak mampu menahan invasi asing ini. Ini adalah pertama kalinya Kairo jatuh ke tangan kafir sejak didirikan, dan pertama kali ibu kota Islam di Mesir diduduki sejak penaklukan Islam. Momen ini menjadi kejutan besar dan awal dari era baru.

Surat kabar Prancis pada waktu itu melaporkan bahwa Napoleon, meskipun seorang sekular tanpa agama, mengajukan seruan kepada orang Yahudi untuk kembali ke Tanah Suci ketika ia bergerak menuju Syam. Terlepas dari kebenaran berita tersebut, ini menjadi sinyal awal persinggungan kepentingan Yahudi dan Barat. Namun, kegagalan Napoleon di hadapan tembok Akka menunda rencana ini.

Pasukan Prancis akhirnya dipaksa keluar dari Mesir oleh aliansi Ottoman dan Inggris. Namun, Prancis mulai mencari sosok yang bisa menjadi sekutu mereka di Mesir. Mereka menemukan seorang perwira militer Ottoman bernama Muhammad Ali. Perwira ini adalah seorang yang sangat cerdas, ambisius, dan penuh tipu daya. Berkat dukungan politik Prancis, Muhammad Ali berhasil menguasai Mesir.

Muhammad Ali dianggap sebagai salah satu tokoh paling berbahaya di Timur selama dua abad terakhir. Ia berhasil mewujudkan ambisi Napoleon dengan membangun sebuah negara modern yang sentralistik berdasarkan model Barat. Selama hampir setengah abad pemerintahannya, ia memecah masyarakat Islam di Mesir, menjadikannya tunduk pada kekuasaan sentral.

Muhammad Ali mengalami kekalahan dalam semua peperangannya melawan kaum kafir, namun ia memenangkan perang-perangnya melawan sesama Muslim terutama di kawasan Hijaz, Sudan, Mesir dan Syam. Dalam perjalanannya menaklukkan Syam, ia membawa kebijakan yang memberikan hak istimewa kepada non-Muslim, terutama Yahudi dan Nasrani, dengan mengorbankan hak-hak Muslim.

Kebijakan ini mencakup:

1. Mendorong imigrasi Yahudi ke Syam, khususnya Yerusalem.
2. Memberikan izin pembangunan dan renovasi sinagoga dan gereja tanpa perlu persetujuan Ottoman.
3. Memberikan hak perdagangan yang menguntungkan kepada orang asing dan membatasi aktivitas perdagangan Muslim.
4. Membuka pintu bagi konsulat-konsulat asing di Yerusalem, yang kelak menjadi pusat pengaruh Inggris dan Amerika.

Muhammad Ali mendorong imigrasi Yahudi ke Mesir dan memperbanyak kehadiran mereka dalam administrasinya. Ada sebuah dokumen misterius yang bertanggal sembilan tahun sebelum Muhammad Ali menduduki Syam, berupa surat dari seorang Yahudi asal Syam yang melaporkan kondisi Syam, Irak, dan Iran, serta memperkirakan perkembangan di Syam. Hal ini mungkin menunjukkan adanya organisasi Yahudi yang bekerja untuk kepentingan Muhammad Ali di wilayah tersebut.

Setelah pasukannya memasuki Syam, Muhammad Ali menghapus semua pajak yang sebelumnya dikenakan pada para peziarah Nasrani dan Yahudi ke Yerusalem. Ia memperbaiki biara-biara milik para rahib Romawi dan membangun karantina kesehatan untuk para peziarah Nasrani yang datang, lalu menyerahkan dana yang dibayarkan oleh para peziarah tersebut kepada para rahib. Langkah ini sulit dipahami untuk seseorang yang biasanya bersikap monopolistik dalam membangun negara modern dengan sentralisasi keuangan.

Sejak hari-hari awal pendudukan Syam, ia memulai renovasi dan pembangunan sinagoga baru, bahkan sebelum pendudukannya sepenuhnya stabil. Sebanyak sembilan sinagoga Yahudi dibangun di Yerusalem, selain gereja-gereja dan biara-biara. Hal ini memicu perdebatan di antara komunitas Yahudi tentang apakah prioritasnya adalah membangun sinagoga baru atau menyediakan perumahan bagi para imigran Yahudi baru. Yerusalem sendiri mengalami lonjakan imigrasi Yahudi dan Nasrani yang signifikan.

Selain itu, kaum Nasrani diberi hak untuk merenovasi gereja-gereja mereka dan membangun yang baru tanpa harus meminta izin dari otoritas Ottoman, seperti yang biasa dilakukan sebelumnya. Orang asing juga diberi hak untuk memasuki tempat-tempat suci Islam dengan perlindungan otoritas.

Muhammad Ali mengizinkan pedagang asing untuk berdagang di wilayah Syam, yang sebelumnya hanya diizinkan oleh Ottoman di kota-kota pesisir. Tarif pajak perdagangan Muslim tujuh kali lebih tinggi dibandingkan tarif perdagangan untuk orang asing. Pemerintah juga mengendurkan pengawasan terhadap perdagangan asing, memungkinkan mereka untuk masuk lebih dalam ke wilayah Syam, termasuk ke Damaskus. Bahkan, terjadi peristiwa simbolis yang menonjol berupa penyambutan meriah untuk konsul Inggris yang masuk ke Damaskus, sesuatu yang sebelumnya dilarang oleh Ottoman karena mereka menganggap Syam sebagai wilayah Islam yang suci. Lebih jauh lagi, kapal-kapal Ottoman dilarang berdagang di wilayah Syam.

Selain itu, orang asing dan Yahudi diizinkan mendirikan sekolah-sekolah di Syam. Orang-orang kaya raya Yahudi mendirikan sekolah-sekolah modern yang bertujuan mencetak generasi muda

Yahudi Timur yang terampil dan mandiri sehingga mereka tidak lagi bergantung pada Yahudi Barat untuk membela mereka.

Kaum Nasrani dan Yahudi dimasukkan ke dalam jajaran militer dan administrasi, memperoleh pangkat dan gelar. Untuk pertama kalinya, Yahudi, Nasrani, Armenia, dan orang asing ditunjuk sebagai anggota *Majelis Syura Yerusalem*, yang bertugas mengatur urusan kota suci tersebut. Mereka juga diberikan izin untuk menjalankan proyek-proyek ekonomi dan perdagangan yang memungkinkan mereka mengelola tanah-tanah wakaf Islam serta lahan-lahan milik Kesultanan Ottoman.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Yerusalem, sebuah konsulat asing didirikan di sana, yaitu Konsulat Inggris pada tahun 1839. Konsulat ini memainkan peran penting dalam melindungi komunitas Yahudi dan Protestan di Yerusalem dan Syam, serta menjadi pusat pengaruh besar Inggris. Bahkan, konsulat ini menjadi benteng penyebaran agama Kristen. Pada waktu itu, konsul Amerika (berbasis di Jaffa) mengajukan permohonan untuk menunjuk wakil di Yerusalem, dan sejak saat itu aktivitas Amerika di kota suci tersebut pun dimulai.

Pada masa yang suram ini, terjadi upaya pertama dari komunitas Yahudi untuk menguasai sebagian dari area Tembok Buraq (yang mereka sebut sebagai *Tembok Ratapan*), dengan bantuan dari Konsul Inggris. Otoritas Mesir pun menyetujui hal tersebut.

Kaum Yahudi dan Nasrani menikmati status yang berada di atas hukum. Hukuman diberlakukan kepada siapa saja yang melakukan kesalahan terhadap mereka, bahkan jika hal itu terjadi tanpa sengaja. Bahkan, kejahatan pembunuhan serius yang dilakukan oleh beberapa dari mereka, seperti insiden al-Badiri, dimaafkan. Ketika terjadi pemberontakan di suatu wilayah, otoritas Mesir melakukan tindakan kejam untuk menghukum masyarakat, namun secara konsisten memberikan pengecualian bagi Yahudi dan Nasrani. Jika para pemberontak adalah kaum Nasrani, mereka diperlakukan dengan kelembutan yang luar biasa!

Ini adalah paradoks yang tidak dapat dijelaskan kecuali dengan kebencian dan permusuhan yang mendalam yang dimiliki Muhammad Ali dan para pengikutnya terhadap Islam dan umatnya.

Sebaliknya, beberapa masjid diambil alih dan diubah menjadi kandang kuda, sementara umat Muslim menghadapi penindasan yang sangat kejam, yang penjelasannya terlalu panjang untuk tempat ini. Banyak orang merasa bahwa ini adalah akhir dari kekuasaan Islam di dunia. Properti wakaf Islam mengalami perusakan dan perampasan yang paling parah, sementara properti wakaf milik Nasrani dan Yahudi diperlakukan dengan perlindungan dan perhatian khusus.

Banyak tokoh dan kaum terpandang Muslim terpaksa berlindung di bawah perlindungan konsulat-konsulat asing untuk menghindari penghinaan, wajib militer, dan pajak yang memberatkan. Bahkan, beberapa dari mereka berlindung di bawah perlindungan orang Nasrani dan Yahudi yang bekerja di konsulat dan lembaga asing, karena mereka mendapat perlindungan dari kekuatan asing. Akibatnya, seorang bangsawan Muslim yang terhormat pada masa sebelumnya kini bekerja di bawah perintah bekas pelayan mereka yang Nasrani atau Yahudi, hanya untuk menghindari kekejaman kekuasaan Muhammad Ali. Banyak pula yang melarikan diri meninggalkan negeri itu demi menyelamatkan diri.

Semua ini menyebabkan perubahan demografis di Yerusalem. Kaum Yahudi menjadi mayoritas, diikuti oleh Nasrani, sementara umat Muslim menjadi minoritas kecil. Perubahan ini juga menyebabkan perubahan besar dalam status sosial dan ekonomi, di mana posisi umat Muslim jatuh ke tingkat paling rendah, sementara Yahudi dan Nasrani lokal mengungguli mereka. Di atas semuanya, kaum asing memegang kendali tertinggi.

Perubahan dramatis dalam politik, ekonomi, dan sosial ini membangkitkan hasrat seorang kaya raya Yahudi, Moses Montefiore, untuk merancang proyek pemukiman kembali Yahudi di Palestina. Ini merupakan upaya terbesar sebelum Theodore Herzl, yang dilakukan dengan mencoba membeli tanah-tanah luas yang memiliki hak istimewa dalam bidang pertanian dan perdagangan. Montefiore disambut dengan hangat oleh Muhammad Ali, yang bahkan menawarkan bahwa desa-desa yang dibeli akan diberikan status otonomi!

Montefiore berhasil berkontribusi dalam mendirikan permukiman-permukiman pertanian, proyek-proyek industri, dan mem-

bangun pemukiman Yahudi pertama di luar tembok Yerusalem. Ia menciptakan status khusus yang menguntungkan bagi kaum Yahudi di Syam dan Palestina. Dengan bantuan konsul Inggris dan tekanan politiknya, kondisi ini mengubah kaum Yahudi menjadi *elemen asing* yang terlepas dari keterkaitan dengan wilayah tersebut dan dengan potensi besar untuk berkembang menjadi komunitas kolonial fungsional.

Singkatnya, hasil akhir dari kebijakan-kebijakan tersebut selama tahun-tahun itu adalah lahirnya gagasan untuk mengusir Yahudi dari Eropa dan mendirikan negara bagi mereka di Palestina. Dengan demikian, mimpi-mimpi kaum Yahudi beralih dari puisi-puisi para darwis, doa-doa para rabi, dan ritual keagamaan di sinagoga menjadi diskusi politik, artikel surat kabar, dan tulisan para pemikir serta intelektual, hingga akhirnya menjadi perhatian para raja, menteri, dan politisi. Dari sini muncul beberapa hal penting:

1. Charles Fourier, seorang pemikir sosialis yang membenci Yahudi dan menganggap mereka sebagai sumber kejahatan dunia, menerbitkan bukunya *"Industrie Fausse"* (1835-1836). Dalam buku tersebut, ia mengusulkan solusi untuk "masalah Yahudi" dengan mengusir mereka dari Eropa dan memukimkan mereka di Syam (Levant).
2. Lord Shaftesbury pada tahun 1839 menerbitkan artikel di *Quarterly Review*, sebuah majalah terkenal saat itu, yang membahas buku seorang pelancong yang mengunjungi Palestina. Ia menyimpulkan bahwa Palestina adalah tanah yang cocok untuk menampung Yahudi sebagai tenaga kerja di bawah pengawasan konsul Inggris di Yerusalem. Dua tahun kemudian, ia mengajukan gagasan ini dalam sebuah dokumen kepada Palmerston (25 September 1840), yang merinci manfaat proyek ini bagi Inggris.
3. The Times menyatakan bahwa isu ini telah menjadi persoalan nyata yang dibahas di tingkat politik. Surat kabar *The Globe* di London (yang dekat dengan Kementerian Luar Negeri) menerbitkan serangkaian artikel pada tahun 1839/1840 yang mendukung pemukiman besar-besaran Yahudi di Syam. Artikel-artikel ini mendapat persetujuan dari Lord Palmerston. Pada

tahun yang sama, Palmerston menulis surat kepada duta besar Inggris di Konstantinopel, mengusulkan pendirian negara Yahudi sebagai cara untuk melindungi Kesultanan Utsmaniyah dari Muhammad Ali.

4. Kolonel Churchill pada tahun 1841 menyerahkan memorandum kepada Moses Montefiore, yang mengusulkan pembentukan gerakan politik untuk mendukung pemulihan Palestina sebagai tanah Yahudi.

Kesimpulannya, pemikiran untuk mendirikan negara Yahudi pada waktu itu tidak akan muncul tanpa kebijakan yang diterapkan oleh Muhammad Ali di Syam. Oleh karena itu, ia dianggap tanpa diragukan sebagai *pendahulu pertama*, jika bukan *pendiri pertama* Israel. Seandainya dinamika politik internasional tidak mengalahkannya karena pertimbangan di luar kendalinya, Israel mungkin sudah berdiri setidaknya 50 tahun lebih awal dari yang sebenarnya!

Pada era ini, Yahudi mulai membangun pemukiman pertama mereka di luar tembok Yerusalem. Seorang filantropis Yahudi, Moses Montefiore, memainkan peran kunci dalam mendanai proyek-proyek Yahudi di Palestina. Kebijakan Muhammad Ali memungkinkan munculnya ide untuk menciptakan negara Yahudi di Palestina, yang sebelumnya hanya merupakan impian spiritual.

Pengaruh kebijakan Muhammad Ali inilah yang kemudian melahirkan gagasan konkret tentang pemindahan Yahudi dari Eropa ke Palestina. Ide ini mulai diadopsi oleh para pemikir, politisi, dan pemerintah Barat, menandai awal dari gerakan Zionisme modern.

Dalam kesimpulannya, kebijakan Muhammad Ali di Syam tidak hanya menjadi dasar untuk kebangkitan gagasan "Israel" tetapi juga membuka jalan bagi implementasinya pada dekade-dekade berikutnya. Muhammad Ali, tanpa diragukan lagi, menjadi salah satu pelopor utama ide pendirian negara Yahudi di Palestina.

Perlawanan Utsmaniyah terhadap Negara Yahudi

Meskipun upaya Muhammad Ali gagal dalam mempertahankan wilayah Syam, ia meninggalkan jejak yang kuat yang dibangun oleh penerus-penerusnya. Setelah Kesultanan Utsmaniyah merebut

kembali kendali atas Syam, mereka tidak bisa mengembalikan keadaan seperti semula, karena situasi baru telah mulai mengakar dan berkembang, seperti jumlah orang Yahudi yang semakin banyak, proyek-proyek ekonomi, dan kedutaan Inggris. Selain itu, kembalinya Kesultanan Utsmaniyah untuk menguasai Syam tidak hanya didasarkan pada kekuatan mereka sendiri, tetapi dengan bantuan Inggris, yang menjadikan kehadiran asing—terutama Inggris—tetap ada.

Meskipun upaya Muhammad Ali gagal, upaya-upaya Yahudi tidak mati. Terdapat sejumlah upaya Yahudi antara kepergian Muhammad Ali dari Syam hingga munculnya Herzl dan Zionisme, di antaranya: upaya oleh pelancong Yahudi Lawrence Oliphant (1880), yang dituangkan dalam bukunya *"The Land of Gilead"*. Selain itu, ada upaya oleh Samuel Montagu, seorang bankir Yahudi Inggris dan anggota parlemen Inggris serta ketua Asosiasi Pecinta Zion, kepada Sultan Abdulhamid II (1893) untuk mengizinkan Yahudi menjajah Yordania Timur. Begitu juga pada tahun yang sama, Zionis Jerman, Böhlendorf, menyusun rencana untuk membawa kelompok-kelompok Zionis untuk menetap di Yordania Timur dan berusaha mengusir suku Bedouin dari daerah tersebut. Pada periode ini, sejumlah organisasi dan asosiasi Yahudi didirikan di Eropa dan Rusia yang bertujuan untuk mempermudah migrasi ke Palestina dan mendukung minoritas Yahudi di sana, baik dengan memberikan dana langsung atau dengan membangun proyek-proyek pertanian dan industri.

Selain itu, upaya-upaya Yahudi ini semakin terjalin dengan pengaruh asing. Ada dua jalur utama pengaruh asing yang bisa kita amati: pertama, politisi dan pengambil keputusan berpengaruh di ibu kota Eropa, dan kedua, konsul asing yang mewakili ibu kota-ibu kota ini di Syam.

1. Politikus yang berpengaruh dan pembuat keputusan telah berusaha untuk menggabungkan kepentingan kekaisaran kolonial dengan tujuan untuk mengembalikan Yahudi ke Palestina. Di antara yang paling menonjol adalah Ernest Laharan, sekretaris pribadi Napoleon III yang menulis sebuah buku dengan tujuan tersebut, dan Lord Palmerston yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Inggris kemudian menjadi Perdana Menteri, yang

memiliki upaya besar untuk mendapatkan persetujuan dari Sultan Utsmaniyah agar membolehkan pendirian rumah bagi orang Yahudi di Palestina, serta lainnya. Beberapa di antaranya memiliki latar belakang pendidikan dan pendidikan Protestan yang dalam, seperti Lloyd George yang menyatakan bahwa ia lebih mengenal negara yang disebutkan dalam Perjanjian Lama (desa-desa Palestina) daripada mengenal tempat-tempat di Eropa, dan bahwa ia menghafal raja-raja dan nabi-nabi Israel lebih baik daripada raja-raja Inggris! Secara keseluruhan, "kebanyakan negara-negara ini (Eropa) mengeluarkan janji Balfour atau semacam janji Balfour." Bahkan Amerika Serikat juga terlibat dalam hal ini dan mulai menekan Utsmaniyah, terutama setelah pembantaian terhadap Yahudi di Rusia sejak 1881.

2. Konsul asing telah berusaha untuk membeli tanah di Palestina setiap kali ada kesempatan, sesuai dengan hukum kepemilikan tanah oleh orang asing yang berlaku di negara Utsmaniyah seperti di negara lainnya hingga saat ini. Artinya, hal tersebut merupakan eksploitasi terhadap kondisi tertentu, seperti hukum yang mengizinkan orang asing untuk memiliki tanah atau properti, serta beberapa kondisi yang tidak wajar yang berasal dari warisan era Muhammad Ali dan kelemahan Kesultanan Utsmaniyah. Kelemahan ini terwujud dalam krisis keuangan yang dihadapi oleh negara Utsmaniyah yang menyebabkan penumpukan utang besar, sehingga kebutuhan akan uang terkadang memaksa untuk menjual beberapa tanah melalui lelang publik. Selain itu, konsul asing memberikan perlindungan kepada orang Yahudi dalam bentuk hak istimewa asing dan memanfaatkan pengaruh konsuler untuk memperkuat keberadaan dan posisi mereka. Lebih dari itu, banyak konsul yang berusaha mengakali dan melanggar hukum Utsmaniyah.

Tidak diragukan lagi bahwa pengaruh ini mendapatkan jalannya melalui orang-orang korup di dalam kerajaan Utsmaniyah, baik mereka yang terpengaruh budaya Barat atau mereka yang tergoda oleh kekayaan dan nafsu duniawi. Oleh karena itu, pembicaraan tentang perlawanan Kesultanan Utsmaniyah terhadap negara

Yahudi tidak hanya terkait dengan sikap Sultan Utsmaniyah Abdul Hamid II terhadap Herzl, seperti yang akan kita bahas nanti, tetapi juga meluas ke periode sebelum munculnya Herzl dan Zionisme. Bahkan, kami telah menyebutkan beberapa firman yang dikeluarkan oleh sultan-sultan pada masa kejayaan Kesultanan Utsmaniyah yang melawan pemukiman Yahudi di Sinai, tiga abad sebelum saat itu.

Beberapa upaya penolakan signifikan yang dilakukan oleh Kesultanan Utsmaniyah pada masa sultan-sultan mereka yang lebih terkini antara lain sebagai berikut:

1. Kegagalan proyek pemukiman besar yang diprakarsai oleh Moses Montefiore, yang sebelumnya disetujui oleh Muhammad Ali setelah kembalinya Kesultanan Utsmaniyah ke wilayah Syam. "Serangan ini memukul inti dari proyek-proyek yang telah keras dikerjakan oleh Montefiore, yang kemudian dihentikan dan diputuskan dengan sangat keras."
2. Dalam sebuah dokumen Utsmaniyah tertanggal (6 Rabi'ul Sani 1262H = 3 April 1846M), Sultan Abdul Majid memerintahkan kepada gubernur Yerusalem untuk mengambil kembali tanah yang dibeli oleh seorang Yahudi Inggris dan menjualnya kepada warga negara Utsmaniyah, karena dokumen tersebut mengungkapkan bahwa kepemilikan tanah oleh orang Yahudi asing di Palestina dilarang berdasarkan hukum yang lebih dulu ada.
3. Kegagalan usaha berulang yang dilakukan oleh Lord Palmerston, Menteri Luar Negeri Inggris dan kemudian Perdana Menteri, untuk mendapatkan izin dari pihak Utsmaniyah untuk memberikan sebidang tanah di Palestina kepada orang Yahudi, "karena kekerasan hati dari pihak Kesultanan Utsmaniyah."
4. Pada (18 Rajab 1287H = 13 Oktober 1870M), Sultan Abdul Aziz mengeluarkan perintah yang menyatakan bahwa tanah Palestina adalah "tanah milik kerajaan", yang berarti dimiliki oleh Kesultanan Utsmaniyah untuk mencegah pemukiman Yahudi, dan 20% di antaranya tetap menjadi milik pribadi.
5. Pada tahun 1874, Yerusalem diubah menjadi wilayah administratif (mutasarriflik), yang langsung dikelola oleh ibu kota Istanbul, dan sistem administrasinya dikembangkan untuk menjadikannya salah satu pusat pemerintahan besar. Dengan demi-

kian, status administratifnya diperkuat dan dipantau langsung dari ibu kota, bukan dari gubernur atau pejabat lokal.

6. Lawrence Oliphant menganggap kegagalan proyeknya (1880M) disebabkan oleh fakta bahwa "prioritas dalam kebijakan politik mereka (Abdul Hamid II dan para pejabatnya) adalah untuk melawan kekuatan asing dalam segala hal."
7. Kegagalan upaya-upaya yang dilakukan oleh para duta besar Amerika Serikat yang berturut-turut kepada Sultan Abdul Hamid II untuk membuka Palestina bagi orang Yahudi yang melarikan diri dari pembantaian di Rusia, serta kecaman resmi Amerika terhadap tindakan-tindakan Kesultanan Utsmaniyah, "semuanya tidak membuahkan hasil."
8. Pada (Jumada al-Awwal 1299H = April 1882M), ketika gelombang migrasi Yahudi dimulai dari Rusia akibat penganiayaan yang mereka alami, Sultan Abdul Hamid II mengeluarkan sebuah pengumuman yang memberitahukan kepada orang Yahudi yang ingin berhijrah ke Kesultanan Utsmaniyah bahwa mereka tidak akan diizinkan menetap di Palestina, tetapi mereka diperbolehkan untuk bermigrasi ke wilayah Utsmaniyah lainnya dan menetap di sana dengan syarat mereka menjadi warga negara Utsmaniyah.

Dua bulan setelah itu (Rajab 1299H = Juni 1882M), sebuah telegram dari Sultan dikirim ke gubernur Yerusalem untuk melarang kedatangan orang-orang Yahudi Rusia yang bermigrasi ke pelabuhan-pelabuhan Palestina, dan untuk mengarahkan kapal-kapal yang membawa mereka ke pelabuhan Utsmaniyah lainnya. Kemudian, perintah dikeluarkan untuk mengusir semua orang yang telah menetap di Yerusalem, diikuti dengan perintah serupa untuk seluruh wilayah Syam guna mencegah pemukiman Yahudi atau infiltrasi mereka ke Palestina.

Setelah dua tahun (1884M), Kesultanan Utsmaniyah mengeluarkan keputusan untuk membatasi durasi kunjungan orang Yahudi ke Palestina hanya satu bulan. Namun, di bawah tekanan asing, durasi tersebut kemudian diperpanjang (1887M) menjadi tiga bulan. Tekanan asing terus berlanjut di satu sisi, sementara taktik dan per-

lawanan Utsmaniyah tetap berjalan di sisi lainnya. Secara umum, dekade 1880-an menyaksikan aktivitas dan kewaspadaan yang signifikan dari pihak Utsmaniyah dalam menghadapi upaya-upaya pemukiman Yahudi, terutama para migran dari Rusia dan sekitarnya, untuk menetap di Palestina.

Pada awal 1890-an, sejumlah keputusan berturut-turut dikeluarkan, dan dalam dokumen-dokumen Utsmaniyah muncul kesadaran terhadap rencana Zionis untuk menetap di Palestina. Pada (25 Rabi'ul Sani 1308H = 7 Desember 1890M), Sultan Abdul Hamid II mengeluarkan keputusan lain yang menutup celah-celah hukum yang berhasil dimanfaatkan beberapa orang Yahudi untuk membeli tanah pribadi, dan ia berusaha membeli sebanyak mungkin tanah di Palestina dari kas pribadinya untuk menutup jalan bagi pembeli Yahudi.

Pada (21 Dzulqa'dah 1308H = 28 Juni 1891M), Sultan memerintahkan kementeriannya untuk menolak kedatangan migran Yahudi yang diusir dari Eropa ke wilayah Utsmaniyah, karena hal ini dapat mengarah pada pembentukan "Pemerintahan Musawi" di masa depan, yang dianggap berisi "konspirasi besar."

Pada (28 Dzulqa'dah 1308H = 5 Juli 1891M), Sultan Abdul Hamid II menegaskan keputusan ini dalam suratnya kepada komite militer, menyatakan bahwa "menerima orang-orang musawi dan menempatkan mereka atau memberikan mereka kewarganegaraan adalah hal yang sangat merugikan, karena ini dapat menyebabkan pembentukan pemerintahan musawi di masa depan."

Pada (29 Dzulqa'dah 1308H = 6 Juli 1891M), Sultan Abdul Hamid II kembali menegaskan keputusan-keputusannya dan menolak posisi negara-negara yang mengecam penolakan mereka terhadap kedatangan migran Yahudi, dan menyatakan bahwa "jika orang-orang musawi ini ditempatkan di bagian manapun dari wilayah kekaisaran (Utsmaniyah), mereka akan perlahan-lahan menyusup ke Palestina, meskipun tindakan pencegahan diambil, dan mereka akan berusaha membentuk pemerintahan musawi dengan dukungan dan perlindungan dari negara-negara Eropa."

Pada (1896M), perusahaan-perusahaan Yahudi dilarang memiliki tanah, dan hanya orang Yahudi yang sudah menetap sebelum tahun 1893 yang diizinkan memiliki properti tetap.

Perlu dicatat bahwa semua tindakan ini dilakukan sebelum munculnya Herzl dan sebelum pendirian gerakan Zionisme.

Semua ini tidak berarti bahwa hasil yang diinginkan tercapai, karena ada pelanggaran yang terjadi akibat kelemahan Kesultanan Utsmaniyah, kuatnya pengaruh asing, dan korupsi administratif, namun yang dimaksud di sini adalah bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Kesultanan Utsmaniyah adalah untuk melindungi Palestina dan menentang pembentukan negara Yahudi. Ini adalah hal yang seharusnya tidak perlu dibahas panjang lebar atau dibuktikan, karena sudah menjadi sifat negara untuk melindungi tanahnya dan merasa sensitif terhadap pembentukan entitas yang berdiri sendiri di dalam wilayahnya. Namun, kami merasa perlu untuk membahasnya karena dua alasan:

Pertama: Banyaknya tuduhan terhadap Kesultanan Utsmaniyah karena telah mengkhianati Arab dan mengabaikan Palestina, hingga hal tersebut dianggap sebagai kebenaran oleh banyak generasi, yang semakin dipromosikan dalam konteks kontemporer untuk lebih menjelekkan Turki dan kebijakan mereka di masa pemerintahan Erdogan.

Kedua: Apa yang telah ditanamkan oleh kebijakan-kebijakan pengkhianatan oleh rezim-rezim Arab kontemporer mengenai konsep nasionalisme dan patriotisme yang meremehkan masalah pengabaian Palestina dan Baitulmaqdis, sehingga hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang dapat diterima dalam ranah politik. Akibatnya, banyak orang merasa bahwa para pemimpin negara-negara Arab dan Muslim tidak bertanggung jawab atas pembebasan Palestina, melawan penjajah Zionis, atau menjaga kesucian Masjid Al-Aqsa, melainkan melihatnya sebagai bentuk kebaikan hati atau bahkan sebuah tindakan yang dianjurkan. Hal ini merupakan hasil dari pemahaman nasionalisme yang buruk yang bertentangan dengan Islam, yang menempatkan para pemimpin sebagai bertanggung jawab hanya atas batas-batas negara yang telah ditentukan oleh penjajah! Salah satu dampak dari pemahaman ini adalah meredupnya kesadaran banyak orang tentang kesucian Baitulmaqdis dan Al-Aqsa, dan mereka mulai menerima anggapan bahwa Kesultanan Utsmaniyah telah mengabaikan wilayah tersebut demi kepentingan politik dan

finansial, padahal sebenarnya ini adalah kesalahan besar! Kesultanan Utsmaniyah sangat menghargai wilayah Syam ini, bahkan menyebutnya "Syam yang Mulia", dengan Baitulmaqdis sebagai pusatnya.

PENDIRIAN GERAKAN ZIONISME

Keadaan Yahudi di Eropa

Orang Kristen meyakini bahwa orang Yahudi adalah pihak yang membunuh Yesus Kristus, atau lebih tepatnya: mereka yang menyebabkan kematiannya, ketika mereka memfitnahnya kepada pihak berkuasa Romawi, yang akhirnya membawa Yesus ke salib, di mana ia mengalami penderitaan dan siksaan yang sangat mendalam menurut penuturan kitab-kitab mereka. Oleh karena itu, penganiayaan terhadap orang Yahudi oleh orang Kristen menjadi pola yang berulang dalam sejarah, khususnya di wilayah Syam, setelah para Kaisar Romawi memeluk agama Kristen. Hal ini menyebabkan orang Yahudi sering menjadi sekutu bagi Persia ketika mereka menyerang Syam, bekerja sama dengan pasukan penyerang untuk menghancurkan gereja-gereja, membunuh orang Kristen, dan menjarah harta benda gereja. Ini semakin memperburuk permusuhan terhadap mereka, yang meledak dalam bentuk pembalasan besar-besaran ketika Romawi kembali menguasai Syam. Para kaisar Romawi atau pemimpin militer mereka di Syam adalah pihak yang memberi pukulan paling besar kepada orang Yahudi, yang menyebabkan mereka tercerai-berai dan terpecah belah.

Pada zaman Abad Pertengahan di Eropa, penganiayaan terhadap orang Yahudi oleh orang Kristen menjadi salah satu ciri khas dari era tersebut. Mereka sering diusir dari negara-negara pada berbagai periode sejarah, dan alasan di balik pengusiran ini melibatkan faktor agama yang berkaitan dengan permusuhan Yahudi terhadap Kristus, serta alasan-alasan politik, ekonomi, dan sosial. Orang Yahudi memiliki sifat yang terisolasi dan cenderung berkelompok di daerah-daerah tertentu, membentuk kawasan khusus yang dikenal dengan nama kawasan Yahudi, dan seringkali menguasai perdagangan tertentu, terutama dalam bisnis emas, di samping praktik riba yang mereka lakukan. Hal ini semakin memperburuk pengasingan mereka di satu sisi dan meningkatkan kebencian terhadap mereka di sisi lain. Ditambah lagi dengan ketidakpercayaan terhadap orang asing yang ada dalam setiap masyarakat, atau upaya penguasa untuk memanfaatkan minoritas sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka, yang seringkali berbalik melawan mereka dalam masa-masa pemberontakan atau protes rakyat.

Jika orang Kristen sendiri hancur dalam perang-perang agama yang melibatkan persaingan antara aliran Katolik, Ortodoks, dan Protestan di Abad Pertengahan, bagaimana jika itu menyangkut orang Yahudi, yang merupakan minoritas agama, kelompok sosial yang terisolasi, dan kelas parasit dalam bidang ekonomi?

Namun, keadaan orang Yahudi di Eropa mulai membaik ketika Eropa secara bertahap mulai melepaskan diri dari dominasi agama Kristen dan Gereja, serta memasuki era sekularisme, nasionalisme, dan sistem negara modern dengan undang-undang dan peraturan sipil. Perubahan ini menyebabkan orang Yahudi dipandang sebagai warga negara biasa, bukan hanya sebagai orang Yahudi, sehingga membuka kesempatan bagi mereka untuk bekerja dalam posisi-posisi pemerintahan, bahkan ada yang berhasil menjadi anggota parlemen atau menteri dalam pemerintahan. Selain itu, mereka juga meraih kesuksesan finansial yang terlindungi oleh undang-undang sekuler yang dihasilkan oleh parlemen yang dipilih dan mewakili kepentingan jaringan kekuatan dan pengaruh di dalam negara. Mereka menjadi pemilik bank, lembaga keuangan, dan modal besar, yang seringkali mampu membiayai perang-perang para raja dan pangeran,

serta menutupi defisit anggaran negara dan pemerintahan. Hal ini seiring dengan perkembangan dan penyebaran Protestanisme, yang membawa aliran Zionisme Kristen, yang telah dibahas sebelumnya, yang menjadikan orang Yahudi objek kasih sayang, perlindungan, bahkan penghormatan, yang menghidupkan kembali keadaan mereka dan menyebabkan kondisi mereka berkembang pesat.

Namun, hal ini hanya berlaku di Eropa Barat, tidak mencakup Eropa Timur dan wilayah Rusia. Di wilayah tersebut, orang Yahudi tetap menjadi kelompok terpinggirkan yang menderita penganiayaan dan ketakutan, serta terus-menerus menjadi sasaran pembalasan sebagai sumber segala kejahatan. Keadaan ini memuncak dalam bentuk pembantaian terhadap orang Yahudi di Rusia dan Eropa Timur setelah pembunuhan Tsar Alexander II (1881M), yang dituduhkan kepada mereka, dan mereka hidup dalam ketakutan yang mendalam. Dari sini, gelombang emigrasi orang Yahudi dari Rusia dan Eropa Timur ke Eropa Barat dimulai!

Gelombang migrasi ini menjadi salah satu faktor penting dalam kesuksesan proyek Zionisme. Orang Yahudi di Eropa Barat tidak begitu tertarik untuk berimigrasi dari Eropa setelah kondisi mereka membaik. Mereka memandang rencana ini sebagai sebuah konspirasi yang bertujuan untuk mengeluarkan mereka dari Eropa dengan alasan mengembalikan mereka ke tanah nenek moyang mereka. Sementara itu, orang Yahudi dari Rusia dan Eropa Timur melarikan diri dari penderitaan dan mencari perlindungan di mana saja, dan merekalah yang menyediakan sumber daya manusia yang berkolaborasi dengan kepentingan Eropa Barat dalam mendirikan sebuah negara bagi orang Yahudi di Palestina.

Orang-orang yang melarikan diri dari Eropa Timur ini memperbaharui "masalah Yahudi" di kalangan para politisi Eropa Barat, dan berbagai upaya dari Zionisme Yahudi dan non-Yahudi—yang telah disebutkan sebelumnya—mendorong solusi yang dianggap paling dekat dan terbaik, yaitu: memindahkan mereka ke Palestina; baik dari perspektif agama dan keyakinan, atau sebagai kebijakan dan kepentingan kolonialisme.

Dengan demikian, pendirian sebuah negara untuk orang Yahudi di Palestina adalah harga yang harus dibayar oleh umat Muslim, me-

lalui darah dan nyawa mereka, sebagai kompensasi dari Eropa kepada orang Yahudi atas penganiayaan yang telah mereka alami selama sebagian besar sejarah Eropa! Selain itu, hal itu juga menjadi solusi untuk masalah Eropa dan kepentingan kolonial ekspansionis mereka, yang memanfaatkan orang Yahudi untuk menjadikan Palestina sebagai tanah yang tertancap seperti duri di tubuh dunia Islam, dan untuk mengandalkannya sebagai basis militer yang maju untuk tentara mereka! Dengan demikian, yang lemah selalu menjadi pihak yang membayar harga dalam konflik antara yang kuat.

Herzl dan Pendirian Gerakan Zionisme

Seluruh keadaan ini berkumpul untuk membangkitkan seorang pemuda jurnalis Yahudi asal Austria, bernama Theodore Herzl, yang cerdas, aktif, dan penuh taktik. Dengan banyak kecerdikan, dia berhasil memanfaatkan semua kondisi yang ada untuk mendukung proyek pendirian negara Yahudi di Palestina.

Herzl mendasarkan proyeknya pada tiga pilar utama:

1. **Pilar Pertama:** Kemungkinan realistis yang diangkat oleh kebijakan Muhammad Ali, enam puluh tahun sebelumnya. Orang Yahudi masih menjadi mayoritas, memiliki kegiatan perdagangan yang kuat, dan kekuatan otoritas Utsmaniyah masih lemah!
2. **Pilar Kedua:** Penyebaran gagasan nasionalisme yang menganggap setiap bangsa memiliki negara dengan batas politik yang jelas dan kedaulatan yang independen. Herzl mengemukakan gagasan bahwa orang Yahudi adalah bangsa tanpa negara, dan mereka adalah bangsa tanpa tanah. Oleh karena itu, adalah kewajiban moral dan secara alami bagi orang Yahudi untuk memiliki negara dan tanah. Gagasan ini dirangkum dalam bukunya *"Negara Yahudi"* yang diterbitkan pada tahun 1896, dan buku ini menandai awal dari proyeknya untuk mendirikan gerakan Zionisme yang bertujuan mewujudkan ide tersebut. Gerakan ini mengadakan konferensi pertamanya di kota Basel, Swiss, pada tahun 1897, untuk meluncurkan proyek pendirian negara Yahudi.
3. **Pilar Ketiga:** Herzl hidup di zaman kolonialisme dan dominasi Eropa, di mana Eropa saat itu secara efektif menguasai dunia, baik melalui penjajahan langsung maupun pengaruh besar di

> wilayah-wilayah yang belum dijajah. Oleh karena itu, pendirian negara untuk orang Yahudi di suatu tempat menjadi hal yang memungkinkan jika ia berhasil meyakinkan politisi Barat, dan menjadikan proyek negara Yahudi bagian dari kepentingan kolonial Barat yang sekaligus menyelesaikan lebih dari satu masalah, terutama masalah aliran imigrasi Yahudi dari Eropa Timur yang dapat merugikan negara-negara Barat.

Selagi Herzl berusaha, dia menyadari bahwa orang Yahudi tidak akan bereaksi atau merespons proyek pendirian negara bagi mereka, kecuali jika tanah tersebut berada di Palestina, khususnya di Yerusalem! Sebelumnya, Herzl berpikir untuk mendirikan negara Yahudi di Amerika Selatan, Afrika, atau tempat lain. Namun, ia menyadari bahwa proyek ini hanya akan berhasil dengan memanfaatkan energi, impian, dan hasrat spiritual orang Yahudi. Maka, ia mengubah proyeknya menjadi pendirian negara Yahudi di Palestina.

Herzl mulai upaya gigihnya untuk meyakinkan para politisi Barat mengenai proyek pendirian negara Yahudi di Palestina. Ia melakukan banyak perjalanan ke Austria, Jerman, Italia, Prancis, Inggris, dan Kekaisaran Ottoman, menggunakan segenap kecerdasan dan keterampilan persuasi untuk mencoba menemukan cara agar proyek negara Yahudi dapat mewakili kepentingan negara-negara yang ia ajak bernegosiasi. Ia berusaha memahami kepentingan dan perselisihan setiap negara, serta mencari titik temu yang dapat membuat proyek negara Yahudi menjadi bagian dari kepentingan negara tersebut.

Bagi orang Jerman, negara Yahudi di Palestina akan menyelamatkan mereka dari banjirnya imigran Yahudi dari Jerman yang melarikan diri dari penganiayaan Rusia, sekaligus menarik surplus tenaga kerja dan petani Yahudi. Negara ini juga akan menjadi negara Timur yang bergantung pada tenaga kerja Yahudi murah dan bahan mentah yang tersedia, menarik investasi dan modal Eropa, menggantikan Cina sebagai tempat tujuan. Semua ini akan menghemat Jerman dari harus menerima pekerja Yahudi yang teraniaya, yang mungkin akan bergabung dengan partai-partai revolusioner dan menyebabkan

kerusuhan. Selain itu, negara Yahudi akan menjadi penghalang bagi ambisi Prancis dan Rusia (musuh Jerman) jika Turki hancur, karena orang Yahudi yang teraniaya akan berjuang melawan pengaruh Rusia. Negara ini akan menjadi titik pijakan bagi kebijakan Barat dan dukungan baru bagi perlindungan orang Kristen Timur, serta menjadi penghalang agar satu negara (Inggris = musuh Jerman) tidak menguasai jalur antara Timur dan Barat, karena Inggris menguasai jalur ini dengan menguasai India, Teluk Persia, Mesir (laut dan Terusan Suez), dan Siprus.

Sementara itu, bagi orang Inggris, Herzl menawarkan proyek negara Yahudi dengan alasan bahwa hal itu akan memberikan mereka jalur alternatif antara Timur dan Barat, yaitu jalur darat yang lebih pendek. Dengan demikian, Inggris akan menjamin dominasi totalnya atas jaringan jalan dan kepentingan kolonialnya. Negara Yahudi ini akan bekerja untuk membangun jalur kereta api antara Teluk Persia dan Laut Tengah, dengan salah satu cabangnya yang membentang hingga Afghanistan, yang akan sangat menguntungkan Inggris lebih dari negara lainnya, dan Inggris tidak akan menanggung biaya apa pun, karena orang Yahudi akan bekerja dan membiayainya. Dengan begitu, Inggris akan memiliki jalur alternatif jika terjadi masalah dengan Terusan Suez. Selain itu, keberadaan negara Yahudi di wilayah ini akan memecah Turki dan mencegah Rusia memperluas pengaruhnya di Timur, dan jika rencana Yahudi berhasil dalam mempengaruhi Sultan Utsmaniyah dengan uang, maka Sultan tidak akan lagi perlu meminjam uang dari Prancis dan Rusia (musuh-musuh Inggris), yang akan mencegah kedua negara tersebut memperbesar pengaruh mereka di Kekaisaran Ottoman. Bagi kalangan religius Inggris, ada alasan religius lainnya untuk mendukung negara Yahudi, yaitu bahwa kedatangan Mesias akan terjadi setelah orang Yahudi kembali ke tanah ini.

Adapun bagi orang Rusia, Herzl menawarkan proyek negara Yahudi sebagai kesempatan luar biasa untuk mengatasi "masalah Yahudi" mereka dengan mengusir orang Yahudi ke sana. Pengusiran ini akan berlangsung dengan mudah dan lancar, karena orang Yahudi sendiri akan menyambutnya. Karena banyak orang Yahudi berasal dari Rusia dan membawa budaya Rusia, negara Yahudi tersebut akan

berada di bawah pengaruh Rusia, dan ini akan memotong jalan bagi perluasan pengaruh Barat di Timur. Selain itu, orang Yahudi akan membayar uang kepada Sultan Utsmaniyah untuk membeli tanah dari mereka, dan uang ini akan dipergunakan Sultan untuk melakukan "reformasi" yang ditekan oleh negara-negara Kristen untuk memperbaiki kondisi umat Kristen. Dengan demikian, orang Yahudi akan dianggap sebagai pihak yang membiayai perbaikan kondisi umat Kristen, yang sebagian besar berada di bawah pengaruh Rusia, dan mereka akan berusaha menenangkan mereka dalam masalah Yerusalem, dengan mengatakan "Yerusalem akan tetap jauh dari urusan perdagangan."

Bahkan, kepada Paus Katolik, Herzl mengajukan proyeknya melalui wakilnya, dengan melepaskan tempat-tempat suci seperti Yerusalem, Betlehem, dan Nazaret, yang tidak akan termasuk dalam batas negara Yahudi yang diinginkan. Herzl juga bertemu dengan pemimpin muda Mesir, Mustafa Kemal, yang saat itu berusia 23 tahun. Kemal tertarik dengan semangat Herzl untuk mengusir Inggris dari Mesir, dan Herzl berpikir bahwa mungkin mengusir Inggris dari Mesir adalah kepentingan gerakan Zionis, karena dengan demikian Inggris akan terpaksa menyerahkan Terusan Suez, yang akan memperkuat proyek negara Yahudi yang menyediakan alternatif jalur darat. Setelah itu, tak bisa dilupakan bagaimana Herzl memanfaatkan keyakinan Protestan yang percaya bahwa Mesias akan datang setelah kembalinya orang Yahudi ke Palestina. Ia bekerja untuk menyampaikan keyakinan ini kepada para pemimpin religius.

Di Eropa, Herzl menghadapi masalah lain, yaitu keraguan orang Yahudi terhadap keseriusan proyek ini dan kemungkinan keberhasilannya. Tiga ribu tahun warisan kegagalan dan penganiayaan begitu membebani mereka, bahkan banyak orang Yahudi—terutama para rabbi dan kelompok religius—menafsirkan proyek ini sebagai konspirasi terhadap mereka, bagian dari proses penganiayaan untuk mengusir mereka dari Eropa, yang telah lama diperjuangkan oleh gerakan "anti-Semit". Keraguan mereka semakin meningkat dengan kenyataan bahwa gerakan Zionis adalah sekuler, bukan religius, sehingga tampaknya proyek ini bertujuan untuk mengusir mereka dari tempat-tempat aman mereka ke tempat yang tidak menjamin keber-

hasilan. Namun, Herzl dan gerakan Zionis setelahnya, berhadapan dengan mereka dengan berbagai cara persuasif dan rayuan, jika tidak dengan paksaan atau pembunuhan. Herzl bukanlah representasi dari impian orang Yahudi, tetapi ia dan gerakan Zionis mengumpulkan orang Yahudi ke dalam proyek negara Zionis, dengan cara pilihan—jika memungkinkan—atau dengan paksaan. Herzl menyatakan bahwa "orang-orang anti-Semit akan menjadi teman-teman yang paling dapat dipercaya, dan negara-negara anti-Semit akan menjadi sekutu kami," dan Zionisme bekerja sama dengan Nazi untuk tujuan pengusiran orang Yahudi dari Jerman.

Filsafat Herzl dalam mendirikan negara Yahudi sepenuhnya bergantung pada kekuatan kolonial dan alat-alatnya. Mungkin ia memanfaatkan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang gagal dalam menjadikan keberadaan Yahudi sebagai kenyataan, meskipun telah menghabiskan banyak uang dan upaya untuk itu. Filsafat ini terbukti efektif dan sukses, karena tidak mungkin sebuah negara Yahudi dapat berdiri di Palestina kecuali dengan bantuan kolonialisme dan dengan cara-cara paksaannya, pasukan, dan armadanya, apapun keahlian Herzl dan kemampuan orang Yahudi. Ini adalah rahasia keberhasilannya dalam hal yang gagal dicapai oleh para pendahulunya selama tiga ribu tahun. Filsafat ini juga memiliki sisi lain yang mengarah pada penerimaan dan pengorbanan banyak orang Yahudi dalam pembantaian brutal untuk memikat atau memaksa orang Yahudi lainnya untuk meninggalkan negara mereka dan berimigrasi ke Palestina!

Sejak awal, Herzl menolak dengan tegas untuk melaksanakan proyek negara Yahudi dengan cara orang Yahudi menyusup ke Palestina, atau dengan menciptakan masalah Yahudi di Palestina yang akan mengundang intervensi kekuatan besar untuk melindungi mereka. Ia menolak dengan segala cara untuk menunjukkan orang Yahudi sebagai pemberontak terhadap Sultan, karena semua ini akan menempatkan proyek tersebut dalam risiko kegagalan dan pemusnahan. Sebaliknya, ia memilih jalannya untuk menjadikan negara Yahudi sebagai keputusan dari ibu kota besar, yang mana Sultan harus meresponsnya, baik dengan keinginan dan iming-iming, atau dipaksakan dengan tekanan kekuatan besar. Inilah yang menjamin

pelaksanaannya, yang akan mendorong orang Yahudi untuk berimigrasi ke sana, mendorong orang Yahudi kaya untuk mendukung dan membiayainya, serta mewujudkan pendirian negara tersebut dengan kerugian minimal.

Herzl dan Sultan Abdul Hamid II

Tidak diragukan lagi bahwa kebijakan Herzl akan mengarah pada hubungan dengan Sultan Kekaisaran Ottoman, Abdul Hamid II pada saat itu. Itu adalah jalan tercepat untuk mendapatkan tanah bagi orang Yahudi di Palestina, yang merupakan bagian dari wilayah Kekaisaran Ottoman. Herzl berusaha keras untuk bertemu dengan Abdul Hamid dan menyiapkan tawaran kuat yang menjadikan negara Yahudi sebagai bagian dari kepentingan Kekaisaran Ottoman dan peluang penting bagi sang sultan.

Kesimpulan dari tawaran Herzl adalah bahwa negara Yahudi di Palestina (yang tentu saja jauh dari Yerusalem, karena Herzl tidak berani membicarakan pembangunannya di Yerusalem) akan menjadi dukungan kuat bagi Kekaisaran Ottoman. Orang Yahudi masih berhutang budi kepada umat Muslim, terutama kepada Kekaisaran Ottoman, karena mereka masih menderita penganiayaan di Eropa dan tidak menemukan perlindungan atau kehidupan yang layak kecuali di bawah pemerintahan Muslim. Orang Yahudi sering melarikan diri ke tanah Islam untuk menghindari Inkuisisi dan penganiayaan agama, dan karena itu mereka adalah minoritas yang paling setia kepada Muslim. Mereka mencari pelindung, dan betapa baiknya jika itu adalah Sultan Abdul Hamid. Jika mereka memiliki negara di wilayah Levant, itu akan menjadi penghalang terhadap kolonialisasi Eropa dan ekspansi pengaruhnya, serta menjadi dukungan kuat bagi pengaruh Islam Ottoman. Selain itu, orang-orang Yahudi yang dibawa dari Eropa dan Rusia akan menyediakan kondisi untuk pengembangan dan pembangunan tanah tersebut dengan modal dan keahlian Eropa serta tenaga kerja murah, yang akhirnya akan menguntungkan kas Kekaisaran Ottoman.

Herzl mendukung tawarannya dengan bantuan finansial yang besar. Pada saat itu, Kekaisaran Ottoman mengalami krisis keuangan yang berat yang memaksanya untuk hampir menyerahkan keuangan-

nya kepada komisi kolonial Eropa untuk melunasi utang besar. Herzl menawarkan 20 juta lira emas pada waktu itu, ketika pendapatan tahunan Kekaisaran Ottoman hanya 80 ribu lira! Herzl menyatakan bahwa tawaran keuangan ini tidak dapat disediakan oleh siapa pun selain orang Yahudi, yang hanya berusaha membeli tanah yang tidak diminati oleh orang lain, dan ini akan menyelamatkan Ottoman dari cengkeraman Eropa.

Selain itu, ia akan berusaha menenangkan orang-orang Armenia dan pemimpin mereka di Eropa, yang pada waktu itu terlibat dalam pemberontakan yang kuat dan didorong oleh musuh-musuh Kekaisaran Ottoman untuk memecahnya dan memberi kemerdekaan kepada Armenia. Herzl juga berjanji akan melakukan upaya persuasif di media untuk membela kebijakan Ottoman dan citra Sultan di pers Barat yang terus-menerus mencemarkan nama baiknya dan menghasut.

Namun, Abdul Hamid menolak tawaran ini dan memberi jawaban terkenal: "Saya tidak bisa menjual sejengkal tanah pun, karena itu bukan milik saya, tetapi milik rakyat saya. Rakyat saya mendapatkan kekaisaran ini dengan darah mereka, dan mereka menyuburkannya kemudian dengan darah mereka, dan kami akan menutupinya dengan darah kami sebelum kami membiarkan orang lain merebutnya dari kami. Biarkan orang Yahudi menjaga miliaran mereka, jika kekaisaran ini dibagi, orang Yahudi bisa mendapatkan Palestina tanpa imbalan. Namun, itu tidak akan dibagi kecuali dengan tubuh kami, dan saya tidak akan menerima tubuh kami dibedah untuk tujuan apa pun."

Meskipun demikian, Abdul Hamid ingin memanfaatkan Herzl dan energinya serta hubungan-hubungannya, sehingga ia tidak memutuskan kontak dengan Herzl. Ia mengirimkan kepada Herzl melalui Izet Pasha (penasihat dekat Abdul Hamid yang beretnis Arab dari Damaskus) untuk menawarkan percakapan kedua mengenai kemungkinan orang Yahudi membeli Siprus (yang saat itu dikuasai Inggris) dan memberikannya kepada Sultan dengan tambahan uang sebagai imbalan untuk sebidang tanah di Palestina. Ide ini memang terlintas dalam pikiran Herzl, dan ia juga diminta untuk menenangkan pemimpin-pemimpin Armenia dan media Eropa terkait masalah

orang Armenia. Herzl pun melakukan usaha yang kuat dalam hal ini, berharap bisa mendekatkan dirinya pada tujuannya.

Herzl menghabiskan waktu yang panjang mendukung Kekaisaran Ottoman dan Abdul Hamid, dengan kekhawatiran bahwa negara-negara Eropa mungkin akan menggulingkan Sultan. Pencopotan Sultan akan menjadi ancaman buruk bagi gerakan Zionis, karena Sultan yang baru yang didukung oleh negara-negara Barat tidak akan membutuhkan uang dari orang Yahudi, dan dengan demikian tidak akan mempertimbangkan pembentukan negara Yahudi. Herzl berdiri bersama Kekaisaran Ottoman dalam perang mereka melawan Yunani yang didukung oleh Rusia, dan meluncurkan kampanye medis dan finansial untuk membantu Ottoman serta mendirikan sebuah surat kabar untuk mendukung posisi politik mereka. Abdul Hamid memberinya penghargaan sebagai penghargaan atas upayanya dan sebagai dorongan untuk lebih banyak upaya tersebut. Herzl, di sisi lain, tidak berhenti menawarkan ide tentang negara Yahudi dengan semakin mengurangi syarat-syaratnya setiap kali, bahkan berpikir untuk menawarkan Sultan agar dia sendiri yang mengelola gerakan Zionis, mengumumkan bahwa dia akan memberikan Palestina sebagai wilayah di bawah kekuasaan penuh Sultan, dengan imbalan satu juta poundsterling per tahun.

Secara keseluruhan, dalam melihat upaya Herzl, kita dapat melihat bahwa Sultan berhasil memanfaatkan Herzl dan usahanya, namun Herzl tidak bisa mendapatkan apa pun dari Abdul Hamid.

Abdul Hamid terus berupaya mengatasi pemukiman Yahudi di Palestina; ia membentuk komite khusus di Yerusalem untuk mengawasi penerapan pembatasan masuk bagi orang Yahudi ke wilayah tersebut (1897), dan kemudian mengeluarkan instruksi pada Juni 1898 untuk melarang orang Yahudi asing memasuki Palestina kecuali dengan membayar jaminan dan menyerahkan janji untuk meninggalkan dalam waktu satu bulan. Otoritas bandara juga memperketat aturan ini sehingga tidak ada pengecualian, bahkan untuk wakil konsul Inggris di Antakya yang seorang Yahudi. Kemudian, komite Yerusalem mengeluarkan laporan pada September 1899 setelah mempelajari situasi dan menemukan celah-celah yang dimanfaatkan oleh orang Yahudi untuk masuk ke negara tersebut, serta mengajukan

beberapa rekomendasi. Sultan kemudian mengeluarkan undang-undang pada tahun 1901 untuk mengatur kunjungan orang Yahudi ke Yerusalem, yang mewajibkan mereka membawa tiket perjalanan (paspor) yang mencantumkan detail perjalanan dan durasinya. Paspor ini akan diberikan sebagai imbalan atas izin tinggal sementara yang diberi tanda khusus yang tidak lebih dari tiga bulan di Palestina, dan pelanggar aturan akan diberi sanksi tegas. Pada tahun 1904, undang-undang yang melarang penjualan tanah kepada orang Yahudi dari semua kewarganegaraan diberlakukan kembali. Pada tahun 1906, Sultan menolak proyek universitas Yahudi yang diusulkan oleh Herzl. Di tahun yang sama, Abdul Hamid memecat Rashid Pasha, gubernur Yerusalem yang sering mendapat keluhan karena kebijakannya yang terlalu ramah terhadap orang Yahudi, dan menggantikannya dengan Ali Akram Pasha, yang berupaya keras menghadapi migrasi Yahudi dan memajukan Yerusalem serta bertahan dengan tegas terhadap tekanan dari pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari migrasi tersebut, baik yang berasal dari luar negeri maupun pegawai korup.

Pada September 1907, Sultan mengeluarkan perintah yang melarang pemindahan kepemilikan tanah milik negara kepada orang Yahudi Ottoman, yang menghambat upaya bank-bank asing untuk membeli tanah Palestina. Kemudian pada akhir masa pemerintahannya (1908), Sultan menunjuk sekretaris-sekretarisnya sebagai gubernur Yerusalem untuk memastikan bahwa masalah ini tetap diawasi oleh orang-orang dekatnya.

Namun, upaya-upaya Abdul Hamid tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Jumlah orang Yahudi di Palestina meningkat selama masa pemerintahannya karena beberapa alasan utama, seperti: korupsi administratif yang meluas pada akhir pemerintahan Ottoman, tekanan asing, dan pengaruh konsul-konsul asing. Negara-negara ini, beserta konsul-konsulnya, bekerja sama dalam memberikan dokumen atau memberikan perlindungan asing kepada orang Yahudi, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Kekaisaran Ottoman pada masa-masa kelemahannya tidak mampu menanggulangi tekanan asing, dan kapasitasnya untuk memperbaiki administrasinya dengan pejabat yang kompeten terbatas.

Selain itu, ada juga pertumbuhan alami jumlah orang Yahudi dan pergerakan alami orang Yahudi di wilayah Ottoman. Meskipun Mesir, Tunisia, Aljazair, dan negara-negara lain dijajah pada masa Abdul Hamid, Kekaisaran Ottoman tidak mengakui atau menerima pendudukan tersebut, oleh karena itu orang-orang Yahudi dari negara-negara ini bebas untuk melakukan perjalanan ke Palestina untuk berziarah atau berkunjung tanpa larangan. Beberapa kasus perjalanan yang dimulai sebagai ziarah kemudian berakhir dengan menetap dan tinggal permanen di Palestina.

Jika hanya melihat angka-angka, seseorang mungkin menyimpulkan bahwa Abdul Hamid dan Kekaisaran Ottoman gagal menghentikan migrasi Yahudi, bahkan mungkin dituduh telah mempermudah migrasi mereka ke Palestina. Namun, jika melihat proporsi orang Yahudi yang berhasil menetap di Palestina dibandingkan dengan gelombang migrasi Yahudi yang datang dari Rusia dan didukung oleh intrik-intrik asing (yang tidak melebihi 2,5% dalam perkiraan terbesar), maka kita bisa menyimpulkan bahwa Abdul Hamid dan Kekaisaran Ottoman berhasil mencegah migrasi Yahudi dan melindungi Palestina.

Secara umum, dengan mempertimbangkan semua faktor yang saling terkait, dan dengan memantau angka-angka serta berbagai pendapat, kesimpulan yang jelas adalah bahwa Sultan Abdul Hamid II merupakan penghalang besar terhadap pembentukan negara Yahudi. Herzl dalam memoirnya beberapa kali menyatakan kemarahannya terhadap Abdul Hamid, merasa bahwa dia telah dikhianati dan dimanfaatkan tanpa diberikan apa-apa. Bahkan Herzl menawarkan untuk memberikan tiga juta franc tanpa imbalan apa pun untuk menunjukkan niat baiknya dan niat gerakan Zionisme terhadap Kekaisaran Ottoman, namun Sultan marah dan menolak uang tersebut serta memutuskan hubungan dengannya. Kemudian, Herzl menawarkan untuk mendirikan universitas Yahudi di Yerusalem tanpa imbalan, mengemas tawarannya dengan alasan bahwa universitas yang maju di bawah pengawasan Ottoman dengan pengajaran dari dosen-dosen Yahudi terbaik dari universitas-universitas terkemuka Barat akan mencegah para pemuda Ottoman untuk pergi ke Barat, yang dapat menyebabkan mereka terpengaruh oleh pemikiran Barat

atau mendukung oposisi terhadap Sultan. Sultan juga menolak permintaan tersebut.

Pada akhirnya, di akhir hidupnya, Herzl cenderung untuk melaksanakan rencana meledakkan Istana Yıldız dan membunuh—atau menangkap—Sultan untuk membuka jalan bagi pemerintah Turki yang setuju memberikan Palestina kepada orang Yahudi, jika bukan karena ketakutannya terhadap konsekuensi kegagalan rencana tersebut.

Kemudian terjadi kudeta terhadap Abdul Hamid pada tahun 1909, yang menurut Abdul Hamid, penyebab utama dari kudeta tersebut adalah penentangannya terhadap imigrasi orang Yahudi ke Palestina. Dia telah memperkirakan bahwa jika Sultan kehilangan takhtanya, hal ini akan terjadi, dan itulah yang sebenarnya terjadi.

Dengan jatuhnya Abdul Hamid, pintu bagi imigrasi Yahudi terbuka secara umum. Beberapa peneliti dengan baik merangkum perbedaan antara posisi Abdul Hamid dan para penggantinya; Abdul Hamid memiliki posisi yang prinsipil dan strategis, meskipun kadang-kadang terpaksa mundur secara taktis di bawah tekanan. Sementara itu, para penggantinya memiliki posisi yang lebih pragmatis dan tidak prinsipil, mereka lebih toleran terhadap migrasi Zionis sampai mereka melihat ancaman, kemudian mereka menjadi lebih tegas secara taktis karena terpaksa.

Gerakan Zionisme Setelah Kematian Herzl

Herzl meninggal pada tahun 1904, dalam usia empat puluh empat tahun. Meskipun usia yang singkat, ia telah mengukir namanya untuk ratusan tahun ke depan. Ia berhasil menjadi benih dari impian yang gagal tercapai selama tiga ribu tahun. Herzl memprediksi bahwa konferensi pertama gerakan Zionisme adalah benih dari negara yang akan berdiri dalam lima tahun atau paling lama lima puluh tahun. Prediksinya terbukti benar, negara tersebut benar-benar terbentuk setelah lima puluh tahun. Dalam buku hariannya, ia mencatat bahwa pendirian negara "terletak pada kehendak rakyat untuk mendirikan negara, tetapi juga pada kehendak seorang individu yang kuat dengan kekuatan yang cukup."

Setelah kematiannya, gerakan Zionisme mengalami kebingungan dan ketidakpastian, karena setelahnya pemimpin-pemimpin yang

mengambil alih tidak memiliki kecerdasan dan semangat yang setara dengannya, seperti David Wilson (1905–1911), dan Otto Warburg (1911–1920). Namun, gerakan Zionisme kembali mendapatkan kekuatan dan momentum ketika dipimpin oleh seorang tokoh kuat: Chaim Weizmann (1920), yang membuktikan bahwa ia tidak kalah cakap dan gigih dari Herzl. Weizmann berhasil memimpin gerakan ini hingga impian itu terwujud pada zamannya, dan ia menjadi presiden pertama negara Israel setelah pengumuman berdirinya negara tersebut.

Ketidakpastian dan kebingungan yang melanda gerakan Zionisme setelah Herzl adalah bukti kuat bahwa gerakan ini tidak mampu mewujudkan proyek besar seperti mendirikan negara untuk orang Yahudi di Palestina tanpa bantuan kekuatan Eropa imperialistik. Bagaimana mungkin sebuah gerakan yang secara praktis terhenti selama enam belas tahun setelah kematian pendirinya dapat melanjutkan proyek besar seperti mendirikan sebuah negara? Namun, pengakuan atas kenyataan ini tidak mengurangi usaha besar yang dilakukan oleh Chaim Weizmann. Sebagaimana Zionisme tidak mampu mendirikan negara hanya dengan kekuatan sendiri, kolonialisme Barat pun tidak bisa menghidupkan kembali tubuh yang mati atau memberi kehidupan pada entitas yang lemah dan malas! Meskipun tampaknya Weizmann tidak kalah tekad dan ambisinya dibanding Herzl, ia jauh lebih beruntung karena kondisi dan arah angin mendukung misinya. Salah satu faktor terbesar adalah melemahnya kekhalifahan Ottoman, dengan terjadinya kudeta terhadap Sultan Abdul Hamid dan penggulingannya (1909), kemudian kekalahan Ottoman dalam Perang Dunia I (1914–1918), dan kehadiran pasukan Inggris yang menduduki Palestina, Irak, dan menguasai Yordania Timur. Dengan demikian, halangan kuat yang menghalangi terbentuknya Israel hilang, dan pendukung kuat yang akan merawat kelahiran Israel hadir.

Akibatnya, kebijakan yang diambil oleh gerakan Zionisme pun berubah. Pada masa Kekaisaran Ottoman di bawah Sultan yang cerdas, Herzl dengan tegas menolak agar orang-orang Yahudi menyusup dan muncul sebagai migran ilegal, untuk menghindari pengusiran mereka dan memudahkan menarik para migran. Namun,

setelah penggulingan Sultan, konferensi Zionis kedelapan (The Hague, 1907) memutuskan untuk mendukung rencana untuk melanjutkan penyusupan secara perlahan, mengaturnya, dan merawatnya, agar Zionisme memiliki eksistensi yang bisa memberi tekanan pada Kekaisaran Ottoman dan meminta perlindungan internasional. Keputusan ini juga ditegaskan dalam konferensi Zionis kesembilan (Hamburg, 1909) dan kesepuluh (Basel, 1911).

KEADAAN PALESTINA PADA AKHIR KEKUASAAN OTTOMAN

Para sejarawan biasanya cenderung menyebutkan keadaan Palestina pada akhir kekuasaan Ottoman untuk membantah pandangan Herzl dan propaganda Zionis yang mengatakan bahwa Palestina adalah tanah kosong, tanah tanpa bangsa. Namun, bagi kita, yang lebih penting saat ini bukan untuk membantah pandangan tersebut, melainkan untuk lebih memahami kondisi yang membuat wilayah ini rentan terhadap penjajahan!

Oleh karena itu, kita tidak akan membahas sekarang mengenai aspek-aspek keberadaan, peradaban, pembangunan, dan budaya yang ada di Palestina pada masa tersebut, melainkan kita akan berusaha memahami titik-titik kelemahan di negara dan bangsa ini yang menyebabkan mereka mengalami nasib tersebut.

Keadaan Kekaisaran Ottoman: "Tidak Ada Penghalang"!

Sejarawan Ibn al-Athir menjelaskan cepatnya penyebaran bangsa Mongol di wilayah Islam dan runtuhnya negara-negara di hadapan mereka dengan mengatakan: "Yang menyebabkan mereka

berhasil adalah tidak adanya penghalang, dan sebab tidak adanya penghalang itu adalah bahwa Shah Khwarezm Muhammad telah menguasai negara itu, membunuh raja-raja dan menghancurkan mereka, dan hanya dia yang tersisa sebagai penguasa di seluruh negara. Ketika dia kalah, tidak ada lagi orang yang bisa menghalangi mereka atau melindungi negara itu."

Ungkapan ini sangat berharga dan seharusnya menjadi teori dalam ilmu politik dan sejarah. Bahwa negara atau penguasa atau sultan, ketika ia menguasai segala urusan dan mengonsolidasikan krisis di tangannya, serta menghancurkan kekuatan di sekitarnya, maka dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Jika dia kalah atau mati atau terjadi sesuatu padanya, maka keadaan akan hancur. Inilah kondisi terbaik yang dapat menjelaskan keadaan Kekaisaran Ottoman di akhir masa pemerintahannya. Kekaisaran Ottoman memasuki masa kelemahannya dengan proses "modernisasi", yaitu sistem sekuler Barat dalam pemerintahan dan administrasi yang mengonsentrasikan kekuasaan di tangan pemerintah dan mencabutnya dari masyarakat. Secara bertahap—seringkali tanpa disadari—Kekaisaran Ottoman meninggalkan sistem Islam yang berbasis pada "keseimbangan kekuasaan", sebuah proses yang dipengaruhi oleh negara yang kalah yang meniru negara yang menang, sesuai dengan pendapat Ibn Khaldun. Namun demikian, meskipun negara tersebut beralih ke modernisasi, hal ini tidak menjadikannya negara yang kuat seperti yang diharapkan. Sebaliknya, Kekaisaran Ottoman terus mengalami kekalahan sepanjang abad ke-19 meskipun mengikuti jejak Eropa dalam modernisasi, karena kebangkitan Eropa bukanlah semata-mata hasil modernisasi, dan kelemahan Ottoman bukanlah akibat dari "ketinggalannya" dalam proses modernisasi.

Yang penting bagi kita sekarang adalah bahwa Kekaisaran Ottoman menjadi semakin terpusat dan terkonsentrasi kekuatannya, serta memperluas jaringan birokrasi untuk mencakup seluruh wilayah yang masih berada di bawah kekuasaannya, termasuk Palestina. Birokrasi yang meluas ini menggerus sedikit demi sedikit kekuatan masyarakat, persatuan mereka, dan kemampuan mereka untuk bangkit dan mengendalikan keadaan jika terjadi kerusakan atau korupsi dalam sistem pemerintahan Ottoman.

Ditambah dengan itu, di akhir masa kekaisaran Ottoman, kelemahan negara ini memungkinkan masuknya pengaruh asing, baik dari Eropa maupun Rusia, yang berfokus pada mendukung minoritas Kristen dan Yahudi serta memperluas pengaruh dan keuntungan mereka. Hal ini memicu lahirnya ide nasionalisme Arab yang diusung oleh orang-orang Kristen Arab di Levant, yang beriringan dengan lahirnya ide nasionalisme Turki. Semua wilayah Islam ini terpengaruh oleh ide nasionalisme yang berkembang di Barat, dan mulai muncul gerakan-gerakan pemikiran yang mendesak kemerdekaan bangsa Arab di wilayah Arab serta seruan untuk Turkiisasi orang Arab dalam struktur pemerintahan Ottoman.

Dengan demikian, gambaran tentang identitas Palestina berubah. Sebelumnya, orang yang lahir di Palestina pada akhir era Ottoman, seperti banyak orang Arab pada waktu itu, tidak ragu atau ragu bahwa dia adalah seorang Ottoman. Itu adalah identitasnya, hubungannya, dan afiliasinya. Meskipun asal-usulnya Arab, ia akan melihat di jalanan dan sekolah seorang pemuda lain yang berasal dari keluarga Turki, dan seringkali namanya Arab. Orang Turki ini pun tidak melihat dirinya sebagai orang Turki, tetapi melihat dirinya juga sebagai orang Ottoman. Kedua siswa ini akan bersatu ketika mempelajari geografi atau sejarah atau menyanyikan lagu-lagu yang memuji Kekaisaran Ottoman dan merayakan kemenangan-kemenangannya!

Pertikaian yang Terjadi dan Keadaan Palestina setelah Kehancuran Kekaisaran Ottoman

Pertikaian kini telah terjadi, dan semakin memperburuk keadaan adalah bahwa ini terjadi di tengah kekacauan setelah penggulingan Sultan Abdulhamid dan masuknya Ottoman ke dalam Perang Dunia I, di mana kecurigaan mencapai puncaknya. Pada masa ini, nasionalisme Turki menjadi kenyataan yang menguasai, dan hal ini terwujud dalam periode Persatuan dan Kemajuan (İttihat ve Terakki), yang menyaksikan pemerintahan militer sekuler Turki, yang berusaha untuk "menaturalisasi" wilayah Syam dan menerapkan kebijakan yang lebih keras di wilayah-wilayah Arab, mempercepat hukuman-hukuman, dan ini adalah periode pahit ketika Jamal Pasha memerintah wilayah Syam.

Di sisi lain, gagasan nasionalisme Arab berkembang dengan sangat pesat. Tak hanya dipromosikan oleh beberapa orang Kristen Syam, tetapi Inggris pun terlibat dalam memperjuangkan nasionalisme Arab, dengan menggoda Sharif Hussein—Sharif Mekkah dan penguasa Hijaz—untuk menerima Khilafah Arab di bawah kepemimpinannya. Yang menarik adalah bahwa Khilafah Arab ini terbatas pada wilayah Arab yang berada di bawah kekuasaan Ottoman saja, dengan slogan: "Dari Rafah hingga Taurus", bukan dari samudra ke teluk! Khilafah ini adalah versi "penjajahan Barat"! Selain itu, ide ini bukan hanya sekadar gagasan, tetapi menjadi kenyataan yang berbahaya pada saat yang kritis, ketika Sharif Hussein dan pasukan Arabnya memberontak, menciptakan front baru yang merugikan Ottoman yang tengah terlibat dalam pertempuran Perang Dunia I.

Dan di sinilah dimulai lingkaran permasalahan yang saling memperburuk satu sama lain, di mana kesalahan, kelalaian, kejahatan, bahkan kebijakan dan tindakan biasa, segera diterjemahkan sebagai hasil dari kecenderungan nasionalis, baik Arab maupun Turki, yang kemudian memicu respons nasionalis yang berlawanan.

Ketika Kekaisaran Ottoman kalah dalam Perang Dunia I, masyarakat Ottoman mengalami kehancuran yang parah, sesuai dengan ungkapan Ibn al-Athir: "Tidak ada penghalang." Masyarakat Ottoman kehilangan banyak dari kekuatan internal mereka, banyak dari mereka yang tewas dalam perang, baik karena mereka direkrut ke dalam tentara Ottoman yang kalah dan hancur, atau bergabung dengan pasukan Sharif Hussein—yang pada waktu itu secara terbuka menyerukan pemberontakan terhadap Persatuan dan Kemajuan dan mengembalikan khalifah Ottoman yang terzalimi ke takhtanya—atau melarikan diri dari bencana perang, kelaparan, dan bencana pengungsian.

Maka, yang tersisa di Palestina adalah bentuk sosial yang sangat terbatas: ikatan keluarga, suku, dan klan. Hanya mereka yang kaya berkat keberadaan mereka di kota-kota besar dan hubungan mereka sebelumnya dengan aparat pemerintahan Ottoman yang muncul ke permukaan, biasanya mereka yang berusaha—atau lebih tepatnya, mereka satu-satunya yang memiliki kemampuan—mengirim anak-

anak mereka untuk belajar di ibu kota besar: Istanbul, Kairo, London, dan Paris, berusaha untuk mempertahankan posisi sosial mereka.

Demikianlah, ketika Inggris masuk ke Palestina, mereka menemukan masyarakat dengan kondisi ini, dengan orang-orang terkemuka yang tersisa di Palestina yang bisa diajak bernegosiasi dalam berbagai cara: entah dengan menggoda mereka untuk mempertahankan posisi mereka, kekayaan, dan status sosial mereka, atau dengan mendukung gagasan nasionalisme Arab yang pada waktu itu didukung oleh Inggris, atau dengan mengedepankan gagasan kebangkitan dan modernisasi dengan model Barat yang menarik beberapa dari mereka dan anak-anak mereka yang belajar di luar negeri. Semua daya tarik ini juga dihadapkan pada ketidakmampuan untuk menentang Inggris. Bagaimana mungkin masyarakat kecil tanpa sumber daya bisa melawan sebuah kekaisaran besar yang baru saja keluar dari kemenangan atas kekuatan besar lainnya?

Tidak ada jalan lain selain mencoba berkompromi. Kompromi yang dilakukan oleh sebuah masyarakat seperti ini dengan kekaisaran besar yang baru saja meraih kemenangan! Siapa yang bisa menyalahkan orang Palestina?

Seorang pemimpin nasionalis Arab dari Akka mencatat bagaimana dia sering mendengar para tetua dan orang tua merindukan masa kekuasaan Ottoman, menyebutnya sebagai "masa kejayaan dan kemakmuran". Bahkan mereka yang kemudian melihat masa Ottoman sebagai penjajahan, masih merasa kehilangan persatuan Arab, karena pada masa Ottoman, persatuan Arab adalah kenyataan yang hidup—meskipun di bawah "penjajahan" Ottoman! Namun setelah datangnya Inggris dan Prancis, mereka membawa penjajahan dan pemecahan wilayah secara bersamaan, menghilangkan impian persatuan Arab.

Kondisi Minoritas Yahudi

Peradaban Islam kita telah memberikan contoh luar biasa dalam memperlakukan minoritas dengan adil dan penuh kasih. Tidak ada bangsa atau peradaban di dunia yang mampu menyerap minoritas dan menjaga kepentingan mereka seperti yang dilakukan oleh peradaban Islam. Bahkan, beberapa orang yang membaca sejarah—

dengan pandangan materialistik atau non-Islam—mungkin beranggapan bahwa umat Islamlah yang menanam benih kehancuran dan kelemahan mereka ketika mereka menunjukkan toleransi dan kebaikan yang luar biasa terhadap minoritas non-Muslim, yang akhirnya berbalik menyerang mereka dan menjadi duri dalam tubuh umat dan peradaban ini.

Namun, kami tidak sepakat dengan pandangan tersebut. Kami mengatakan: seandainya waktu dapat diputar kembali, kami akan menjadi orang yang paling baik dalam menyerap minoritas ini sesuai dengan perintah agama kami. Masalah yang muncul disebabkan oleh pelanggaran ajaran agama kami dalam menempatkan minoritas ini di posisi-posisi sensitif dan merasa tenang dengan mereka, padahal kami tahu bahwa sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an: *"Mereka tidak berhenti menyakiti kalian. Mereka ingin agar kalian mengalami kesulitan. Kebencian telah tampak jelas dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan hati mereka lebih besar."* (Al-Imran: 118). Selain itu, masalah ini diperburuk oleh kelemahan militer dan politik yang membuat umat kita menjadi sasaran empuk bagi musuh dari dalam dan luar. Kelemahan selalu menjadi sasaran, tak peduli seberapa mulia, karena kekuatan adalah penjaga terbaik bagi moralitas, dan seperti yang dikatakan: *"Ketegasan adalah pagar bagi keadilan!"* Dan kasih sayang yang tidak pada tempatnya adalah kelemahan.

Jika kisah Zionisme yang memilukan adalah kisah pembalikan antara Yahudi dan Protesan terhadap umat Islam dan aliansi mereka bersama untuk melawan umat ini, banyak pembaca akan terkejut mengetahui bahwa umat Islam justru menjadi penyelamat dan tempat perlindungan bagi kedua kelompok ini, terutama pada saat mereka menghadapi ancaman pemusnahan! Mereka menemukan keselamatan dan perlindungan di tanah umat Islam, pada waktu-waktu di mana umat Islam bisa saja memusnahkan mereka tanpa ada yang bisa menyelamatkan atau membela mereka.

Banyak sejarawan Yahudi dan Protesan yang menyaksikan hal ini, dan ini adalah cerita yang terlalu banyak untuk disampaikan secara singkat. Namun, tidak ada salahnya memberikan beberapa contoh cepat, terutama yang berkaitan dengan Yahudi dan Protesan dalam hubungan mereka dengan Kekaisaran Ottoman. Salah satu

contohnya adalah pernyataan sejarawan Yahudi Israel, Michael Winter: "Meskipun Kekaisaran Ottoman adalah negara Islam Sunni yang konservatif, itu adalah negara yang maju. Kombinasi pandangan seimbang Sultan terhadap rakyatnya dan perspektif ilmiah-keagamaan, memperbaiki keadaan Yahudi di seluruh kekaisaran. Periode Ottoman mendorong, setidaknya bagi Yahudi yang bekerja di Kementerian Keuangan, untuk mencapai posisi yang belum pernah mereka alami sebelumnya, atau setidaknya sejak masa pemerintahan Fatimiyah pada abad pertengahan." Oleh karena itu, Kekaisaran Ottoman menjadi "tempat perlindungan kebebasan beragama bagi Yahudi yang terbuang."

Yahudi telah diusir dari Spanyol dan Portugal Katolik pada abad ke-15 dan ke-16, dan kemudian mereka diusir dan dianiaya di Kekaisaran Rusia dan Eropa Timur pada abad ke-18 dan ke-19. Bahkan sejarawan Amerika Yahudi, Salo W. Baron, yang dianggap sebagai "sejarawan Yahudi terbesar di abad ke-20", menyatakan bahwa "pusat-pusat yang paling berkembang untuk komunitas Yahudi, sejak munculnya khilafah hingga pembubaran kawasan Yahudi di Eropa, berada di negara-negara Islam: di Irak selama pemerintahan Abbasiyah, di Spanyol selama pemerintahan berber, dan setelah itu di Kekaisaran Ottoman."

Dan mengenai kaum Protestan, mereka awalnya muncul sebagai pecahan dari Gereja Katolik Barat, sehingga mereka mengalami peristiwa-peristiwa pembantaian, penganiayaan, dan perang yang sangat keras. Mereka tidak menemukan tempat berlindung kecuali di Kekaisaran Ottoman. Sejarawan Protestan Inggris, Thomas Arnold, mencatat bahwa perlakuan Ottoman terhadap umat Kristiani "menunjukkan toleransi yang belum pernah dikenal sebelumnya di seluruh Eropa hingga saat itu. Para pengikut Calvini dan pemeluk paham Unitarian dari kalangan Kristen yang tinggal di Transylvania sering memilih untuk tunduk kepada Turki, dan orang-orang Protestan di Silesia memandang Turki dengan keinginan, serta dengan senang hati berharap untuk membeli kebebasan beragama dengan tunduk kepada pemerintahan Islam. Bahkan, ketika Yahudi-Yahudi yang dianiaya di Spanyol melarikan diri dalam jumlah besar, mereka tidak menemukan tempat perlindungan kecuali di Turki

pada akhir abad ke-15. Demikian pula, kaum Cossack yang dianiaya oleh Gereja Negara Rusia, menemukan toleransi di kerajaan Sultan yang tidak didapatkan dari sesama mereka dalam agama Kristen."

Yahudi dan Nasrani di Palestina hidup seperti halnya mereka hidup di wilayah-wilayah Islam lainnya, khususnya seperti orang-orang Yahudi yang tinggal di Mesir dan Syam, karena mayoritas dalam sejarah Islam, Mesir dan Syam berada di bawah kekuasaan negara yang sama. Oleh karena itu, selama masa tersebut, tidak ada masalah atau persoalan khusus yang dihadapi oleh Yahudi atau Nasrani di Palestina!

Keadaan ini tidak berubah kecuali ketika Kekaisaran Ottoman mulai melemah, dan kekuatan Eropa mulai berusaha untuk campur tangan dengan alasan melindungi minoritas. Persaingan terhadap minoritas Kristen, di mana Rusia memperhatikan kaum Ortodoks, Prancis memperhatikan Katolik dan Maronit, sementara Yahudi tetap tidak mendapatkan perhatian hingga munculnya Zionisme di Inggris setelah pengaruh Protestanisme berkembang di sana—seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Mereka melihat Yahudi sebagai minoritas yang bisa dimanfaatkan, seperti halnya minoritas lainnya yang diperebutkan oleh pesaing-pesaing tersebut. Dengan upaya pembelaan dari pihak Ottoman dan kegagalan proyek-proyek Barat, keadaan minoritas Yahudi tidak terpengaruh secara signifikan atau jelas dalam konteks peristiwa-peristiwa dan konflik-konflik kekaisaran. Bahkan hingga akhir abad ke-19, Yahudi tidak memiliki masalah atau krisis di Kekaisaran Ottoman, dan mereka digambarkan sebagai: "Mereka tidak memberontak, tidak menghasut, tidak mengeluh, dan tidak menderita. Sebaliknya, mereka memuji negara (Ottoman) siang dan malam dalam suka dan duka, serta selalu memuji berkah yang diberikan negara atas perhatian dan perawatan yang baik terhadap mereka, karena tidak ada negara Eropa yang mengklaim membela mereka."

Bahkan, gelombang migrasi Yahudi yang meningkat setelah penganiayaan Rusia terhadap Yahudi (1881) yang mengarah pada pembengkakan jumlah Yahudi di Palestina, tidak membawa perubahan besar. Sebab sebagian besar dari para migran ini adalah orang-orang miskin dan pengungsi, yang kondisi hidup mereka

penuh dengan kesulitan dan keadaan yang buruk. Mereka hidup hanya bergantung pada sumbangan dan dana dari orang-orang Yahudi kaya, sehingga kekuatan mereka sendiri tidak cukup untuk mengangkat mereka atau membantu mereka membuat perubahan. Di sisi lain, keadaan mereka tidak menunjukkan bahwa mereka menjadi ancaman. Bahkan mungkin banyak yang meremehkan siapa saja yang berbicara tentang bahaya mereka pada waktu itu.

Di antara fenomena yang sering terjadi adalah bahwa banyak dari Yahudi yang tiba di Palestina dalam gelombang migrasi berturut-turut, mereka malah pergi ke tempat lain yang lebih baik di Eropa, Amerika, atau daerah lainnya. Keyakinan terhadap Tanah Perjanjian tidak cukup kuat bagi banyak dari mereka untuk tetap tinggal. Namun, banyak di antara mereka yang memilih untuk tetap tinggal, baik karena keyakinan mereka, maupun karena mereka menemukan jalan untuk memperbaiki kondisi mereka melalui terlibat dalam proyek-proyek yang didanai oleh gerakan Zionisme dan orang-orang kaya Yahudi selama periode tersebut.

Namun, gelombang migrasi ini menyadarkan pemikiran Arab tentang tujuan-tujuan gerakan Zionisme, dan pers dengan cepat mengingatkan hal tersebut melalui surat kabar seperti: "Filistin", "Al-Karmil", dan majalah "Al-Manar". Gelombang ini juga menyebabkan terjadinya beberapa bentrokan, seperti yang terjadi pada tahun 1886 antara para petani Palestina dan pemukim Yahudi.

Dapat dikatakan bahwa perubahan pertama yang signifikan yang dialami oleh Yahudi di Palestina terjadi setelah penggulingan Sultan Abdul Hamid II dan pemecatannya pada tahun 1909, di mana Kekaisaran Ottoman terjerumus dalam pergolakan, pergantian pemerintahan, dan kudeta. Banyak pintu bahaya terbuka pada waktu itu, yang paling penting adalah:

1. Adanya sejumlah Yahudi di posisi-posisi pemerintahan tinggi pada masa tersebut.
2. Kebutuhan mendesak akan dana yang mendorong untuk berurusan dengan gerakan Zionisme, yang menawar dengan uang untuk menghapuskan pembatasan terhadap imigrasi Yahudi, dan berkembang menjadi penjualan beberapa tanah milik pemerintah di Palestina.

3. Penyebaran kekacauan yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintahan pusat, yang membuka jalan bagi pembelian lebih banyak tanah dan membuka pintu bagi pelanggaran hukum dan manipulasi terhadapnya.
4. Lanjutan migrasi Yahudi dari Rusia setelah kekalahannya oleh Jepang dan ketidakstabilan politik yang menyertainya.

Dalam kondisi yang kacau tersebut, para warga Yahudi di Palestina mengambil langkah penting lainnya; mereka mulai mendirikan pasukan penjaga bersenjata untuk pemukiman-pemukiman mereka pada tahun 1909, yang merupakan cikal bakal tentara Zionis. Dua tahun kemudian, pada tahun 1911, mereka mengajukan tuntutan untuk mengakui bahasa Ibrani sebagai bahasa resmi.

Namun, keberpihakan Yahudi kepada Sekutu dalam Perang Dunia I melawan Kekaisaran Ottoman yang saat itu dipimpin oleh kelompok Uni Turki, memicu reaksi keras terhadap mereka. Informasi mengenai konspirasi Zionisme untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina sampai ke tangan Jamil Pasha, komandan Ottoman di Syam, yang kemudian melancarkan serangan besar-besaran terhadap institusi-institusi Yahudi, menyita harta mereka, dan merampas senjata dari pasukan penjaga pemukiman. Selain itu, mereka juga dilarang untuk mengibarkan bendera Yahudi atau memasang papan bertulisan bahasa Ibrani.

Kemudian, Kekaisaran Ottoman kalah dalam Perang Dunia I, dan kekuasaannya atas Syam berakhir, menandai berakhirnya periode tersebut dan membuka jalan bagi periode baru yang berbeda.

Kisah Israel mencerminkan sifat jahat dan rendah dari kaum Yahudi, seperti yang diberitakan Allah dalam kitab-Nya yang mulia. Mereka yang hidup di tanah Muslim merasakan kenikmatan yang tidak mereka dapatkan di tempat lain, namun ketika mereka melihat peluang untuk menyerang pihak yang telah memuliakan mereka dan memberi tempat tinggal kepada mereka, mereka tidak ragu sedikitpun untuk melakukannya. Pada saat yang sama, kisah ini menunjukkan kebesaran umat kita dan kemuliaan karakter mereka. Kita harus ingat bahwa bahkan pada saat terakhir, ketika Kekaisaran Ottoman berada dalam kelemahan terbesarnya, mereka tetap memberi

solusi yang menyelamatkan Yahudi dari penindasan dan pembantaian tanpa menjadikan mereka ancaman bagi negara itu. Namun, mereka menolak untuk menjadi solusi tersebut dan memilih menjadi ancaman itu sendiri, serta menjadi tangan panjang musuh Barat dalam merobek negara itu.

"Para pemukim Zionis selalu diberikan tawaran untuk memperoleh kewarganegaraan Ottoman dan menetap di Palestina sebagai orang Ottoman, bukan sebagai elemen pemukiman yang terikat dengan negara Barat. Masalahnya bukan tentang beberapa ribu Yahudi yang tidak memiliki tanah air, atau yang ditindas di negara mereka dan mencari tempat berlindung, melainkan masalah mengenai penanaman elemen asing yang berubah menjadi negara dengan orientasi Barat kolonial dan pemukiman yang menolak solusi ini."

Ketika kita membaca sejarah, kita harus selalu berhati-hati dan membedakan antara Yahudi yang tinggal di negeri mereka yang hidup di bawah Kekaisaran Ottoman dan mereka yang datang dari luar; yang pertama jauh lebih sedikit membahayakan dan berisiko, bahkan mereka khawatir terhadap Zionisme dan pendirian Israel. Namun, mereka akhirnya ikut serta dalam proyek yang dominan ini, menyerap rencananya, dan menjadi bagian integral darinya, mengkhianati peradaban Islam mereka dan meninggalkan umat Muslim yang telah hidup bersama mereka dengan terhormat. Oleh karena itu, mereka pun turut bertanggung jawab atas kejahatan besar ini, meskipun lebih sedikit dibandingkan dengan para penjajah yang datang dari luar!

Kita juga harus ingat bahwa di antara orang-orang Yahudi, bahkan di antara para Zionis yang berimigrasi, ada yang menikmati rasa aman dan penghargaan dari orang Arab, bahkan di masa-masa konflik yang paling sengit kemudian hari, karena mereka hidup berdampingan dan berinteraksi dengan lingkungan Arab mereka dengan akhlak yang baik.

ERA PENDUDUKAN INGGRIS

Persaingan internasional dan benturan kepentingan antara Inggris, Prancis, dan Rusia turut berperan dalam memperpanjang masa hidup Kekaisaran Ottoman. Selain kekuatan Ottoman yang semakin melemah, perbedaan antara kekuatan-kekuatan ini, serta ketakutan mereka akan terjadinya perang besar untuk membagi warisan Kekaisaran Ottoman, memberikan kesempatan lebih bagi negara itu untuk bertahan. Sultan Abdulhamid II berusaha memanfaatkan posisi lemah ini, berharap bahwa perang besar antara mereka akan menjadi peluang kebangkitan bagi Kekaisaran Ottoman. Namun, kekuatan-kekuatan tersebut menunda dan menyelesaikan konflik mereka dengan mengorbankan Ottoman, yang akhirnya semakin terkikis di bawah pemerintahannya. Perang hanya dimulai lima tahun setelah ia digulingkan dari kekuasaan.

Perang Dunia I dan Hasilnya

Perang Dunia I adalah perang yang sepenuhnya Eropa, dan pihak Ottoman tidak terlibat langsung, namun sebagian dari medan perangnya pasti berada di wilayah yang diduduki Ottoman, seperti Mesir dan Afrika Utara. Hasilnya juga akan memengaruhi wilayah Ottoman lainnya yang belum dijajah: Syam, Irak, Jazirah Arab,

Kaukasus, dan Anatolia! Oleh karena itu, Ottoman harus menyelidiki sikap kekuatan besar. Sumber-sumber sejarah mengungkapkan bahwa kekuatan Sekutu berencana untuk membagi Kekaisaran Ottoman setelah perang berakhir, dan mereka menolak memberikan jaminan atau kesepakatan yang melindungi wilayah Ottoman, yang memaksa Ottoman untuk bergabung dengan Jerman dan negara-negara Poros dalam perang tersebut.

Perang berakhir dengan kekalahan negara-negara Poros, termasuk Kekaisaran Ottoman yang kehilangan Syam, Irak, dan Jazirah Arab. Namun, yang penting bagi kita sekarang adalah apa yang terjadi di Syam, khususnya Palestina.

Dalam konteks Perang Dunia I, Inggris mengeluarkan tiga janji: satu untuk Arab, satu untuk Yahudi, serta perjanjian dengan Prancis, yang berarti Inggris "menjual kulit beruang sebelum menangkapnya" kepada lebih dari satu pihak! Berikut adalah rinciannya:

1. **Khilafah Arab Sharif Hussein Bin Ali**

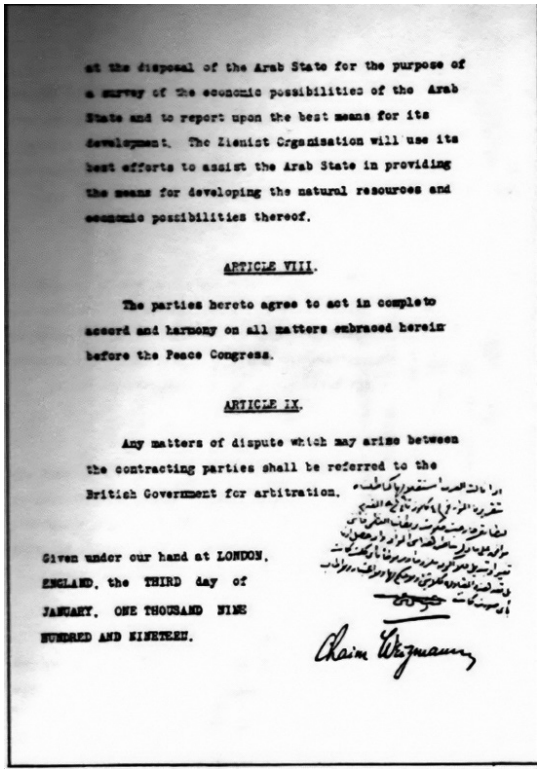

at the disposal of the Arab State for the purpose of a survey of the economic possibilities of the Arab State and to report upon the best means for its development. The Zionist Organisation will use its best efforts to assist the Arab State in providing the means for developing the natural resources and economic possibilities thereof.

ARTICLE VIII.

The parties hereto agree to act in complete accord and harmony on all matters embraced herein before the Peace Congress.

ARTICLE IX.

Any matters of dispute which may arise between the contracting parties shall be referred to the British Government for arbitration.

Given under our hand at LONDON, ENGLAND, the THIRD day of JANUARY, ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND NINETEEN.

Chaim Weizmann

Inggris menjanjikan kepada penguasa Hijaz, Sharif Hussein bin Ali, bahwa ia akan menjadi Khalifah Arab atas negara besar yang mencakup Syam, Irak, dan Jazirah Arab. Hubungan yang erat terjalin antara keduanya, dengan Sharif Hussein dan kedua putranya, Faisal dan Abdullah, menjadi sekutu setia Inggris. Mereka berjanji untuk memerangi pasukan Ottoman di Hijaz dan Syam. Sharif Hussein sepenuhnya terlibat dalam pengkhianatan besar ini, yang menjadi pukulan besar bagi Ottoman pada masa itu. Inggris juga mendapatkan persetujuan dari Faisal atas Deklarasi Balfour dan mempermudah migrasi Yahudi melalui Perjanjian Faisal-Weizmann (pemimpin Zionis) pada 3 Januari 1919, di mana Faisal setuju untuk mengorbankan Palestina demi negara Arab yang akan dikuasai oleh ayah dan saudaranya. Setelah itu, terbukti bahwa Inggris telah mengkhianati Faisal: ia kehilangan wilayah Hijaz berhadapan dengan Abdul Aziz Al Saud, dan diasingkan ke Siprus tanpa memperoleh apa-apa. Namun, Inggris mengangkat putra Sharif Husein, Abdullah, menjadi Emir di sebuah wilayah gurun yang kemudian dikenal sebagai "Yordania", sementara Faisal diangkat menjadi Raja Suriah. Ketika perselisihan antara Prancis dan Inggris terjadi mengenai pembagian wilayah Syam dan Irak, mereka sepakat bahwa Prancis akan mengambil Suriah, sementara Palestina jatuh ke tangan Inggris. Yang penting bagi kita saat ini adalah bahwa Kerajaan Yordania hanyalah sebuah rejim yang didirikan oleh Inggris untuk salah satu agen mereka yang paling setia, Abdullah bin Hussein, dan sistem ini akan memainkan peran besar dalam setiap isu Palestina sejak saat itu hingga sekarang..

Perlu dicatat bahwa pendapat yang dominan di Palestina, sebelum semua hasil pahit ini muncul, adalah mendukung Kekhalifahan Ottoman. Mereka memandang Sharif Hussein sebagai pemberontak terhadap Islam karena ia telah memberontak melawan Khalifah Ottoman, Muhammad Rashad.

2. Deklarasi Balfour

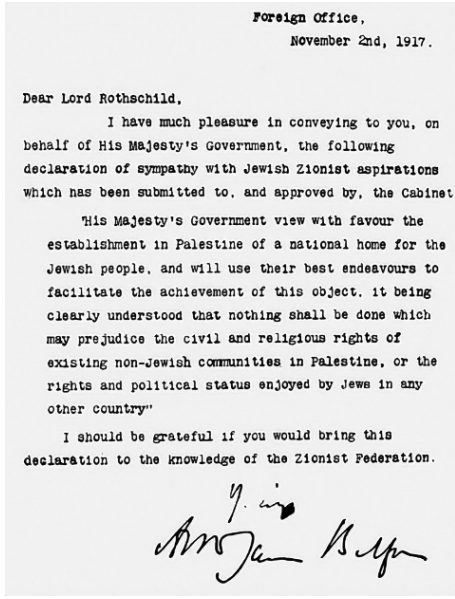

Foreign Office,
November 2nd, 1917.

Dear Lord Rothschild,

I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet

'His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country"

I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.

Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, mengeluarkan deklarasi terkenalnya yang berjanji untuk mendirikan negara bagi Yahudi di Palestina. Deklarasi itu berbunyi:

> *"Pemerintah Yang Mulia memandang dengan simpati terhadap pendirian tanah air nasional bagi rakyat Yahudi di Palestina, dan akan menggunakan upaya terbaiknya untuk memfasilitasi pencapaian tujuan ini, dengan pemahaman yang jelas bahwa tidak ada yang akan dilakukan yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, atau hak-hak dan status politik yang dimiliki Yahudi di negara lain mana pun."*

Deklarasi ini dengan jelas memperlakukan Palestina seolah-olah tanah itu kosong tanpa pemilik, sementara penduduk aslinya hanya dianggap sebagai "komunitas non-Yahudi" yang tinggal di sana! Presiden AS, Woodrow Wilson, juga mendukung deklarasi ini (31 Agustus 1918) melalui surat kepada pemimpin Zionis Amerika, Rabbi Stephen Wise. Wilson mengonfirmasi dukungannya dalam

surat kepada Konferensi Perdamaian di Paris, di mana ia mengajak Yahudi untuk kembali ke Palestina dan berjanji bahwa Liga Bangsa-Bangsa akan mengakui negara Yahudi begitu terbentuk.

Nilai praktis Deklarasi Balfour adalah bahwa ini merupakan keberhasilan terbesar gerakan Zionis, karena kekuatan internasional terbesar saat itu mendukung tuntutan mereka dan mengambil alih proyek mereka. Ini berarti bahwa proyek Zionis tidak lagi hanya bergantung pada organisasi Yahudi semata, melainkan mendapat dukungan penuh dari kekuatan besar dunia. Selain itu, deklarasi ini memperkuat posisi organisasi Zionis di hadapan para penentangnya dari kalangan Yahudi sendiri yang meragukan tujuan atau kemampuan mereka untuk mewujudkan impian tersebut. Deklarasi ini juga menarik lebih banyak dana dan tenaga dari kalangan Yahudi, serta mendorong banyak Yahudi untuk bermigrasi ke Palestina karena mereka sekarang berada di bawah perlindungan kekuatan besar.

3. Perjanjian Sykes-Picot

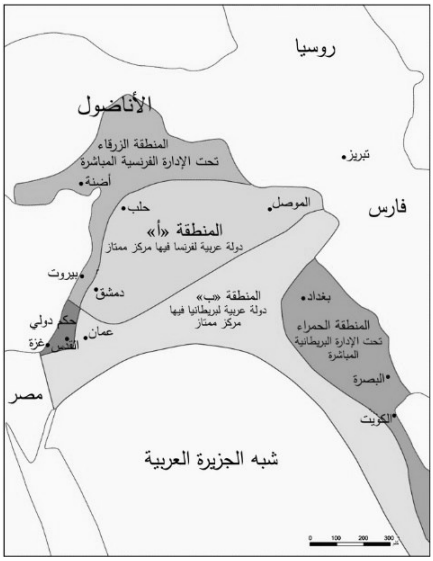

Inggris dan Prancis sepakat untuk membagi wilayah Syam, Irak, Jazirah Arab bagian timur, dan Anatolia timur yang diwarisi dari Ottoman. Perjanjian ini dikenal sebagai Perjanjian Sykes-Picot,

yang dinamai dari dua pihak yang menandatanganinya: Mark Sykes dari Inggris dan François Georges-Picot dari Prancis. Perjanjian ini menetapkan pembagian wilayah Syam dan Irak sesuai dengan peta yang disepakati, dengan meninggalkan bagian utara Palestina saat ini—termasuk Yerusalem—di bawah pengawasan internasional. Namun, Inggris akhirnya mengambil kendali penuh atas Palestina, melanggar perjanjian tersebut. Prancis menyerbu Damaskus dan menempatkan Suriah di bawah kendali langsungnya. Oleh karena itu, Inggris memindahkan Raja Faisal bin Hussein untuk memerintah Irak, sementara batas-batas saat ini hampir ditetapkan antara Irak dan Syam. Wilayah Syam akhirnya terbagi menjadi empat negara: Yordania, Suriah, Lebanon, dan Palestina.

Jelas terlihat bahwa dari tiga janji tersebut, hanya satu yang terwujud: Deklarasi Balfour. Sementara itu, politik Inggris menggagalkan dua janji lainnya. Pihak yang paling dirugikan adalah Sharif Hussein, yang langsung menerima balasan atas pengkhianatannya dengan diasingkan ke Siprus. Dikatakan bahwa ia bahkan tidak mampu membayar sewa rumah tempat ia tinggal! Riwayat hidupnya menggambarkan contoh aneh dari pengkhianatan; meskipun ambisinya terhadap kekuasaan sangat besar, ia berkali-kali mengetahui bahwa Inggris memperdayainya. Namun, ia tidak pernah berhenti untuk berpikir atau mengambil langkah hati-hati, melainkan menyerahkan seluruh masa depannya kepada Inggris dengan kepercayaan tanpa batas, hingga akhirnya ia dijatuhkan ke dalam kehancuran.

Namun, semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kemenangan Inggris dalam perang dan keberhasilan pasukan mereka memasuki Yerusalem!

Penjajahan Palestina dan Yerusalem

Masuknya Inggris ke Yerusalem tidaklah mudah. Namun, Inggris memiliki keunggulan militer yang besar serta posisi strategis yang signifikan, karena mereka telah menduduki Mesir selama hampir empat puluh tahun (sejak 1882). Selama waktu tersebut, Inggris menguasai sumber daya Mesir, memungkinkan mereka merekrut dan memanfaatkan sumber daya manusia dan finansial Mesir untuk mendukung posisi mereka dalam perang. Inggris berhasil merekrut

lebih dari setengah juta orang Mesir untuk bergabung dengan pasukan mereka, yang digunakan untuk melawan tentara Ottoman dan pemberontakan Islam di Darfur, Libya, serta wilayah-wilayah lain yang jauh. Namun, yang menjadi fokus kita sekarang adalah apa yang terjadi di front Palestina.

Terusan Suez menjadi pusat jaringan kolonial Inggris. Jalur air yang dibuat pada masa Dinasti Muhammad Ali ini menciptakan pelanggaran serius terhadap keamanan dunia Arab dan Islam. Terusan ini menjadi jalur terpenting dan terpendek yang digunakan oleh negara penjajah untuk memindahkan pasukan mereka dari India di timur ke Atlantik di barat. Oleh karena itu, lokasi ini menjadi titik strategis yang sangat sensitif dan krusial. Ottoman berusaha menguasai terusan tersebut, sementara Inggris berupaya melindunginya dengan maju menghadapi Ottoman di lokasi yang jauh dari terusan. Pertempuran besar pun terjadi di kota Gaza, yang dikenal sebagai "Tiga Pertempuran Gaza." Dalam dua pertempuran pertama, Ottoman berhasil menang, memaksa Inggris mengganti komandan militer mereka, Murray, dengan salah satu jenderal terbaik mereka, Edmund Allenby. Jenderal ini berhasil menang dalam Pertempuran Gaza Ketiga, yang membuka jalan bagi Inggris untuk masuk ke wilayah Palestina.

Pasukan Mesir yang bergabung dengan tentara Inggris menjadi elemen kunci dalam tragedi yang menyebabkan hilangnya Palestina. Peran mereka tidak hanya sebagai tentara, tetapi juga sebagai pekerja dan insinyur yang membangun jalur transportasi air tawar dan logistik untuk tentara Inggris melintasi gurun Sinai yang tandus. Hal ini memungkinkan Inggris melanjutkan pertempuran dalam Pertempuran Gaza Ketiga.

Akhirnya, Jenderal Inggris Edmund Allenby memasuki Yerusalem pada 17 Desember 1917. Media Inggris mencetak tajuk utama besar: *"Sekarang, perang salib telah berakhir!"*

Setelah itu, pasukan Inggris melanjutkan pergerakan mereka ke utara, menduduki seluruh wilayah Palestina. Mereka melanggar perjanjian dengan Prancis dan menyelesaikan pendudukan wilayah tersebut pada tahun 1918.

Mengapa Inggris Mendukung Proyek Zionis?

Ada banyak analisis yang mencoba memahami alasan di balik dukungan besar Inggris terhadap proyek Zionis. Namun, pertanyaan ini biasanya diajukan oleh para sejarawan yang meninjau peristiwa berdasarkan apa yang terjadi setelahnya, yaitu ketika Inggris akhirnya terpaksa mundur dari wilayah Syam. Tetapi, pada saat itu, alasan tersebut tidaklah aneh. Keinginan untuk menguasai, memperluas wilayah, dan mendominasi adalah naluri mendasar dari negara-negara kolonial yang kuat.

Ketika faktor-faktor berikut digabungkan: musuh yang lemah dan hampir runtuh (yaitu Kekhalifahan Ottoman), persaingan sengit dengan kekuatan lain (Rusia, Jerman, dan Prancis), pentingnya lokasi Palestina, statusnya sebagai tanah suci, serta kedekatan dan kesesuaian ideologis antara Protestanisme dan Yudaisme, maka perlombaan untuk menguasai dan mendominasi wilayah ini menjadi sebuah kebutuhan kolonial.

Yang pasti, ketika Inggris mencoba mendirikan negara Yahudi, mereka tidak membayangkan akan meninggalkan wilayah tersebut, seperti yang terjadi tiga dekade kemudian. Sebaliknya, mereka membayangkan negara Yahudi sebagai bagian dari wilayah di bawah kekuasaan Inggris, mirip dengan sistem yang mereka terapkan di Mesir, Irak, dan Yordania. Dalam sistem ini, Inggris memiliki kendali militer dan otoritas tertinggi, sementara pemerintah lokal Arab memikul beban administrasi sehari-hari dan memberikan citra nasional bagi rakyatnya.

Persiapan Inggris untuk Israel

Ketika pasukan Inggris memasuki Palestina, sebuah unit militer Yahudi pertama turut serta di bawah kendali Inggris. Chaim Weizmann, kali ini bukan sebagai investor, tetapi sebagai pemimpin proyek Zionis, mengunjungi Yerusalem. Proyek ini segera dimulai dengan membentuk cikal bakal badan intelijen Zionis pada tahun 1919. Badan ini bertugas mengumpulkan informasi mendetail tentang tanah, penduduk, cara pembelian, metode pengambilalihan, dan potensi sumber perlawanan. Dengan demikian, infrastruktur keamanan dan militer negara Zionis telah terbentuk 30 tahun

sebelum deklarasi resmi berdirinya negara tersebut.

Dua tahun sebelum pasukan Inggris memasuki Yerusalem, seorang menteri Zionis di pemerintahan Inggris menulis laporan pada tahun 1915. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa kondisi belum memungkinkan untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina, dan diperlukan masa pendudukan Inggris untuk mempersiapkan situasi. Dia menyatakan:

> *"Apapun keuntungan atau kerugian dari gagasan tersebut (mendirikan negara Yahudi), jelas bahwa waktunya belum tiba. Mencoba mewujudkan impian negara Yahudi terlalu dini—bahkan seratus tahun lebih awal—akan menunda realisasinya selama berabad-abad lagi. Pertimbangan ini sepenuhnya dipahami oleh para pemimpin gerakan Zionis."*

Menteri tersebut adalah Herbert Samuel, yang kemudian diangkat Inggris sebagai Gubernur Palestina pada tahun 1920. Dia memulai upaya sistematis untuk mempersiapkan pendirian negara Yahudi, menjadikannya sebagai pendiri *de facto* Israel. Langkah-langkahnya meliputi:

1. **Mendukung Imigrasi Yahudi:** Samuel memfasilitasi aliran migrasi Yahudi ke Palestina dengan menghapus semua pembatasan dan undang-undang Ottoman yang sebelumnya menghalangi proses tersebut.
2. **Penghapusan Lembaga Keuangan Ottoman:** Bank pertanian Ottoman, yang memberikan pinjaman murah kepada petani Arab, dibubarkan. Sebagai gantinya, Bank Kredit dan Hipotek Yahudi diberi ruang, memungkinkan mereka menguasai modal pertanian. Hal ini membuat banyak petani Arab kehilangan tanah mereka karena tekanan utang berbunga tinggi.
3. **Izin Persenjataan Yahudi:** Samuel memberi izin kepada komunitas Yahudi untuk mempersenjatai diri dan membangun tentara terpisah.
4. **Sistem Pendidikan Yahudi:** Ia memperbolehkan komunitas Yahudi memiliki sistem pendidikan independen.
5. **Pengakuan Bahasa Ibrani:** Bahasa Ibrani diakui sebagai salah satu bahasa resmi di Palestina.

6. **Redistribusi Tanah Negara:** Tanah milik negara, tanah komunal, dan tanah yang menjadi milik pemerintah dialihkan kepada komunitas Yahudi.
7. **Peraturan Agraria Baru:** Samuel menerbitkan serangkaian undang-undang yang memungkinkan negara mengambil alih tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh penduduk lokal, sekaligus mempermudah orang Yahudi untuk memilikinya. Akibatnya, banyak tanah Palestina diserahkan ke tangan Yahudi.

Semua kebijakan ini dilindungi secara politik dan internasional melalui *Mandat Inggris untuk Palestina*. Dokumen ini menjadi dasar kebijakan Inggris di Palestina, dan isinya mencerminkan esensi dari Deklarasi Balfour. Dalam Pasal 2 Mandat tersebut, disebutkan bahwa Inggris harus bekerja untuk mempersiapkan kondisi yang memungkinkan berdirinya negara Yahudi di Palestina. Dokumen ini disetujui oleh lebih dari 20 negara anggota Liga Bangsa-Bangsa, organisasi internasional yang muncul setelah Perang Dunia I.

Inggris sebagai Fasilitator bagi Tumbuhnya Israel

Pemerintahan Inggris di Palestina berperan sebagai pelindung dan pendukung pertumbuhan komunitas Yahudi asing di wilayah tersebut. Inggris secara paksa dan sepihak memfasilitasi keberadaan finansial, sosial, dan politik komunitas ini, meskipun melawan kehendak masyarakat Palestina sebagai pemilik tanah.

Mandat Inggris, dalam Pasal 4-nya, mencakup pendirian sebuah "Agensi Yahudi" yang bekerja sama dengan otoritas pendudukan Inggris untuk mewujudkan negara Yahudi. Agensi ini menjadi embrio entitas politik Zionis, yang mewakili dan mengelola urusan komunitas Yahudi serta membangun institusi negara masa depan. Bahkan sebelum negara Yahudi resmi berdiri, Agensi Yahudi telah diberi hak untuk mewakili Yahudi di tingkat internasional. Dengan demikian, Agensi ini menjadi pemerintahan dalam pemerintahan Inggris dan berkembang menjadi otoritas yang independen.

Selain mendukung Agensi Yahudi, sejumlah tokoh Zionis memegang posisi strategis dalam pemerintahan Inggris, seperti

Norman Bentwich sebagai Jaksa Agung, Dov Hos sebagai kepala Departemen Tanah, dan Arthur Ruppin di Departemen Imigrasi. Tokoh-tokoh ini memainkan peran penting sebagai "pilar utama" dalam pembangunan tanah air Yahudi.

Implementasi Janji Balfour yang Bertentangan

Inggris melaksanakan Deklarasi Balfour dengan mengabaikan sebagian dari isi janji itu sendiri, yaitu untuk tidak merugikan kepentingan penduduk non-Yahudi. Dalam menjalankan mandat yang bertujuan membangun institusi-institusi lokal, Inggris hanya mendukung institusi Yahudi, sementara mencegah munculnya lembaga-lembaga Palestina. Padahal, penduduk Palestina pada waktu itu merupakan 92% dari populasi.

Perkembangan Komunitas Yahudi (1925-1935)

Lima tahun setelah mandat dimulai (1925), jumlah pemukim Yahudi dan institusi mereka terus meningkat. Beberapa pencapaian penting termasuk:

1. **Otonomi Tel Aviv:** Kota ini diberi hak untuk mengatur dirinya sendiri.
2. **Pendirian Serikat Pekerja:** Ben Gurion memimpin organisasi ini yang menjadi wadah bagi komunitas pekerja Yahudi.
3. **Pembukaan Universitas Ibrani:** Acara pembukaannya dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Lloyd George, Jenderal Allenby, Balfour, Churchill, Chaim Weizmann, dan Herbert Samuel.

Kekuatan militer terorganisir komunitas Yahudi mulai terlihat selama Pemberontakan Palestina 1929. Penduduk Palestina terkejut melihat formasi militer Yahudi yang memiliki pangkat dan struktur organisasi yang jelas.

Migrasi Massal dan Industrialisasi

Antara tahun 1930 hingga 1935, lebih dari 150.000 Yahudi, terutama dari Jerman, bermigrasi ke Palestina. Banyak dari mereka adalah pengusaha kaya yang membawa modal besar. Mereka juga

mendirikan pabrik senjata dengan dukungan Inggris, dan pada tahun 1935, industri Zionis telah mulai mengekspor berlian dan kapas ke luar negeri.

Pada tahun 1935, terjadi puncak gelombang migrasi Yahudi dari Jerman, yang menambah lebih dari 60.000 imigran baru. Dalam dua dekade, komunitas Yahudi terus bertambah secara signifikan melalui migrasi, mendapatkan persenjataan dari Inggris, dan meningkatkan keahlian mereka melalui pelatihan militer. Kesiapan mereka terbukti dalam berbagai peristiwa, menunjukkan bahwa mereka memiliki rencana yang matang dan strategi yang siap dijalankan.

Pembentukan Sistem Intelijen Zionis

Badan keamanan Zionis, yang kelak dikenal sebagai Mossad, telah mengembangkan kemampuan intelijennya dengan mendetail. Mereka mengidentifikasi tokoh-tokoh dari organisasi Islam di Palestina—siapa yang dapat diajak bekerja sama, siapa yang bisa disuap, dan siapa yang harus dihabisi. Selain itu, badan ini membentuk divisi khusus untuk melatih Yahudi keturunan Arab agar menjadi mata-mata di negara-negara Arab.

Inggris, dengan dukungannya terhadap proyek Zionis, membentuk landasan bagi pendirian negara Israel, sembari mengabaikan hak-hak penduduk Palestina asli.

Peran Zionis dan Inggris pada Akhir 1930-an hingga Akhir Perang Dunia II

Pada akhir 1930-an, Perang Dunia II dimulai, melibatkan sekitar 15.000 Yahudi yang bergabung dengan Sekutu. Partisipasi ini memberi mereka pelatihan, pengalaman militer, dan akses terhadap ilmu peperangan yang tidak dimiliki oleh masyarakat Palestina. Akibatnya, organisasi bersenjata Yahudi "Haganah" berkembang menjadi kekuatan militer yang nyata, bahkan memiliki sejumlah pesawat.

Perang Dunia II juga menyebabkan peningkatan besar dalam migrasi Yahudi ke Palestina, terutama dari Jerman dan Eropa, di mana mereka mengalami penganiayaan Nazi. Ironisnya, beberapa pemimpin Zionis mendukung penganiayaan ini karena dianggap mendorong migrasi ke Palestina. David Ben-Gurion pernah berkata:

"Jika saya harus memilih antara menyelamatkan semua anak-anak Yahudi Jerman untuk pergi ke Inggris atau menyelamatkan setengah dari mereka untuk pergi ke Israel, saya akan memilih opsi kedua."

Dan pada periode itu, bersamaan dengan upaya militer ini, upaya keamanan intelijen bekerja untuk menyelesaikan berkas 'desa-desa' yang mencakup informasi yang jelas dan rinci tentang setiap desa Palestina.

Perselisihan dengan Inggris

Pada 1939, terjadi perselisihan antara Zionis dan Inggris. Inggris, yang sibuk memadamkan Revolusi Palestina (1936–1939) dan menghadapi tekanan dari dimulainya Perang Dunia II, berupaya menenangkan situasi di Palestina. Mereka mengadakan Konferensi London dan menerbitkan *Buku Putih 1939*, yang berisi kebijakan untuk membatasi migrasi Yahudi ke Palestina. Kebijakan ini ditentang keras oleh Zionis karena dianggap menghambat pendirian negara Yahudi.

Ben-Gurion dengan cerdik mengelola konflik ini dengan menyatakan: *"Kami akan membantu tentara Inggris melawan fasisme seolah-olah Buku Putih tidak ada, sementara pada saat yang sama kami akan menentang Buku Putih seolah-olah perang tidak terjadi."*

Radikalisasi Kelompok Zionis

Meskipun Haganah bertempur bersama Inggris selama perang, beberapa kelompok yang lebih ekstrem memisahkan diri, seperti Irgun (1937) dan Stern Gang (1940). Kelompok-kelompok ini bahkan memerangi Inggris, yang mereka anggap sebagai penghalang bagi proyek negara Zionis. Stern Gang, yang didirikan oleh Yair Stern, mencapai puncak permusuhan terhadap Inggris hingga mencoba bekerja sama dengan Nazi Jerman—meskipun usaha ini gagal. Serangan terhadap Inggris berlanjut, termasuk pembunuhan Lord Moyne, pejabat Inggris tertinggi di Timur Tengah, di Kairo pada 6 November 1944, karena dukungannya terhadap Buku Putih.

Kondisi Palestina Pasca Perang Dunia II

Setelah Perang Dunia II berakhir, situasi di Palestina sangat sulit di berbagai tingkat:

1. **Internasional:** Kemenangan Sekutu atas Poros menyebabkan harapan Palestina terhadap negara-negara Poros pupus, sementara proyek Zionis semakin mulus tanpa hambatan politik besar.
2. **Internal:** Zionisme semakin mengokohkan posisinya:
    - Haganah telah menjadi kekuatan militer dengan pengalaman, persenjataan, dan pelatihan dari perang bersama Inggris.
    - Jumlah imigran Yahudi meningkat pesat: lebih dari 90.000 selama perang dan 60.000 lebih setelahnya. Mereka merebut 270.000 dunam tanah dan mendirikan 73 permukiman baru.
    - Tragedi Holocaust mengubah hampir semua Yahudi menjadi pendukung Zionisme, sehingga migrasi menjadi solusi yang diterima oleh mayoritas komunitas Yahudi di dunia, termasuk dari negara-negara Arab.
    - Keamanan dan Intelijen: Badan keamanan Zionis menyelesaikan peta intelijen detail mengenai desa-desa Palestina, mencakup informasi tentang tanah, demografi, ekonomi, politik, dan tingkat kesulitan untuk merebut desa. Mereka juga memperluas jaringan agen dan meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat Palestina, serta menciptakan lembaga-lembaga "Islam nasional" palsu untuk menciptakan perpecahan internal.

Dampak Strategi Zionis

Dengan kombinasi kekuatan militer, migrasi besar-besaran, dan operasi intelijen, gerakan Zionis berhasil memperkuat pijakan mereka di Palestina, sementara masyarakat Palestina semakin terpinggirkan. Dukungan Inggris kepada Zionis, meskipun berkurang pada akhir 1930-an, tetap memberikan dasar yang kuat bagi proyek negara Yahudi.

Transisi Kekuasaan Pasca Perang Dunia II dan Peran Zionisme

Salah satu dampak besar Perang Dunia II adalah memudarnya pengaruh Inggris dan Prancis, digantikan oleh munculnya Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai kekuatan baru. Zionisme dengan cepat membaca situasi ini dan pada tahun 1942 memindahkan

pusat aktivitasnya dari Inggris ke Amerika Serikat. Mereka kembali menerapkan strategi lama, yakni menjadikan diri mereka sebagai mitra kekuatan internasional demi mencapai tujuan mereka.

Pada masa itu, Amerika menggantikan peran Inggris dan Prancis di Timur Tengah dengan pendekatan "dekolonisasi" atau "mengakhiri kolonialisme lama," yang sejatinya hanyalah bentuk baru penjajahan melalui dominasi tidak langsung. Amerika berbicara tentang kebebasan dan hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri, meskipun retorika ini seringkali hanya untuk menyingkirkan pengaruh Inggris dan Prancis.

Konflik Zionisme dengan Inggris

Zionisme, termasuk kelompok Haganah, mulai menyerang Inggris dan instalasi militernya di Palestina. Serangan ini termasuk kerja sama rahasia antara Haganah, Irgun, dan Stern Gang, yang memuncak dalam serangan besar pada Hotel King David di Yerusalem (22 Juli 1946). Serangan ini, yang ditujukan pada markas administrasi militer dan sipil Inggris, menewaskan lebih dari 90 orang. Serangan ini terjadi setelah Inggris memperoleh dokumen yang membuktikan keterlibatan Haganah dalam aktivitas militer melawan mereka.

Insiden ini menjadi titik balik yang menunjukkan kepada Inggris bahwa Zionisme telah berbalik melawan mereka dan kini menjadi bagian dari kekuatan Amerika yang sedang naik daun, yang ingin menggantikan pengaruh kolonial lama. Sejak saat itu, Zionisme mengubah narasinya menjadi gerakan pembebasan yang melawan penjajahan Inggris. Klaim ini menjadi slogan yang digunakan Zionis di seluruh dunia, sejalan dengan tren global pada 1940-an hingga 1970-an tentang hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri—sebuah ideologi yang didukung oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet, bukan karena cinta pada bangsa-bangsa, melainkan untuk menyingkirkan Inggris dan Prancis.

Taktik Zionisme

Kelompok Zionis melancarkan berbagai operasi seperti:

1. Meledakkan kereta api Inggris.
2. Menyerang markas, tentara, dan perwira Inggris.

3. Menyerbu Penjara Akko untuk membebaskan teroris Yahudi yang ditahan oleh Inggris.

Keberanian Zionis meningkat karena lemahnya respons Inggris terhadap serangan ini. Bahkan, menurut Glubb Pasha, seorang komandan Inggris, ada kesepakatan antara Inggris dan Zionis untuk mempercepat penarikan Inggris dari Palestina dan menyerahkan wilayah tersebut kepada organisasi teroris Yahudi, mempercepat pendirian negara Israel.

Pada akhirnya, Inggris mengklaim bahwa mereka tidak lagi mampu menangani masalah di Palestina dan menyerahkan isu tersebut kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi yang baru dibentuk oleh pemenang Perang Dunia II untuk mengelola urusan dunia. Hal ini menandai babak baru dalam isu Palestina, setelah Inggris mempersiapkan jalan bagi berdirinya negara Yahudi.

Dampak Pendudukan Inggris

Selama 30 tahun pendudukan Inggris (1918–1948), jumlah populasi Yahudi meningkat 13 kali lipat, dari sekitar 50.000 orang (8% dari total populasi) pada 1918 menjadi 650.000 orang pada 1948. Sementara itu, kepemilikan tanah oleh Palestina menyusut dari 98,5% pada 1918 menjadi hanya 6% pada 1948.

Ketika Inggris menduduki Palestina, tidak ada satu pun tentara Yahudi di wilayah itu. Namun, ketika mereka meninggalkan Palestina, Yahudi memiliki:

- Sekitar 60.000 orang bersenjata.
- Tiga pabrik senjata.
- Gudang senjata besar, bunker, dan kendaraan lapis baja.
- Pesawat-pesawat yang terbang di langit Palestina dan membombardir kota-kota serta desa-desa Arab lebih dari sebulan sebelum pasukan Inggris meninggalkan wilayah tersebut.

Selain itu, ketika Inggris tiba, tidak ada organisasi populer atau otoritas kepemimpinan Yahudi. Namun, ketika mereka pergi, Yahudi telah memiliki pemerintahan sendiri di bawah bayang-bayang Mandat Inggris.

Tokoh Kunci Zionisme

Meskipun Theodore Herzl adalah penggagas ide awal Zionisme, kita tidak boleh melupakan peran tokoh-tokoh penting yang meneruskan perjuangan ini, terutama trio berpengaruh:

- Chaim Weizmann.
- Herbert Samuel.
- David Ben-Gurion.

Peran Tiga Tokoh Zionis dalam Mewujudkan Negara Israel

Tiga tokoh Zionis—Chaim Weizmann, Herbert Samuel, dan David Ben-Gurion—berperan besar dalam memanfaatkan berbagai kondisi internasional dan domestik untuk mendukung pembentukan negara Zionis. Mereka tidak hanya memastikan bahwa Israel memiliki dukungan dari kekuatan politik Barat, tetapi juga membangun kemandirian militer, ekonomi, dan keamanan Yahudi. Tujuan mereka adalah menjadikan kekuatan internal Israel sebagai bagian integral dari dinamika politik internasional.

Meskipun mereka terus mendorong propaganda agama dan nasionalisme Yahudi, ketiga tokoh ini bekerja untuk menciptakan kondisi yang mendukung berdirinya negara bahkan sebelum deklarasinya. Saat waktu deklarasi tiba, Israel sudah menjadi realitas yang tak terhindarkan.

Keadaan Palestina di Bawah Pendudukan Inggris

Di sisi lain, masyarakat Palestina menghadapi cerita yang berbeda dan penuh tantangan. Pendudukan Inggris di Palestina membawa pukulan besar bagi mereka, terutama setelah penderitaan luar biasa yang dialami selama Perang Dunia I.

Dampak Perang Dunia I

- Banyak penduduk Palestina direkrut untuk berperang bersama Kesultanan Utsmaniyah di berbagai front.
- Pertempuran antara pasukan Utsmaniyah dan Sekutu menghancurkan banyak kota di Palestina, dengan Gaza menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak akibat tiga pertempuran besar antara Inggris dan Utsmaniyah.

- Selain kehancuran fisik, kelaparan melanda wilayah tersebut, menyebabkan kematian massal di antara penduduk.

Transisi ke Pendudukan Inggris

Ketika Kesultanan Utsmaniyah kalah dalam perang, masyarakat Palestina menemukan diri mereka di bawah pendudukan asing untuk pertama kalinya dalam enam abad. Sejak era Mamluk yang mengusir pasukan Salib dari Levant, wilayah ini selalu berada di bawah pemerintahan Islam, terakhir di bawah Kesultanan Utsmaniyah selama empat abad.

Namun, setelah perang, Mustafa Kemal Atatürk di Turki membubarkan Kekhalifahan Islam dan membatasi wilayah kekuasaan Turki pada batas negara modernnya. Hal ini meninggalkan Palestina dalam kondisi anomali yang belum pernah mereka alami sebelumnya:

1. Palestina menjadi wilayah independen secara nominal, tetapi tanpa kekhalifahan yang melindungi mereka.
2. Mereka berada di bawah pendudukan asing, tanpa ada entitas yang mengklaim tanggung jawab untuk membela atau membebaskan mereka.

Kondisi ini menciptakan guncangan psikologis dan ideologis yang besar. Sebelumnya, identitas masyarakat Palestina tidak terkait dengan konsep "kebangsaan Palestina." Mereka lebih mengidentifikasi diri berdasarkan keluarga, kota, agama, atau sebagai bagian dari Kesultanan Utsmaniyah yang luas. Namun, situasi baru ini melahirkan konsep "Palestina" sebagai identitas nasional tersendiri.

Munculnya Kesadaran Nasional Palestina

Dalam konteks baru ini, Palestina mulai dipahami bukan hanya sebagai wilayah geografis, tetapi juga sebagai tanah air nasional yang terpisah dari wilayah lain, berada di bawah pendudukan asing, dan membutuhkan perjuangan untuk kemerdekaan.

Penyebaran Gagasan Nasionalisme

Gagasan nasionalisme mulai menyebar di Palestina melalui berbagai saluran, antara lain:

1. Pendidikan:
   - Meningkatnya tingkat pendidikan di sekolah-sekolah yang didirikan oleh misi Kristen dan lembaga asing.
   - Sebagai tanggapan, Kesultanan Utsmaniyah mendirikan banyak sekolah untuk melindungi identitas generasi mudanya. Namun, bahkan di sekolah-sekolah Utsmaniyah, gagasan nasionalisme yang dominan pada masa itu mulai meresap.
2. Pengaruh Regional:
   - Meningkatnya jumlah orang terdidik di negara-negara tetangga seperti Mesir, Suriah, dan Lebanon, yang juga terpapar gagasan nasionalisme.
   - Ideologi nasionalisme menjadi tema utama dalam kurikulum pendidikan, media, sastra, dan buku-buku budaya yang beredar luas.

Gagasan nasionalisme ini menyebar terutama di kalangan kelas terdidik yang jumlahnya semakin meningkat dan mulai mendapatkan posisi yang lebih kuat dalam struktur sosial.

Faktor-Faktor Penyebaran Ide Nasionalisme di Palestina

1. Ide Nasionalisme sebagai Produk Penjajahan Asing

   Ide nasionalisme merupakan bagian dari strategi penjajahan asing. Tidak diragukan bahwa penjajah menyebarkan ide-idenya di wilayah yang dijajah, baik dengan paksaan maupun bujukan. Seiring dengan upaya penjajah untuk menata ulang struktur sosial dan politik sesuai kepentingannya, masyarakat yang dijajah juga cenderung meniru penjajah sebagai bagian dari sifat "kalah yang mengagumi pemenang." Akibatnya, ide-ide penjajah sering kali diterima, terutama oleh kalangan yang memiliki hubungan dekat dengan penjajah.
2. Runtuhnya Kekhalifahan Islam

   Kekalahan dan akhirnya keruntuhan kekhalifahan Islam, yang ditandai oleh tindakan Mustafa Kemal Atatürk, membawa dampak psikologis yang besar. Ideologi Islam, yang dianggap sebagai ideologi yang kalah, mulai ditinggalkan demi ide-ide

yang diusung oleh pihak yang menang, seperti nasionalisme. Bahkan, beberapa pemimpin agama dan hakim syariah terjebak dalam ideologi sekularisme.

3. **Minimnya Dukungan dari Negara-Negara Tetangga**

   Tidak ada pemimpin dari negara-negara di sekitar Palestina yang menganggap bahwa membela Palestina adalah tanggung jawab mereka. Penjajah, yang berasal dari Eropa dengan identitas nasional yang kuat, membangun identitas nasional Yahudi di Palestina sebagai dasar pembentukan negara. Hal ini mendorong masyarakat Palestina untuk mengadopsi ide nasionalisme sebagai alat untuk melawan penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan melalui seruan hak menentukan nasib sendiri, sebagaimana diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat.

4. **Konsep Nasionalisme sebagai Alat Perlawanan**

   Nasionalisme menjadi cara untuk melawan penjajah dan mencari kemerdekaan, dengan mengangkat slogan "kemerdekaan nasional" dan menyerukan hak untuk menentukan nasib sendiri. Ide ini menjadi daya tarik bagi masyarakat yang berada di bawah penjajahan setelah Perang Dunia I, yang berusaha mencapai kemerdekaan melalui kesepakatan global.

Transformasi Identitas Palestina

Akibat faktor-faktor tersebut, ide nasionalisme mulai menyebar di kalangan masyarakat Palestina. Lambat laun, mereka mulai disebut sebagai "bangsa Palestina," sebuah identitas baru dalam konteks modern. Identitas ini menjadi penting dalam menghadapi dua proyek penjajahan sekaligus: Inggris dan Zionis.

Namun, ini tidak berarti bahwa masyarakat Palestina meninggalkan identitas Islam mereka. Dalam berbagai periode perjuangan dan perlawanan, Islam tetap menjadi faktor dominan dalam membangkitkan semangat dan solidaritas, bahkan menarik dukungan dari luar Palestina. Meskipun demikian, dinamika politik praktis memaksa sebagian besar diskursus politik dan media untuk berfokus pada konsep nasionalisme dan upaya membebaskan Palestina sebagai sebuah negara nasional.

Kebijakan Inggris untuk Menghambat Pembentukan Negara Palestina

Salah satu prioritas utama Inggris sejak era Herbert Samuel adalah mencegah terbentuknya negara atau entitas politik yang mewakili rakyat Palestina. Inggris secara aktif:

- Menolak Pembentukan Dewan Perwakilan Palestina: Meskipun ada tuntutan dari Konferensi Arab di Yerusalem pada tahun 1928, Inggris menolak permintaan ini, karena dewan tersebut pasti akan didominasi oleh mayoritas Arab.
- Menghalangi Kemunculan Kepemimpinan Palestina: Inggris berusaha menggagalkan munculnya tokoh-tokoh yang dapat mewakili rakyat Palestina dan menekan segala bentuk gerakan yang dapat mengarah pada pembentukan kekuatan politik Palestina.

Paradoks Kebijakan Inggris

Inggris menjalankan dua kebijakan yang bertentangan secara bersamaan:

1. Mendukung Penuh Proyek Zionis: Inggris memberikan dukungan, perlindungan, dan fasilitas untuk membangun negara Yahudi, meskipun negara tersebut masih kekurangan banyak elemen dasar sebagai sebuah negara.
2. Mencegah Pembentukan Negara Palestina: Inggris menghalangi pembentukan negara Palestina, meskipun masyarakat Palestina sudah memiliki semua elemen dasar untuk mendirikan negara.

Kondisi ini menciptakan situasi yang unik dan tidak wajar di Palestina. Di negara-negara Arab lain yang juga dijajah oleh Inggris, seperti Mesir, Yordania, dan Irak, kebijakan Inggris cenderung mendirikan rezim-rezim yang loyal kepada mereka. Namun, di Palestina, Inggris menerapkan pendekatan yang berbeda dengan menghalangi segala bentuk institusi politik lokal, sementara secara aktif mendukung pembentukan negara Yahudi.

Dampak Kebijakan Inggris terhadap Masyarakat Palestina

Kebijakan Inggris di Palestina tidak hanya bertujuan mendukung proyek Zionis, tetapi juga menciptakan perpecahan di dalam

masyarakat Palestina. Beberapa dampak penting dari kebijakan ini meliputi:

1. **Perpecahan Antar Keluarga Besar**

   Kebijakan Inggris memicu persaingan dan konflik di antara keluarga-keluarga besar Palestina, seperti keluarga Al-Husseini dan Al-Nashashibi.

2. **Pelemahan Kepemimpinan Palestina**

   Haj Amin Al-Husseini, yang dianggap sebagai pemimpin politik utama Palestina, dipaksa melarikan diri. Ketika ia berlindung di Masjid Al-Aqsa, Inggris mengirimkan pasukan India "Muslim" untuk menangkapnya. Namun, ia berhasil melarikan diri ke luar Palestina, sehingga perjuangan kehilangan pemimpin politiknya yang terpisah dari situasi dan pemimpin lapangan.

   Inggris juga mengeluarkan kebijakan untuk menguasai pengelolaan pengadilan syariah dan dana wakaf, melemahkan otoritas mufti serta sisa-sisa sistem Islam yang masih ada.

3. **Penyebaran Ideologi Sekular dan Komunisme**

   Ideologi sekular nasionalis dan komunis mulai menyebar di kalangan pemuda terdidik Palestina. Hal ini menimbulkan konflik antara nilai-nilai Islam tradisional dengan modernitas yang dibawa penjajah, yang semakin melemahkan harmoni dalam masyarakat Palestina.

   Banyak pemuda Palestina yang naik secara sosial melalui pekerjaan di institusi pemerintahan Inggris. Meski bukan karena niat buruk, posisi mereka sebagai pengumpul pajak dan pelaksana kebijakan administratif sering kali membuat mereka dipandang sebagai bagian dari sistem penjajahan.

4. **Ketergantungan pada Struktur Penjajah**

   Sistem pendidikan dan pekerjaan yang disediakan Inggris menjadi satu-satunya jalan untuk mobilitas sosial bagi lulusan sekolah. Ini tidak hanya memperkuat pengaruh penjajah, tetapi juga melemahkan perkembangan gerakan perlawanan yang solid dan harmonis.

5. **Eksploitasi Perpecahan Antar-Komunitas Agama**

   Inggris memperkuat perpecahan antara Muslim, Kristen, dan Yahudi.

- Komunitas Yahudi: Cenderung mendukung proyek Zionis yang didukung Inggris.
- Komunitas Kristen: Sebagian besar berlindung pada Inggris, terutama melalui kebijakan yang memberikan mereka posisi tinggi dan keistimewaan secara bertahap. Sementara sebagian kecil dari mereka tetap mendukung perlawanan, mereka berfokus pada gagasan nasionalisme Arab sekular, yang sulit diterima oleh mayoritas Muslim.

6. **Perpecahan antara Penduduk Desa dan Kota**

   Inggris, terutama di bawah pemerintahan Arthur Wauchope, memperdalam perpecahan antara penduduk desa dan kota. Keluarga-keluarga terpandang di kota sering kali direkrut untuk posisi pemerintahan, sementara penduduk desa tetap terpinggirkan, menciptakan jurang sosial yang dalam.

7. **Konflik yang Diarahkan oleh Penjajah**

   Sebagai bagian dari kebijakan penjajahan, Inggris terus mendorong konflik dan ketegangan antara masyarakat Palestina dan Yahudi untuk mencapai tujuan politiknya. Pola ini berlangsung sepanjang periode pemerintahan Inggris di Palestina.

Kesimpulan

Kebijakan Inggris tidak hanya membangun fondasi untuk negara Zionis tetapi juga secara sistematis melemahkan masyarakat Palestina melalui perpecahan internal, penguatan identitas sekular, dan eksploitasi perbedaan sosial, agama, serta budaya. Semua ini menciptakan hambatan besar bagi terciptanya kesatuan dan perjuangan kolektif untuk kemerdekaan.

Hubungan Sosial Palestina-Yahudi dan Dinamika Perlawanan

1. **Kehidupan Sosial Palestina-Yahudi Sebelum Konflik Memuncak**

Meskipun situasi politik sering kali bergejolak, catatan sejarah Arab menunjukkan adanya periode kehidupan bersama yang relatif harmonis antara Muslim Palestina dan komunitas Yahudi, khususnya Yahudi lokal atau yang berasal dari kawasan Arab. Kehidupan

bersama ini paling terlihat di kota-kota besar yang menjadi pusat perdagangan.

Beberapa sumber bahkan mencatat interaksi sosial yang melampaui hubungan biasa, termasuk cinta dan pernikahan antara pemuda Palestina dan perempuan Yahudi. Namun, situasi ini mulai berubah menjelang tragedi Nakba, ketika ketegangan politik menimbulkan kekhawatiran dan segregasi sosial semakin jelas.

Memahami konteks sosial ini membantu menjelaskan karakter perlawanan yang muncul dari masyarakat Palestina serta tantangan yang dihadapinya.

2. Bentuk-Bentuk Perlawanan Palestina

Perlawanan Palestina terbagi dalam dua bentuk utama:

- Perlawanan Politik Damai (Legal dan Non-Kekerasan)
- Perlawanan Bersenjata (Non-Legal menurut Hukum Inggris)

a. Perlawanan Politik Damai

Perlawanan ini menggunakan pendekatan politik, hukum, dan prinsip-prinsip moral yang diklaim Inggris untuk menekan mereka agar memenuhi janji dan prinsip yang mereka canangkan sendiri. Bentuk perlawanan ini sering kali menjadi pilihan bagi masyarakat yang belum memiliki kekuatan militer memadai.

Meskipun tidak efektif untuk mencapai kemerdekaan langsung, strategi ini menjadi satu-satunya jalan yang tersedia bagi mereka yang lemah. Penjajah sering memanfaatkan lapisan elite lokal untuk menenangkan masyarakat dan mengelola konflik. Elite ini, yang disebut sebagai "nasionalisme jinak," berusaha meraih konsesi kecil dari penjajah tanpa konfrontasi besar.

Namun, tidak semua elite yang terlibat dalam perlawanan politik damai dapat dianggap sebagai pengkhianat. Kompleksitas situasi sering melibatkan kombinasi antara kelemahan, ketertipuan, dan upaya mencari jalan terbaik untuk masyarakat. Beberapa individu yang awalnya berkolaborasi kemudian beralih menjadi pejuang sejati, sementara yang lain terjebak dalam jebakan kolonial.

b. Perlawanan Bersenjata

Ketika pendekatan damai gagal memenuhi aspirasi rakyat, muncul perlawanan bersenjata sebagai bentuk penolakan terhadap penjajahan. Namun, dinamika sosial dan politik sering kali mempersulit koordinasi gerakan ini, terutama dengan fragmentasi regional dan kurangnya dukungan lintas negara yang pernah ada di bawah Kekhalifahan Utsmaniyah.

3. Konferensi Arab dan Perlawanan Politik

Perlawanan politik damai paling menonjol melalui serangkaian konferensi Arab yang bertujuan:

1. Membatalkan Deklarasi Balfour.
2. Menghentikan imigrasi Yahudi.
3. Menghentikan penjualan tanah kepada Yahudi.
4. Membentuk dewan legislatif yang mencerminkan aspirasi rakyat Palestina.

Konferensi pertama diadakan di Yerusalem pada 1919, dengan tuntutan utama agar Palestina tetap menjadi bagian dari Syam yang bersatu di bawah pemerintahan Arab. Namun, kekuatan kolonial besar dan kesepakatan antara Inggris dan elite Arab seperti putra-putra Syarif Hussein (Faisal dan Abdullah) melemahkan posisi Palestina.

Sebanyak tujuh konferensi diadakan hingga 1928, dipimpin oleh Musa Kazim Al-Husseini, yang menjadi simbol perjuangan politik hingga kematiannya pada 1934.

4. Peran Amin Al-Husseini

Setelah wafatnya Musa Kazim, Inggris menciptakan posisi baru, yaitu Mufti Yerusalem dan Ketua Dewan Islam, dan menunjuk Amin Al-Husseini. Meskipun pada awalnya ia berkompromi dengan Inggris, Amin Al-Husseini akhirnya menjadi pemimpin utama perlawanan Palestina. Upayanya dalam melawan penjajahan Inggris membuatnya diakui sebagai tokoh sentral dalam perjuangan nasional Palestina.

Perlawanan Palestina: Pendekatan Islam dan Perlawanan Bersenjata

1. Dominasi Karakter Islam dalam Perlawanan

Salah satu hal yang sering tidak dibahas dalam studi sejarah yang ditulis oleh nasionalis dan kaum Arabis adalah bahwa perlawanan Palestina, baik yang damai maupun yang bersenjata, didominasi oleh karakter Islam. Tokoh yang paling menonjol pada masa itu adalah Mufti Palestina, Haj Amin al-Husseini, yang memanfaatkan kekuatan keluarga al-Husseini serta pengaruhnya dalam urusan agama, termasuk pengelolaan wakaf, pengadilan syariah, hakim, imam, dan para pengkhotbah.

Al-Husseini juga memanfaatkan posisi ini untuk menggerakkan acara-acara keagamaan yang menjadi titik kumpul dan titik bakar perlawanan terhadap kolonialisme. Pengaruh agama yang dimilikinya tidak hanya terbatas di Palestina, tetapi juga meluas ke dunia Arab dan pemimpin-pemimpin gerakan Islam di luar negeri. Karena itu, al-Husseini dan kelompoknya memperoleh dukungan luas dari rakyat Palestina. Meski begitu, kelompok lawan yang berasal dari keluarga al-Nashashibi gagal menandingi kekuatan al-Husseini dengan pengaruh keluarga mereka sendiri.

2. Perlawanan Damai dan Dampaknya

Dalam perlawanan damai, ada berbagai cara yang digunakan, seperti melakukan kunjungan ke London, mengadakan protes, mengeluarkan petisi, dan menyerukan seruan-seruan. Meskipun pendekatan ini memberikan hasil terbatas dalam kondisi tertentu, namun tidak banyak mengubah jalannya konflik. Perlawanan damai ini menerima dua pukulan besar: pertama, kegagalan kunjungan Musa Kazim al-Husseini dan delegasi Arab ke London pada tahun 1930; dan kedua, surat dari Perdana Menteri Inggris, MacDonald, kepada Chaim Weizmann pada Februari 1931, yang menegaskan komitmen Inggris terhadap Zionisme. Surat ini, yang dikenal sebagai "Buku Hitam," membatalkan janji Inggris sebelumnya untuk membatasi imigrasi Yahudi, meskipun mereka telah diberi peringatan mengenai keterbatasan tanah di Palestina.

Namun, meskipun demikian, aktivitas damai terus berlangsung. Bahkan mereka yang mendukung perlawanan bersenjata tidak dapat secara terbuka mengungkapkan posisi mereka. Mereka juga membutuhkan kegiatan damai sebagai penutup untuk gerakan mereka, mengenalkan diri kepada masyarakat, membangkitkan semangat Arab dan Muslim, serta mengumpulkan dana atau inisiatif. Salah satu acara besar yang diadakan adalah konferensi Islam umum di Yerusalem pada tahun 1931, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Rashid Rida, Muhammad Iqbal, dan Abdelaziz al-Thaalibi. Di sini, dihasilkan keputusan untuk mendirikan universitas Islam, membentuk perusahaan untuk menyelamatkan tanah, dan membentuk komite Palestina di setiap negara. Pada tahun 1935, konferensi ulama Palestina mengeluarkan fatwa yang melarang penjualan tanah kepada Yahudi dan mengkafirkan orang yang melakukannya.

3. Pengaruh Inggris dalam Mengelola Kepemimpinan Palestina

Penting untuk dicatat bahwa kehadiran Inggris yang kuat dapat mempengaruhi naik turunnya tokoh-tokoh penting, memberikan atau mencabut kedudukan diplomatik, serta merusak kesatuan politik Palestina. Inggris sering memanfaatkan individu yang dekat dengan mereka, baik yang terpengaruh atau terlibat dalam kolaborasi, untuk melemahkan kohesi politik Palestina. Ini digunakan dalam banyak kesempatan selama periode penjajahan.

4. Perlawanan Bersenjata

Meskipun banyak penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina di bawah penjajahan Inggris, mereka tidak pernah berhenti melawan dengan segala daya yang mereka miliki dalam kondisi yang sulit. Terdapat rangkaian pemberontakan yang tersebar, di mana perlawanan ditujukan kepada Yahudi, tetapi menghindari konfrontasi langsung dengan Inggris agar tidak membuka front yang lebih kuat dan lebih ganas. Tujuan mereka adalah untuk menekan Inggris agar mengubah kebijakan mereka mengenai dukungan terhadap Yahudi. Beberapa pemberontakan tersebut termasuk yang terjadi di Yerusalem (1920), Jaffa (1921), Pemberontakan al-Buraq (1929),

dan Pemberontakan Yerusalem dan Jaffa (1933).

Perlawanan ini lebih bersifat Islam dan sering kali berakhir dengan korban jiwa dari kedua belah pihak, baik Arab maupun Yahudi. Perbedaannya terletak pada cara kematian: Yahudi terbunuh oleh tangan orang Arab dengan senjata tajam seperti tongkat dan pisau, sedangkan orang Arab terbunuh oleh Inggris dengan senjata api.

Perlawanan Palestina: Dari Aksi Individual hingga Revolusi

1. Inisiatif Perlawanan Kecil

Seperti biasa, muncul inisiatif-inisiatif individual dan kelompok kecil, seperti yang dilakukan oleh nelayan di Yafa yang meledakkan bom di kapal-kapal yang membawa imigran Yahudi. Selain itu, muncul juga kelompok-kelompok bersenjata kecil yang dengan cepat dihancurkan, seperti gerakan "Al-Kaf al-Akhder" yang dipimpin oleh Ahmad Tafesh yang terbentuk pada Revolusi al-Buraq dan berakhir dengan penangkapan pemimpinnya pada Februari 1930. Dalam gerakan-gerakan ini, pola yang semula hanya menargetkan Yahudi dan menghindari Inggris, mulai berubah. Gerakan ini kini menargetkan kedua musuh, dengan keyakinan bahwa Inggris adalah sumber dari masalah, sementara Yahudi hanya menjadi bayangannya—seperti bayangan pohon yang hilang bersama dengan pohon yang ditebang. Pemikiran ini muncul antara tahun 1930 dan 1935, pada masa yang menyaksikan peningkatan imigrasi dan persenjataan Yahudi.

2. Revolusi Sheikh Izz ad-Din al-Qassam

Gerakan-gerakan kecil ini berkembang hingga mencapai pemberontakan terbesar saat itu, yang dikenal sebagai Revolusi Sheikh Izz ad-Din al-Qassam. Pada tahun 1935, Sheikh al-Qassam berkonsultasi dengan pemimpin-pemimpin Palestina tentang memulai revolusi melawan Inggris, tetapi mereka menyatakan bahwa rakyat belum siap dan waktunya tidak tepat, dengan harapan masih ada peluang untuk mencapai hak-hak melalui dialog dengan Inggris. Namun, al-Qassam tetap memulai pemberontakan dan menjadi salah satu syuhada (martir) pada 20 November 1935, dalam pertempuran pertama yang dihadapi dengan Inggris.

Jumlah pasti anggota organisasi yang dibentuk oleh al-Qassam tidak diketahui, namun diperkirakan jumlahnya antara 200 hingga 800 orang. Organisasi ini tidak diketahui dengan pasti kapan dimulai, tetapi diperkirakan antara tahun 1925 dan 1930, dengan aktivitasnya terutama di bagian utara Palestina, tempat di mana populasi Yahudi meningkat. Salah satu syarat untuk bergabung adalah kesiapan untuk berjuang secara bersenjata dan membeli senjata dengan uang sendiri.

Organisasi ini menargetkan Yahudi dan Inggris, serta mata-mata dan kolaborator mereka. Organisasi ini berstruktur sel-sel kecil, di mana setiap anggota hanya mengetahui anggota lainnya dalam kelompok kecilnya. Setelah al-Qassam menjadi syuhada, kepemimpinan diambil alih oleh Farhan al-Saadi. Salah satu pemicu keputusan untuk revolusi adalah penemuan oleh penduduk Haifa bahwa peti-peti yang tiba di toko-toko Yahudi ternyata berisi senjata dan peluru cepat, bukan barang dagangan seperti yang diharapkan.

3. Reaksi terhadap Kematian al-Qassam

Kematian al-Qassam mengguncang dunia Arab secara keseluruhan dan menjadi percikan yang menyalakan Revolusi Palestina yang lebih besar, yang dikenal sebagai "Revolusi Pedesaan Palestina" atau "Revolusi Palestina Besar." Hal ini bertepatan dengan dua kejadian penting: pertama, pembatalan rencana Inggris untuk membentuk parlemen Palestina yang sebelumnya mereka tawarkan untuk meredakan ketegangan; dan kedua, keberhasilan pemogokan umum yang terjadi di Suriah, yang memaksa Prancis untuk membentuk pemerintahan nasional di Suriah. Keberhasilan ini menumbuhkan harapan bahwa pemogokan serupa di Palestina bisa menjadi solusi bagi masalah dengan Inggris.

4. Proses Dimulainya Revolusi Besar

Pemberontakan besar ini dimulai dengan aksi yang dilaksanakan oleh anggota Qassami di bawah pimpinan Farhan al-Saadi yang menewaskan dua orang Yahudi pada 15 April 1936. Aksi tersebut memicu reaksi balasan, yang akhirnya mengarah pada pengumuman pemogokan umum oleh rakyat Palestina pada 20 April 1936. Pemo-

gokan ini berlangsung selama enam bulan, menjadikannya sebagai pemogokan terpanjang dalam sejarah Palestina, bahkan beberapa peneliti menyebutnya "pemogokan terpanjang dalam sejarah yang dilakukan oleh seluruh bangsa."

5. **Kematian al-Qassam dan Keberlanjutan Revolusi**

Meski al-Qassam tidak sempat melihat hasil dari perjuangannya selama hidupnya, Palestina menyaksikan buah dari perjuangannya setelah kematiannya. Anggota organisasi al-Qassam menjadi tokoh utama dalam Revolusi Palestina Besar, bersama dengan pemimpin-pemimpin lokal dan tokoh-tokoh berpengaruh yang lahir dari gerakan ini, yang menjadi pilar utama dalam perjuangan bersenjata.

Sedangkan di sisi politik, kepemimpinan Palestina segera terbentuk dengan dibentuknya "Komite Arab Tertinggi" pada 25 April 1936, yang dipimpin oleh Haj Amin al-Husseini. Komite ini menetapkan tiga tuntutan utama yang harus dicapai melalui pemogokan:

1. Pembentukan pemerintahan Palestina yang bertanggung jawab kepada parlemen yang dipilih.
2. Penghentian imigrasi Yahudi ke Palestina.
3. Penghentian penjualan tanah kepada Yahudi.

Perkembangan Politik dan Militer Revolusi Palestina

1. **Lintasan Politik Revolusi**

Britania terkejut dengan perkembangan revolusi yang tiba-tiba ini dan gelombang perlawanan yang meluas. Mereka merasa terkejut oleh pemogokan yang meluas dan bertahan lama ini, yang tampaknya sangat sulit untuk dihentikan. Dalam upaya mengakhiri pemogokan, Inggris mulai menekan rakyat Palestina dengan cara-cara kekerasan dan politik. Mereka meminta para penguasa Arab yang berada di bawah pengaruh Inggris untuk menekan "Komite Arab Tertinggi" agar menghentikan pemogokan tersebut, dan hal ini berhasil dilakukan.

Selain itu, Inggris juga berjanji untuk mengirimkan sebuah komisi tingkat tinggi untuk menyelidiki situasi, yang dikenal dengan nama "Komisi Peel". Kombinasi dari ancaman, bujukan, serta kekerasan militer dari Inggris membuat rakyat Palestina akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pemogokan, dengan harapan memberikan kesempatan bagi upaya diplomatik antara dunia Arab dan Inggris. Namun, para penguasa Arab tidak melakukan apa pun, sementara komisi Inggris membutuhkan waktu setahun untuk menyelesaikan laporannya (Juli 1937), yang kesimpulannya adalah: pembagian Palestina antara Arab dan Yahudi!! Ini adalah kali pertama sebuah komisi Inggris mengusulkan gagasan untuk mengusir dan mengusulkan pengusiran rakyat Palestina dari tanah mereka.

Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh proses tersebut hanyalah upaya untuk membeli waktu dan mencoba meredam revolusi. Pada saat itu, tanah yang dimiliki oleh Yahudi di Palestina hanya sekitar lima persen, tetapi komisi tersebut memberi mereka sepertiga bagian utara Palestina, sementara Arab mendapatkan dua pertiga bagian selatan Palestina. Sementara itu, wilayah yang menghubungkan Yerusalem dan Haifa dijadikan koloni Inggris. Ini menjadi keuntungan baru bagi Yahudi yang mereka peroleh berkat kebijakan Inggris, meskipun mereka—seperti biasanya—tidak berhenti sampai di situ.

2. Reaksi Rakyat Palestina dan Peningkatan Revolusi

Hasil tersebut semakin meningkatkan kemarahan rakyat Palestina dan memicu kebangkitan revolusi. Sebagai respon, Inggris memutuskan untuk membubarkan "Komite Arab Tertinggi" dan menangkap para pemimpinnya. Empat anggota komite ditangkap dan diasingkan ke Pulau Seychelles, sementara pemimpin mereka, Haj Amin al-Husseini, berhasil melarikan diri dan pergi ke Lebanon (Oktober 1937), berusaha untuk mengelola revolusi dari luar negeri.

3. Lintasan Militer dan Operasi Lapangan

Di sisi militer dan lapangan, revolusi Palestina menargetkan mata-mata dan kolaborator, selain juga Yahudi dan Inggris. Serangan dilakukan terhadap markas-markas pemerintahan Inggris dan fasilitas-fasilitas pemerintahannya, serta serangan terhadap koloni-koloni Yahudi. Salah satu taktik yang digunakan adalah pembunuhan pejabat-pejabat tinggi dan ancaman terhadap anggota polisi Arab. Selain itu, serangan juga dilakukan terhadap jalur komunikasi dan transportasi yang digunakan oleh pasukan dan administrasi Inggris, seperti jembatan, jalur kereta api, saluran telepon, serta pemboman kereta api dan pipa minyak.

Salah satu operasi penting yang mencuat adalah pembunuhan gubernur Inggris, Louis Andrews (26 Juli 1937), setelah hasil dari "Komisi Peel" yang mengusulkan pembagian Palestina antara Arab dan Yahudi. Revolusi ini terus berkembang pesat dan mencapai puncaknya pada musim panas 1938, ketika para pejuang Palestina berhasil merebut seluruh wilayah pedesaan Palestina, bahkan merebut sejumlah kota untuk jangka waktu tertentu dari kekuasaan Inggris.

Keterlibatan Muslim dari Negara-Negara Arab dalam Revolusi Palestina

Seperti biasa dalam setiap perjuangan Islam, dalam revolusi ini juga ikut serta Muslim dari Mesir, Yordania, Syam, dan Irak. Mereka datang sebagai relawan, dan beberapa di antaranya bahkan menduduki posisi kepemimpinan, seperti Fawzi al-Qawuqji.

Represi Brutal Inggris

Setiap kali terjadi pemberontakan rakyat, senjata Inggris digunakan dengan kekerasan untuk memadamkan setiap perlawanan. Mereka menggunakan berbagai metode seperti pembunuhan, penangkapan, pengasingan, dan pengadilan. Semua ini didukung oleh operasi intelijen dan pengawasan, serta kerja politik yang memecah belah kepemimpinan Palestina dan berusaha menggagalkan perlawanan mereka dengan menciptakan ketegangan sektarian dan agama di dalam negeri. Revolusi Palestina besar ini mendapat perlakuan represif yang luar biasa dari Inggris, yang menggunakan cara-

cara seperti: membunuh pemimpin lapangan, memisahkan pemimpin politik dari apa yang terjadi di lapangan melalui pengasingan atau memfasilitasi pelarian mereka dari Palestina, dan mencabut senjata dari rakyat. Jika ditemukan senjata, bahkan hanya peluru kosong, rumah mereka akan dihancurkan. Selain itu, Inggris juga menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia, mengikat mereka di depan mobil atau kereta api untuk menghindari jebakan. Desa-desa dikepung dan dilakukan razia besar-besaran untuk menangkap orang-orang, terutama keluarga mereka yang bergabung dengan revolusi atau yang dicurigai akan bergabung. Banyak rumah dihancurkan, terutama di Yaffa (16 Juni 1936), yang menyaksikan penghancuran rumah yang paling besar.

Intervensi Militer Inggris

Inggris mengerahkan kekuatan besar untuk menghentikan revolusi yang berlangsung selama tiga tahun ini. Mereka mengirimkan 20.000 pasukan di bawah komando empat jenderal senior yang sebelumnya terlibat dalam Perang Dunia I. Inggris terpaksa merebut kembali Palestina pada akhir 1938 dan awal 1939, dan memberlakukan pemerintahan militer dengan menggunakan 100.000 tentara Inggris, yang berarti satu tentara untuk setiap empat warga Palestina! Hal ini dapat kita bayangkan sebagai beban besar, terutama ketika kita ingat bahwa seorang Zionis yang sangat fanatik dan keras dalam kekerasan seperti Jabotinsky pernah berpendapat bahwa kekuatan yang dibutuhkan untuk mendirikan Israel tidak kurang dari 50.000 tentara.

Peran Milisi Zionis

Selain pasukan Inggris, milisi Zionis juga tumbuh di bawah naungan mereka. Milisi-milisi ini mulai melancarkan operasi pemboman yang mematikan di pasar-pasar dan tempat umum yang padat di wilayah dan kota-kota Arab.

Kehilangan Besar dalam Revolusi

Selama tiga tahun revolusi (1936–1939), sekitar lima ribu orang Palestina syahid, lebih dari empat belas ribu orang terluka, belum lagi yang ditangkap, diusir, atau terpaksa melarikan diri. Beberapa

perkiraan menyebutkan bahwa jumlah tersebut mewakili sekitar 10% dari laki-laki dewasa yang siap bertempur. Ini berarti bahwa generasi yang dapat melawan milisi Zionis sepuluh tahun kemudian telah dihancurkan. Praktis, bencana besar bagi Palestina sudah terjadi dengan dipadamkannya revolusi ini pada akhir tahun 1930-an.

Keberanian dan Kelemahan dalam Perlawanan

Walaupun rakyat Palestina menunjukkan perlawanan yang luar biasa, perjuangan mereka terpecah dan terfragmentasi. Misalnya, meskipun aksi protes besar yang terorganisir pada tahun 1933 yang kemudian beralih menjadi Intifada Yerusalem dan Yaffa menjadi bukti adanya upaya untuk mengorganisir gerakan, masyarakat yang terpecah dan terhambat dalam menghasilkan kepemimpinan ini membutuhkan waktu 15 tahun untuk dapat mengatur gerakan populer damai seperti yang dilakukan oleh Gandhi di India.

Selain itu, perlawanan ini juga menghadapi ketimpangan besar dalam kekuatan dan persenjataan, kekurangan kader akibat dihancurkannya generasi revolusioner sepuluh tahun sebelumnya, serta konspirasi internasional, terutama dari pihak Inggris. Perlawanan ini juga terhambat oleh pengkhianatan dari negara-negara Arab, di mana para pemimpinnya adalah agen yang bekerja untuk kepentingan penjajah.

Kesulitan Palestina Menghadapi Kekuasaan Inggris

Kita harus ingat bahwa Kekaisaran Inggris adalah kekuatan global terkuat pada masanya, dan bahwa bangsa-bangsa dengan jumlah besar dan sumber daya melimpah pun tidak mampu membebaskan diri dari penjajahan Inggris kecuali dengan sangat sulit dan setelah bertahun-tahun, seperti India, Mesir, dan Irak. Lalu, bagaimana mungkin sebuah bangsa kecil dengan sumber daya terbatas seperti bangsa Palestina bisa berhasil dalam perjuangan seperti itu?! Meskipun demikian, rakyat Palestina menunjukkan keberanian luar biasa dan meraih hasil yang tak terduga mengingat perbedaan besar dalam kemampuan kedua belah pihak. Bahkan hanya dengan memulai dan menjalani babak-babak perlawanan ini saja sudah merupakan keberanian yang langka.

Perlawanan yang Tidak Sia-Sia

Namun, perlawanan rakyat Palestina tidak berakhir tanpa hasil. Justru, Inggris terpaksa mencari solusi yang menenangkan menghadapi kenyataan revolusioner ini, terutama karena tanda-tanda dimulainya Perang Dunia II mulai muncul dan Inggris membutuhkan ketenangan di kawasan ini. Inggris pun mengumumkan pembatalan rencana pembagian Palestina, membebaskan para pemimpin yang diasingkan dari Komite Arab Tinggi, dan mengundang pertemuan di London antara pihak Arab dan Yahudi. Kemudian, Inggris menerbitkan *Buku Putih* (Mei 1939) yang dianggap sebagai konsesi terbesar Inggris untuk kepentingan Palestina, yang memicu perselisihan antara Inggris dan Yahudi. Dalam dokumen itu, Inggris berjanji untuk membatasi imigrasi Yahudi hingga 75.000 orang dan melarang penjualan tanah di beberapa daerah, serta membatasi penjualannya di wilayah lain. Namun, Inggris tetap menolak untuk memberikan amnesti bagi para pejuang atau mengizinkan kembalinya pemimpin politik Palestina, Amin al-Husayni. Inggris berusaha menenangkan keadaan tanpa ancaman, oleh karena itu mereka tidak membiarkan munculnya benih-benih yang bisa memulai perjuangan lagi.

Perjalanan Amin al-Husayni

Amin al-Husayni tidak bisa kembali ke Palestina, tetapi ia melakukan perjalanan panjang dan berbahaya, berpindah-pindah antara Lebanon, Irak, Iran, dan Turki sebelum akhirnya menetap di Jerman. Di sana, ia mencoba menjalin aliansi dengan Jerman —musuh Inggris—untuk mendapatkan janji yang bertentangan dengan Janji Balfour, yakni aliansi antara Arab dan Jerman untuk membebaskan tanah mereka dan mengakhiri proyek Zionisme. Kesepakatan ini benar-benar terjalin, yang kemudian berkembang menjadi pelatihan pasukan Arab oleh Jerman dan penyediaan senjata untuk mereka.

Kekalahan Jerman dan Kekuatan Baru Amerika

Namun, situasi berubah setelah kekalahan Jerman dan Italia dalam Perang Dunia II, dengan Inggris berada di posisi pemenang, sementara kekuatan Amerika yang sedang bangkit mengakhiri perang dunia tersebut, menjadi negara yang muncul sebagai peme-

nang terbesar karena tidak terkuras seperti Inggris, Perancis, dan Rusia. Pada titik ini, Inggris meninggalkan *Buku Putih* melalui pernyataan Menteri Luar Negeri Inggris, Ernest Bevin (14 November 1945). Gelombang imigrasi Yahudi besar-besaran terjadi selama dan setelah Perang Dunia II, dengan lebih dari 90.000 orang Yahudi datang selama perang dan lebih dari 60.000 setelahnya.

Keadaan Amin al-Husayni yang Makin Sulit

Keadaan Amin al-Husayni semakin buruk, ia melarikan diri ke Prancis dan ditangkap, tetapi berhasil melarikan diri dan dibawa ke Mesir. Dari Mesir, ia berusaha memimpin fase paling kritis dalam perjuangan Palestina sebelum terjadinya nakbah dan pengumuman berdirinya Israel!

NAKBAH 1948 DAN DEKLARASI NEGARA ISRAEL

Rakyat Palestina memasuki Perang 1948 dengan menguasai 94% dari tanah Palestina dan memiliki 69% dari populasi Palestina. Namun, mereka keluar dari perang tersebut dengan Israel menguasai 78% dari tanah Palestina dan mengusir sekitar 800.000 penduduk Palestina!

Keadaan Negara-negara Arab Sebelum 1948

Negara-negara Arab berada dalam keadaan yang sangat buruk setelah Perang Dunia I, dan mereka terperangkap dalam penjajahan asing yang mendirikan pemerintahan yang loyal pada penjajah. Meskipun beberapa negara Arab diberi kemerdekaan formal, itu tidak memberi manfaat banyak karena dominasi Inggris dan Perancis tetap ada. Oleh karena itu, penting untuk memahami keadaan negara-negara di sekitar Palestina untuk memahami kisah mereka.

1. Mesir

Pada akhir Perang Dunia I, Mesir sudah berada di bawah penjajahan Inggris selama hampir empat puluh tahun. Inggris menduduki Mesir untuk mempertahankan sistem pemerintahan Dinasti

Muhammad Ali, yang membawa Mesir ke arah modernisasi dan menjadikannya "bebek yang bertelur emas" bagi bangsa asing. Ketika Perang Dunia I pecah, salah satu janji yang diberikan oleh Inggris untuk menenangkan orang Mesir dan elit mereka adalah janji untuk menarik pasukan Inggris dari Mesir. Namun, karena lambatnya Inggris dalam memenuhi janji tersebut dan ketidakmampuan para politisi, Revolusi Mesir 1919 meletus, yang hampir mengguncang keberadaan Inggris di Mesir. Inggris pun berusaha untuk meredam revolusi ini dan menciptakan kepemimpinan yang bisa mereka kontrol. Saad Zaghloul, yang dikenal sebagai salah satu sekutu setia Inggris di Mesir, berhasil menjadi pemimpin revolusi dan menariknya dari jalanan menuju meja perundingan. Perundingan tersebut menghasilkan kemerdekaan yang bersifat formal, sebuah konstitusi yang memberikan kekuasaan penting kepada raja, dan sebuah parlemen dengan kekuasaan terbatas. Mulai tahun 1923, Mesir memasuki apa yang disebut "era liberal", di mana Inggris tetap menguasai secara efektif, dan para pengikut mereka yang terpengaruh budaya Barat mengontrol media dan memimpin partai-partai politik. Mereka berjuang secara damai untuk meraih kemerdekaan, meskipun mereka gagal mencapainya dalam tiga dekade berikutnya.

Pada era ini, ide negara bangsa berkembang, yaitu nasionalisme Mesir yang sekuler. Sebagian besar politisi Mesir tidak memedulikan atau bahkan tidak peduli dengan masalah Palestina. Bahkan, di Mesir terdapat komunitas Yahudi yang berpengaruh serta media yang mendukung Zionisme (seperti *Israel*, *al-Shams*, dan *al-Ittihad al-Israeli*), serta media yang menyuarakan ide-ide Zionis meskipun tidak secara eksplisit mengidentifikasikan diri sebagai Zionis. Banyak politisi Mesir yang berusaha mengambil keuntungan dari situasi ini dengan mengumumkan dukungannya terhadap hak-hak Yahudi dan mengecam perlawanan Palestina sebagai manifestasi fanatisme agama dan ekstremisme ideologi. Oleh karena itu, masalah Palestina menjadi isu yang kontroversial di kalangan elit Mesir, yang bisa diterima atau diabaikan begitu saja.

Seringkali, pemerintahan Mesir dan elit Mesir secara terang-terangan mendukung Zionis dan memenjarakan orang Palestina

dan mereka yang simpatik terhadap Palestina dalam banyak insiden. Salah satunya adalah penahanan orang Palestina yang meneriakkan protes terhadap kunjungan Balfour ke Mesir. Selama Pemberontakan al-Buraq (1929), pemerintah Mesir yang dipimpin oleh Muhammad Mahmoud mengambil posisi yang menentang, dan surat kabar resmi *al-Siyasah* mengancam untuk mengusir orang Palestina dengan alasan bahwa mereka menyebabkan ketegangan sektarian dan memicu opini publik. Beberapa orang Palestina memang diusir, termasuk Abdul Qadir al-Husayni, sementara delegasi mahasiswa Yahudi dari Palestina diterima dengan baik. Pada tahun 1930, pemerintah yang dipimpin oleh Ismail Sidqi menutup surat kabar Palestina *al-Sbura* dan surat kabar kerajaan (*al-Saraya*) menganggap bahwa pendirian negara Yahudi di Palestina adalah solusi bagi masalah Palestina, karena mereka akan membawa keahlian dan modal (sesuai narasi Zionis sepenuhnya). Surat kabar tersebut mengklaim bahwa para ekstremis mulai meyakini solusi ini, dan bahwa orang Palestina semakin menerima keberadaan orang Yahudi setelah hidup berdampingan dengan mereka.

Pemerintah Mesir yang dipimpin oleh Ahmad Zayur mengirimkan rektor Universitas Mesir, Ahmad Lutfi al-Sayyid, sebagai wakil mereka untuk menghadiri pembukaan Universitas Ibrani, dan Taha Hussein mengirimkan telegram ucapan selamat pada kesempatan tersebut. Kemudian, Taha Hussein mengunjungi Yerusalem setelah menerima undangan dari Universitas Ibrani dan gubernur Inggris, dan ia memanipulasi hukum untuk mengirim seorang mahasiswa Mesir untuk melanjutkan studi di Universitas Ibrani. Pada waktu itu, Taha Hussein adalah salah satu tokoh yang mendorong ide nasionalisme Mesir berbasis pada konsep "Mesir sebagai tanah Firaun". Pemerintah Mesir yang dipimpin oleh Ismail Sidqi juga berpartisipasi dalam pameran Zionis di Tel Aviv (Musim Semi 1932). Khadive Abbas Hilmi II mengusulkan dan menekan penggunaan pengaruhnya pada beberapa pemimpin untuk meyakinkan masyarakat Palestina agar berdamai dengan orang-orang Yahudi, bahkan jika mereka harus meninggalkan tanah mereka dan pindah ke sebelah timur Sungai Yordan.

Pada masa pemogokan Palestina besar (1936), pemerintah Mesir yang dipimpin oleh Mustafa al-Nahas menyetujui pengiriman ratusan pekerja Mesir ke Palestina untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja yang disebabkan oleh pemogokan tersebut. Ketika ditanya oleh seorang wartawan selama kunjungannya ke Eropa pada tahun 1938 mengenai niatnya terhadap Palestina, Perdana Menteri Mesir Muhammad Mahmoud Pasha menjawab, "Saya adalah Perdana Menteri Mesir, bukan Perdana Menteri Palestina."

Di Mesir, diterbitkan buku-buku yang memuji bangsa Yahudi dan memberi harapan mereka untuk kembali ke Palestina. Bahkan ada buku yang meminta dukungan dari Raja dan pemerintah Mesir untuk mendirikan negara Yahudi dan menyelamatkan bangsa Yahudi yang malang ini. Penerbitan buku tentang Palestina yang mengungkapkan pembantaian dan kehancuran di sana merupakan tindakan yang sangat berisiko, di mana penulisnya bisa dihukum, sehingga mereka harus menerbitkannya tanpa mencantumkan nama dan mendistribusikannya secara sembunyi-sembunyi, menghindari kekuasaan yang dapat menghukum mereka. Sejak tahun 1920, di Mesir juga diterbitkan surat kabar *Israel* yang berbicara atas nama gerakan Zionis. Selain itu, mereka juga aktif dalam membeli dukungan dari jurnalis dan politisi Mesir.

Tujuan utama di sini bukan untuk menilai sikap pemerintah Mesir terhadap masalah Palestina, atau menganalisis ketidakpastian mereka yang naik turun, tetapi untuk mengatakan bahwa masalah ini bukanlah masalah yang dipandang secara tegas dan prinsipil. Posisi Mesir terhadap masalah ini bervariasi dan berubah, bahkan sikap pihak yang sama pun sering berbeda-beda tergantung pada kepentingan, perhitungan politik, dan persaingan mereka dengan pihak lain di dalam kekuasaan atau di kalangan elit.

Pada akhirnya, militer, polisi, kekuatan terkoordinasi, dan sumber daya ekonomi pada kenyataannya berada di bawah kendali Inggris. Meskipun rakyat Mesir sangat simpatik dan siap berjuang serta berkorban demi Palestina, mereka hanya bisa bergerak dalam batas yang ditentukan oleh kekuasaan Inggris.

Singkatnya, "Mesir adalah salah satu pusat utama propaganda Zionis di dunia Arab."

2. Yordania

Setelah Perang Dunia I berakhir, Syarif Hussein tidak mendapatkan apa pun dari janji-janji tentang impiannya untuk mendirikan Kekhalifahan Arab di Irak dan Syam. Akhir kisahnya yang menyedihkan adalah ia meninggal dalam pengasingan di Siprus tanpa memiliki kerajaan atau kekuasaan, setelah sebelumnya menjabat sebagai Syarif Makkah dan mengabdikan diri serta pasukannya untuk Inggris.

Putra sulungnya, Abdullah, diberikan wilayah oleh Inggris dengan menciptakan sebuah negara di padang pasir di sebelah timur Sungai Yordan, yang dinamakan dengan nama yang aneh dalam dunia kenegaraan: "Emirat Transyordania." Wilayah ini kemudian berubah menjadi "Kerajaan Hasyimiyah Yordania" pada tahun 1947. Wilayah ini tidak memiliki sumber daya, kemampuan, bahkan tidak memiliki satu kota pun yang layak disebut sebagai kota. Emirat ini jauh dari memenuhi syarat untuk disebut negara, apalagi kerajaan!

Abdullah mewarisi hubungan erat dengan Inggris dari ayahnya. Ia adalah salah satu tokoh yang paling setia dan patuh kepada Inggris, hingga hubungan tersebut digambarkan sebagai "keintiman yang unik dan tanpa tandingan." Inggris memberikan dana untuk membentuk angkatan bersenjata dan menopang kekuasaannya atas suku-suku Arab di wilayah tersebut. Angkatan bersenjatanya dipimpin oleh perwira Inggris terkenal, Glubb Pasha, yang mencoba membentuk "tentara nasional" dari putra-putra suku Arab setempat.

Namun, Abdullah tidak puas dengan wilayah yang diberikan kepadanya. Ia merasa kecewa dengan wilayah tandus tanpa potensi apa pun yang diberikan kepadanya. Irak telah diserahkan kepada adiknya, Faisal, oleh Inggris, dan wilayah Hijaz direbut oleh Ibn Saud dengan restu Inggris, sementara Prancis menguasai Suriah di utara. Dengan demikian, satu-satunya peluang bagi ambisinya adalah Palestina, sebuah wilayah tanpa pemerintahan, yang mungkin bisa dijadikan bagian dari emiratnya. Ambisinya ini semakin menguat setelah ia memperoleh kemerdekaan nominal pada tahun 1946, dengan Inggris tetap mendanai angkatan bersenjatanya, karena sumber daya lokal tidak mampu menopang pemerintahan negara.

Karena kelemahannya dan keterikatannya yang erat dengan Inggris, Abdullah memilih untuk menjadi agen paling patuh kepada Inggris, berharap mereka mengizinkannya memperluas kekuasaan ke Palestina. Bahkan, korespondensi menunjukkan bahwa ketika ia mendengar Inggris berniat keluar dari Palestina, ia ketakutan akan kehilangan dukungan Inggris hingga sempat mempertimbangkan untuk meninggalkan kekuasaan, seperti yang dilakukan oleh agen kolonial mana pun saat tuannya pergi.

Selama 30 tahun pemerintahannya (1921–1951), Abdullah memberikan contoh yang luar biasa tentang pengkhianatan dan penyesuaian total terhadap rencana Inggris, bahkan dengan Zionisme. Ia menyerahkan sejumlah orang yang berlindung kepadanya kepada Inggris, dan diam terhadap pengiriman beberapa lainnya ke Prancis. Ia juga mencoba menarik perusahaan Yahudi ke Yordania Timur, selain pertemuan dan kesepakatannya dengan pemimpin Zionis seperti Ben-Gurion, Golda Meir, dan Moshe Dayan menjelang Nakba. Abdullah memainkan peran penting dalam menyerahkan Palestina kepada Zionis. Ia adalah satu-satunya pemimpin Arab yang menyetujui rencana pembagian Palestina, karena Inggris menjanjikan bahwa wilayah yang dialokasikan untuk orang Arab dalam rencana pembagian akan berada di bawah kekuasaannya.

Namun, persetujuannya terhadap pembagian Palestina tidak dinyatakan secara terbuka. Sebaliknya, ia berperan sebagai pejuang dan pembela Arabisme Palestina, yang akan memobilisasi pasukannya untuk memasuki Palestina demi tujuan tersebut. Tentara Abdullah memasuki Palestina dengan slogan ini, dengan izin Inggris sebelum mereka mundur. Namun, tujuan sebenarnya bukan untuk membela Palestina, melainkan untuk mencaplok Tepi Barat ke kerajaannya. Dengan cara ini, rencana pembagian Palestina dijalankan secara praktis, tetapi hanya untuk mendirikan negara Zionis tanpa negara Palestina di sisinya.

3. Suriah

Inggris menempatkan Faisal bin Hussein sebagai penguasa di Damaskus, tetapi pengingkaran Inggris terhadap janjinya kepada Prancis dalam Perjanjian Sykes-Picot membuat Prancis menyerbu

Suriah dan mengusir Faisal. Inggris kemudian menjadikan Faisal raja di Irak. Suriah pun jatuh di bawah pendudukan Prancis sejak tahun 1920 hingga meraih kemerdekaan pada tahun 1946. Namun, pemerintahannya menikmati tingkat otonomi tertentu di bawah dominasi Prancis sejak 1936, mirip dengan status Mesir setelah 1922. Ketika Perang Dunia II terjadi, kekuasaan kolonial Prancis sebagai penjajah lama mulai pudar di bawah tekanan Amerika Serikat, yang mewakili penjajahan baru.

Terdapat persaingan antara pemerintahan di Suriah dan Yordania. Raja Yordania, Abdullah, bercita-cita untuk menggabungkan Suriah ke dalam wilayahnya, mengejar impian ayahnya—atau lebih tepatnya, dia mengejar impian ayahnya yang hilang—untuk mendirikan negara Arab besar yang mencakup Syam, Irak, dan Jazirah Arab. Di sisi lain, pemerintahan Suriah yang baru merdeka—meski kemerdekaan itu hanya formal dan terbatas—menolak monarki dan bercita-cita mendirikan republik sipil yang demokratis dan parlementer. Sistem pemerintahan Suriah memandang Yordania sebagai bagian yang dipisahkan dari Suriah, yang seharusnya kembali menjadi bagian darinya, terutama karena Abdullah dikenal dengan pengkhianatannya. Bahkan jika orang-orang Suriah menerima monarki, mereka tidak akan menerima seorang raja yang terkenal sebagai pengkhianat.

Ketika situasi di Palestina mulai memburuk dan perkembangan menuju pengiriman pasukan ke Palestina terjadi, Raja Abdullah dari Yordania khawatir bahwa pasukan Saudi dan Suriah dikirim untuk merebut Yordania. Oleh karena itu, dia segera meminta bantuan Irak yang dipimpin oleh kerabatnya untuk mengirim pasukan guna menghadapi konspirasi ini. Saat itu, negara-negara Arab terbagi menjadi dua kubu: Mesir, Saudi, dan Suriah di satu sisi, serta Irak dan Yordania di sisi lain. Di atas semua pihak tersebut adalah kendali Inggris, kecuali Suriah, yang sistem pemerintahannya adalah yang paling kurang buruk meskipun tetap khawatir akan kemungkinan pendudukan Inggris jika mereka melanggar kebijakan Inggris.

Keadaan negara-negara sekitar Palestina ini menunjukkan dengan jelas bagaimana mereka secara efektif mendukung keberadaan Zionis, melemahkan perlawanan Palestina, dan menghalangi mereka

dari mendirikan negara sendiri. Bahkan, dapat dikatakan bahwa negara Zionis tidak akan berdiri dan stabil tanpa peran pemerintahan negara-negara Arab pada waktu itu. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana negara-negara ini bertindak untuk memperkokoh negara Zionis dalam Perang 1948.

Di luar negara-negara 'cincin' (lingkaran, yang berbatasan langsung dengan pendudukan Israel) ini, keadaan di negara-negara Arab lainnya tidak lebih baik.

Di Irak, cabang dinasti Hasyimiyah lainnya berkuasa dengan Faisal bin Hussein di bawah dominasi Inggris, setelah diberi kemerdekaan semu sebagai hasil Revolusi 1920. Inggris membawa Faisal, yang diusir oleh Prancis dari Suriah setelah pemberontakan itu, dalam situasi yang serupa dengan apa yang terjadi di Mesir pada Revolusi 1919. Pemerintahan Hasyimiyah di Irak menghadapi beberapa upaya pembebasan, seperti kudeta Rashid Ali al-Kilani pada tahun 1941, yang dihancurkan oleh Inggris. Namun, pada akhirnya terjadi kudeta militer pada tahun 1958 yang mengakhiri pemerintahan monarki ini dan mendirikan republik militer di Irak. Bagaimana mungkin mereka—bahkan jika diasumsikan mereka ingin melakukan sesuatu untuk Palestina—dapat bertindak? Bukankah Raja Faisal sendiri adalah pihak yang terlibat dalam perjanjian dengan Chaim Weizmann untuk memberikan negara kepada Yahudi dalam negara Arab besar yang dijanjikan oleh Inggris kepada Syarif Hussein, yang kemudian dikhianati oleh Inggris?

Di Arab Saudi, Abdul Aziz Al Saud berkuasa dengan hubungan yang tidak kalah erat dan kuat dengan Inggris dibandingkan dinasti Hasyimiyah. Bahkan, Inggris yang menentukan batas wilayah kerajaannya dan membantu menumpas pemberontakan Ikhwan yang hampir memisahkan diri darinya. Meski mungkin dia memiliki niat untuk membantu Palestina, dia tidak memiliki kemampuan untuk itu, mengingat dia memerintah wilayah yang luas namun berpenduduk sedikit dan tanpa sumber daya (sebelum penemuan minyak, yang kemudian dieksploitasi oleh perusahaan Inggris dan Amerika).

Di luar lingkaran ini, negara-negara Teluk kecil dan wilayah Maghrib juga berada di bawah penjajahan asing. Meski penduduknya merasakan simpati dan dukungan besar untuk Palestina, mereka

bahkan tidak memiliki cukup kekuatan untuk mencapai kemerdekaan mereka sendiri, apalagi melawan konspirasi atas Palestina.

Dalam semua negara ini, pemerintahannya paling baik dapat digambarkan sebagai lemah dan tidak berdaya. Pada kenyataannya, mereka adalah pengikut penjajah, hanya berbeda dalam tingkat ketundukan dan loyalitas kepada penjajah tersebut.

Keputusan Pembagian Palestina

Inggris keluar dari Perang Dunia II dalam kondisi yang lemah, sementara gerakan Zionis dengan cepat mengalihkan aktivitasnya ke kekuatan baru yang sedang naik daun: Amerika Serikat. Dengan fleksibilitas yang sama, kelompok-kelompok militan Zionis mulai melakukan perlawanan bersenjata terhadap Inggris di Palestina, mengklaim sebagai gerakan pembebasan nasional yang bertujuan mengusir penjajah Inggris dari wilayah tersebut. Strategi ini selaras dengan wacana global pada masa itu tentang hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, yang dipromosikan oleh kekuatan baru seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk mengambil alih koloni dari kekaisaran yang mulai melemah (Inggris dan Prancis).

Metode kolonialisme Amerika saat itu berbeda; mereka lebih mengandalkan pengaruh, dominasi, dan kendali tidak langsung melalui pemerintah boneka, tanpa mengirimkan pasukan militer secara langsung. Zionisme dengan lihai memanfaatkan wacana ini, menjadi alat Amerika untuk mendorong Inggris keluar dari Palestina. Zionisme membungkus dirinya dalam narasi perjuangan pembebasan nasional melawan penjajahan Inggris. Dalam konferensi gerakan Zionis di Atlanta, Amerika Serikat, pada tahun 1944, mereka menuntut agar Inggris meninggalkan Palestina dan meminta perlindungan internasional bagi orang-orang Yahudi.

Kelompok-kelompok Zionis kemudian melancarkan perang gerilya melawan tentara Inggris, melakukan berbagai aksi pengeboman, pembunuhan, dan penculikan yang signifikan. Antara tahun 1946 dan 1947, setidaknya 169 tentara Inggris tewas dalam serangan-serangan ini. Pada akhir periode mandat Inggris, kelompok-kelompok Zionis telah melakukan lebih dari 500 serangan terhadap Inggris.

Ironisnya, Winston Churchill, yang dulu melatih milisi Yahudi di masa lalu, kini mengungkapkan kepahitannya di PBB, mengeluarkan peringatan-peringatan yang semua orang tahu tidak efektif. Meski begitu, Inggris nyaris tidak memberikan respons signifikan terhadap serangan Zionis, karena gerakan Zionis kini berada di bawah perlindungan Amerika Serikat. Selain itu, banyak anggota polisi dan tentara Inggris di Palestina yang berasal dari komunitas Yahudi dan Zionis itu sendiri.

Sementara itu, Inggris menangkap warga Palestina hanya karena memiliki senjata. Pada paruh pertama tahun 1946 saja, jumlah warga Palestina yang ditahan mencapai 300 orang.

Dari sisi politik internasional, gerakan Zionis mendukung kampanye pemilihan presiden Amerika Harry Truman, yang memiliki kecenderungan pro-Zionis berdasarkan keyakinan agamanya. Sebagai balasan setelah kemenangannya, Truman menyetujui migrasi 100.000 orang Yahudi AS ke Palestina. Selain itu, Zionis di Amerika Serikat mengumpulkan dana dari komunitas Yahudi untuk mendirikan industri militer di Israel, memungkinkan kelompok militan seperti Haganah memproduksi sebagian senjata mereka sendiri, yang memperkuat posisi mereka bahkan terhadap Inggris.

Dengan demikian, situasi di Palestina dapat diringkas sebagai berikut:

1. **Pendudukan Inggris:** Selama sekitar tiga dekade, Inggris mendominasi wilayah tersebut, menghadapi tekanan dari Amerika untuk keluar, serta perlawanan dari rakyat Palestina dan kelompok Zionis.
2. **Kehadiran Zionis:** Populasi Yahudi terus bertambah, dengan organisasi militer, institusi pendidikan, industri, media, dan kegiatan perdagangan yang mendukung perjuangan mereka untuk kemerdekaan dari Inggris. Mereka juga memiliki sekutu internasional, terutama Amerika Serikat sebagai kekuatan global yang sedang naik daun, serta dukungan dari beberapa rezim Arab di sekitar Palestina.
3. **Penduduk Palestina:** Sebagai pemilik tanah dan negara, mereka mengalami kelelahan dan pelemahan yang berat selama 30 tahun terakhir. Mereka menuntut kemerdekaan dari dua penjajahan:

Inggris dan Zionis, sekaligus. Namun, mereka kekurangan alat kekuatan dan sekutu yang mendukung perjuangan mereka.

Setelah Perang Dunia II, negara-negara pemenang perang mendirikan sebuah badan internasional yang berfungsi sebagai "pemerintahan dunia," yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lima negara pemenang utama (Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan Cina) mendapatkan posisi istimewa sebagai anggota tetap Dewan Keamanan dengan hak veto. Artinya, jika seluruh dunia menyetujui suatu keputusan tetapi salah satu dari lima negara ini menentangnya, keputusan tersebut tidak akan diberlakukan. Dengan demikian, PBB menjadi alat bagi para pemenang untuk mendominasi dunia, sekaligus memberikan legitimasi hukum global terhadap kepentingan mereka.

Dalam forum PBB, masalah Palestina dipresentasikan sebagai konflik antara orang Arab dan Yahudi, di mana kedua belah pihak mengklaim memiliki hak historis atas tanah tersebut. Inggris menyatakan akan menarik diri dari Palestina pada Mei 1948, menyerahkan tanggung jawabnya kepada PBB. Melalui proses yang direkayasa, kekuatan internasional menghasilkan *Resolusi 181* pada tahun 1947, yang membagi wilayah Palestina: 54,7% diberikan kepada Yahudi, 44,8% kepada Arab Palestina, sementara Yerusalem dan Betlehem dijadikan zona internasional.

Keputusan ini sangat kontroversial dan tidak masuk akal karena memperbolehkan pihak luar memutuskan nasib tanah yang bukan milik mereka, bahkan tanpa konsultasi atau persetujuan rakyat Palestina. Beberapa negara yang mendukung keputusan ini, seperti Haiti, Filipina, Guatemala, dan Liberia, sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Palestina. Selain

itu, resolusi ini tidak mengindahkan fakta bahwa menurut piagam PBB sendiri, keputusan Majelis Umum tidak bersifat mengikat.

Proporsi pembagian wilayah juga sangat tidak adil. Setelah bertahun-tahun imigrasi Yahudi dan akuisisi tanah, orang Palestina masih memiliki 90% dari tanah Palestina, termasuk 80% lahan subur. Namun, mereka hanya diberikan 44% dari wilayah tersebut dalam keputusan ini.

Jika kita menelaah kekuatan besar yang menginisiasi keputusan ini, terlihat bahwa Inggris adalah pelopor utama proyek tersebut, sementara Amerika Serikat mengambil alih sebagai "ibu pengganti." Uni Soviet, di sisi lain, mengira bahwa negara baru ini mungkin mengadopsi ideologi komunis, sehingga memungkinkan mereka mendapatkan pengaruh di kawasan tersebut dan akses ke Laut Mediterania.

Ketika resolusi pembagian ini diumumkan, sikap resmi negara-negara Arab adalah menolaknya, kecuali Raja Abdullah dari Yordania, yang menyetujui keputusan tersebut dengan harapan memperluas kerajaannya ke barat, mencakup wilayah Palestina yang diberikan kepada Arab dalam pembagian tersebut. Sikap ini juga sejalan dengan kepentingan Inggris. Selanjutnya, Raja Abdullah ikut serta dalam pengaturan dan pelaksanaan pembagian ini. Baginya, mengambil alih wilayah Palestina yang tersisa dianggap sebagai langkah terbaik untuk Inggris dan Zionis, mengingat dia adalah salah satu sekutu terdekat dan paling mudah bekerja sama dengan mereka. Oleh karena itu, rakyat Palestina menolak penyatuan ini, yang mereka anggap hanya sebagai peralihan dari pendudukan Inggris langsung ke pendudukan Inggris tidak langsung.

Namun, penolakan resmi dari negara-negara Arab terhadap pembagian ini hanya bersifat retorik. Beberapa pemimpin mungkin tulus, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan penolakan itu dalam tindakan nyata. Pemerintah Arab pada masa itu berada di bawah pengaruh Inggris, dengan kedaulatan yang hanya bersifat formal. Liga Arab, lembaga yang bertugas mengoordinasikan sikap Arab, sangat lemah dan pada dasarnya diciptakan untuk melayani kepentingan Inggris, yang juga mengendalikan kebijakannya.

Di sisi lain, kekuatan militer Arab lemah, baik dalam jumlah maupun persenjataan, sehingga tidak mampu menghadapi pasukan Inggris yang masih menguasai Palestina. Mereka juga kekurangan informasi strategis tentang wilayah Palestina dan kekuatan Zionis, serta tidak memiliki komando yang terpadu.

Meskipun beberapa tokoh di Liga Arab memiliki pandangan Islamis, nasionalis, atau Arabisme, tindakan akhir mereka justru membantu, memfasilitasi, dan bahkan memperkuat keberadaan negara Zionis. Liga Arab mengikuti kebijakan Inggris yang melarang pasukan Arab memasuki Palestina sebelum tanggal 15 Mei 1948, yaitu hari yang dijadwalkan sebagai penarikan resmi pasukan Inggris dari wilayah tersebut.

Warisan Palestina dari Inggris kepada Zionis

Seiring dengan proses transisi kekuasaan di Palestina, kaum Zionis mulai "mewarisi" senjata Inggris melalui pembelian atau dukungan langsung. Mereka berhasil memperoleh 24 pesawat dengan harga lima juta poundsterling, selain tank, kendaraan lapis baja, roket, dan amunisi lainnya. Pada awal tahun 1948, badan Yahudi telah mengendalikan Palestina secara administratif dan militer. Mereka memiliki pasukan tempur, termasuk *Haganah* (35.000 orang), 10.000 pasukan khusus, dan kelompok ekstremis lainnya seperti *Irgun* dan *Stern*.

Sebaliknya, masyarakat Palestina tidak memiliki sumber daya serupa. Setelah terkuras dalam Revolusi Besar (1936–1939), mereka dilarang memiliki senjata, tidak memiliki pelatihan militer, dan tidak didukung oleh kekuatan politik maupun militer dari negara-negara tetangga. Satu-satunya kekuatan yang mereka miliki adalah keberanian. Bahkan mereka yang bergabung dengan organisasi jihad hanya dapat berlatih melalui olahraga dan teori tanpa akses ke senjata.

Faktor tambahan yang dimiliki Palestina adalah dukungan sukarela dari Arab dan Muslim di luar Palestina. Namun, faktor ini pun segera dirampas oleh kebijakan internasional dan negara-negara Arab yang akan kita lihat selanjutnya.

Dampak Keputusan Pembagian Palestina

Keputusan pembagian Palestina yang diklaim bertujuan menciptakan perdamaian justru memicu perang. Kaum Yahudi berusaha merebut tanah yang telah dialokasikan untuk mereka dengan mengusir penduduk Arab, sementara bangsa Arab melawan untuk mencegah perampasan tersebut.

Inggris memainkan peran terakhirnya dalam mendukung negara Zionis dengan menyatakan akan menarik diri pada Mei 1948 dan mengancam akan menghukum serangan terhadap pasukan Inggris hingga saat itu. Namun, secara diam-diam, Inggris menyerahkan kota-kota penting kepada Zionis sebelum jadwal yang ditentukan. Setiap pagi, warga Palestina dan bangsa Arab terbangun dengan kenyataan bahwa kota mereka telah ditinggalkan Inggris dan dikuasai Zionis. Hal ini memberi posisi strategis yang lebih kuat bagi Yahudi untuk melanjutkan perang perebutan wilayah dan pengusiran penduduk.

Rencana Inggris Mundur dan Penyerahan Palestina kepada Yahudi

Pada 10 Maret 1948, dua bulan sebelum mandat Inggris berakhir, pimpinan *Haganah* menyelesaikan rencana rinci untuk pengusiran desa-desa Palestina. Strateginya lebih bergantung pada teror daripada kekuatan militer. Mereka merencanakan pembantaian besar untuk menciptakan ketakutan yang akan memaksa penduduk melarikan diri sebelum sempat melawan. Jika ada yang tertangkap, sebagian dari mereka dibunuh untuk memperbesar rasa takut. Desa-desa dikepung dari tiga sisi dan dibombardir, memaksa penduduk melarikan diri dari sisi keempat.

Pengusiran dimulai dari wilayah pesisir dan bergerak ke timur untuk memastikan akses negara Zionis ke laut. Korban pertama adalah penduduk desa dan kota di utara dan barat Palestina. Diperkirakan sekitar 350.000 orang Palestina diusir dalam operasi ini.

Kekejaman Zionis

Metode kekerasan mencakup serangan militer terhadap desa-desa, pengeboman pasar, pembakaran penduduk hidup-hidup,

hingga kontaminasi sumber air dengan bakteri. Unit *Mistaravim* yang menyamar juga melakukan operasi rahasia untuk menyerang warga Palestina.

Salah satu peristiwa paling mengerikan adalah pembantaian Deir Yassin, yang diakui Menachem Begin sebagai faktor utama dalam menyebarkan ketakutan di wilayah lain, sehingga mempermudah jatuhnya kota Haifa. Ia menggambarkan keberhasilan ini seperti "pisau yang meluncur dalam mentega."

Jatuhnya Haifa dan Jaffa

Haifa jatuh pada April 1948, sebulan sebelum penarikan resmi Inggris dari Palestina. Meski Inggris awalnya menyatakan akan meninggalkan Haifa pada Agustus 1948, mereka justru menarik diri lebih awal dalam koordinasi dengan Zionis. Haifa memiliki nilai strategis sebagai kota pelabuhan utama dengan kilang minyaknya. Dari populasi Arab sekitar 70.000 orang, hanya sekitar 3.000–4.000 orang yang tersisa setelah pembantaian dan pengusiran.

Beberapa hari kemudian, Jaffa menyusul. Serangan dimulai pada 27 April 1948, dengan artileri ditempatkan di daerah yang telah dikuasai. Setelah menghadapi serangan bertubi-tubi, sebagian besar penduduk melarikan diri ke Lebanon. Dari populasi Arab sebanyak 70.000 orang, hanya sekitar 4.000–5.000 yang tetap bertahan.

Jatuhnya Kota-Kota Palestina dan Deklarasi Israel

Dengan cara yang serupa, kota-kota lain seperti Safed, Beisan, dan wilayah Galilea jatuh ke tangan Zionis. Proses ini didukung oleh penarikan pasukan Inggris yang dilakukan lebih awal dari jadwal resmi, dengan koordinasi langsung bersama kelompok Zionis. Inggris juga melarang masuknya pasukan Arab ke Palestina sebelum 14 Mei 1948. Sementara itu, Pasukan Penyelamat (Tentara Relawan Arab) yang terdiri dari sukarelawan Arab, hanya dapat bertindak sesuai kapasitas terbatasnya, sebagaimana akan dibahas kemudian. Dengan demikian, konspirasi terhadap rakyat Palestina yang tidak bersenjata dan kelelahan menjadi sempurna. Mereka tidak memiliki sarana atau kesempatan sedikit pun untuk membela diri melawan puluhan ribu milisi Zionis yang terlatih dan dipersenjatai lengkap.

Sejumlah saksi mata berpendapat bahwa pengosongan wilayah dengan populasi Arab yang besar adalah hasil konspirasi Inggris. Sebab, Israel tidak akan mampu bertahan jika populasi Arab di kota-kota seperti Haifa dan Jaffa tetap ada. Inggris juga mempercepat pengkhianatan ini karena khawatir Amerika Serikat mulai mundur dari dukungan terhadap rencana pembagian Palestina akibat meningkatnya perlawanan Palestina. Tindakan Inggris tersebut merupakan langkah preventif untuk mencegah perubahan sikap Amerika yang dapat memengaruhi pendirian Israel.

Dalam setiap kisah jatuhnya kota atau terjadinya pembantaian di desa-desa, gelombang pengungsi terus mengalir. Mereka datang dari kota-kota yang telah jatuh, desa-desa yang dihancurkan, atau orang-orang yang melarikan diri setelah melihat pembantaian, khawatir mengalami nasib serupa. Tanpa perlindungan atau bantuan, mereka mengungsi ke Tepi Barat, Gaza, Lebanon, atau Suriah sesuai dengan apa yang memungkinkan. Banyak di antara mereka yang meninggal dalam perjalanan akibat kelemahan fisik, penyakit, kelaparan, cuaca dingin, atau bahkan gigitan kalajengking dan ular. Mereka yang beruntung mungkin menemukan perlindungan di gua, bawah batu, atau celah-celah kecil, tetapi sebagian besar tidak memiliki tempat berlindung.

Pada 14 Mei 1948, pemerintah Inggris secara resmi meninggalkan Palestina. David Ben-Gurion memasuki wilayah itu dan mendeklarasikan "kemerdekaan" negara Israel. Di belakangnya berdiri potret besar Theodor Herzl, pemikir Zionis yang memulai visi ini. Meskipun Herzl meninggal delapan tahun setelah gagasannya, cita-citanya terwujud 40 tahun kemudian.

Dengan deklarasi ini, janji lama yang disebutkan dalam Al-Qur'an pun terwujud, yaitu kembalinya Bani Israel ke tanah suci:

"Dan Kami berkata kepada Bani Israel setelah itu, 'Tinggallah kalian di negeri ini. Apabila datang janji yang akhir, Kami akan mendatangkan kalian dalam keadaan bersatu.'" (Al-Isra: 104).

Era Baru Dimulai: Nakba 1948

Meskipun Inggris telah memberikan banyak dukungan kepada Zionis selama tiga dekade, perampasan tanah Palestina oleh mereka

bukanlah tugas yang mudah. Perlawanan rakyat Palestina tetap sengit meskipun mereka menghadapi kondisi yang sangat berat, sumber daya yang minim, serta pengkhianatan internasional dan regional. Jika hanya mengandalkan hitungan logis, seharusnya pendirian negara Zionis dan Israel dapat diselesaikan dalam waktu singkat, bukan membutuhkan waktu hingga 30 tahun.

Untuk menyederhanakan gambaran periode ini yang penuh dengan konflik dan detail kompleks, perlawanan terhadap Zionis dapat dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan:

1. Perlawanan Palestina: Dipimpin oleh gerakan "Jihad Suci" di bawah komando Abdul Qadir al-Husseini.
2. Tentara Penyelamat: Dibentuk oleh Liga Arab untuk mengorganisasi sukarelawan jihad di Palestina.
3. Tentara Arab Resmi: Masuk ke Palestina setelah Inggris meninggalkan mandatnya dan terlibat dalam Perang 1948.

Ketiga tingkatan ini, baik secara individu maupun gabungan, memiliki kelemahan signifikan: kekurangan senjata, amunisi, pelatihan militer, dana, jalur logistik, serta dukungan politik dibandingkan milisi Zionis. Bahkan tentara Arab resmi memiliki jumlah pasukan dan perlengkapan yang minim, tanpa pengalaman militer, dan berada di bawah kendali rezim yang secara praktis tunduk pada penjajahan asing.

Rakyat Palestina sebenarnya ingin mengambil tanggung jawab penuh dalam membela tanah air mereka, karena mereka lebih mengenal wilayah dan musuh mereka. Yang mereka butuhkan hanyalah dukungan dana dan senjata dari negara-negara Arab. Pendekatan ini juga memiliki keuntungan politik, karena dapat meruntuhkan propaganda Zionis yang menggambarkan Israel sebagai negara kecil yang dikepung oleh negara-negara Arab besar. Propaganda ini tidak sesuai kenyataan, karena faktanya milisi Zionis memiliki jumlah pasukan dan persenjataan yang lebih besar daripada gabungan tentara Arab.

Namun, Liga Arab dan negara-negara resmi Arab justru mengabaikan peran utama rakyat Palestina, mengambil alih kendali perjuangan, dan malah memperburuk situasi. Sejarah menunjukkan

bahwa kebijakan dan intervensi militer Arab selama periode ini justru berperan besar dalam memperkuat dan melegitimasi keberadaan Israel.

Ketiadaan Kepemimpinan Politik Palestina dan Peran Abdul Qadir al-Husseini

Masyarakat Palestina pada masa itu tidak memiliki kepemimpinan politik di tanah airnya. Sebagian pihak berpendapat bahwa salah satu kesalahan dalam periode ini adalah absennya Haji Amin al-Husseini, satu-satunya pemimpin politik yang diakui, dari tanah Palestina. Mereka berpendapat bahwa al-Husseini seharusnya berada di Palestina pada masa krisis tersebut. Meskipun Raja Farouk melarangnya kembali, al-Husseini seharusnya berusaha mengatasi larangan itu dengan segala cara yang memungkinkan.

1. Gerakan Jihad Suci

Usaha Abdul Qadir al-Husseini untuk mengorganisasi perlawanan rakyat melalui pembentukan gerakan bersenjata adalah salah satu upaya paling berhasil dalam sejarah perlawanan Palestina sejak Revolusi Besar Palestina. Al-Husseini, yang merupakan tokoh penting dalam revolusi itu, sempat terluka, ditangkap, tetapi kemudian berhasil melarikan diri dan berpindah-pindah di antara negara-negara Arab dan Eropa.

Pada musim panas tahun 1946, Abdul Qadir al-Husseini bertemu dengan sepupunya, Haji Amin al-Husseini, di Kairo. Sebagai pemimpin politik Palestina, Haji Amin telah melarikan diri dari Palestina, menjalin hubungan dengan negara-negara Blok Poros selama Perang Dunia II untuk menentang rencana Sekutu mendirikan negara Zionis. Namun, kekalahan Blok Poros dalam perang tersebut menghancurkan harapannya, dan dia terus menjadi buronan hingga akhirnya menetap di Kairo. Di sana, Dewan Tinggi Arab bersidang dan menyepakati pembentukan gerakan bersenjata yang dinamakan "Jihad Suci," dipimpin oleh Abdul Qadir al-Husseini.

Al-Husseini berkeliling desa-desa Palestina, menggunakan reputasinya yang baik untuk merekrut banyak pemuda, baik untuk operasi militer maupun perlindungan dan pengelolaan desa. Gerakan

"Jihad Suci" dibagi menjadi beberapa unit, seperti:

1. Unit Pemboikotan: Menindak orang-orang yang bekerja sama dengan Zionis dengan memberikan peringatan. Jika peringatan diabaikan, gudang, rumah, atau barang dagangan mereka dibakar.
2. Unit Penentang Penjualan Tanah: Memberi peringatan kepada para makelar tanah. Jika diabaikan, mereka akan dibunuh.
3. Unit Militer: Membagi tanggung jawab sesuai wilayah.
4. Unit Pendukung: Mengurusi logistik dan keamanan.
5. Unit Intelijen: Mengumpulkan informasi.

Markas besar "Jihad Suci" berada di Yerusalem, yang merupakan pusat konflik di Palestina. Di Yerusalem dan sekitarnya, terjadi pertempuran-pertempuran penting yang melibatkan pasukan "Jihad Suci." Berbeda dengan Pasukan Penyelamat dan tentara Arab resmi, "Jihad Suci" memiliki keunggulan berupa kepemimpinan yang tulus dan kompeten, pasukan lokal yang lebih mengenal wilayah dan musuh, serta semangat juang yang tinggi.

Meskipun jumlah pasukan dan persenjataan mereka jauh lebih sedikit dibandingkan musuh, "Jihad Suci" berhasil meraih kemenangan dalam beberapa pertempuran penting. Namun, pada akhirnya mereka tidak mampu menghalangi berdirinya negara Zionis yang didukung kekuatan internasional. Hal ini terjadi karena kurangnya dukungan logistik, amunisi, serta kehilangan pemimpin mereka yang gugur dalam pertempuran.

Konspirasi Arab terhadap Jihad Suci

Liga Arab sejak awal berusaha menghambat perjuangan Abdul Qadir al-Husseini, dengan mencoba mengendalikan dan memaksanya tunduk pada otoritas mereka. Meskipun demikian, al-Husseini berhasil memisahkan diri dan membentuk "Jihad Suci." Namun, karena kebutuhan akan dana dan amunisi, dia tetap harus berhubungan dengan Liga Arab. Dukungan yang diberikan kepada al-Husseini disertai syarat-syarat yang membatasi, seperti larangan mengumpulkan dana dari desa-desa dan pembatasan operasi hanya di wilayah Yerusalem.

Pasukan Penyelamat juga tidak mendukung Abdul Qadir al-Husseini, bahkan menolak memberikan senjata atau amunisi yang dia butuhkan. Pada kunjungan terakhirnya ke markas Pasukan Penyelamat di Damaskus, al-Husseini meminta bantuan senjata, tetapi ditolak dan diperlakukan dengan kasar. Dalam keadaan itu, dia mendengar bahwa Desa Al-Qastal, lokasi strategis yang menghubungkan pelabuhan Jaffa dan Yerusalem, telah jatuh ke tangan musuh. Dia segera kembali untuk merebut desa tersebut dan berhasil melakukannya, yang disebut sebagai "keajaiban militer." Namun, dia gugur sebagai syahid dalam pertempuran ini.

Sebelum gugur, Abdul Qadir meninggalkan pesan terakhirnya kepada Sekretaris Jenderal Liga Arab:

> *"Tuan Sekjen, Saya memikulkan tanggung jawab kepada Anda semua karena telah meninggalkan tentara saya dalam puncak kemenangan mereka tanpa bantuan atau senjata."*

Sehari setelah kematian Abdul Qadir al-Husseini, ketika jenazahnya sedang diarak, terjadi tragedi pembantaian Deir Yassin pada 9 April 1948.

2. Pasukan Penyelamat

Gelombang semangat rakyat Arab dan Muslim untuk berjihad di Palestina begitu besar hingga tidak dapat dihambat oleh rezim-rezim Arab. Oleh karena itu, rezim-rezim ini berusaha meredam antusiasme rakyat dengan membentuk "Pasukan Penyelamat," sebuah wadah resmi bagi para relawan yang ingin terlibat dalam perjuangan. Namun, pembentukan pasukan ini menjadi babak baru dari konspirasi terhadap rakyat Arab.

Babak pertama dari konspirasi ini adalah pelarangan segala bentuk relawan kecuali di bawah komando Pasukan Penyelamat. Selain itu, larangan membentuk kelompok atau batalion independen di bawah kendali pasukan ini mengurangi efektivitas organisasi-organisasi relawan yang telah terbentuk dan mengganggu koordinasi mereka. Mereka yang menolak tunduk dikenai sanksi berupa pemutusan akses terhadap senjata dan amunisi, sehingga mereka tidak mampu menyerap relawan baru, terutama dalam situasi kekurangan persenjataan.

Markas Pasukan Penyelamat berada di Damaskus, dipimpin oleh tiga tokoh militer berpengalaman, yakni Ismail Safwat, Taha al-Hashimi, dan Fawzi al-Qawuqji. Meski memiliki reputasi dan sejarah panjang, ketiganya tampil dalam perang ini dengan kinerja yang buruk, bertentangan dengan reputasi mereka sebelumnya. Mereka memperlakukan situasi ini seperti operasi militer reguler, bukan perang gerilya, dan tampak seolah-olah menjadi bagian dari konspirasi Inggris terhadap Palestina.

1. Ismail Safwat adalah ahli militer asal Irak yang telah meniti karir panjang di militer. Meskipun ia ikut serta dalam Revolusi 1920, tidak ada prestasi luar biasa yang tercatat dalam riwayat hidupnya.
2. Taha al-Hashimi adalah seorang pakar militer Irak yang dikenal karena karya-karya ilmiahnya dalam teknik dan sejarah perang, terutama terkait geografi militer. Dengan pengalaman sebagai Menteri Pertahanan (1938) dan Perdana Menteri Irak (1941), ia memiliki segudang pengalaman. Namun, usianya yang mencapai 60 tahun pada 1948 tampaknya tidak mendukung fleksibilitasnya dalam perang gerilya.
3. Fawzi al-Qawuqji, yang juga mendekati usia 60 tahun, adalah veteran perang gerilya. Ia memiliki sejarah panjang dalam melawan Inggris di Basra, berperang bersama Kesultanan Utsmaniyah selama Perang Dunia I, serta melawan Prancis di Suriah, termasuk dalam Pertempuran Maysalun. Ia juga memimpin pemberontakan di Hama dan menjadi salah satu pemimpin Revolusi Besar Suriah pada 1920-an.

Namun, baik Ismail Safwat maupun Taha al-Hashimi bukanlah ahli perang gerilya dan tidak memiliki pengalaman di Palestina. Hubungan di antara ketiga pemimpin ini pun tidak harmonis, penuh dengan kecurigaan yang berdampak negatif pada hasil pertempuran.

Konflik dengan Haji Amin al-Husseini

Konflik yang lebih berbahaya adalah antara pimpinan Pasukan Penyelamat dan pemimpin Palestina, Haji Amin al-Husseini. Al-Husseini adalah musuh rezim Hashemite di Yordania dan Irak.

Di Yordania, perseteruannya dengan Raja Abdullah jelas, karena Raja Abdullah adalah agen Inggris sementara al-Husseini adalah penentang mereka. Persaingan mereka juga terkait perebutan tanah Palestina. Di Irak, konflik terjadi karena al-Husseini mendukung kudeta Rashid Ali al-Kilani yang gagal melawan rezim Hashemite yang pro-Inggris.

Kepemimpinan Pasukan Penyelamat dirancang oleh Liga Arab untuk mengecualikan al-Husseini dan kelompoknya, sebagai bagian dari kebijakan Liga yang bertujuan menghalangi rakyat Palestina membela diri. Sebaliknya, al-Husseini percaya bahwa perjuangan seharusnya difokuskan pada rakyat Palestina sendiri dengan melatih dan mempersenjatai mereka. Jika diperlukan bantuan militer, maka pasukan relawan harus berada di bawah kepemimpinan al-Husseini dan sepupunya, Abdul Qadir al-Husseini, karena rakyat Palestina lebih mengenal tanah mereka dan sangat membutuhkan senjata, uang, dan pelatihan dibandingkan jumlah pasukan.

Konflik ini menciptakan dampak yang sangat merugikan perjuangan Palestina, terutama karena situasi yang mendesak tidak memungkinkan adanya perpecahan.

Kendala Pasukan Penyelamat

Pasukan Penyelamat menerima banyak relawan, hingga rumah komandan Fawzi al-Qawuqji dikatakan selalu dipenuhi oleh mereka. Namun, senjata yang dikirimkan Liga Arab sangat tidak memadai, hanya beberapa ratus senapan untuk puluhan ribu relawan yang potensial. Liga Arab berdalih bahwa mereka telah mengambil tanggung jawab untuk membebaskan Palestina sendiri.

Pasukan ini terhambat oleh kekurangan dana, persenjataan, dan waktu, serta kurangnya wewenang yang independen. Dalam tulisan para pemimpinnya, sering kali tanggung jawab atas kegagalan ini dialihkan kepada kebijakan rezim-rezim Arab yang lamban, ragu-ragu, dan terbatas dalam memberikan dukungan. Bahkan, tujuan pembentukan Pasukan Penyelamat ini tidak jelas: apakah untuk mendukung rakyat Palestina, bertempur melawan Zionis, atau sekadar mempertahankan ketegangan hingga tentara Arab resmi tiba.

Pasukan Penyelamat dan Kesalahan Strategisnya

Pasukan Penyelamat, di bawah wewenang dan sumber daya terbatas yang diberikan kepada mereka, melakukan sejumlah kesalahan yang menjadi bahan perdebatan di kalangan saksi mata dan sejarawan. Perdebatan ini berkisar apakah kesalahan tersebut murni akibat ketidakmampuan, ataukah merupakan bagian dari konspirasi dan pengkhianatan. Berikut adalah ringkasan kesalahan-kesalahan tersebut tanpa melakukan analisis mendalam, mengingat keterbatasan ruang:

1. **Pembatasan Relawan**
   Pasukan Penyelamat hanya menerima sedikit relawan dan kemudian menutup pendaftaran dengan alasan jumlah yang diterima sudah jauh melampaui kebutuhan. Mereka berjanji akan membuka kembali pendaftaran jika diperlukan, tetapi hal ini membatasi potensi dukungan yang bisa didapatkan.
2. **Pemilihan Relawan yang Tidak Tepat**
   Relawan yang dipilih sebagian besar berasal dari kalangan yang tidak berguna, bahkan termasuk mantan kriminal dan pengangguran. Setelah tiba di wilayah perjuangan, beberapa di antaranya terlibat dalam perampokan, penjarahan, dan pelecehan, hingga bentrok bersenjata sesama mereka. Lebih parah lagi, di antara mereka ditemukan mata-mata Yahudi serta agen-agen Arab yang bekerja untuk kepentingan musuh.
3. **Pelatihan yang Tidak Sesuai**
   Pelatihan relawan dilakukan seperti pelatihan tentara reguler, bukan sebagai pasukan relawan. Pendekatan ini membuat proses pelatihan menjadi lambat dan tidak sesuai dengan dinamika medan perang yang cepat berubah.
4. **Manuver Tanpa Perencanaan**
   Pasukan Penyelamat sering mengerahkan pasukannya tanpa rencana atau organisasi yang jelas. Serangan dan penarikan pasukan dilakukan secara sembarangan, yang tidak hanya gagal mencapai kemenangan tetapi juga merugikan lebih banyak pihak. Dalam beberapa kasus, prajurit ditemukan duduk di kafe alih-alih menjaga pos-pos pertahanan.

5. **Keterbatasan Operasional**
   Operasi Pasukan Penyelamat hanya terbatas pada wilayah yang dialokasikan untuk Arab menurut keputusan pembagian wilayah. Mereka tidak bertindak di wilayah-wilayah yang terancam, seperti Jaffa dan Haifa, yang akhirnya jatuh tanpa perlawanan berarti. Bahkan, desa seperti Deir Yassin yang dekat dengan posisi mereka tidak menerima bantuan sama sekali.
6. **Kurangnya Dukungan untuk Abdul Qadir al-Husseini**
   Pasukan Penyelamat menolak bekerja sama secara efektif dengan Abdul Qadir al-Husseini, termasuk gagal memberikan senjata yang sangat dibutuhkan pasukannya di saat-saat kritis. Hal ini menyebabkan runtuhnya garis pertahanan yang dijaga oleh Pasukan Jihad Suci.
7. **Penolakan untuk Bekerja Sama dengan Kelompok Lain**
   Pasukan Penyelamat juga menolak bekerja sama dengan kelompok relawan lainnya dan menghalangi pasokan amunisi yang mereka perlukan. Selain itu, mereka menolak memberikan dana yang dapat digunakan untuk membeli senjata dari stok peninggalan tentara Inggris.
8. **Penyerahan Kota Penting**
   Kota-kota strategis seperti Jaffa, Haifa, dan bahkan Yerusalem dengan mudah diserahkan kepada musuh. Taha al-Hashimi beralasan bahwa Yerusalem bukan kota strategis dan dapat direbut kembali kapan saja. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa jatuhnya Yerusalem memiliki dampak strategis, politik, dan moral yang sangat besar.
9. **Kepatuhan Buta terhadap Kebijakan Politik**
   Pasukan Penyelamat mematuhi kebijakan umum rezim-rezim Arab, dengan perintah mundur atau maju yang datang dari ibu kota politik, bukan berdasarkan kebutuhan medan perang. Penarikan mundur sering dilakukan tanpa rencana, yang membuat kota-kota jatuh dengan mudah. Bahkan, Yahudi sering terkejut dengan kecepatan keruntuhan tersebut. Selain itu, Pasukan Penyelamat juga melakukan kesalahan besar dengan melucuti senjata penduduk desa, lalu mundur meninggalkan mereka dalam keadaan tidak berdaya menghadapi serangan

Zionis, seperti yang terjadi di desa-desa di Galilea Atas.

10. **Penerimaan Gencatan Senjata yang Merugikan**
    Pasukan Penyelamat menerima gencatan senjata di saat-saat kritis, yang dimanfaatkan oleh pihak Zionis untuk memperkuat posisinya dengan menerima pasokan senjata dan personel. Contohnya terjadi dalam Pertempuran "Mishmar HaEmek."

Kurangnya Dukungan dari Rezim Arab

Di saat-saat paling kritis, para relawan tidak mendapatkan dukungan nyata dari ibu kota politik Arab, bahkan setelah tentara Arab resmi memasuki medan perang. Para pejabat Arab tidak peduli terhadap permintaan bantuan, dan malah memerintahkan penarikan pasukan, meskipun hal ini akan menyebabkan pembantaian besar-besaran terhadap pengungsi dan penduduk lokal. Ironisnya, kota Yerusalem sendiri menjadi korban dari kebijakan semacam ini.

Hasil yang Tidak Seimbang dan Dampaknya pada Pasukan Penyelamat

Sebagai akibat dari kesalahan strategis dan operasional, pertempuran yang terjadi menjadi sangat tidak seimbang dan tidak terorganisir. Hasil akhirnya adalah kekalahan pasukan yang tidak terlatih dan tidak terorganisir ini di hadapan pasukan Yahudi yang terlatih, terorganisir, dan didukung oleh kekuatan serta kebijakan Inggris.

Hasil memalukan ini menyebabkan perubahan besar dalam pandangan publik terhadap tokoh-tokoh terkait. Jika sebelumnya mereka dikagumi secara berlebihan sebelum peristiwa Nakba, setelahnya mereka dianggap sebagai pihak yang diragukan, bahkan dituduh berkhianat. Analisis mendalam tentang perilaku mereka membutuhkan ruang dan upaya yang lebih luas.

Namun, yang tak terbantahkan adalah bahwa kepemimpinan Pasukan Penyelamat memiliki andil besar dalam hilangnya Palestina dan Yerusalem. Mereka menunjukkan sikap kasar dan arogan terhadap Abdul Qadir al-Husseini di saat-saat paling genting. Dalam pertemuan terakhirnya dengan mereka, al-Husseini yang frustrasi

karena tidak diberikan senjata, marah besar dan berkata kepada Ismail Safwat dan Taha al-Hashimi:

"Kalian adalah pengkhianat, kalian adalah penjahat, dan sejarah akan mencatat bahwa kalian telah menyebabkan hilangnya Palestina." Ia pergi dari pertemuan itu dengan keyakinan bahwa takdirnya adalah syahid, dan itulah yang terjadi.

Sheikh Mustafa al-Siba'i, pemimpin relawan Ikhwanul Muslimin dari Suriah, mencatat pengalaman pahitnya dengan Pasukan Penyelamat. Ia menyimpulkan bahwa pasukan tersebut dibentuk bukan untuk berperang, melainkan untuk menenangkan emosi masyarakat Arab yang marah. Pasukan itu tidak pernah terlibat dalam pertempuran serius di Palestina, dan para pemimpinnya tidak memahami realitas situasi. Ia juga menyebut bahwa misi sebenarnya adalah menghancurkan organisasi "Jihad Suci" yang dipimpin oleh Abdul Qadir al-Husseini.

Beberapa pengamat menambahkan bahwa Pasukan Penyelamat juga menjadi alat untuk menahan senjata, bantuan, dan donasi agar tidak sampai ke tangan penduduk Palestina. Selain itu, pasukan ini digunakan untuk menyerap tenaga dan semangat para pemuda Arab guna mengimplementasikan keputusan pembagian wilayah. Dengan kata lain, pasukan ini menjadi alat kekuatan Arab untuk menghalangi Palestina mempertahankan tanah mereka serta mencegah pembentukan kepemimpinan Palestina yang independen dan efektif.

Meskipun demikian, penduduk Palestina dan relawan berhasil mempertahankan 82% wilayah Palestina sebelum pasukan resmi Arab masuk.

3. Tentara Koalisi Arab

Inggris melarang tentara Arab memasuki Palestina sebelum tanggal resmi penarikan pasukan Inggris, yaitu 15 Mei 1948. Pasukan Arab mematuhi batas waktu tersebut, meskipun banyak kota penting telah ditinggalkan Inggris sebelumnya dan diambil alih oleh Yahudi. Dalam kondisi ini, pasukan "Jihad Suci" dan Pasukan Penyelamat menghadapi situasi yang sangat sulit akibat kolaborasi Inggris-Zionis.

Keterlambatan dan Kelemahan Tentara Arab

Namun, yang lebih mengecewakan adalah bahwa negara-negara Arab baru memutuskan secara resmi untuk mengirim pasukan pada 12 Mei 1948, hanya dua hari sebelum penarikan Inggris. Ini menunjukkan tidak adanya niat serius untuk terlibat sejak awal. Dua hari tentu saja tidak cukup untuk merencanakan dan mempersiapkan perang.

Jumlah pasukan Arab secara keseluruhan juga hanya sepertiga dari kekuatan Zionis, dan kondisi ini tidak banyak berubah sepanjang tahun tersebut. Pada Mei 1948, pasukan Zionis berjumlah 35.000, meningkat menjadi 65.000 pada September, dan 96.000 pada Desember. Sementara itu, satu-satunya tentara Arab yang mengalami peningkatan signifikan adalah tentara Mesir, dari 10.000 menjadi 45.000 pasukan.

Selain itu, perbedaan dalam hal persenjataan dan pelatihan juga sangat mencolok. Pasukan Zionis memiliki keunggulan besar dengan pelatihan, persenjataan Inggris, serta pengalaman dalam pertempuran besar seperti Perang Dunia II. Sebaliknya, tentara Arab adalah pasukan baru yang berada di bawah kendali kekuatan asing di negara-negara dengan kemerdekaan yang hanya bersifat formal.

Perbedaan signifikan lainnya adalah dalam hal intelijen. Pasukan Zionis telah hidup dan berlatih di tanah Palestina selama puluhan tahun. Mereka memiliki sistem intelijen yang sudah bekerja selama 30 tahun untuk mengumpulkan informasi tentang tanah dan penduduk, serta telah merencanakan operasi mereka secara matang. Sementara itu, tentara Arab tidak memiliki informasi dasar tentang situasi di Palestina.

Misalnya, Mahmoud al-Sobbagh, komandan relawan Ikhwanul Muslimin dari Mesir, menceritakan bahwa ketika ia meminta peta medan kepada komando tentara Mesir, mereka memberinya peta yang berusia 30 tahun. Informasi dalam peta tersebut tidak lagi relevan karena tanah Palestina telah berubah drastis dengan pembangunan jalan, koloni, dan fasilitas Yahudi. Akibatnya, para relawan terpaksa mengumpulkan informasi dari nol.

Kurangnya Dukungan dan Koordinasi dalam Tentara Arab

Selain itu, tentara Arab tidak memiliki dukungan politik, finansial, atau militer yang mereka butuhkan, sementara pasukan Zionis mendapat dukungan dari kekuatan besar: secara politik di organisasi internasional, di dalam istana-istana pemerintah Arab, secara finansial melalui jalur laut yang memungkinkan aliran modal Yahudi, dan militer jika diperlukan.

Akhirnya, tentara Arab ini kehilangan rasa percaya diri, koordinasi, dan rasa kebersamaan dalam perjuangan, hingga seorang sejarawan Inggris menyatakan:

> *"Seandainya intervensi tentara Arab dilakukan dengan sedikit koordinasi, perencanaan yang matang, dan rasa percaya diri serta kesadaran akan tujuan bersama, mungkin pasukan Arab bisa meraih kemenangan; namun kenyataannya, orang Arab masuk ke Palestina seakan mereka lebih banyak bertarung satu sama lain daripada melawan negara Yahudi."*

Perpecahan ini mengarah pada situasi yang sangat aneh dan sulit dipercaya, seperti tentara Irak yang bertempur di daerah pegunungan dengan pelindung tubuh yang tidak berguna di medan tersebut, sementara tentara Mesir bertempur di daerah terbuka tanpa pelindung tubuh sama sekali! Tentara Irak memiliki meriam 25 pon tanpa amunisi, sementara tentara Mesir memiliki amunisi untuk meriam tersebut tetapi tidak ada meriamnya. Bahkan, pasukan Irak datang ke Yordania tanpa amunisi, dengan harapan ada persediaan amunisi di Yordania, namun mereka terkejut ketika diberitahu bahwa tidak ada amunisi yang tersedia.

Perbedaan besar dalam berbagai faktor kekuatan seperti ini dapat membalikkan keseimbangan dalam pertempuran manapun. Jika sebuah pasukan yang penuh semangat, kesetiaan, dan keberanian ditempatkan dalam kondisi seperti ini, maka sudah dipastikan mereka akan kalah, bahkan dengan alasan yang tak bisa dibenarkan. Lantas, bagaimana kita bisa membayangkan situasi ini, mengingat tentara-tentara ini sendiri juga dipenuhi dengan bencana dan masalah internal yang mengarah pada kekalahan mereka?!

Perang 1948 adalah salah satu perang tragis yang penuh ke-

anehan, yang dapat digambarkan dengan pepatah "sudah jatuh tertimpa tangga," karena di samping kondisi yang sudah disebutkan, ada pula situasi-situasi lain yang bahkan lebih ironis dan fatal, antara lain:

1. **Pemimpin Tentara Arab yang Meragukan**
   Tentara Arab berada di bawah komando tertinggi yang dipimpin oleh tentara Yordania! Padahal Raja Yordania sudah menyetujui rencana pembagian wilayah (pembagian Palestina), bagaimana mungkin dia yang setuju dengan pembagian ini memimpin perang melawan keputusan yang dia setujui, dengan tujuan menggabungkan wilayah yang dibagi untuk orang Arab ke dalam kerajaannya?!
2. **Kepemimpinan Tentara Yordania oleh Inggris**
   Tentara Yordania dipimpin oleh perwira Inggris, termasuk Jenderal Glubb Pasha yang merupakan komandan tentara Yordania. Dengan kata lain, kepemimpinan tentara Arab yang masuk ke Palestina untuk membebaskannya dari Zionis justru berada di bawah perwira Inggris yang memiliki hubungan erat dengan Zionis!
3. **Persenjataan dan Peralatan Inggris**
   Tentara Arab, terutama dari Mesir, Irak, dan Yordania, sebagian besar dilengkapi dengan senjata dan amunisi buatan Inggris, karena Inggris yang membentuk pasukan-pasukan ini selama masa penjajahan. Persenjataan yang dimiliki pasukan Arab hanya sampai kepada mereka melalui persetujuan Inggris, yang memastikan bahwa senjata dan amunisi tersebut tidak akan menjadi ancaman yang nyata bagi Zionis.
4. **Kepatuhan pada Keputusan Politik dari Penguasa Kolonial**
   Tentara Arab mengikuti keputusan-keputusan politik yang diberikan oleh para politisi, yang sebagian besar adalah bawahannya Inggris. Mereka maju ketika diperintahkan untuk maju, mundur ketika diperintahkan untuk mundur, tanpa ada perencanaan strategis di lapangan, dan mundur hanya berdasarkan perintah, bahkan ketika situasi di lapangan membutuhkan perlawanan lebih keras. Ketika keadaan menguntungkan mereka, seringkali Dewan Keamanan PBB ikut campur, memaksa gen-

catan senjata, yang diikuti oleh pemerintah Arab dan tentara mereka, sementara pasukan Zionis menggunakan waktu itu untuk memperkuat posisi mereka, dan kembali menyerang setelah jeda gencatan senjata.

5. **Pendekatan yang Mengabaikan Rakyat Palestina**
   Banyak pasukan ini yang justru menganggap penduduk Palestina sebagai ancaman, bukan sekadar pendukung perjuangan. Mereka seringkali mengumpulkan senjata dari desa-desa dengan alasan untuk "melindungi" desa tersebut, padahal pada kenyataannya, setelah tentara Arab mundur dan kalah dari pasukan Zionis, desa-desa tersebut menjadi tidak berdaya, dan penduduknya terpaksa mengungsi untuk menghindari pembantaian oleh Zionis.
6. **Keengganan untuk Tidak Melibatkan Tentara Resmi**
   Seperti yang disebutkan sebelumnya, pasukan perlawanan Palestina lebih memilih agar tentara resmi Arab tidak ikut campur dalam konflik, dan agar negara-negara Arab hanya menyediakan dana dan senjata kepada rakyat Palestina yang lebih memahami tanah mereka. Selain itu, keterlibatan tentara Arab dalam konflik ini, secara teori, bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap keputusan internasional, karena keputusan PBB sebenarnya hanya "huruf di atas kertas," yang jika menguntungkan negara-negara besar bisa menjadi keputusan yang mengikat.

Dengan segala perbedaan ini, bagaimana mungkin kita bisa membayangkan bagaimana sebuah perang dapat berlangsung antara dua pihak yang kondisinya seperti ini?

Pengkhianatan dan Keadaan Tentara Arab dalam Perang 1948

Raja Abdullah dari Yordania dikenal sebagai "sekutu Zionis", dan David Ben-Gurion menyebutnya sebagai "penguasa bijaksana". Pertemuan-pertemuan rahasia antara Raja Abdullah bin Hussein, Raja Yordania, dan para pemimpin Zionis yang beragam, di mana Raja Abdullah berjanji untuk tidak memerangi mereka, dan janji tersebut dianggap sebagai janji dari seorang raja Badui Hashemi, yang tidak

bisa dilanggar. Selain itu, partisipasi Yordania dalam Perang 1948 direncanakan dalam sebuah pertemuan rahasia antara Perdana Menteri Yordania, Tawfiq Abu al-Huda, Komandan Tentara Yordania (Inggris), Glubb Pasha, dan Menteri Luar Negeri Inggris, Bevin, di London pada 17 Februari 1948. Ambisi Abdullah tidak hanya untuk menguasai bagian yang diputuskan untuk orang Arab di Palestina, tetapi pengkhianatannya mencapai titik di mana dia bekerja sama dengan orang Kristen Lebanon untuk mendirikan negara Kristen di Lebanon, sebagai imbalan untuk menggabungkan bagian-bagian Palestina yang mayoritas Muslim ke dalam kerajaannya!

Rencana untuk tentara Arab disusun di Amman, namun kemudian dibatalkan, disusun ulang, lalu dibatalkan lagi untuk kembali ke rencana semula. Namun, ini terjadi setelah tentara bergerak sesuai dengan perubahan tersebut, yang menyebabkan terpecahnya upaya dan menimbulkan kecemasan, serta menjadikan tentara-tentara ini, yang bergerak terpisah tanpa rencana yang terkoordinasi, sebagai sasaran empuk bagi pasukan Zionis yang mereka hadapi. Glubb Pasha menahan pasukan Yordania untuk tidak memasuki Yerusalem, yang memberi kesempatan kepada Zionis untuk menguasai Yerusalem dan memenangkan pertempuran, yang dikenal dengan lima hari berdarah di Yerusalem. Akibatnya, Zionis menguasai Yerusalem Barat, yang merobek keputusan pembagian yang menjadikan Yerusalem sebagai wilayah di bawah pengawasan internasional, dan ini menyebabkan pengungsian 60.000 orang Palestina!

Tentara Yordania tidak bertindak untuk melawan Zionis atau mencoba membebaskan wilayah yang mereka duduki, melainkan menjalankan keputusan pembagian dengan menguasai wilayah Tepi Barat untuk digabungkan dengan Kerajaan Yordania. Dengan kata lain, mereka menjalankan rencana pembentukan Israel seperti yang ditetapkan oleh kekuatan internasional, dan seperti yang disepakati oleh Raja Abdullah dengan Zionis dan Inggris. Beberapa sumber mencatat bahwa tentara Yordania menyerahkan posisi-posisi mereka langsung kepada tentara Zionis.

Tentara Yordania, termasuk perwira-perwira Inggrisnya, menghadapi upaya untuk menguasai Kota Tua Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa karena kebijakan Inggris saat itu khawatir jika jatuhnya Masjid

Al-Aqsa ke tangan Zionis akan memicu kemarahan umat Muslim di dunia Arab dan India.

Tentara Irak, yang mengundurkan diri setelah pasukan Zionis keluar, menghabiskan lima hari di Yordania dan bergerak sangat lambat. Hingga gencatan senjata pertama, hanya satu brigade yang masuk ke Palestina, dan mereka mengalami kekalahan besar serta serangan keras. Instruksi para pemimpin mereka hampir identik dengan perintah-perintah dari para pemimpin Inggris di tentara Yordania.

Sedangkan tentara Mesir, yang masuk dari selatan, diperintahkan untuk maju langsung ke Yerusalem. Pasukan Zionis memberi jalan tanpa perlawanan, namun ketika tentara Mesir mendekat Yerusalem, mereka diserang oleh pasukan dari pemukiman yang mereka tinggalkan, dalam sebuah jebakan militer yang sangat sederhana hingga sulit dipercaya. Tentara Mesir terpecah, beberapa unit terkepung, dan pergerakan mereka terhenti. Kemudian mereka menerima perintah untuk mundur, yang dilakukan dengan sangat sulit, meskipun seharusnya mereka bisa lebih mudah mundur dengan menembakkan tembakan ke arah pasukan Zionis.

Peristiwa-peristiwa ini meninggalkan kenangan mendalam bagi rakyat Palestina, termasuk ungkapan yang sering diucapkan oleh tentara Irak setiap kali Palestina memohon bantuan: "Maaku Awamir" (kami tidak memiliki perintah untuk bergerak membantu kalian).

Perang 1948 dan Pengkhianatan Negara Arab

Beberapa unit dalam tentara Arab melakukan tindakan heroik dan perlawanan yang gigih, namun mereka adalah kelompok yang memberontak terhadap keputusan politik, atau terpaksa bertempur tanpa mengikuti perintah-perintah tinggi karena situasi medan perang. Sayangnya, segala pencapaian yang berhasil diraih oleh para pejuang ini akhirnya sia-sia, dihancurkan oleh tindakan pemerintah Arab sendiri, baik dengan mengeluarkan perintah mundur, mengubah rencana, menghentikan kemajuan, atau mematuhi gencatan senjata, bahkan dengan menangkap dan menyiksa para pejuang seperti yang terjadi pada Ikhwanul Muslimin di Mesir, serta mengadili beberapa pemimpin Irak yang menolak perintah mundur!

Tahap awal pertempuran adalah yang terbaik bagi Arab dan terburuk bagi Israel, meskipun ada banyak faktor lain yang telah dijelaskan sebelumnya. Tentara Zionis terperangkap karena mereka harus bertempur di beberapa front sekaligus. Namun, mereka diselamatkan secara politik oleh keputusan PBB untuk memberlakukan gencatan senjata selama 28 hari, dengan pelarangan pengiriman senjata. Gencatan senjata ini langsung diterima oleh para pemimpin Arab, yang memberi kesempatan kepada Israel untuk memperkuat jumlah pasukan dan memperbarui persenjataan mereka—melanggar keputusan PBB—sehingga setelah gencatan senjata pertama, Zionis kembali menguasai situasi. Mereka melanjutkan pertempuran, menguasai wilayah utara, mengalahkan pasukan Suriah dan Lebanon, bahkan merebut kota Lydda dan Ramla tanpa ada pertahanan atau upaya dari tentara Yordania, dan mulai fokus pada front Mesir di selatan. Kemudian, PBB memberikan keputusan baru untuk gencatan senjata panjang selama tiga bulan (dari 19 Juli hingga 14 Oktober), yang dimanfaatkan oleh Zionis untuk memperkuat persenjataan dan pasukan mereka, lalu melanjutkan pengusiran pasukan Suriah dan Lebanon di utara serta pasukan Mesir di selatan hingga mereka menguasai wilayah Mesir di Teluk Aqabah, yaitu desa Um Rashrash! Setelah itu, garis perbatasan digambar antara kedua pasukan melalui perjanjian gencatan senjata, menjadikan Israel sebagai entitas yang sah di tanah tersebut.

Sementara itu, pihak berwenang Mesir menyita senjata yang dikumpulkan oleh para relawan, serta perlengkapan lainnya, untuk memutuskan jalur kelanjutan perlawanan setelah kekalahan tentara.

Dengan demikian, Palestina jatuh! Dan pengkhianatan para kolaborator tidak kalah besar dibandingkan dengan Zionis atau penjajah, atau seperti yang dikatakan oleh Syeikh Abdullah Azzam: *"Bangsa Yahudi menerima dalam waktu lima bulan lebih dari lima kali lipat apa yang mereka kuasai selama lima puluh tahun!"* **Sebelum tentara Arab masuk, orang Palestina masih menguasai lebih dari 93% tanah mereka, namun begitu tentara Arab mundur, orang-orang Yahudi telah menguasai 78% tanah Palestina!!!**

Ini adalah gambaran yang sangat mengejutkan, tetapi cukup dengan mengetahui bahwa "Tidak ada satupun pertemuan Arab

di markas Liga Arab mengenai Palestina pada saat itu kecuali ada sosok jenderal Inggris, Clayton, yang mengawasi dan memandu pertemuan serta keputusan-keputusannya, sehingga dengan itu ia berhasil merebut dukungan Arab untuk konspirasi kolonialnya di Palestina."

Akibat dari Nakbah (malapetaka) ini adalah kehancuran 531 desa dan kota Palestina, dan Israel menguasai sekitar 78% dari wilayah Palestina. Artinya, mereka memperoleh lebih banyak tanah dengan perang dibandingkan dengan keputusan pembagian yang memberikan sekitar 55% dari tanah Palestina kepada mereka, seolah-olah tentara Arab bertempur di pihak Israel dan mendukung proyek Zionis!

Selain itu, perang ini juga membawa tragedi pengungsi, dengan sekitar 58% penduduk Palestina (805.076 orang Palestina) terpaksa mengungsi. Keluar dari desa-desa mereka menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia bagi orang-orang tak bersenjata dan lelah yang terdesak oleh pasukan Zionis yang bersenjata dan kejam. Pada saat itu, pandangan umum di kalangan orang Palestina adalah bahwa orang Arab tidak akan membiarkan ini begitu saja, dan mereka percaya bahwa tentara Arab akan masuk dan mengusir kelompok Zionis sehingga mereka bisa kembali ke rumah mereka. Maka, keluarnya mereka dari desa-desa bukanlah bentuk kekalahan atau penyerahan, melainkan keputusan yang didorong oleh dua faktor: kelemahan dan ketidakmampuan, serta harapan pada janji yang telah dibuat oleh negara-negara Arab. Harus dicatat bahwa setengah dari para pengungsi telah diusir dari desa mereka sebelum tentara Arab masuk, sehingga tragedi pengungsi ini bukanlah akibat langsung dari perang, melainkan akibat invasi Zionis dan pembantaian yang mereka lakukan, yang didukung oleh konspirasi Inggris.

Distribusi Pengungsi Palestina dan Ekspansi Wilayah Israel

Para pengungsi Palestina tersebar ke tiga arah utama: Gaza, Tepi Barat, dan luar Palestina, yaitu ke Yordania, Suriah, Lebanon, dan negara lainnya. Daerah-daerah yang tersisa dari Palestina—Gaza (1,3% dari luas Palestina) dan Tepi Barat (21,5% dari luas Palestina)—segera dianeksasi oleh dua negara yang tidak membiarkan orang Palestina menguasainya. Mesir menggabungkan Gaza, sementara Yordania menguasai Tepi Barat. Namun, perlu dicatat bahwa pemerintah Yordania menyerahkan Lydda dan Ramla, sementara pemerintah Mesir melepaskan bagian-bagian dari Gaza yang tidak direbut oleh Israel dalam pertempuran, melainkan diserahkan oleh negosiator Mesir, selain penyerahan desa Um Rashrash, yang memberikan Israel akses laut ke Laut Merah!

Namun, penggabungan Tepi Barat ke Yordania tidak diprotes oleh banyak orang Palestina. Beberapa di antara mereka melihatnya sebagai bentuk perlindungan agar sisa tubuh Palestina tidak kehilangan pemiliknya seperti yang terjadi setelah Perang Dunia I dan runtuhnya kekuasaan Ottoman. Seperti yang telah disuarakan

oleh para pemimpin Palestina dalam Kongres Arab pertama yang diselenggarakan di Yerusalem untuk menggabungkan Palestina dengan Suriah pada saat itu, penggabungan Tepi Barat ke Yordania adalah hasil dari serangkaian konferensi yang diselenggarakan di kota-kota Tepi Barat. Meskipun sebagian besar diorganisir oleh Raja Abdullah, yang berkoordinasi dengan Inggris, penting untuk dicatat bahwa gagasan penggabungan itu sendiri tidak ditentang atau ditolak oleh para pemimpin dan tokoh Palestina. Mereka yang menentang penggabungan ini lebih karena kekhawatiran terhadap kebijakan Raja Abdullah, yang dianggap sebagai sekutu Inggris, bukan karena penolakan terhadap persatuan Arab atau Islam.

ANTARA DUA NAKBAH: POSISI ISRAEL

Setelah pembentukan negara Israel yang diakui oleh kekuatan internasional segera setelah deklarasi berdirinya negara tersebut, Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi negara pertama yang mengakui Israel, diikuti oleh negara-negara Eropa. Langkah pertama yang diambil oleh David Ben-Gurion adalah menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, meskipun ini bertentangan dengan keinginan kekuatan internasional yang merupakan sekutu Zionis. Meskipun demikian, Ben-Gurion tetap mengesahkan keputusannya, memindahkan kantor pemerintahan dan kementerian ke Yerusalem, meskipun hanya departemen luar negeri yang tetap berada di Tel Aviv karena kedutaan dan misi diplomatik tetap berada di sana. Dengan demikian, Yerusalem menjadi ibu kota de facto Israel sejak awal, sementara Tel Aviv tetap menjadi ibu kota resmi. Para menteri pergi ke Yerusalem dengan terburu-buru, bahkan Golda Meir tinggal sementara di kamar di atas atap sebuah bangunan hingga rumah untuk menteri disiapkan.

Di ranah politik internasional, Israel berusaha memperkuat eksistensinya dan menjadikannya kenyataan yang tak terbantahkan. Keamanan menjadi prioritas utama mereka sejak saat itu:

- Karena negara ini didirikan dengan cara mengusir banyak penduduk asli, mereka berusaha keras menakut-nakuti dan me-

nekan penduduk Palestina agar tidak berani mencoba merebut kembali tanah mereka atau bahkan menyusup ke dalam wilayah yang kini menjadi "perbatasan Israel".

- Israel juga berada di lingkungan Arab yang tidak menerima keberadaannya dan berusaha menghapusnya, sehingga negara ini berusaha maksimal untuk menunjukkan kekuatan dan kemampuannya dalam mempertahankan diri.

Tak lama setelah itu, situasi politik Arab yang tidak stabil mendorong ambisi Israel untuk memperluas pengaruhnya dan bahkan merebut lebih banyak wilayah, termasuk sisa-sisa Palestina yang berada di Tepi Barat dan Gaza. Oleh karena itu, Israel melancarkan serangkaian serangan ke Tepi Barat, Gaza, Suriah, dan Yordania, yang menewaskan banyak warga sipil serta personel kepolisian dan militer, bahkan memperlakukan mayat-mayat para pejuang yang tertangkap dengan kekerasan ketika mereka berusaha menyusup ke wilayah yang telah diduduki oleh Israel sejak 1948.

Salah satu serangan paling besar dan berbahaya yang dilakukan Israel adalah serangan besar-besaran pada tahun 1956 ke Semenanjung Sinai, yang merupakan wilayah Mesir. Serangan ini menjadi alasan untuk intervensi Inggris dan Prancis setelah Presiden Nasser mengumumkan nasionalisasi Terusan Suez. Israel berusaha memanfaatkan ketidaksiapan dan korupsi dalam pemerintahan Nasser. Inggris dan Prancis segera mengambil alih Terusan Suez, dan tentara Mesir menerima pukulan keras. Namun, agresi ini yang dikenal sebagai Perang Suez atau Agresi Tiga Pihak, tidak disetujui oleh Amerika dan Uni Soviet, karena tindakan tersebut menghidupkan kembali kolonialisme lama (Inggris dan Prancis) di wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Amerika. Amerika Serikat menentang agresi ini dengan tegas dan memaksa semua pihak mundur. Meski demikian, Israel berhasil meraih sejumlah keuntungan penting dari perang ini.

1. Membuktikan Kemampuan untuk Menyerang Secara Mendadak dan Berhasil ke Mesir yang Merupakan Negara Arab Terbesar dengan Tentara Terkuatnya Ini adalah ujian pertama bagi sistem Revolusi Juli Mesir, yang mengklaim bahwa revolusi tersebut

dilakukan dengan berbagai alasan, termasuk Palestina. Namun, terbukti bahwa sistem tersebut lemah dan tidak mampu memenuhi janjinya.

2. Merebut Hak Kebebasan Berlayar di Teluk Aqabah Teluk ini menghubungkan Israel dengan belahan bumi selatan lainnya. Meskipun Israel menguasai ujung Teluk Aqabah di Eilat, teluk ini berakhir dengan dua pulau yang menghalanginya, yang berada di wilayah Mesir. Melalui perang ini, Israel berhasil meraih hak navigasi bebas di teluk tersebut sebagai imbalan atas penarikan pasukannya, sebuah hal yang tidak diketahui oleh Mesir sendiri.
3. Menempatkan Pasukan Internasional di Perbatasan Mesir-Israel Ini berarti Mesir tidak akan bisa mengejutkan Israel dengan serangan militer. Jika Mesir berniat menyerang, mereka harus memberitahukan pasukan internasional atau meminta mereka untuk mundur, karena pasukan Mesir tidak dapat menyerang pasukan internasional.

Israel hampir berhasil menjadikan Gaza terpisah dengan pengawasan internasional, jika bukan karena protes besar dari penduduk Gaza yang dipimpin oleh kelompok Islam Gaza, yang berjuang untuk mempertahankan kedaulatan Mesir atas wilayah tersebut.

Dengan cara ini, melalui perang 1956, Israel memperkuat kekuatan dan pengaruhnya di kawasan ini, meningkatkan pentingnya dan kehadirannya, serta mengekspresikan ambisi ekspansinya. Israel tidak puas dengan apa yang telah diraihnya pada tahun 1948, dan keberhasilan mudahnya merebut Sinai tampaknya menggoda Israel untuk melanjutkan upaya ekspansi pada tahun 1967.

Ekspansi Berbahaya Lainnya oleh Israel antara Dua Nakbah Israel juga berhasil menembus sistem politik Arab dengan menempatkan agen-agen langsung yang menduduki posisi sensitif. Beberapa di antaranya adalah Eli Cohen, yang menjadi Wakil Presiden Suriah, dan Ashraf Marwan, menantu Nasser dan sekretaris informasi pribadinya. Kedua individu ini memiliki peran penting dalam menyediakan informasi kepada Israel selama Nakbah Kedua (1967) dan Perang Oktober (1973).

Keadaan Palestina antara Dua Nakbah

Selama periode penjajahan Inggris, identitas "Palestina" yang jelas mulai terbentuk di masyarakat Palestina. Hal ini menyebabkan penurunan signifikan dalam hubungan kolektif dengan identitas dan ikatan Islam, yang disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Kemerosotan Identitas Islam di Seluruh Dunia Islam. Setelah runtuhnya Kekhalifahan Islam dan penjajahan banyak negara Islam oleh kekuatan asing, negara-negara yang tidak dijajah langsung tetap berada di bawah pengaruh asing yang kuat.
2. Dominasi Sekularisme di Wilayah Tersebut. Sekularisme mendominasi wilayah-wilayah ini, dengan dua ideologi yang saling bersaing untuk mempengaruhi, yaitu komunisme sosialis kiri yang terkait dengan blok Timur yang dipimpin Uni Soviet, dan kapitalisme liberal yang terkait dengan blok Barat yang dipimpin Amerika.
3. Penguatan Konsep Nasionalisme. Pembagian wilayah Islam menjadi negara-negara modern, yang masing-masing memiliki bendera, konstitusi, dan hukum mereka sendiri, mulai membentuk identitas nasional yang terpisah dan mandiri. Negara-negara ini mulai menggali sejarah dan warisan mereka untuk membentuk sejarah yang independen dan kuno.

Ketiga faktor ini—tidak adanya kekhalifahan Islam, dominasi sekularisme, dan penguatan nasionalisme—semuanya berada di bawah pengaruh kekuatan asing dan saling menguatkan.

Namun, meskipun ada penurunan dalam hubungan dengan ikatan Islam, di Palestina tidak ada kecenderungan nasionalisme yang terlepas dari identitas Arab. Orang Palestina tetap menganggap pembebasan tanah mereka sebagai tugas bersama bangsa Arab, dan mereka percaya bahwa ketika orang Arab berperang di Palestina, itu adalah kewajiban alami mereka, bukan suatu kebaikan atau pemberian seperti yang dilakukan oleh teman atau sekutu. Beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan dan penguatan identitas Arab ini, antara lain:

1. Keterkaitan Keluarga Palestina dengan Negara-negara Tetangga. Keluarga-keluarga Palestina sering terbagi antara Palestina,

Yordania, Mesir, Suriah, dan Lebanon. Banyak pemilik tanah yang tinggal di Lebanon atau Suriah, sementara tanah mereka berada di Palestina. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan "nasional" atau perbatasan yang jelas antara Palestina dan negara-negara tetangganya. Bahkan jika kita mengabaikan bahwa Palestina adalah isu agama Islam yang suci, banyak pejuang "Arab" yang berjuang untuk membela keluarga, harta, dan tanah mereka.

2. Keterlibatan Negara-negara Arab dalam Isu Palestina. Negara-negara Arab, terutama yang berbatasan dengan Palestina, secara aktif terlibat dalam masalah ini secara politik dan militer. Mereka menjadikan slogan Arabisme sebagai tameng dan menyatakan "kewajiban" mereka untuk membebaskan Palestina dan melawan Zionisme. Bahkan, mereka mencegah orang Palestina membela diri mereka sendiri dan membatasi jalan bagi mereka, dengan alasan bahwa masalah Palestina adalah masalah umum yang melibatkan tentara, bukan kelompok bersenjata.
3. Meningkatnya Nasionalisme Arab Setelah Nakbah. Setelah Nakbah, nasionalisme Arab (sekuler) mencapai puncaknya dengan munculnya gerakan Nasserisme di Mesir dan kebangkitan Partai Ba'ath di Suriah dan Irak. Slogan ini berfokus pada kesatuan dunia Arab dan pembebasan Palestina, serta pengusiran kelompok Zionis. Perang Palestina juga disertakan dalam deklarasi pertama kudeta militer Mesir (Revolusi 23 Juli 1952). Pada saat itu, Mesir hampir mendominasi media di dunia Arab melalui radio dan pers, yang menyebarkan semangat nasionalisme Arab ini dan memberikan harapan besar kepada orang Palestina dan lainnya. Namun, yang penting sekarang adalah bahwa ini mengokohkan makna identitas Arabisme di hati mereka.

Namun, kenyataan di balik slogan ini sangat berbeda. Negara-negara Arab mulai memanfaatkan masalah Palestina untuk memperkuat pengaruh mereka, mirip dengan apa yang dilakukan Inggris sebelumnya yang berusaha mencegah terbentuknya kepemimpinan Palestina yang bersatu. Kini, peran tersebut dimainkan oleh rejim negara-negara Arab.

Usaha Dewan Arab Tertinggi untuk Membentuk Pemerintah Palestina

Dewan Arab Tertinggi, yang dipimpin oleh Haj Amin al-Husseini, berusaha membentuk pemerintahan Palestina untuk mengisi kekosongan politik yang timbul akibat penarikan Inggris. Mereka berupaya melakukannya menjelang Nakbah, namun pemerintahan-pemerintahan Arab menolaknya, dengan penolakan paling keras datang dari Raja Abdullah dari Yordania, yang berambisi memperluas kerajaannya. Raja Abdullah masih merasa kecewa selama tiga puluh tahun karena diberikan wilayah kecil yang tandus, padahal ia adalah anak tertua dari Sharif Hussein. Ketika Nakbah terjadi dan pasukan Arab kalah, Dewan Arab Tertinggi mendeklarasikan Pemerintah Palestina Umum pada 23 September 1948, yang diakui oleh negara-negara Arab kecuali Yordania. Dewan ini mengundang pertemuan Dewan Legislatif di Gaza pada 1 Oktober 1948 yang dipimpin oleh Haj Amin al-Husseini untuk mengonfirmasi keabsahan pemerintah tersebut. Namun, hanya dalam beberapa jam, pemerintah Mesir memindahkan Haj Amin al-Husseini dan anggota pemerintahan lainnya ke Kairo secara paksa, serta mengambil alih penguasaan Jalur Gaza, menjadikan pemerintahan ini sebagai pemerintah simbolis dan pemerintah pengasingan yang tidak memiliki kekuatan untuk menjalankan wewenang apapun! Di Kairo, pengawasan terhadap al-Husseini diperketat, dan markas Dewan Arab Tertinggi terisolasi. Tidak ada lagi nilai bagi seorang Presiden Pemerintah Palestina Umum selain menjadi wakil Palestina di Liga Arab!

Dengan demikian, negara-negara Arab secara praktis memberi jalan bagi Israel untuk memperkuat posisi dan memperluas wilayahnya melebihi apa yang ditetapkan dalam Resolusi Pembagian, sementara kedua rezim Arab—Mesir dan Yordania—yang menguasai Gaza dan Tepi Barat, bekerja keras untuk menggagalkan segala upaya perlawanan atau infiltrasi oleh individu-individu Palestina ke dalam wilayah "Israel". Layanan keamanan mereka bahkan berusaha menyusup ke dalam kelompok-kelompok pejuang, meskipun serangan dan pelanggaran terus dilakukan oleh Israel. Sebuah laporan dari Liga Arab mencatat upaya resmi mereka untuk mengatasi infiltrasi, dengan menghukum para pejuang dengan penjara, denda, penga-

singan, serta penyiksaan dan hukuman lainnya. Selain itu, media mereka juga berusaha untuk mendiskreditkan perlawanan. Dengan demikian, sejak awal, rezim Arab memainkan peran dalam melindungi Israel dan mengejar musuh-musuhnya. Dalam situasi ini, sangat naif untuk bertanya: apakah rezim-rezim Arab pernah berpikir untuk menggerakkan pasukan mereka atau membalas serangan udara dan pelanggaran Israel, apalagi untuk memikirkan pembebasan Palestina?!

Pengkhianatan oleh Pemerintah Arab terhadap Palestina

Jika pemerintah-pemerintah Arab menyerahkan Palestina kepada Zionis dan memungkinkan mereka menguasainya, hal ini bukan sekadar kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja, melainkan sebuah pengkhianatan yang terencana. Kami akan melihat bahwa perjalanan pemerintah-pemerintah Arab terkait Palestina adalah perjalanan pengkhianatan yang lengkap! Negara-negara yang disebut-sebut telah "merdeka" dan "terbebas" dari kolonialisme, tidak berbeda dalam perilaku mereka dengan negara-negara yang masih berada di bawah penjajahan asing.

Dampak Nakbah terhadap Masyarakat Palestina

Masyarakat Palestina mengalami gempa besar—secara politik, ekonomi, dan sosial. Nakbah dan arus migrasi yang mengikutinya mengubah wajah seluruh masyarakat Palestina. Jika sebelumnya masyarakat Palestina terus-menerus mengalami kelelahan dan eksploitasi selama masa penjajahan Inggris, kini mereka menghadapi masyarakat yang terkejut, terpecah, dan tercerai-berai. Hal ini bahkan menimbulkan pertanyaan apakah mereka masih bisa dianggap sebagai sebuah masyarakat atau tidak. Bencana pengungsi ini membentuk kelas-kelas sosial dan kelompok baru di kamp-kamp pengungsi dan kota-kota sekitarnya. Banyak orang Palestina yang bermigrasi ke negara-negara sekitarnya, dan banyak yang juga pergi ke negara-negara Teluk yang sedang mengalami lonjakan ekonomi berkat minyak dan mulai membangun diri mereka sendiri. Di sana, orang Palestina menemukan peluang dan harapan untuk melarikan diri dari kemiskinan, serta menjadi tenaga kerja terampil di berbagai

bidang. Orang Palestina pun mulai fokus pada pendidikan karena ini menjadi satu-satunya jalur menuju kemajuan sosial setelah kehilangan tanah dan negara. Mereka menjadi salah satu bangsa Arab dengan tingkat melek huruf tertinggi, dan banyak di antara mereka yang meraih gelar akademis dari universitas-universitas di dunia Arab, Eropa, dan Amerika.

Pengaruh Kebijakan Arab terhadap Perlawanan Palestina

Gempa sosial-ekonomi yang besar ini, ditambah dengan kebijakan Arab—terutama Mesir dan Yordania—memiliki dampak negatif terhadap perlawanan Palestina, baik dari segi politik maupun militer. Dalam hal politik, Dewan Arab Tertinggi mulai meredup dan memudar, sementara bintang Haj Amin al-Husseini semakin redup, yang akhirnya tetap terperangkap di Kairo hingga ia meninggalkannya pada 1958 menuju Lebanon.

Di sisi perlawanan militer, aktivitas terbatas hanya dilakukan oleh individu atau kelompok kecil yang mencoba menerobos perbatasan atau menyerang tentara Israel. Namun, meskipun terbatas, mereka berhasil menyebabkan sekitar 1.200 tentara Israel tewas dalam tujuh tahun (1949–1956), sebelum akhirnya terhenti karena rezim Nasser semakin ketat dalam menjaga perbatasan dan mencegah serangan terhadap Israel setelah kekalahan besar dalam Perang 1956. Memang, "rekam jejak darah pengkhianatan atas apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini terhadap pemuda Gaza setiap kali mereka mencoba mengorganisir perlawanan untuk membebaskan tanah mereka, bagaimana para pemuda itu mendekam di penjara dan kamp tahanan Abdu Nasser hingga perang 1956" belum tercatat dengan jelas. Karena file-filenya telah diserahkan kepada pasukan pendudukan Israel.

Kelahiran Gerakan Fatah

Dalam kondisi penuh keputusasaan dan kekosongan ini, pada tahun 1957, sekelompok pemuda Palestina mulai membentuk gerakan baru, yaitu Gerakan Fatah yang didirikan di Kuwait, yang pada waktu itu banyak dihuni oleh orang Palestina. Gerakan ini akan berkembang selama sembilan tahun hingga melakukan operasi

militernya yang pertama pada Desember 1964. Gerakan ini dimulai dengan basis Islam melalui pemuda Ikhwanul Muslimin, namun seiring waktu akan berubah menjadi gerakan sekuler karena berbagai kondisi dan alasan yang akan dibahas lebih lanjut di kemudian hari, insya Allah.

Salah Satu Kekurangan dalam Studi Singkat Ini: Masalah Pengungsi

Salah satu kekurangan dalam studi singkat ini adalah tidak dapat memberikan hak sepenuhnya kepada isu pengungsi, yang merupakan salah satu tragedi pahit yang terkait dengan masyarakat Palestina. Keluarga-keluarga Palestina terpecah belah, dan bagian-bagiannya tersebar di berbagai negara, bahkan benua, tergantung pada kondisi yang ada, tingkat pendidikan, bakat, dan kesempatan yang dimiliki setiap individu. Para pengungsi Palestina di setiap negara Arab mengalami berbagai bentuk penghinaan, penistaan, dan pengucilan. Mereka sering diperlakukan lebih rendah daripada warga asing lainnya, apalagi jika mereka ingin menjadi warga negara. Tidak ada satu pun negara Arab yang berusaha memanfaatkan potensi orang Palestina di atas dasar kesetaraan penuh dengan penduduk asli negara tersebut. Perlakuan mereka bervariasi, dari buruk hingga lebih buruk. Ini adalah tragedi yang mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan, mulai dari perjalanan, pendidikan, perawatan medis, pekerjaan, tempat tinggal, kehidupan anak-anak, hingga pemakaman orang yang telah meninggal. Selain itu, para pengungsi sering menjadi korban dalam periode pergolakan politik dan perang, yang selalu membayar harga dan mengalami penderitaan. Meskipun kita sepenuhnya mengakui bahwa tidak ada pemahaman yang baik tentang masalah Palestina tanpa memahami isu pengungsi, keterbatasan dalam hal ringkasan dan seleksi dalam studi ini memaksa kami untuk hanya memberikan penekanan singkat pada hal ini, tanpa masuk lebih dalam pada masalah yang pahit ini!

Keadaan Negara-Negara Arab Setelah Nakbah 1948

Nakbah menimbulkan gelombang kekerasan berupa kudeta, pembunuhan, dan revolusi di kawasan tersebut, terutama di negara-

negara tetangga Palestina. Penafsiran terhadap Nakbah dan penyebabnya sangat beragam, dan akibatnya, berbagai jalan menuju masa depan muncul. Gelombang ini bergabung dengan gelombang lain, yakni gelombang persaingan antara kekuasaan Amerika dan Soviet yang mewarisi pengaruh Inggris dan Prancis di kawasan tersebut. Daerah tersebut dipenuhi dengan aktor-aktor, petualang, organisasi, dan kebijakan yang saling tumpang tindih. Aktor-aktor ini menemukan dukungan eksternal, sementara para pendukung menemukan lingkungan, iklim, dan banyak elemen yang dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, tahun-tahun setelah Nakbah menjadi tahun-tahun yang penuh dengan kegelisahan, kebingungannya, dan dinamika besar di dunia Arab, terutama di wilayah Syam, Mesir, dan Irak. Namun, hasil akhirnya adalah kemenangan bagi pihak yang lebih kuat, yaitu Amerika dan Uni Soviet, yang merupakan pemenang Perang Dunia Kedua.

Masalah Palestina adalah bukti jelas bahwa keseluruhan perubahan dan pergolakan yang terjadi di kawasan Arab tidak menghasilkan perubahan yang menguntungkan bagi rakyat Arab, dan tidak mengakhiri pengaruh asing. Meskipun sistem pemerintahan kerajaan digantikan oleh republik, meskipun raja-raja digantikan, dan meskipun presiden-presiden berganti, sikap terhadap Palestina tetap sama. Tidak ada satu pun negara yang berani mengambil langkah untuk menyerang Israel, dan tidak ada yang berusaha membebaskan Palestina atau mendukung rakyat Palestina. Karena ruang tidak memungkinkan untuk pembahasan panjang, kita akan cukupkan dengan melihat situasi di negara-negara tetangga Palestina: Mesir, Yordania, Suriah, dan Lebanon, karena pengaruh mereka sangat besar terhadap jalannya masalah ini.

1. Mesir

Sebelum Perang 1948 berakhir, pemerintah Mesir menyerbu Ikhwanul Muslimin, yang merupakan kekuatan utama di antara para relawan yang berjuang untuk Palestina. Keputusan untuk melarang organisasi tersebut, menyita harta mereka, dan menangkap para pemimpin serta banyak anggotanya, termasuk relawan yang mendukung tentara Mesir, diambil. Mereka menyatakan bahwa "Ikhwan

lebih berbahaya daripada Zionis", dan tidak lama kemudian, pendiri dan pemimpin organisasi, Hasan al-Banna, dibunuh. Organisasi ini pun memasuki fase kekacauan setelah pukulan berat ini.

Namun, sekelompok anggota militer Mesir yang dipimpin oleh Gamal Abdel Nasser mampu membangun atas upaya sebelumnya dari Ikhwanul Muslimin, komunis, dan kelompok lainnya, serta melakukan kudeta militer yang berhasil merebut kekuasaan. Ini adalah operasi yang diprakarsai oleh Amerika untuk mewarisi kekuasaan kolonial Inggris di Mesir, yang kemudian terjadi. Dengan kudeta ini, Mesir beralih dari pengaruh Inggris ke pengaruh Amerika.

Meskipun Ikhwanul Muslimin adalah bagian dari kelompok yang terlibat dalam kudeta ini melalui anggotanya di militer—bahkan dua anggota Ikhwan yang mengelola dua tugas paling penting, yaitu mengepung raja-raja di Kairo dan Alexandria—organisasi ini menerima pukulan berat dari Nasser setelah ia berhasil menyusup dan membubarkan kepemimpinan mereka.

Nasser pun memerintah Mesir dengan tangan besi, memulai era yang penuh dengan ketidakadilan, kegelapan, dan korupsi yang disebut "Era Penindasan dan Kekalahan". Era ini lebih buruk daripada masa penjajahan Inggris, dan Nasser tidak pernah menang dalam satu pertempuran pun. Ia kehilangan kesatuan dengan Sudan, yang akhirnya memisahkan diri dari Mesir. Ia juga gagal mempertahankan kesatuan dengan Suriah selama tiga tahun dan akhirnya kehilangan itu. Selain itu, ia kalah dalam Perang Yaman, kalah dalam dua perang melawan Israel, dan meninggal dengan kehilangan Sudan, Jalur Gaza, dan Semenanjung Sinai. Selain itu, negara ini juga mengalami kemunduran dalam hampir semua sektor: politik, ekonomi, sosial, budaya, moral, dan lainnya.

Di tengah banyaknya seruan untuk membebaskan Palestina dan pembentukan negara Palestina yang dijanjikan, Nasser tidak pernah berpikir untuk menyerang Israel. Bahkan, ia menerima kebijakan untuk menetapnya dua belas ribu keluarga di Sinai, dan dikabarkan bahwa ia mempertimbangkan untuk berdamai dengan Israel, namun takut dibunuh seperti yang terjadi pada Raja Abdullah dari Yordania. Selama masa awal pemerintahannya, Nasser malah mengurangi anggaran militer, dan para pemimpin militer yang kalah

dalam Perang 1956 tetap memimpin hingga akhirnya kalah lebih parah lagi pada Perang 1967. Keadaan militer dan lembaga-lembaga negara berada dalam kondisi yang sangat buruk dan penuh korupsi.

2. Suriah

Suriah memulai era kudeta militer di negara-negara Arab, dan kudeta-kudeta di Suriah menjadi alat dan tangan bagi kekuatan kolonial. Pada tahun yang sama, Suriah mengalami tiga kudeta militer berturut-turut: kudeta Husni al-Za'im (Maret 1949), kudeta Sami al-Hinnawi (Agustus 1949), dan kudeta Adib al-Shishakli (Desember 1949).

Adib al-Shishakli mencoba untuk memerintah di balik layar pemerintahan sipil, namun setelah gagal, ia melakukan kudeta keduanya, yang merupakan kudeta militer keempat (November 1951) untuk memegang kekuasaan militer otoriter hingga akhirnya terjadi kudeta lain terhadap dirinya (Februari 1954) yang dipimpin oleh Faisal al-Atasi, menggulingkan kekuasaan al-Shishakli, dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil, yang membawa Suriah ke era yang dikenal sebagai "Musim Semi Demokrasi" selama empat tahun.

Pada tahun 1958, Shukri al-Quwatli mengajukan proyek persatuan dengan Mesir. Meskipun Gamal Abdel Nasser tidak menyambut baik hal ini, ia akhirnya setuju, dan sebuah persatuan antara Mesir dan Suriah terbentuk dengan nama baru "Republik Arab Bersatu". Namun, persatuan ini hanya bertahan selama tiga tahun sebelum akhirnya runtuh setelah terjadi kudeta militer (1961) terhadap kekuasaan Mesir yang dianggap merusak dan tirani di Suriah. Nasser pun menerima kudeta tersebut, dan dengan demikian, ia—melalui kebijakan yang korup terlebih dahulu, kemudian dengan penyerahan dan penarikan diri kedua—telah menghancurkan kesempatan emas untuk persatuan antara dua negara Arab terpenting di waktu yang sangat sulit tersebut.

Pada tahun 1963, terjadi kudeta militer yang dilaksanakan oleh komite militer Partai Ba'ath, yang membawa negara ke era pemerintahan Ba'ath yang keras dan kejam. Kondisi semakin memburuk setelah kudeta militer internal lainnya pada tahun 1966 yang meng-

gulingkan kelompok Ba'ath lama, yang menyebabkan pecahnya partai Ba'ath antara Suriah dan Irak. Kudeta internal lain pada tahun 1970 yang dipimpin oleh Hafez al-Assad menggulingkan sisa-sisa kehidupan sipil dan politik, memulai era tirani mengerikan yang menjadi masa paling buruk dalam sejarah Suriah.

Melalui gambaran singkat ini, jelas bahwa Suriah tidak siap dan tidak memiliki kesempatan untuk memberikan bantuan nyata kepada Palestina. Sebaliknya, Husni al-Za'im, pemimpin kudeta pertama, berusaha menawarkan perdamaian kepada Israel dengan normalisasi penuh, pertukaran duta besar, dan pemukiman tiga ratus ribu pengungsi Palestina di Suriah. Namun, David Ben-Gurion menolak hal ini karena ia ingin menguasai seluruh Danau Tiberias, bukan membaginya dengan Suriah, karena ia tidak menginginkan perjanjian yang menetapkan batas yang lebih sempit dari ambisinya yang luas terhadap tanah Israel yang diinginkan!

3. Yordania

Berbeda dengan keadaan Suriah yang penuh kekacauan, dan berbeda dengan Mesir dan Irak yang sistem pemerintahannya berganti dari monarki ke republik, Yordania menikmati stabilitas politik yang lebih besar, dan menjadi satu-satunya negara yang tidak mengalami perubahan dalam sistem pemerintahan, bahkan keluarga penguasa tidak berubah. Pemerintahan terus berlanjut dengan Raja Abdullah dan kemudian turun kepada keturunannya. Hal ini bukan karena sistem tersebut disukai rakyat atau memiliki kekuatan internal yang kuat, keduanya lemah dan rapuh, tetapi lebih karena kekuatan pendudukan yang mencegah perubahan! Sistem Yordania tetap menjadi yang paling patuh dan setia kepada kekuatan asing, dan hal ini terbukti melalui keselarasan dan kerja sama terus-menerus dengan kepentingan asing, khususnya di Palestina.

Begitu Perang 1948 berakhir dan Raja Abdullah mulai memerintah Tepi Barat, dengan jelas terlihat bagaimana raja ini sangat dekat dengan Inggris dan Zionis, serta bagaimana ia merupakan salah satu pihak yang berkhianat terhadap Palestina. Pengkhianatan ini semakin terang karena persaingannya dengan pemerintahan Mesir, Arab Saudi, dan Suriah, serta permusuhannya dengan Haj Amin al-

Husseini, salah satu pemimpin Palestina terkemuka. Semua ini bersatu untuk mengakhiri masa pemerintahannya, dan saat ia sedang berdoa di Masjid Al-Aqsa, ia dibunuh oleh seorang Palestina di ambang pintu masjid (20 Juli 1951) sebagai hukuman pertama bagi seorang penguasa yang berkhianat terhadap Palestina!

Cucu raja yang kemudian menjadi raja, Hussein bin Talal, menyebutkan bahwa Raja Abdullah sudah memperkirakan pembunuhannya, yang disaksikan oleh cucunya, dan banyak orang lainnya juga memprediksi hal yang sama, termasuk duta besar Amerika. Hussein terkejut dengan betapa cepatnya para pengawal raja meninggalkan dan melarikan diri darinya segera setelah pembunuhan tersebut.

Pembunuhan ini memberikan dampak besar di kalangan para penguasa Arab lainnya, bahkan Nasser mengungkapkan ketakutannya untuk dibunuh jika ia memulai perdamaian dengan Israel. Sistem pemerintahan Yordania akhirnya terpaksa mengambil jalan lain untuk menutupi pengkhianatannya dan mengikuti jalur yang lebih jelas mendukung Arabisme. Bisa dikatakan bahwa pembunuhan ini menghambat proses normalisasi hubungan Arab dengan Israel selama sekitar tiga puluh tahun, dan menghambat normalisasi Yordania selama sekitar empat puluh tahun!

Setelah Raja Abdullah, putranya Talal yang berusia empat puluh dua tahun mengambil alih pemerintahan, tetapi ia segera digulingkan setelah kurang dari setahun karena alasan kesehatan mental yang dipersangkakan. Ia kemudian dikirim ke rumah sakit di luar negeri selama lebih dari dua puluh tahun hingga wafat. Hal ini menjadi salah satu misteri dalam sejarah Arab kontemporer, karena hingga kini tidak diketahui secara pasti apa penyebabnya, namun banyak yang menduga bahwa ia tidak terlalu patuh kepada Inggris seperti ayahnya, dan ini mungkin yang menjadi alasan konspirasi dari Glubb Pasha (pimpinan militer Inggris di Yordania) dan Tawfiq Abu al-Huda (perdana menteri Raja Abdullah yang setia kepada Inggris).

Setelah itu, putra raja, Raja Hussein yang masih berusia tujuh belas tahun, naik tahta dan memerintah selama hampir setengah abad (1952-1999), mengikuti jejak kakeknya dalam menjalin hubungan dengan Israel, dan kemudian mengalihkan kesetiaannya

ke Amerika setelah berakhirnya kekuatan Inggris. Banyak sumber mengungkapkan bahwa ia terdaftar sebagai agen intelijen Amerika dengan nama samaran, nomor kode, dan gaji yang jelas.

Rejim monarki Yordania dianggap salah satu sistem yang paling licik, pintar, dan berbahaya di dunia Arab. Karena faktor-faktor internal dan eksternal, terutama kekuatan penjajahan Inggris, sistem ini terpaksa mengadopsi strategi manipulasi, tipuan, dan kelicikan dalam semua kebijakannya. Dikarenakan beberapa faktor internal dan eksternal. Di antara hal yang paling menonjol adalah:

1. Bahwa rejim ini lahir dari penjajahan Inggris, sebuah penjajahan yang cerdik, yang lebih mengutamakan penggunaan tipu daya dan penipuan daripada kekerasan, kekuatan, dan penindasan!
2. Bahwa itu adalah rejim pemerintahan yang lemah, tanpa akar sosial yang alami di tanah ini, melainkan muncul dan menguasainya melalui kekuatan penjajahan Inggris.
3. Kemudian, ia memerintah sebuah negara kecil yang miskin sumber daya, yang diciptakan secara artifisial, sehingga tidak mungkin baginya untuk terus memerintah tanpa bergantung pada tali pusat Inggris, kemudian Amerika, dan juga Israel.
4. Meskipun nasionalisme Arab dimulai oleh kakek buyut Raja Hussein, yaitu Syarif Hussein bin Ali, dan juga dipegang oleh kakek langsungnya, Raja Abdullah bin Hussein; namun kondisi menjadikan panji nasionalisme Arab diangkat di Mesir, Suriah, dan Irak. Semua negara ini memiliki populasi besar dan kaya sumber daya, sementara para pemimpin mereka bercita-cita, sejauh karakter dan keadaan mereka memungkinkan, untuk memimpin dunia Arab dan isu Palestina. Hal ini menempatkan mereka dalam konfrontasi dengan rejim Yordania.
5. Ketiga rejim tersebut—Mesir, Irak, dan Suriah—dikuasai oleh rezim-rezim yang mendekati komunisme, sosialisme, dan Uni Soviet. Sementara itu, Yordania adalah satu-satunya yang terhubung dengan Amerika dan blok Barat, menjadikan ini sebagai salah satu faktor utama dalam gesekan, tarik-menarik, perselisihan, dan permusuhan.
6. Bahwa rejim Yordania memerintah rakyat yang mayoritasnya adalah warga Palestina. Keluarga-keluarga dan suku-suku mereka

terhubung di kedua sisi Sungai Yordan sebelum penjajahan Inggris dan pembentukan Yordania. Kemudian, ketika Palestina diduduki, rejim Yordania menguasai Tepi Barat dan berpegang teguh padanya, selain mereka yang diusir dari Palestina dan menetap di Yordania atau Tepi Barat.

Karena semua ini, rejim Yordania menempuh jalan representasi, penipuan, dan manuver. Ia mengadopsi retorika dan slogan-slogan pan-Arab, tetapi kebijakan dan loyalitasnya sebenarnya pro-Zionis dan pro-Amerika. Sistem ini membuka pintu dan beberapa posisinya bagi kelompok Islamis yang melarikan diri dari represi rezim-rezim Mesir, Suriah, dan Irak—bukan karena cinta terhadap mereka, tetapi untuk melindungi rakyatnya agar tidak berbalik melawannya sebagai respons terhadap pengaruh kepemimpinan seperti Gamal Abdel Nasser atau lainnya.

Selain itu, ia memperdagangkan isu Palestina dan mengizinkan beberapa gerakan serta ruang terbatas, bukan karena keyakinannya pada jalur perjuangan ini, tetapi untuk melakukan kontrol, pelepasan tekanan, dan meredam energi yang menyala-nyala menyerukan jihad melawan Zionis dan pembebasan Palestina.

Seiring berjalannya waktu, rejim ini semakin kuat, sehingga ia menutup sebanyak mungkin ruang yang sebelumnya diberikan kepada Islamis atau warga Palestina.

Hal ini menyebabkan bahwa aparat keamanan Yordania lebih kuat dan lebih berbahaya dibandingkan dengan tentara Yordania, bahkan mungkin menjadi aparat keamanan Arab yang paling berbahaya. Tidak seperti di Irak, Suriah, Mesir, dan Aljazair, yang cenderung menggunakan kekerasan, aparat keamanan Yordania lebih profesional, halus, dan efisien.

Dengan demikian, Yordania berhasil menjadi alat keamanan terbaik untuk Israel, yang berbagi perbatasan terpanjang (650 km) dengannya, meskipun mayoritas penduduknya adalah warga Palestina yang ingin berjihad, dan meskipun Yordania memberi ruang bagi kelompok Islamis dan gerakan perlawanan Palestina. Yordania menjadi model dalam menanggulangi setiap gerakan pembebasan dan gerakan Islam melalui strategi pengekangan yang halus, bukan

dengan kekerasan dan penyiksaan. Ini tidak berarti bahwa Yordania tidak menggunakan kekerasan saat diperlukan, tetapi lebih kepada bahwa kecerdikan, kelicikan, dan muslihat lebih dominan dalam kebijakan sistem Yordania daripada kekerasan dan penyiksaan.

Model Yordania ini menjadi alasan bagi banyak rejim lainnya di Mesir, Suriah, dan Irak, serta beberapa orang Palestina, untuk mengeluh dan menyalahkan Yordania karena menghalangi proyek mereka untuk membebaskan Palestina. Kedua belah pihak benar ketika menyebutkan kejahatan pihak lain, tetapi semua pihak adalah penjahat, tidak ada yang jujur, bersih, atau tak bersalah!

Dengan demikian, sejak didirikan hingga saat ini, rejim Yordania tetap berpegang pada prinsip yang sama, yang akhirnya digambarkan oleh Perdana Menteri Israel saat ini, Benjamin Netanyahu, dalam memoarnya, di mana ia berkata: *"Keberadaan Kerajaan Yordania adalah kepentingan vital bagi Israel, dan jika diperlukan, kami akan mengerahkan tentara kami untuk mencegah kejatuhannya."*

Beberapa kesimpulan penting yang bisa diambil dari situasi negara-negara Arab terkait Palestina adalah sebagai berikut:

1. Negara-negara ini sebenarnya tidak pernah berusaha untuk bersatu, melainkan setiap rejim berusaha mengukuhkan dirinya sendiri dan memperdalam identitas nasional lokalnya, meskipun mereka menyanyikan lagu kebangsaan Arab! Mereka mengucapkan "persatuan adalah jalan pembebasan" dengan lidah mereka, tetapi tidak dengan hati mereka.
2. Negara-negara ini tidak pernah memberi kesempatan bagi para pengungsi Palestina untuk bekerja keras dalam membebaskan Palestina, dan mereka juga tidak memungkinkan pergerakan alami para pemimpin Palestina atau pemuda. Sebaliknya, para pengungsi Palestina menghadapi penindasan dari pemerintahan-pemerintahan tersebut, bahkan lebih berat daripada yang dialami oleh penduduk lokal.
3. Negara-negara besar, terutama Mesir, Suriah, dan Irak, berusaha menjadikan Palestina sebagai isu yang mereka kuasai dan tawar-menawar! Hal ini memecah belah dan memporak-porandakan antara berbagai faksi Palestina, menumbuhkan kecemburuan dan perasaan permusuhan, serta mendorong banyak orang

untuk berusaha meraih kepemimpinan dan menggulingkan yang lain.

4. Tidak ada satu negara pun di antara negara-negara ini yang berpikir tentang perang melawan Israel atau membebaskan Palestina. Setiap rejim justru menggunakan kekuatan keamanan dan militernya untuk memperkuat kekuasaannya dan menindas rakyatnya sendiri. Di atas semua itu, periode ini berakhir dengan "nakbah" kedua, yang tidak kalah berbahaya dan mengerikan, bahkan lebih besar dari nakbah pertama, yaitu nakbah tahun 1967.

NAKBAH 1967 DAN LEDAKAN EKSPANSI ISRAEL

Banyak rahasia dari perang ini masih tersembunyi, meskipun sudah hampir enam puluh tahun berlalu sejak kejadian tersebut. Pasalnya, sistem-sistem Arab yang ada pada saat itu masih berkuasa hingga kini dan mereka tidak pernah mempublikasikan dokumen-dokumen terkait, yang membuat para sejarawan harus bergantung pada memoar saksi mata yang diizinkan untuk dipublikasikan, serta penelitian-penelitian asing mengenai topik tersebut.

Nakbah 1967

Yang mengejutkan dalam perang ini adalah bahwa Abdul Nasser terjun ke dalamnya seolah-olah ia siap, namun menerima pukulan yang menghancurkan seolah-olah ia tidak memikirkan hal ini atau tidak pernah terlintas dalam pikirannya! Dan masalah ini tidak hanya berkaitan dengan Mesir, karena Israel menyerang empat negara Arab dalam satu hari, 5 Juni 1967:

1. Mesir: Israel menduduki Gaza (yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Mesir) dan kemudian menaklukkan Semenanjung Sinai yang luasnya lebih besar daripada Israel itu sendiri! Itu dua kali lipat dari luas seluruh Palestina!

2. Suriah: Israel menduduki Dataran Tinggi Golan yang memiliki posisi strategis dan dilindungi secara alami.
3. Yordania: Israel menduduki Tepi Barat yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Yordania.
4. Negara keempat adalah Palestina, menurut pembagian kontemporer, lebih tepatnya: sisa Palestina, yaitu Gaza dan Tepi Barat, dua wilayah yang telah dilepaskan oleh pasukan Mesir dan Yordania, yang kemudian mereka tinggalkan secara permanen. Ini adalah salah satu pengkhianatan terbesar dalam sejarah kita modern: mereka menguasainya dengan slogan-slogan nasionalisme Arab, namun setelah menyerahkannya kepada Israel, mereka meninggalkannya dan mengadopsi slogan-slogan nasionalisme!

Perang ini dikenal dengan nama Perang Enam Hari, namun enam jam pertama adalah yang paling menentukan, sehingga perang ini sering digambarkan sebagai "kemenangan terbesar yang pernah tercapai dalam konflik jenis ini sejak runtuhnya Kekaisaran Bizantium di tangan Arab!"

Perang dimulai setelah Abdul Nasser menutup Selat Tiran bagi pelayaran Israel, yang membuat Mesir menyadari untuk pertama kalinya bahwa Israel telah melayari kapal-kapalnya di perairan Mesir sejak tahun 1956. Penutupan ini merupakan eskalasi militer yang serius, dan kemudian Nasser meminta pasukan polisi internasional yang memisahkan perbatasan Mesir-Israel untuk mundur, yang secara jelas menunjukkan niatnya untuk memulai perang, namun setelah itu ia tidak melakukan apa pun untuk mempersiapkan perang. Hal ini menyebabkan banyak sejarawan berpendapat bahwa Nasser ingin mengancam dan meningkatkan ketegangan untuk menarik intervensi internasional agar ia bisa memperoleh keuntungan finansial atau politik. Namun, ketika ia terkejut bahwa eskalasi ini tidak membawanya kepada siapa pun, bahkan pasukan polisi internasional benar-benar mundur, ia tidak tahu harus berbuat apa.

Begitu pasukan Mesir dalam keadaan terkejut dan tidak siap, mereka memanggil pasukan cadangan yang dilemparkan langsung ke medan perang tanpa tahu di mana batasnya atau di mana posisi

musuh! Bahkan filsuf dan juru bicara Nasser, Muhammad Hassanein Heikal, menulis bahwa Mesir memutuskan untuk menerima serangan pertama! Seandainya mereka bisa menangani atau menghindari serangan pertama tersebut, mungkin hasilnya berbeda, namun kenyataannya serangan pertama itu menghancurkan, seperti sebuah kejutan!

Perang dimulai dengan penghancuran menyeluruh terhadap angkatan udara Mesir yang terparkir di bandara tanpa perlindungan apa pun, seolah-olah telah dipersiapkan untuk disembelih, dan itulah yang terjadi dalam salah satu peristiwa militer paling aneh dalam sejarah. Setelah itu, perintah militer diberikan kepada pasukan Mesir untuk mundur dengan cepat dari Sinai tanpa rencana apa pun, sehingga pasukan yang mundur tanpa perlindungan atau rencana menjadi sasaran empuk bagi serangan pesawat Israel dan pasukan darat, yang kemudian mulai menyerang konvoi-konvoi militer ini seperti berburu. Lebih dari sepuluh ribu tentara terbunuh, lebih dari lima ribu ditawan dengan mudah, sebagian dibunuh dan dikubur dalam kuburan massal, sementara yang lainnya ditahan dan dilepaskan dalam keadaan yang sangat memalukan.

Yang semakin menambah krisis dan kejutannya adalah bahwa media Mesir, baik pers maupun radio, terus menyiarkan berita kemenangan Mesir atas pasukan musuh, melaporkan jatuhnya pesawat musuh, terbakarannya tank-tank musuh, dan mundurnya pasukan musuh, sehingga banyak orang Arab yang percaya bahwa tentara Mesir sudah hampir memasuki Tel Aviv!

Tidak ada yang tersadar dari ilusi ini kecuali ketika Gamal Abdul Nasser pada 9 Juni 1967, setelah empat hari, mengumumkan kekalahan dan menawarkan pengunduran dirinya dengan mengatakan, *"Saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri, saya ingin kalian membantu saya,"* dan menyerahkan pemerintahan kepada Menteri Dalam Negeri dan kotak keamanannya yang misterius, Zakaria Mohieddin. Protes-protes rakyat pun meletus, beberapa di antaranya bahkan dipropaganda, menyerukan Nasser untuk tetap bertahan, dan Nasser kembali seolah-olah merespons keinginan rakyat, namun memanfaatkan kesempatan itu untuk membersihkan kepemimpinan lainnya. Ia membunuh sahabat dekatnya, Abdul Hakim Amer, koman-

dan tentara, dan mengumumkan bahwa Amer bunuh diri, sementara ia melanjutkan untuk menindak orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan dan militer, merestrukturisasi kepemimpinan militer, dan memulai kebijakan yang disebutnya "Menghapus Jejak Agresi."

Sementara itu, Israel telah menyelesaikan pendudukan Sinai dan memanfaatkan keberadaan Terusan Suez sebagai penghalang alami, membangun penghalang tanah di tepi timurnya sebagai penghalang tambahan, dan di belakangnya membangun garis pertahanan yang kokoh yang dikenal dengan nama Garis Bar-Lev, menurut nama insinyurnya, sehingga menciptakan situasi militer yang sangat sulit.

Jika Nakbah 1948 itu keras dan mengejutkan, hal itu masih bisa diperkirakan oleh banyak orang karena adanya persiapan Inggris sebelumnya, dominasi asing atas negara-negara Arab, dan karena pasukan Arab yang kecil, lemah, dan dilengkapi dengan senjata yang sedikit serta dipengaruhi oleh kekuatan atau kepemimpinan asing. Namun, Nakbah 1967 adalah sebuah kejutan yang menghancurkan, yang tidak diperkirakan oleh siapapun. Negara-negara ini telah merdeka, mengangkat slogan-slogan nasionalisme Arab, hampir menerima kepemimpinan Abdul Nasser, yang mengklaim tanggung jawab untuk membebaskan Palestina dan mempromosikan kemampuan militer Mesir yang luar biasa dengan roket dan senjata-senjata canggih, sehingga bahkan para pessimis dan pembenci Nasser pun tidak membayangkan bahwa Nakbah sebesar ini bisa terjadi dengan begitu cepat. Seolah-olah tentara, senjata, dan peralatan yang ada menguap menjadi abu, dan kini musuh yang kita harapkan bisa ditaklukkan di Tel Aviv malah sudah berada hanya dua jam dari Kairo!

Di Suriah, Dataran Tinggi Golan dengan mudah diduduki, meskipun itu adalah sebuah dataran tinggi yang hampir mustahil untuk diduduki jika ada tentara yang memiliki kewaspadaan dan persiapan sedikit saja, bahkan disebut-sebut sebagai "Benteng Pertahanan Strategis Terbesar di Timur Tengah," dan seribu tentara Suriah tewas dalam pertempuran ini. Ada pula cerita mencurigakan yang beredar bahwa radio Suriah mengumumkan jatuhnya Golan beberapa jam sebelum daerah itu benar-benar jatuh!

Di Yordania, hubungan yang sangat baik antara Raja Hussein dan Israel serta Amerika Serikat membuat raja tidak merasa curiga

terhadap sekutunya. Bahkan, pertemuan rahasia mulai berlangsung antara Raja Hussein dan para pemimpin Zionis, yang pada waktu itu merupakan kejahatan besar yang tidak pernah dipikirkan oleh siapa pun! Hubungan ini begitu kuat hingga Israel memberitahu Raja Hussein beberapa hari sebelumnya, atau bahkan pada pagi hari yang sama, namun setelah tengah hari itu, pasukan Israel menyerbu Tepi Barat yang berada di bawah kekuasaan Yordania, tidak menghormati janji atau martabat raja. Ini mungkin juga terjadi melalui kesepakatan antara kedua pihak, seperti yang diperkirakan oleh sebagian orang, meskipun hanya Tuhan yang tahu! Sebuah hal yang tidak mustahil terjadi pada rejim ini, terutama pada rejim Yordania. Lebih dari enam ribu tentara Yordania tewas, dan Sungai Yordan menjadi garis pemisah antara Yordania dan Israel. Raja Hussein memutuskan untuk mundur dari Tepi Barat, yang pada dasarnya berarti menyerah, karena rejim ini sangat berhati-hati untuk tidak membekali rakyat dengan senjata atau melatih mereka untuk perlawanan, meskipun rakyat sangat bersemangat untuk berperang di Tepi Barat dan Yordania. Dengan demikian, harapan Raja Abdullah yang telah meninggal (kakek Raja Hussein) untuk memperluas batas-batas Yordania terkubur untuk selamanya.

Dengan demikian, Masjid Al-Aqsa, yang merupakan masjid ketiga paling suci dalam Islam, jatuh ke tangan pendudukan Zionis. "Yerusalem jatuh tanpa pertempuran atau pertahanan," "Tanpa ada sepuluh pemuda atau tentara Yordania yang terbunuh di sekitarnya." Segera setelah itu, Israel menghancurkan kawasan Magharibah di Yerusalem, yang berdekatan dengan Masjid Al-Aqsa, pada tanggal 11 Juni 1967, setelah mengusir penduduknya dengan segera, dan menjadikannya sebagai tempat ibadah Yahudi di depan Tembok Ratapan (dikenal oleh mereka sebagai Tembok Buraq). Kemudian, pada tanggal 27 Juni 1967, Israel mengumumkan bahwa Yerusalem kini menjadi kota yang bersatu di bawah kedaulatan Israel. Selanjutnya, mereka dengan cepat dan teratur mulai membangun permukiman permukiman Yahudi baru di Yerusalem Timur, merampas atau menghancurkan bangunan bersejarah dan Islam, serta mendirikan sinagog-sinagog baru yang berdekatan dengan Masjid Al-Aqsa. Lebih parah lagi, mereka memulai program berbahaya menggali di

bawah Masjid Al-Aqsa, yang hingga kini terus berkembang dan menimbulkan ancaman nyata terhadap keruntuhan masjid tersebut, yang mana beberapa dinding dan temboknya sudah retak. Sebuah percakapan berbahaya untuk membakar Masjid Al-Aqsa dilakukan pada 21 Agustus 1969.

Kejatuhan Nasserisme dan Nasionalisme Arab

Begitulah takdir Allah dalam ciptaan-Nya, bahwa ideologi berkembang dan menyebar saat ia menang, dan menyusut serta terhenti saat ia kalah. Setiap kemenangan besar atau kekalahan besar selalu diikuti dengan gelombang pemikiran yang sesuai dengan hasil pertempuran tersebut. Seperti takdir-Nya, kekalahan militer menumbangkan ideologi yang dominan, dan kekalahan ini menjadi titik balik bagi pemikiran Nasserisme, nasionalisme Arab, dan komunisme yang mendominasi Mesir serta negara-negara Arab lainnya di bawah kepemimpinan Nasser. Beberapa ilmuwan menyadari hal ini dan bersyukur kepada Allah ketika bencana ini terjadi.

Pada saat itu, penyebaran keburukan terbuka di media massa pemerintah, ditambah dengan gelombang dekadensi moral dan pornografi yang dipromosikan melalui media, film, dan serial, sehingga orang yang melihat negara ini pada waktu itu akan berpikir bahwa Islam akan punah di negeri itu secara keseluruhan. Ibrahim Ikhlas menulis di surat kabar tentara Suriah sebulan sebelum Nakbah ke-Dua bahwa *"Allah, kapitalisme, imperialisme, dan semua nilai yang mendominasi masyarakat sebelumnya kini menjadi patung-patung bersejarah di museum-museum sejarah,"* dan orang yang memegang buku Islam dianggap seperti penjahat oleh masyarakat yang terpesona oleh Nasser.

Beberapa hal yang paling berbahaya terkait dengan bencana Nakbah kedua ini, terutama dalam konteks sejarah Palestina, antara lain adalah:

1. Runtuhnya pemujaan terhadap Nasser dan nasionalisme Arab sekuler.
2. Munculnya kembali pemikiran Islam, terutama di Mesir dan Syam.
3. Rasa penipuan dan pengkhianatan yang dirasakan oleh orang Palestina ketika mereka kehilangan tanah mereka sepenuhnya

akibat pasukan Arab yang sebelumnya menindas mereka, mengambil uang mereka, dan menjanjikan pembebasan dan kembalinya Palestina. Sebuah keyakinan baru terbentuk bahwa tidak ada harapan pada rezim-rezim Arab ini atau nasionalisme Arab secara keseluruhan. Ini memberikan dorongan baru pada semangat nasionalisme Palestina dan menyebabkan peningkatan dukungan terhadap faksi-faksi Palestina yang memikul beban perjuangan melawan pendudukan.

4. Untuk pertama kalinya, pemerintah Mesir mulai mencari cara untuk bekerja sama dengan gerakan perlawanan Palestina, setelah sebelumnya menolak dan berusaha mengendalikannya. Beberapa negara Arab lainnya juga mulai melakukannya, sementara yang lainnya tetap pada sikap curiga atau bahkan permusuhan.

Israel, Kekuatan Utama di Kawasan

Israel mencapai serangkaian keuntungan penting dalam perang ini, dan dapat dianggap bahwa Perang 1967 merupakan puncak dari kekuatan dan kemajuan militernya di wilayah tersebut, karena beberapa alasan:

1. Jika Israel sebelumnya didirikan dengan dukungan Inggris dan kekuatan kolonial, dalam perang ini mereka membuktikan bahwa mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan kekuatan mereka sendiri tanpa bergantung pada kekuatan besar.
2. Meskipun keberadaannya sempat diragukan setelah deklarasi kemerdekaannya pada 1948, banyak yang tidak percaya bahwa sebuah negara kecil dapat bertahan di tengah dunia Arab yang bermusuhan, Israel membuktikan dalam perang ini bahwa mereka adalah negara yang mampu berkembang, memperluas diri, dan berkembang, sehingga mereka bisa diandalkan untuk perjanjian politik, ekonomi, atau militer.
3. Israel mengokohkan kemenangan yang diperolehnya dalam Perang 1948, dan tidak ada lagi pembicaraan tentang penghapusan Israel. Bahkan, setelah enam puluh tahun, tuntutan politik lebih terbatas pada pengembalian perbatasan 4 Juni 1967.

Setelah Perang 1967, Israel menjadi kekuatan utama di kawasan ini tanpa tanding, karena mereka mampu mengalahkan negara-negara tetangga secara bersamaan, sehingga mereka menempatkan diri sebagai sekutu yang dapat diandalkan. Sebelumnya, Amerika mungkin meragukan keuntungan mendukung Israel, tetapi setelah perang ini, Israel menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi kekuatan yang dapat diandalkan dan sebuah pilihan strategis di kawasan tersebut, mengalahkan potensi persaingan dari negara-negara Arab.

Perang tersebut mengakibatkan pengungsian lebih dari tiga ratus ribu orang Palestina lainnya. Meskipun jumlah ini sangat besar, jika dibandingkan dengan apa yang terjadi pada bencana pertama (1948) dan dengan memperhitungkan berlalunya waktu, jumlah ini dianggap sedikit. Hal ini karena ingatan rakyat Palestina tentang bencana pertama mengingatkan mereka pada peristiwa Perang Dunia I, ketika banyak orang mengungsi dari desa mereka akibat kondisi perang dan kemudian kembali setelahnya. Mereka berpikir bahwa jika mereka keluar, mereka akan kembali setelah pasukan Arab datang dan mengalahkan pasukan Zionis. Namun, pada tahun 1967, ingatan rakyat Palestina telah menyerap pengalaman dari Nakbah pertama, bahwa orang Yahudi telah menduduki tanah mereka, mengusir penduduknya, dan berniat untuk menetap di sana. Oleh karena itu, banyak orang yang bertahan di tanah dan desa mereka dan tidak keluar. Ditambah lagi, Israel saat itu tidak menjalankan proses pemindahan dan pengungsian secara besar-besaran seperti yang dilakukan pada 1948, melainkan mereka memperluas wilayah dengan cara yang lebih besar daripada kemampuan sumber daya manusia dan penduduk mereka, yang merupakan ekspansi mendadak, bukan secara bertahap seperti pada bencana pertama.

Salah satu keuntungan paling berharga yang diperoleh Israel adalah arsip dari dua lembaga keamanan: Mesir dan Yordania, yang berisi nama-nama pejuang dan pahlawan gerakan perlawanan. Ini menjadi salah satu kerugian besar yang melemahkan perlawanan pasca-Nakbah kedua (1967), dan menyebabkan banyak pahlawan jatuh ke tangan Israel. Selain itu, mereka menemukan lingkungan psikologis dan moral yang lemah, karena rakyatnya telah dihancurkan oleh kediktatoran rezim yang ada dan kehilangan kemampuan untuk

melawan. Banyak pula yang bisa dijadikan tentara atau dijatuhkan akibat kurangnya kesadaran Islam, yang terjadi karena penindasan terhadap gerakan Islam pada waktu itu.

Secara perlahan, Israel, dengan menggunakan berbagai cara militer dan keamanan, serta melalui pendekatan ancaman dan iming-iming, berhasil mengendalikan sel-sel perlawanan di wilayah yang diduduki hingga perlawanan hampir meredup pada tahun 1973.

Karena kemenangan-kemenangan penting ini, beberapa orang mengusulkan agar dibuatkan patung besar untuk Nasser di Israel! Karena tanpa dirinya, Israel tidak akan mencapai semua yang telah dicapainya.

PROSES PENYERAHAN DAN NORMALISASI

Pertempuran sporadis mulai terjadi di garis terusan Suez antara pasukan Mesir dan Israel, yang dikenal sebagai "Perang Pengurasan," di mana Israel mencapai titik di mana mereka mengebom wilayah di ujung selatan Mesir dan melaksanakan beberapa operasi di belakang garis Israel. Namun, pertempuran ini tidak mengubah banyak hal dan berakhir dengan penerimaan Nasser terhadap inisiatif Rogers untuk gencatan senjata. Kemudian Nasser meninggal, dan setelahnya, wakilnya, Anwar Sadat, mengambil alih kepemimpinan, memasuki periode tanpa perdamaian dan tanpa perang.

Perang Oktober

Tiga tahun setelah Sadat menjadi presiden Mesir dan berhasil menguasai pemerintahan serta menyingkirkan orang-orang loyalis Nasser, tentara Mesir melancarkan serangan mendadak ke Sinai, berhasil menyeberangi Terusan Suez, dan memindahkan pasukannya ke sisi timur terusan. Mereka juga memindahkan peralatan pertahanan udara ke pantai terusan, sehingga tentara Mesir berhasil menduduki wilayah seluas sepuluh hingga lima belas kilometer!

Pada saat yang sama, pasukan Suriah melancarkan serangan di front Golan dan berhasil memperoleh kemajuan yang mengejutkan. Namun, Israel segera mengendalikan situasi di front Suriah, me-

mukul mundur serangan pasukan Suriah, dan mengejar mereka hingga berhasil merebut kembali posisi yang hilang akibat serangan mendadak. Pesawat-pesawat Israel memasuki kedalaman Suriah dan membom beberapa wilayah di Damaskus, dan front Suriah kembali ke keadaan semula, bahkan lebih buruk, karena tidak ada yang tahu sejauh mana pasukan Israel akan melanjutkan.

Di front Mesir, rencana berlangsung sesuai yang direncanakan selama enam hari, di mana tentara Mesir bertahan di posisi yang mereka bebaskan, menahan diri untuk tidak maju sesuai dengan rencana. Rencana ini didasarkan pada keyakinan bahwa Israel tidak akan mampu menjalani perang panjang karena mereka harus mengerahkan hampir seluruh tenaga rakyatnya, yang akan menghentikan ekonomi mereka. Selain itu, Semenanjung Sinai yang luas tidak memiliki tempat untuk menyembunyikan pasukan Israel, dan jika Israel gagal mempertahankan seluruh wilayah semenanjung, mereka akan terpaksa mundur.

Setelah beberapa hari, terjadi gangguan dan keruntuhan. Sadat, meskipun ditentang oleh para pemimpin militer, memutuskan untuk menerjunkan pasukan Mesir ke Sinai, yang mengeluarkan mereka dari jangkauan rudal pertahanan udara yang melindungi mereka dari serangan udara Israel. Meskipun para pemimpin militer menolak keputusan Sadat, dia tetap bersikeras. Begitu pasukan Mesir maju, mereka kehilangan lebih dari separuh tank mereka (250 dari 400 tank yang dimiliki tentara), yang dikenal dengan Pembantaian Tank. Yang lebih berbahaya adalah bahwa serangan ini menyebabkan terjadinya celah di barisan pasukan Mesir yang dimanfaatkan oleh pasukan Israel untuk menyeberangi Terusan Suez dan mengepung sebagian dari tentara Mesir (tentara ketiga), membuka jalan bagi Israel menuju Kairo juga.

Kemenangan yang dicapai pada hari-hari pertama berubah menjadi kekalahan. Pada saat ini, Amerika Serikat campur tangan untuk memutuskan gencatan senjata, yang mengakhiri pertempuran di front Mesir. Dapat dikatakan dengan optimis bahwa itu berakhir seri, tetapi tanpa berlebihan, bisa dikatakan bahwa itu adalah kekalahan bagi tentara Mesir, dan Israel berhasil pulih dari kejutan dan kembali mengambil inisiatif.

Peristiwa yang terjadi setelah perang memicu keraguan banyak orang terhadap tujuan dan rencana Sadat. Apakah dia benar-benar memulai perang untuk membebaskan tanah yang terjajah, tetapi kemudian kalah dan terkejut dengan kekuatan Israel serta dukungan tak terbatas dari Amerika Serikat, sehingga dia memutuskan untuk mundur dan meminta perdamaian? Ataukah sejak awal dia menginginkan perang untuk memicu pergerakan dan mendapatkan legitimasi yang memungkinkan dia meminta perdamaian dari posisi yang lebih kuat?

Bukti-bukti semakin banyak yang menunjukkan bahwa Sadat menginginkan perang sebagai pemicu, untuk menjadikannya sebagai jalan menuju perdamaian dengan Israel. Beberapa bukti utama adalah:

1. Banyak pemimpin perang Oktober menyatakan bahwa Sadat mengatakan kepada mereka sebelum perang: *"Saya hanya ingin kalian membebaskan 10 sentimeter di timur terusan, lalu sisanya serahkan pada saya."* Ini menunjukkan niat tersembunyi, mungkin rencana yang telah disiapkan untuk memicu pergerakan dan kemudian memulai perdamaian. Beberapa tokoh lainnya yang bertemu dengan Sadat menjelang perang juga mengungkapkan hal ini.
2. Sadat menyebutkan inisiatif perdamaian dan kesiapan untuk mengunjungi Israel sebelum situasi di medan perang berubah. Saat itu, banyak orang dan pengamat sedang menunggu kemajuan tentara Mesir, bahkan orang yang pesimis pun mengharapkan pembebasan Sinai, sementara yang optimis menantikan pembebasan Yerusalem! Namun, semua orang terkejut dengan pidato Sadat yang segera menawarkan perdamaian dan rencananya untuk mengunjungi Israel.
3. Sikap Sadat dalam negosiasi perdamaian, dan konsesi-konsesinya yang tak masuk akal, yang menyebabkan pengunduran diri dua menteri luar negeri dan pejabat lainnya, menunjukkan tekad yang tak dimengerti untuk menyelesaikan perjanjian perdamaian dan perjanjian normalisasi dengan harga berapapun. Bahkan dia dengan tegas mengatakan, sambil menggeretkan giginya: *"Perang Oktober adalah perang terakhir,"* sebuah pernyataan yang merugikan posisinya bahkan dalam negosiasi itu sendiri!

4. Sikap dingin Sadat terhadap pelanggaran-pelanggaran Israel baik secara politik maupun militer selama dan setelah proses negosiasi, seperti serangan terhadap Irak dan pengumuman Yerusalem sebagai ibu kota yang bersatu untuk Israel, yang semuanya sangat memalukan secara politik. Sebaliknya, Sadat bertindak dengan angkuh dan meremehkan negara-negara Arab lainnya.
5. Perubahan yang dimulai oleh Sadat dalam politik, ekonomi, dan budaya menuju arah Barat, serta keinginannya yang kuat untuk tetap berada di blok Barat yang dipimpin oleh Amerika.

Semua hal ini, dan lainnya, membuat banyak orang berpendapat bahwa Perang Oktober hanyalah cara dan alasan untuk memasukkan Israel ke dalam dunia Arab dengan cara yang tampak terhormat, bukan menghina. Ini adalah hal yang sudah dipahami sejak awal oleh sebagian orang yang diberi wawasan mata batin oleh Allah, sehingga hasil akhir Perang Oktober, dalam kondisi terbaiknya, adalah kemenangan militer setengah jadi yang kemudian diubah oleh politik menjadi kekalahan total! Dengan demikian, Israel secara simbolis keluar dari Sinai untuk masuk ke Kairo melalui pintu "perdamaian"!

Pada waktu itu, perasaan umum di Mesir menganggap bahwa ini adalah pertempuran untuk membebaskan Palestina, bahkan mereka tidak merasa bahwa Sinai dijajah sebanyak mereka merasakan bahwa Palestina dijajah!

Biasanya, kontribusi perlawanan Palestina selama Perang Oktober sering dilupakan. Meskipun partisipasi para pejuang tidak terlihat dalam kebisingan perang pasukan, namun mereka tetap memainkan peran penting. Sadat dan Assad berusaha memanfaatkan para pejuang yang tergabung dalam "Tentara Pembebasan Palestina." Ada koordinasi antara Sadat dan pimpinan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), dan para pejuang melakukan hampir seratus operasi baik di front Golan maupun Galilea Utara. Semua upaya ini gagal di hadapan upaya untuk mencapai kesepahaman dengan Yordania, karena Raja Hussein bersikeras agar perbatasannya tetap aman! Ini bukanlah hal yang mengejutkan!

Kudeta Mendadak Menuju "Perdamaian"

Jika kita meninjau akar dari upaya-upaya perdamaian dengan Israel, maka upaya Sadat tidak akan terlihat mengejutkan. Seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, ada percakapan mengenai upaya Hosni al-Zaim di Suriah untuk menjalin perdamaian dengan Israel dan menetapkan perbatasan antara Suriah dan Israel, namun David Ben Gurion menolak hal itu karena ambisinya untuk menguasai seluruh air Danau Tiberias. Sebelumnya, upaya serupa dilakukan oleh rejim Mesir pada masa Raja Farouk.

Meskipun pembicaraan tentang perdamaian pada saat itu dianggap sebagai pengkhianatan besar, suasana saat itu sudah dibayangi oleh perasaan tersebut. Maka, kita melihat peringatan dini sejak tahun 1953 dari tokoh-tokoh Islam seperti Sayyid Qutb yang dalam ceramahnya di Yerusalem Timur menyatakan, *"Kami tidak ingin tentara Arab membebaskan Palestina,"* serta Mahmoud al-Sawaf yang juga menyatakan dalam ceramah yang sama, *"Tangan yang akan meraih perdamaian dengan Israel akan dipotong."*

Dalam konteks ini, Sadat bukanlah yang pertama yang mencoba perdamaian terbuka dengan Israel, tetapi dia akan menjadi orang pertama yang "berhasil" dalam hal ini.

Penting juga untuk tidak melupakan bahwa hubungan rahasia antara Israel dan beberapa pemimpin Arab telah berlangsung lama, dimulai dari Raja Abdullah dari Yordania, kemudian cucunya Raja Hussein, serta Raja Hassan II dari Maroko dan orang kuatnya Jenderal Mohamed Oufkir, dan lain-lain.

Namun jika kita melihat dari perspektif lain, kita akan melihat bahwa Sadat mengalami perubahan mendadak dalam usahanya menuju "perdamaian". Kita lihat bahwa semua pihak yang menawarkan perdamaian kepada Israel gagal meraihnya karena keras kepala Israel, yang bahkan memperburuk keadaan dengan ekspansi dan invasi mereka ke negara-negara Arab pada 1967, ditambah dengan penolakan yang meluas terhadap Israel dan anggapan bahwa mereka adalah musuh abadi yang harus diperangi. Kemudian, pencapaian yang diperoleh pada Perang Oktober membuktikan bahwa hak hanya bisa direbut kembali dengan kekuatan. Dalam konteks ini, pidato Sadat yang menawarkan perdamaian dan menyatakan ke-

sediaannya untuk pergi ke Israel adalah sebuah bom besar dan kejutan yang menyakitkan bagi semua orang.

Sadat membenarkan sikap ini dengan alasan bahwa dia tidak dapat melawan kekuatan Amerika, bahkan dia menyatakan bahwa Amerika memegang 99% dari kartu-kartu permainan, dan dia melanjutkan jalannya ini tanpa menghiraukan oposisi baik dari dalam negeri maupun dari dunia Arab. Bahkan, dia memecat semua pimpinan militer yang terlibat dalam Perang Oktober!

Serangkaian pertemuan dan negosiasi dimulai, yang berujung pada Perjanjian Camp David (1978) dan penandatanganan Perjanjian Perdamaian (1979). Berikut adalah ringkasan kondisi yang ditetapkan oleh perjanjian ini dan dampaknya terhadap masalah Palestina:

1. Penarikan hampir seluruh kekuatan militer dari Sinai yang dapat digunakan untuk melancarkan serangan ke Israel, dan hanya menyisakan pasukan terbatas dengan persenjataan ringan. Jika kita melihat peta distribusi pasukan di kedua sisi perbatasan, kita akan dengan jelas melihat bahwa kemampuan Israel untuk menguasai kembali Sinai jauh lebih besar dibandingkan kemampuan Mesir untuk mempertahankannya. Bahkan, Sinai pada kenyataannya telah menjadi zona penyangga (buffer) yang melindungi Israel.
2. Memberikan kebebasan kepada warga Israel untuk masuk ke Sinai tanpa izin atau persetujuan dari pihak Mesir, yang tidak dinikmati oleh sebagian besar warga Mesir dalam mengakses Sinai.
3. Pertukaran duta besar dan pembentukan hubungan normal antara kedua negara, yang membuka jalan untuk hubungan ekonomi dan budaya, bahkan untuk kerjasama militer dan keamanan. Hal ini benar-benar terjadi dan berkembang hingga mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Abdel Fattah el-Sisi (saat buku ini ditulis).

Setelah Sadat dibunuh dua tahun setelah penandatanganan Perjanjian Perdamaian (1979), penerusnya, Hosni Mubarak, melanjutkan kebijakannya untuk mempertahankan perdamaian meskipun

ada banyak pelanggaran Israel terhadap perjanjian tersebut dan meskipun Israel terus berperilaku liar di kawasan tersebut. Mubarak memerintah Mesir selama 30 tahun, dan selama masa pemerintahannya, perdamaian dengan Mesir menjadi kebijakan yang tetap dan kokoh.

Yang paling berbahaya dari normalisasi hubungan Mesir-Israel ini adalah bahwa Mesir mundur dari perjuangan Palestina, melepaskan identitas Arabnya dan semboyan nasionalismenya, dan mengenakan identitas sempit sebagai negara bangsa, menjadikan masalah Palestina sebagai "masalah nasional" yang beban perjuangannya ditanggung sepenuhnya oleh rakyat Palestina.

Di sini, kita dapat membedakan tiga jalur dalam pembentukan normalisasi antara negara-negara Arab dan Israel, yaitu:

1. Normalisasi terbuka, seperti yang terjadi di Mesir.
2. Hubungan rahasia yang tidak diumumkan antara rezim Arab dan Israel.
3. Seruan terbuka untuk perdamaian yang permanen dan menyeluruh dengan Israel, yang bersyarat pada penarikan Israel ke perbatasan 1967.

Sedangkan jalur normalisasi terbuka yang dimulai oleh Sadat berjalan lambat dan ragu-ragu karena pembunuhan Sadat pada 6 Oktober 1981, di mana pembunuhannya oleh beberapa Islamis di militer Mesir mengejutkan dan menghancurkan harapan siapa pun yang berpikir untuk menjalin perdamaian dengan Israel. Pembunuhan ini menyebabkan normalisasi terbuka tertunda hampir empat puluh tahun, dan bahkan dengan adanya pembunuhan tersebut, normalisasi Mesir berlangsung dengan sangat hati-hati dan tetap berada pada tingkat resmi dan politik tanpa melibatkan level masyarakat. Bahkan, normalisasi dan kerjasama militer, keamanan, serta ekonomi antara Mesir dan Israel mengalami penundaan, dengan satu-satunya pengecualian adalah Yordania yang mengakui dan menandatangani perjanjian dengan Israel pada pertengahan 1990-an (1994), yakni tiga belas tahun setelah pembunuhan Sadat. Namun, normalisasi Yordania juga tetap ragu-ragu dan tersembunyi dalam level kebijakan dan keamanan, tanpa menjadi isu publik, bahkan se-

baliknya, tingkat media dan opini publik Yordania tetap mendukung keras hak-hak Palestina dan mengecam keras kejahatan-kejahatan Israel.

Setelah empat puluh tahun, datanglah gelombang normalisasi baru dengan runtuhnya Revolusi Musim Semi Arab, dimulai dengan Uni Emirat Arab pada awal dekade ketiga milenium baru, diikuti oleh Kerajaan Bahrain, Maroko, dan Sudan.

Pada saat penulisan ini, pembicaraan tentang normalisasi terbuka antara Israel dan Arab Saudi masih berlangsung. Mengingat Arab Saudi adalah negara kaya dan berpengaruh dengan dua tempat suci Islam, normalisasi dengan negara ini akan berarti menarik negara-negara Arab lainnya serta sejumlah negara Islam yang belum menjalin hubungan dengan Israel.

Jalur hubungan rahasia yang tidak diumumkan terus berlangsung di balik layar politik, dengan hubungan yang terus berlanjut dan terbuka antara Israel dengan Yordania dan Maroko.

Sedangkan jalur inisiatif dan seruan terbuka untuk perdamaian yang permanen, yang bersyarat pada penarikan Israel, muncul dengan cepat setelah normalisasi hubungan Mesir. Jalur ini dimulai oleh Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Fahd bin Abdulaziz pada tahun 1981 dengan mengeluarkan seruan ini. Meskipun seruan ini juga mengejutkan karena membuka pintu pengakuan terhadap Israel dan menerima apa yang telah dikuasai oleh Israel pada tahun 1948, Fahd melanjutkannya, bahkan inisiatif ini diajukan pada dua KTT Arab yang diadakan di Fes, Maroko (1981, 1982) dan memperoleh dukungan mayoritas, sehingga menjadi inisiatif Arab. Namun, Israel tidak memperdulikannya dan tidak meresponsnya!

Kemudian, Raja Abdullah dari Arab Saudi mengajukan inisiatif yang sama dua puluh tahun kemudian, dan inisiatifnya diajukan pada KTT Arab di Beirut (2003), yang kembali memperoleh dukungan, tetapi Israel tetap mempertahankan sikapnya dan tidak menghiraukannya.

Posisi Palestina Setelah Penarikan Mesir dari Perang

Dari sudut pandang matematis, Mesir adalah salah satu dari dua puluh tiga negara Arab, namun dalam kenyataannya, Mesir me-

wakili seperempat jumlah Arab, karena Mesir adalah negara Arab yang paling kuat. Penarikan Mesir dari konflik Arab sama artinya dengan penarikan seperempat kekuatan Arab, bukan hanya sekadar penarikan satu negara dari dua puluh tiga negara. Selain itu, posisi Mesir yang berbatasan langsung dengan Palestina dan Israel membuat nilai strategisnya dalam konflik ini meningkat menjadi tiga perempat kekuatan Arab atau lebih. Mesir, dengan sendirinya, lebih besar dari negara-negara perbatasan lainnya jika digabungkan. Bahkan dengan logika nasional yang sempit dan logika sekuler tanpa mengaitkannya dengan agama atau identitas Arab, Palestina tetap menjadi masalah yang sensitif dan penting bagi keamanan nasional Mesir.

Oleh karena itu, keputusan Sadat untuk menjalin perdamaian dengan Israel adalah kejutan besar bagi seluruh dunia Arab, terutama bagi orang-orang Palestina. Sebelum Camp David, tidak ada seorang pun di antara mereka yang membayangkan hal seperti ini. Bahkan, orang kedua di Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) berkata: *"Tidak ada satu negara Arab pun yang akan menyetujui penyelesaian tanpa kami, dan lebih jauh lagi, tidak ada yang akan menyetujui penyelesaian yang bertentangan dengan kami."* Namun, dia kemudian mengatakan: *"Perang Oktober (1973) bagi kami, orang Palestina, seperti halnya bagi seluruh bangsa Arab, hanyalah suatu bentuk kelegaan sementara. Alih-alih membuka jalan untuk pembebasan wilayah yang diduduki, perang itu justru memperkuat pengaruh Amerika di Timur Tengah dan memudahkan konspirasi untuk menghapuskan perlawanan Palestina."*

Keputusan Sadat untuk menjalin perdamaian dengan Israel juga memberikan dorongan besar bagi negara Zionis, memberinya kesempatan untuk bertindak lebih bebas di kawasan ini daripada sebelumnya. Ini memicu percobaan untuk meledakkan Masjid Al-Aqsa (1 Mei 1980), kemudian Israel mengumumkan bahwa Yerusalem adalah ibu kota abadi yang bersatu bagi negara Israel dan menjadikannya sebagai amandemen konstitusional yang tidak dapat diubah (30 Juli 1980), serta menyerang reaktor nuklir Irak (Juni 1981) hanya tiga hari setelah pertemuan Menachem Begin dengan Sadat di Sharm El-Sheikh, lalu menginvasi Lebanon (1982) hingga Beirut, dan melakukan pembantaian, baik secara langsung

atau melalui sekutunya dari kalangan Kristen Lebanon, dengan pembantaian terbesar di kamp pengungsi Sabra dan Shatila (16–18 September 1982), yang menewaskan antara seribu hingga tiga ribu orang Palestina. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Saudi Ghazi Al-Qusaibi dalam memoirnya: *"Krisis Lebanon membuktikan bahwa dunia Arab tanpa Mesir tidak dapat menghadapi Israel dalam pertempuran militer. 'Menetralkan' Mesir dalam konflik Arab-Israel adalah lampu hijau bagi Israel untuk bebas bergerak di kawasan ini."*

Yang lebih berbahaya lagi adalah bahwa rejim Mesir tidak melakukan apapun untuk menghentikan kejahatan ini, bahkan duta besar Israel di Mesir terkejut dengan kenyataan bahwa satu-satunya langkah yang diambil oleh Mesir setelah pembantaian Sabra dan Shatila adalah menarik duta besarnya dari Israel, sambil mengirimkan pesan kepada Amerika bahwa mereka tidak akan meningkatkan ketegangan lebih jauh, dan tindakan ini adalah hal terkecil yang bisa diharapkan oleh Israel dari Mesir.

Bahkan Gaza, yang diduduki oleh Israel dari Mesir, tidak lagi dianggap oleh rejim Mesir sebagai tanggung jawab mereka untuk dibebaskan seperti halnya alasan pendudukan sebelumnya. Mesir membiarkannya sebagai masalah Palestina.

Dengan demikian, Palestina benar-benar berada dalam kondisi yatim piatu, terputus dari dunia Arab dan Islam sejak pendudukan Inggris, kemudian Mustafa Kemal membubarkan kekhalifahan dan melepaskan identitas Islamnya, sehingga tidak merasa bertanggung jawab atas pembebasan Palestina, dan tanggung jawab ini terpecah di antara negara-negara yang tidak merasa memiliki kewajiban tersebut. Lalu datanglah rejim-rejim nasionalisme Arab yang hanya memberikan Palestina slogan dan retorika, hingga akhirnya menyerahkan sisa wilayahnya kepada Zionis. Kemudian, rejim-rejim perdamaian dan normalisasi datang dan membiarkan Palestina tetap berada di bawah pendudukan Israel serta mencuci tangan dari tanggung jawab pembebasan!

Inilah hasil yang dapat disimpulkan dari siapa pun yang membaca sejarah terbuka, namun jika seseorang menyelami rincian dan melihat apa yang terungkap dalam dokumen-dokumen serta memoar para saksi hidup, maka hasil yang jelas adalah bahwa Palestina tidak

jatuh hanya karena pengkhianatan yang berarti penyerahan atau pengabaian kepada musuh, tetapi juga karena pengkhianatan dalam bentuk berkolaborasi, bekerja sama, dan berkomplot dengan musuh untuk melawan Palestina, bahkan melawan negara-negara itu sendiri demi mempertahankan takhta dan mengukuhkannya!

Israel mulai membangun pemukiman-pemukiman dan memperbanyak keberadaan Yahudi di Gaza dan Tepi Barat. Mulailah gelombang yang sangat cepat dalam pengambilalihan tanah, air, dan sumber daya oleh Israel, dan tidak ada pilihan lain bagi orang Palestina kecuali bekerja untuk orang Israel, sementara Israel mulai menormalisasi kehadirannya dalam berbagai program yang memungkinkan mereka untuk mengubah struktur sosial dan menyerbu pemikiran mereka!

Sekarang, orang Palestina tidak punya pilihan selain berjuang untuk mendapatkan kembali tanah mereka, meskipun itu adalah perjuangan yang hampir mustahil, dengan keseimbangan kekuatan yang sangat timpang melawan kekuatan musuh yang luar biasa dan dukungannya yang tidak terbatas dari kekuatan internasional, serta pengkhianatan-pengkhianatan dari negara-negara Arab yang paling sedikit adalah pengkhianatan berupa pengabaian dan penyerahan. Meskipun orang Palestina tidak pernah berhenti berjuang, setelah era perdamaian dan normalisasi, mereka memulai gelombang baru yang lebih kuat dalam perlawanan mereka.

ERA PERLAWANAN

Sejarah umat manusia menyaksikan banyak babak di mana pihak yang lebih kuat berhasil memusnahkan atau sepenuhnya menundukkan bangsa-bangsa yang mereka jajah hingga lenyap, seperti yang terjadi pada suku-suku asli di Australia dan Amerika, yang dihancurkan atau dilenyapkan dalam peradaban penjajah hingga punah dan menghilang. Begitu pula yang terjadi pada pemusnahan umat Muslim dan pemaksaan pemurtadan mereka di Andalusia dan sebagian wilayah Eropa Timur. Ketika musuh memiliki kekuatan yang sangat besar dan tujuannya adalah penggantian dan kolonisasi—bukan sekadar penjajahan dan perbudakan terhadap bangsa-bangsa—mereka bisa berhasil mengakhiri perlawanan dan menentukan nasib dengan cara yang pasti.

Mungkin hal yang sama bisa terjadi di Palestina, seandainya tidak ada Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa, yang merupakan ayat-ayat dalam kitab Allah, bagian dari keyakinan umat Muslim, dan sangat suci yang tidak dapat dihapus atau disingkirkan dari hati umat Muslim. Oleh karena itu, perlawanan terhadap keberadaan Zionis di Palestina didasarkan pada dasar yang dalam dan sangat kokoh, yang menguntungkan perjuangan mereka meskipun dalam kondisi yang sangat keras, yang sebenarnya bisa berujung pada pemusnahan atau penundukan total.

Perlawanan di Palestina telah dipimpin oleh kelompok-kelompok Islam dan non-Islam, dengan dominasi kelompok non-Islam dalam satu periode tertentu. Namun, kedalaman Islam dalam masalah Yerusalemlah yang akhirnya membawa perlawanan di Palestina menuju gerakan-gerakan Islam, setelah gerakan-gerakan lain meredup dan melemah. Beberapa di antaranya bahkan mundur dan berbalik untuk bekerja sama dengan penjajah, seperti yang akan kita lihat. Keberadaan dasar Islam ini adalah fondasi yang mendukung perlawanan Islam pada setiap masa, bahkan ketika gerakan perlawanan non-Islam mendominasi.

Gerakan Perlawanan Non-Islam

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perlawanan Palestina setelah nakbah (bencana 1948) terus berlanjut dalam bentuk kecil yang terputus-putus, yang dilakukan oleh para relawan, hingga berakhir setelah Perang (1956). Pada masa ini, para Islamis dari kalangan Ikhwanul Muslimin tampil dalam perlawanan ini, di antaranya Kamil Ash-Sharif, dan banyak warga Gaza dan Sinai yang turut serta.

Tahun berikutnya (1957) menyaksikan berdirinya gerakan Fatah di Kuwait yang dipimpin oleh Yasser Arafat. Meskipun gerakan yang awalnya berlandaskan Islam dan mengandalkan pemuda-pemuda Ikhwanul Muslimin, akhirnya beralih ke arah yang lebih terbuka kepada berbagai arah dan menjadi sepenuhnya sekuler. Gerakan ini melancarkan operasi militernya pertama kali pada akhir tahun (1964).

Namun sebelum kita melanjutkan cerita, perlu kita lihat sejumlah alasan yang mendorong orang Palestina untuk membentuk perlawanan yang independen dari rejim-rejim politik Arab, di antaranya adalah:

1. Kehilangan harapan terhadap rejim Arab yang tampaknya tidak akan melakukan apapun untuk Palestina, terutama Mesir yang telah diserang oleh Israel pada tahun (1956), namun tidak bergerak sedikitpun menuju pembebasan.
2. Keberhasilan Revolusi Aljazair dalam meraih kemerdekaan dari Prancis menginspirasi Palestina, memberikan contoh bagaimana sebuah bangsa bisa meraih kemerdekaannya tanpa ban-

tuan tentara Arab, tanpa menunggu kesatuan Arab yang dijadikan slogan oleh para nasionalis: *"Kesatuan adalah jalan menuju pembebasan."* Model Aljazair menunjukkan bahwa pembebasan bisa terjadi lebih dulu sebelum kesatuan tercapai.

3. Keyakinan bahwa perlawanan bersenjata adalah satu-satunya cara untuk menyatukan rakyat Palestina di sekitar masalah mereka dan memperkenalkan masalah ini ke dalam realitas internasional.
4. Adanya kebutuhan mendalam untuk bergerak dan mengubah situasi yang hanya dipenuhi dengan kata-kata, pidato, dan slogan dari berbagai rejim dan partai yang tidak terwujud menjadi tindakan nyata.
5. Pengalaman yang menunjukkan bahwa negara-negara Arab tidak akan melawan dan bahkan tidak akan membiarkan orang Palestina melawan, oleh karena itu mereka yang ingin melawan harus bekerja secara rahasia, menanggung kesulitan kerahasiaan di atas segala kesulitan yang dihadapi masyarakat Palestina di pengasingan.
6. Kepemimpinan Palestina yang lama yang dipimpin oleh Haj Amin al-Husseini telah terperangkap dan tidak mampu berbuat apapun di bawah tekanan negara-negara Arab.

Kisah selanjutnya bermula dari Yasser Arafat, pemimpin Fatah, yang merupakan salah satu mahasiswa Palestina yang tinggal di Mesir dan dekat dengan Ikhwanul Muslimin. Ia memimpin Perhimpunan Pelajar Palestina yang selama ini dipimpin oleh para Islamis hingga (1957) sebelum gerakan Islam di Mesir terhantam keras oleh pukulan Nasser. Khalil al-Wazir, yang menjadi orang kedua di Fatah selama tiga puluh tahun berikutnya, adalah seorang pemuda Ikhwan dari Gaza, yang ikut serta dalam operasi perlawanan di bawah pimpinan Kamil Ash-Sharif. Namun, rezim Nasser menangkapnya dua kali dan mengusirnya dari Gaza ke Kairo, menutup jalannya, sehingga ia pindah ke Arab Saudi dan kemudian ke Kuwait untuk menjadi salah satu pendiri Fatah.

Jika kita memeriksa para pendiri Fatah, jelas terlihat bahwa mereka berasal dari Ikhwanul Muslimin, seperti: Said al-Mazini,

Ghaleb al-Wazir, Salim al-Za'nun, Salah Khalaf, As'ad al-Saftawi, Muhammad Yusuf al-Najjar, Kamil Adwan, Rafiq al-Natcha, dan lainnya. Bahkan Fatah terus menarik elemen-elemen dari Ikhwanul Muslimin hingga (1963) sebelum akhirnya membuka diri kepada kelompok-kelompok lain.

Jika Yasser Arafat dekat dengan Ikhwanul Muslimin, dan ia merupakan orang kedua dari kalangan mereka, serta pendiri dan anggota-anggota lainnya berasal dari Ikhwan, mengapa Fatah bukanlah gerakan Islam Ikhwan? Dan bagaimana akhirnya gerakan ini bertransformasi menjadi sekuler?

Bagaimana pula gerakan Islam menghilang dari halaman sejarah perlawanan pada waktu itu, hingga muncul kembali di akhir tahun 1980-an dengan intifada Palestina pertama?

Jawaban atas Pertanyaan Tersebut

Pukulan telak yang dialami gerakan-gerakan Islam telah benar-benar menghancurkan mereka, terutama di dua basis utama: Mesir dan Syam. Di Mesir, gerakan Islam dihantam keras pada era Gamal Abdel Nasser pada tahun 1954, kemudian pukulan yang lebih berat terjadi pada tahun 1965, yang berpuncak dengan eksekusi syahid besar: Sayyid Qutb (1966). Hal yang serupa terjadi di Suriah, di mana undang-undang dikeluarkan untuk menghukum mati siapa saja yang tergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Gelombang ujian ini terus berlangsung di Suriah selama dua dekade, hingga pertengahan 1980-an. Setelah Israel menduduki Tepi Barat dan Gaza, banyak tokoh Islamis diusir karena dianggap berpotensi menjadi benih perlawanan.

Di sisi lain, Yordania mengambil pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan kooptasi. Hal ini disebabkan oleh lemahnya stabilitas internal rezim Yordania serta ketakutan akan dominasi nasionalisme Arab yang mencapai puncaknya di Mesir, Irak, dan Suriah. Oleh karena itu, Islamis menemukan perlindungan di Yordania dari badai represif yang sedang berlangsung. Namun, mereka tidak memiliki kebebasan untuk memberontak terhadap rejim atau memulai gerakan perlawanan yang terorganisir. Di samping itu, mereka juga menghadapi disintegrasi internal yang signifikan.

Adaptasi Islamis dan Fokus pada Dakwah

Dalam situasi kelemahan ini, Islamis menemukan cara untuk menenangkan diri dan menyusun langkah sesuai dengan keadaan mereka yang penuh tekanan. Mereka mengadopsi gagasan bahwa pembebasan Palestina tidak dapat dicapai hanya oleh rakyat Palestina sendiri karena mereka terlalu lemah untuk menghadapi Zionis dan sekutu-sekutu mereka. Pembebasan hanya bisa terjadi melalui pendirian negara Islam, yang diyakini mampu memikul beban tersebut. Tanpa membahas keakuratan ide ini, penting untuk dicatat bahwa secara praktis, gagasan ini menyebabkan para Islamis tidak memprioritaskan perlawanan langsung terhadap Zionis atau pembebasan Palestina. Sebaliknya, mereka fokus pada aktivitas dakwah dalam bentuk pendidikan, keilmuan, dan media, sebagai persiapan untuk mendirikan negara Islam.

Dengan pendekatan ini, gerakan Islam membenarkan penarikan diri mereka dari pertempuran melawan penjajahan Zionis. Bahkan, mereka mengambil sikap tegas terhadap anggotanya yang memilih jalur perlawanan, dengan memisahkan mereka dari organisasi. Mereka juga mengabaikan gerakan-gerakan lain yang berupaya mengorganisir perjuangan bersenjata melawan penjajahan. Dalam suasana ini, kekalahan yang dialami gerakan Islam menjadi dominan dalam pikiran dan jiwa mereka, mendorong mereka untuk terus bersembunyi.

Krisis dan Pembentukan Identitas Baru

Tidak semua anggota gerakan Islam menerima pendekatan ini dengan mudah. Banyak yang membelot dan bergabung dengan faksi-faksi lain, seperti kelompok kiri, nasionalis, atau patriotik. Beberapa faksi internal dalam gerakan Islam mencoba mengoreksi jalur mereka atau bahkan membentuk kantong-kantong kecil di dalam organisasi, tetapi semua upaya ini pada akhirnya gagal. Namun, kegagalan ini menjadi landasan bagi kelahiran Hamas (Harakat al-Muqawamah al-Islamiyyah) pada awal 1980-an.

Pada akhir 1950-an, generasi baru rakyat Palestina mulai bergerak dalam perlawanan, sementara generasi lama gerakan Islam menganggap langkah ini sebagai tindakan bunuh diri. Generasi lama

berlindung di balik gagasan bahwa masa kini adalah masa persiapan iman, pendidikan, dakwah, dan ilmu untuk mendirikan negara Islam, yang nantinya akan membebaskan Palestina. Ketidakpuasan terhadap gagasan ini mendorong banyak pemuda yang tidak sabar untuk bergabung dengan gerakan non-Islam lainnya.

Kesamaan dan Perbedaan dengan Nasionalis

Patut dicatat bahwa gagasan mendirikan negara untuk memimpin pembebasan tidak hanya dianut oleh gerakan Islam. Partai-partai nasionalis Arab yang muncul setelah nakbah juga mengadopsi gagasan serupa, bahwa pembebasan Palestina adalah urusan bangsa Arab secara keseluruhan, bukan hanya tanggung jawab rakyat Palestina. Oleh karena itu, partai-partai nasionalis Arab bekerja untuk mengubah negara-negara Arab dengan tujuan mencapai kesatuan Arab, yang diyakini sebagai syarat utama untuk membebaskan Palestina.

Namun, terdapat perbedaan mendasar antara Islamis dan nasionalis. Sementara Islamis hancur oleh represi yang brutal, terutama di Mesir dan Suriah, kaum nasionalis menikmati era keemasan di negara-negara tersebut. Dengan demikian, jika kelemahan Islamis dapat dimaklumi karena situasi represif yang mereka hadapi, maka nasionalis tidak memiliki alasan serupa, terutama karena kontribusi mereka terhadap pembebasan Palestina terbatas pada retorika belaka.

Kemunculan Identitas Nasional Palestina

Beban perjuangan akhirnya dipikul oleh kelompok "patriotik" yang percaya bahwa rakyat Palestina mampu memulai perjuangan pembebasan secara mandiri. Dari sinilah identitas nasional Palestina mulai terbentuk, meskipun dalam situasi yang sulit. Gerakan Fatah, misalnya, mencoba merebut kendali atas isu Palestina dari negara-negara Arab dan mengelola perjuangan secara independen, sembari menavigasi antara otonomi dan tekanan dari negara-negara Arab yang lebih kuat dan berpengaruh.

Dalam proses ini, politik Arab dan regional sering memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Kadang-kadang

mereka mendukung perjuangan Palestina atas nama pan-Arabisme, tetapi di lain waktu mereka menyingkirkan isu Palestina dengan alasan bahwa rakyat Palestina adalah pemilik keputusan independen atas nasib mereka sendiri.

Peran Fatah dan Gerakan Nasional Lainnya

Fatah memulai perjuangan bersenjata dengan membentuk sayap militernya, Al-Asifah (Badai), yang melancarkan operasi militer pertama pada Desember 1964. Dalam waktu satu setengah tahun, hingga 1967, Fatah telah melaksanakan sekitar 200 operasi militer. Seiring waktu, identitas nasional sekuler Fatah menjadi semakin kuat, hingga akar dan awal keislamannya tampak benar-benar terhapus.

Selain Fatah, muncul pula Gerakan Nasionalis Arab, yang didirikan oleh mahasiswa Universitas Amerika di Beirut. Gerakan ini awalnya menganut ideologi nasionalis Arab dan mendukung kebijakan Nasser, tetapi kemudian beralih ke Marxisme dan membentuk aliansi dengan kelompok-kelompok lain seperti *Jabhah Tahrir Filistin* (Front Pembebasan Palestina) yang dipimpin Ahmad Jibril. Pada 1967, kelompok-kelompok ini bergabung menjadi *Jabhah Sha'biyyah Li-Tahrir Filistin* (Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina).

Keberadaan gerakan-gerakan ini memicu kekhawatiran, termasuk bagi Gamal Abdel Nasser, yang sebelumnya menghancurkan entitas politik Palestina, yaitu Pemerintahan Palestina Umum, serta mempersempit ruang gerak pemimpin Palestina, Amin al-Husseini. Merespons situasi ini, Nasser menghidupkan kembali ide pembentukan entitas politik Palestina, yang mengarah pada pembentukan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada 1964. Organisasi ini dipimpin oleh Ahmad Shuqayri, didukung oleh Nasser, dan disahkan dalam sidang Dewan Nasional Palestina di Yerusalem pada 28 Mei 1964. Sidang ini menghasilkan keputusan penting untuk membentuk Tentara Pembebasan Palestina.

Ketika bangsa Palestina menyambut situasi tersebut dengan kegembiraan besar, sejumlah gerakan yang telah memulai perlawanan justru mencurigai perkembangan ini. Pada waktu itu, gerakan Fatah dan faksi-faksi kiri yang terlibat dalam perjuangan perlawanan

enggan bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Mereka menganggapnya sebagai upaya baru dari dunia Arab untuk mengontrol urusan Palestina tanpa niat nyata untuk membebaskan tanah air. Sikap skeptis ini juga dipegang oleh para pemimpin historis yang sebelumnya menderita di bawah tekanan rezim Nasser, seperti Amin al-Husseini. Di sisi lain, pada saat itu Fatah belum muncul sebagai gerakan perjuangan utama, sehingga rezim Nasser dan Arab pada umumnya tidak terlalu memedulikan keberadaan mereka.

Ketika bencana besar lainnya, yaitu Nakba Kedua pada tahun 1967, terjadi, salah satu dampak positifnya adalah munculnya basis perlawanan Palestina di dua negara yang memiliki pemerintahan lemah, yakni Lebanon dan Yordania. Kedua negara ini memiliki "kendurnya otoritas negara", berbeda dengan Mesir dan Suriah yang memiliki rezim kuat yang melumpuhkan aktivitas perlawanan. Bahkan, banyak negara Arab lainnya menolak keberadaan sayap militer Fatah, "al-Asifah" (Badai), dan memperlakukannya dengan dingin serta penuh kecurigaan.

Tiga tahun berikutnya (1967–1970) dianggap sebagai periode emas bagi perlawanan Palestina, terutama di Yordania. Setelah kehilangan Tepi Barat dari kerajaannya akibat kekalahan telak, Raja Hussein terpaksa membebaskan sejumlah tahanan Palestina dan pejuang perlawanan serta membiarkan berdirinya titik-titik dukungan di sepanjang Sungai Yordania. Puncak dari periode ini adalah Pertempuran Karameh (21 Maret 1968), di mana perlawanan Palestina dan pasukan Yordania berhasil menghadang invasi Israel. Mereka menimbulkan lebih dari 30 korban tewas dan 100 luka-luka di pihak Israel, yang kemudian terpaksa mundur. Kemenangan ini memberikan harapan besar dan membuktikan bahwa bangsa Palestina dan Arab mampu melawan Israel yang sebelumnya dianggap sebagai tentara tak terkalahkan pasca-Nakba Kedua (1967).

Setelah kemenangan ini, puluhan ribu sukarelawan bergabung dengan Fatah, yang mulai mendominasi perlawanan Palestina, termasuk di kamp-kamp pengungsi di Jalur Gaza. Pada saat itu, tekanan dari kaum muda Islam terhadap pemimpin mereka untuk bergabung dengan perlawanan semakin meningkat. Hal ini menghasilkan pembentukan "Kamp Militer Para Syekh" di Yordania, yang mencakup

kaum muda Islam dan pemimpin agama, meskipun akhirnya kamp ini dianggap bagian dari Fatah yang sekuler.

Jumlah operasi militer perlawanan meningkat drastis, dari 12 operasi per bulan pada tahun 1967 menjadi 52 pada tahun 1968, lalu 199 pada tahun 1969, dan mencapai 279 pada awal tahun 1970. Setelah pertempuran Karameh, reputasi Fatah semakin bersinar dan posisinya berubah di arena Palestina dan Arab. Fatah akhirnya bergabung dengan PLO dan menjadi faksi terbesar yang mendominasi organisasi tersebut sejak musim panas 1968. Pada Februari 1969, Yasser Arafat, pemimpin Fatah, terpilih sebagai ketua PLO, menjadikannya simbol keberhasilan politik Palestina karena ia memperoleh posisi ini melalui perjuangan lapangan, bukan dukungan dari tokoh politik tertentu.

Namun, kemenangan ini membawa tanggung jawab besar bagi Fatah. Sebagai pemimpin PLO, Arafat harus menghadapi faksi-faksi Palestina lainnya yang memiliki hubungan dengan negara-negara Arab tertentu. Ia tidak mampu sepenuhnya mengendalikan atau menyatukan arah kebijakan mereka, tetapi juga tidak bisa sepenuhnya memutus hubungan atau mengeluarkan mereka dari PLO tanpa menimbulkan perpecahan besar.

Keberhasilan yang cepat ini juga membawa malapetaka lain bagi Fatah. Banyak anggota Fatah mulai merasa sombong, menganggap diri mereka sebagai kekuatan tempur di lapangan yang bahkan mampu menggulingkan Raja Yordania dan mengubah sistem kerajaan menjadi republik. Mereka menyebarkan slogan *"Semua kekuasaan untuk perlawanan"* dan bahkan melakukan tindakan seperti pembajakan pesawat yang kemudian mendarat di Amman dan menyebut bandara tersebut sebagai "Bandara Revolusi." Tindakan ini sangat merusak otoritas raja dan menciptakan ketegangan besar dengan masyarakat Yordania, terutama kelompok agama dan tradisional.

Rezim Yordania, meskipun telah menerima pukulan besar pada tahun 1967, tidak pernah keluar dari pengaruh Amerika Serikat dan tidak berubah menjadi rezim revolusioner. Sebagai rezim yang sejak awal bergantung pada kekuatan asing, seperti Inggris dan Amerika Serikat, mereka tidak pernah berniat melibatkan diri dalam perang langsung melawan Israel. Selain itu, rezim ini juga menggunakan

cara-cara intelijen untuk memecah belah musuh-musuhnya dan memanfaatkan perpecahan di antara kelompok Palestina.

Ketegangan akhirnya mencapai puncaknya dalam peristiwa "September Hitam" pada tahun 1970. Pertempuran sengit pecah antara tentara Yordania dan faksi-faksi Palestina, melibatkan pertempuran di kota-kota dan rumah-rumah, yang menyebabkan kerusakan besar dan trauma mendalam bagi warga sipil, termasuk anak-anak. Raja Hussein bertekad untuk mempertahankan tahtanya meskipun harus menghancurkan ibu kotanya sendiri dengan serangan artileri. Pada akhirnya, perlawanan Palestina dihancurkan secara brutal oleh pasukan Yordania di hutan Jerash, mengakhiri "masa keemasan perlawanan Palestina" dengan kematian ratusan orang, penangkapan ribuan lainnya, dan pengusiran Fatah dari Yordania.

Ketika situasi ini disambut dengan sukacita yang luar biasa oleh rakyat Palestina, kelompok-kelompok yang mulai aktif justru menunjukkan keraguan. Pada waktu itu, Gerakan Fatah maupun faksi-faksi kiri yang terlibat dalam jalur perlawanan tidak begitu antusias untuk bergabung dengan organisasi ini. Mereka menganggapnya sebagai upaya baru dari dunia Arab untuk mengontrol urusan Palestina tanpa adanya kesiapan nyata untuk membebaskan Palestina. Sikap skeptis ini juga dimiliki oleh para pemimpin bersejarah yang pernah merasakan pahit getirnya berurusan dengan rezim Nasser, seperti Amin al-Husseini.

Di sisi lain, Gerakan Fatah pada waktu itu belum muncul sebagai kekuatan perjuangan yang signifikan, sehingga tidak menarik perhatian rezim Nasser atau dunia Arab pada umumnya. Ketika tragedi besar yang dikenal sebagai "nakba kedua" terjadi pada tahun 1967, dampaknya yang tidak terduga justru memungkinkan terbentuknya basis-basis perlawanan Palestina di dua negara perbatasan dengan pemerintahan lemah, yaitu Lebanon dan Yordania. Sementara itu, gerakan perlawanan tidak dapat beroperasi di wilayah negara-negara dengan rezim kuat seperti Mesir dan Suriah. Bahkan, sebagian besar negara Arab menolak kehadiran "al-Asifah" (sayap militer Fatah) dengan sikap dingin dan kecurigaan terhadap aksi-aksi perlawanan.

Tiga tahun antara 1967 hingga 1970 dikenal sebagai periode emas perlawanan Palestina, terutama di Yordania. Raja Yordania,

yang terpukul oleh kehilangan Tepi Barat dari kerajaannya, terpaksa membebaskan para pejuang Palestina dan mengizinkan pembentukan titik-titik dukungan perlawanan sepanjang Sungai Yordan. Puncak dari periode emas ini adalah Pertempuran Karameh pada 21 Maret 1968, ketika perlawanan Palestina dan pasukan Yordania berhasil menghadang serangan pasukan Israel. Israel menderita lebih dari 30 korban tewas dan 100 terluka, memaksanya mundur. Kemenangan ini memberikan harapan besar dan membuktikan bahwa Palestina dan Arab dapat mengalahkan Israel yang sebelumnya dipandang sebagai kekuatan militer tak terkalahkan setelah nakba kedua.

Setelah kemenangan ini, puluhan ribu relawan berbondong-bondong bergabung dengan Gerakan Fatah yang mulai bersinar, mendominasi panggung Palestina, bahkan hingga ke kamp-kamp pengungsi di Jalur Gaza. Tekanan dari pemuda Islam kepada para pemimpin mereka untuk terlibat dalam gerakan perlawanan juga meningkat, hingga terbentuklah "kamp-kamp ulama" di Yordania yang mengintegrasikan pemuda Islam dengan kepemimpinan religius. Namun, pada akhirnya, kamp-kamp ini dianggap bagian dari Gerakan Fatah yang sekuler. Operasi perlawanan meningkat pesat, dari 12 operasi per bulan pada tahun 1967 menjadi 52 pada tahun 1968, 199 pada tahun 1969, dan 279 pada awal tahun 1970.

Akibat nakba kedua dan Pertempuran Karameh, nama Gerakan Fatah menjadi terkenal, mengubah posisi mereka di tingkat Palestina dan dunia Arab. Gerakan ini pun akhirnya bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai faksi terbesar, yang segera mendominasi organisasi tersebut sejak musim panas tahun 1968. Pada Februari 1969, Yasser Arafat, pemimpin Fatah, diangkat sebagai ketua PLO. Ini menjadi pencapaian politik besar bagi Palestina, karena posisi ketua PLO diperoleh melalui perjuangan perlawanan, bukan dukungan dari seorang pemimpin negara.

Namun, keberhasilan ini membawa tantangan baru. Gerakan Fatah yang tiba-tiba melesat bak roket, memanfaatkan kelemahan rezim Yordania, mulai mengalami arogansi di antara banyak anggotanya. Mereka merasa mampu menggulingkan raja, mengubah sistem kerajaan menjadi republik, dan menyebarkan slogan *"Seluruh kekuasaan untuk perlawanan."* Mereka bahkan melakukan pembajakan

pesawat dan mendaratkannya di bandara Amman yang mereka sebut "Bandara Revolusi." Semua ini merusak otoritas raja dan memicu ketegangan besar dengan pemerintah Yordania.

Pada akhirnya, berbagai faktor ini memuncak dalam peristiwa "Black September" pada tahun 1970. Pertempuran hebat terjadi antara tentara Yordania dan faksi-faksi Palestina di berbagai kota, menyebabkan kehancuran besar dan trauma yang mendalam, terutama pada anak-anak. Setelah rangkaian bentrokan yang panjang dan berdarah, kekuatan Fatah berhasil dihancurkan di Yordania, dengan banyak pejuangnya tewas, ditangkap, atau dipaksa pergi. Dengan demikian, berakhir pula era kejayaan perlawanan Palestina di Yordania.

Dengan peristiwa ini, perlawanan Palestina kehilangan salah satu arena perjuangan terpentingnya sepanjang sejarah: wilayah terpanjang untuk bentrokan dengan Israel, tempat dengan dukungan rakyat yang kuat karena tingginya konsentrasi warga Palestina di Yordania, serta lokasi dengan sistem pemerintahan yang relatif lemah dan kurang stabil. Selain itu, rezim di Yordania masih dalam kondisi rapuh akibat kehilangan Tepi Barat, sementara rajanya masih muda, berusia 35 tahun.

Apakah perlawanan Palestina kalah karena kelemahan militernya dan ketidakmampuan menghadapi kekuatan tentara Yordania? Ataukah kekalahan itu disebabkan oleh perpecahan, kekacauan internal, infiltrasi intelijen, pengkhianatan, serta perjanjian rahasia antara sebagian anggotanya dengan rezim Yordania atau pihak lain? Jika bukan karena faktor-faktor tersebut, mungkinkah mereka dapat meraih kemenangan? Narasi tentang ini beragam, penuh dengan detail dan sudut pandang yang berbeda.

Pertanyaan lainnya adalah tentang sikap rezim-rezim Arab yang mendukung perlawanan dan memusuhi Raja Hussein. Rezim-rezim ini, yang diharapkan memberikan perlindungan kepada perlawanan Palestina, justru berubah sikap secara tiba-tiba menjadi pasif, bahkan cenderung bersekongkol. Misalnya, Presiden Gamal Abdel Nasser dan Muammar Gaddafi diam atau secara tersirat mendukung konflik hingga bentrokan terjadi; tentara Irak yang stasioner di Yordania tidak mengambil tindakan; sementara tentara Suriah datang terlambat dan pergi dengan cepat. Apakah ini kebetulan

belaka? Ataukah ini merupakan momen kesepakatan diam-diam untuk melawan perlawanan Palestina—yang seharusnya menjadi sekutu mereka—bersama Raja Hussein, musuh mereka yang selama ini menjadi sasaran cemoohan dan hinaan mereka? Lagi-lagi, ada banyak narasi dan analisis yang berbeda mengenai hal ini.

Namun, hasil akhirnya memberikan kesimpulan yang pahit: perlawanan Palestina, bahkan di masa keemasannya, terlalu lemah untuk menghadapi tentara lemah dari rezim yang tidak stabil. Sementara itu, sekutu-sekutu besar perlawanan justru mengecewakannya di saat paling sulit. Kesimpulan ini membentuk pola pikir generasi pemimpin dan pejuang perlawanan saat itu maupun generasi berikutnya. Namun, pelajaran yang dipetik dari kekalahan sering kali terwarnai oleh kepahitan dan kelemahan, alih-alih menjadi pembelajaran objektif.

Dampak paling serius dari peristiwa *Black September* adalah pengakuan bahwa perlawanan Palestina tidak mampu mengalahkan rezim Arab yang lemah, apalagi menghadapi negara Zionis yang bersenjata lengkap dan didukung Barat. Setelah kekalahan ini, pola pikir perjuangan mulai terpengaruh oleh rasa lemah, dan pendekatan lain dalam perlawanan mulai diterima. Bahkan mereka yang belum terjun dalam perlawanan mulai belajar untuk hanya bergantung pada kekuatan Palestina di tanah Palestina, menghindari konflik atau bentrokan dengan rezim Arab, tidak peduli seberapa besar pengkhianatan mereka.

Namun, meskipun dekade 1970-an dimulai dengan tragedi ini, ia juga membawa pencapaian politik terbaik bagi perlawanan Palestina. Dalam KTT Arab di Maroko pada Oktober 1974, negara-negara Arab mengakui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina. Keputusan ini sebenarnya sudah dibuat pada tahun sebelumnya, tetapi ditentang oleh Raja Hussein dan tetap dirahasiakan karena ia berharap AS akan mengembalikan Tepi Barat kepadanya. Namun, kebijakan AS hanya memanfaatkan Raja Hussein untuk melemahkan perlawanan Palestina.

Keputusan ini sering kali digambarkan sebagai dukungan Arab terhadap PLO, tetapi menurut Abu Iyad (Salah Khalaf), salah satu

pemimpin Fatah, keputusan ini dibuat di bawah ancaman pembunuhan. Dalam versinya, ada rencana pembunuhan terhadap Raja Hussein di Maroko, serta terhadap para pemimpin yang mendukung normalisasi hubungan dengan Israel. Beberapa elemen rencana tersebut terdeteksi oleh intelijen Maroko, tetapi tidak semuanya, sehingga ancaman tetap ada. Hal ini memaksa para pemimpin Arab untuk menyetujui dan mengumumkan keputusan tersebut.

Keputusan ini adalah keberhasilan bagi Palestina dalam memperoleh kemandirian politik, terutama dari Raja Hussein yang sering kali dianggap sebagai ancaman atas kontrolnya terhadap Palestina. Namun, keputusan ini juga menjadi cara bagi negara-negara Arab untuk mengalihkan tanggung jawab atas Palestina kepada sebuah organisasi yang lemah, bergantung pada dukungan sporadis dari raja-raja dan presiden Arab.

Sebulan kemudian, pada November 1974, Yasser Arafat diundang untuk menyampaikan pidato di PBB di New York. Ini menjadi loncatan besar bagi isu Palestina secara internasional, mengubahnya dari sekadar masalah kemanusiaan menjadi perjuangan rakyat yang hidup di bawah pendudukan. Pencapaian ini bukan hanya hasil dari perjuangan Palestina dan dukungan Arab, tetapi juga manfaat dari dinamika Perang Dingin antara Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet dan Blok Barat yang dipimpin AS. Dalam konteks ini, muncul sejumlah resolusi internasional yang mendukung Palestina, seperti deklarasi bahwa Zionisme adalah bentuk rasisme (1975), serta pengakuan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan merebut hak-hak mereka dengan segala cara (1975). Namun, keputusan-keputusan ini memiliki pengaruh terbatas karena dukungan kuat AS terhadap Israel dan melemahnya komitmen Arab dalam mendukung Palestina.

Secara militer, meskipun Palestina kehilangan basis perjuangan di Yordania, mereka berhasil mengalihkan perjuangan mereka ke Lebanon. Meski wilayah perbatasan Lebanon dengan Israel jauh lebih kecil (79 km dibandingkan dengan 360 km di Yordania), Lebanon tetap menjadi satu-satunya pintu yang tersisa di mana pemerintah pusatnya tidak cukup kuat untuk mengontrol penuh aktivitas perlawanan.

Situasi di Lebanon memiliki beberapa kesamaan dengan di Yordania, namun juga terdapat perbedaan mendasar. Kesamaannya terletak pada keberadaan sejumlah besar pengungsi Palestina yang jumlahnya terus bertambah seiring waktu. Kamp-kamp pengungsi ini telah berubah menjadi permukiman besar yang hidup dalam kemiskinan ekstrem dan penindasan, dengan rasa keterasingan yang mendalam. Hukum dan kebijakan yang diterapkan cenderung mempertahankan mereka sebagai warga kelas dua atau tiga. Gerakan perlawanan Palestina sering merekrut mereka untuk menjadi pejuang, melatih dan mempersenjatai mereka.

Selain itu, setelah bencana *Nakba* pada tahun 1967, terjadi pelonggaran pengawasan dari berbagai negara terhadap aktivitas perlawanan Palestina, yang diikuti dengan kebangkitan moral setelah kemenangan dalam Pertempuran Karameh (1968). Namun, euforia yang muncul ini juga menyebabkan beberapa pejuang terlalu percaya diri, sering memamerkan kekuatan mereka, bahkan menghadapi tentara jika terjadi konflik.

Berbeda dengan Yordania, Lebanon menghadapi perpecahan internal yang tajam, termasuk antara Sunni dan Syiah, Muslim dan Kristen, serta kaum nasionalis Arab dan pro-Barat. Perpecahan ini melemahkan kekuatan negara tetapi juga memungkinkan pihak tertentu memanfaatkan situasi untuk memicu konflik. Kondisi ini menjadi latar belakang awal bentrokan antara pejuang Palestina dan tentara Lebanon pada akhir tahun 1969, yang kemudian dimediasi oleh Gamal Abdel Nasser melalui Perjanjian Kairo. Perjanjian ini memberikan kebebasan bagi perlawanan Palestina untuk beroperasi di wilayah selatan Lebanon.

Dalam periode ini, gerakan perlawanan Palestina melancarkan berbagai operasi, termasuk yang berani seperti Operasi Hotel Savoy (6 Maret 1975), di mana para pejuang berhasil menyusup ke Tel Aviv melalui laut, menguasai hotel, dan menyandera tamu untuk menuntut pembebasan tahanan Palestina. Operasi ini berakhir dengan pertempuran tidak seimbang yang menewaskan tujuh dari delapan pejuang Palestina, namun menelan sekitar 100 korban jiwa di pihak Israel.

Selain *Fatah*, nama kelompok lain seperti *Front Populer untuk Pembebasan Palestina* (PFLP), *Front Demokratik*, dan faksi-faksi indepen-

den lainnya juga mencuat. Mereka mengadopsi strategi berbeda seperti pembajakan pesawat, serangan di lokasi strategis seperti Bandara Lod (1972), serta penyanderaan di luar negeri seperti Operasi Munich (1972). Serangan lainnya mencakup penyergapan pemukiman Israel dan serangan ke sekolah militer.

Di sisi lain, Israel merespons dengan serangan udara terhadap markas pejuang, penghancuran infrastruktur Lebanon, serta pembunuhan tokoh Palestina, baik pemimpin sipil maupun militer. Di antara korban terkenal adalah Ghassan Kanafani, Wael Zuaiter (1972), Mahmoud Al-Hamshari, Hussein Abu Al-Khair, Mohammed Youssef Al-Najjar, Kamal Adwan, dan Kamal Nasser (1973).

Permulaan operasi perlawanan dari Lebanon, bersamaan dengan kemampuan Israel untuk melakukan pembunuhan di wilayah Lebanon, memicu ketegangan yang semakin meningkat. Pejuang Palestina merasa bahwa ada elemen pengkhianatan, atau setidaknya keterlibatan dari tentara Lebanon, sementara pihak pemerintah dan militer Lebanon memandang kamp-kamp pengungsi serta organisasi perlawanan sebagai ancaman besar yang membawa konflik eksternal dan ketidakstabilan domestik. Hal ini membuat tentara Lebanon menyerukan kendali lebih besar atas kamp-kamp tersebut, permintaan yang ditolak mentah-mentah oleh Palestina.

Ketegangan semakin memuncak dengan keterlibatan kelompok Kristen Maronit yang menunjukkan permusuhan mendalam terhadap Palestina. Kelompok ini menerima dukungan senjata, pelatihan, dan keahlian dari Israel, yang semakin memperburuk situasi. Perpecahan internal dalam gerakan Palestina juga berkontribusi pada kekacauan, dengan beberapa faksi menjadi alat negara-negara seperti Irak atau Suriah untuk melaksanakan agenda mereka, termasuk pembunuhan atau serangan yang akhirnya memicu lebih banyak permusuhan terhadap rakyat Palestina.

Ketegangan ini memuncak pada pecahnya perang saudara Lebanon pada tahun 1975, dipicu oleh pembantaian yang dilakukan oleh milisi Kristen Maronit terhadap sebuah bus yang membawa pengungsi Palestina, menewaskan pria, wanita, dan anak-anak. Dalam perang ini, Palestina—baik pengungsi di kamp maupun pejuang bersenjata—menjadi salah satu pihak utama yang terlibat, tetapi

juga korban paling awal. Perang saudara ini membuka peluang bagi infiltrasi mata-mata, penyelundupan senjata, dan serangan yang menghancurkan di berbagai wilayah.

Milisi Kristen kemudian mengepung kamp-kamp pengungsi Palestina, melakukan pembantaian besar-besaran. Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) terpaksa terlibat dalam perang untuk mempertahankan dirinya, rakyat Palestina, serta sekutunya di kalangan Muslim Lebanon. Konflik ini semakin mengukuhkan Palestina sebagai salah satu isu utama yang memperumit perang saudara Lebanon, dengan dampak yang meluas di tingkat regional dan internasional.

Tidaklah memungkinkan di sini untuk merinci perang saudara Lebanon yang penuh dengan detail, aliansi, kudeta, dan perubahan-perubahan. Intinya, perlawanan Palestina berpihak kepada kaum Druze, bersatu di bawah semboyan nasionalisme Arab dan kiri—serta Islam di posisi yang lebih jauh—melawan kaum Kristen Maronit yang didukung oleh Zionis, Amerika, dan beberapa rezim Arab terkait. Konflik berlangsung bolak-balik hingga akhirnya kekuatan Kristen mulai runtuh, mendorong masuknya tentara Suriah ke Lebanon (Januari 1976), dengan restu Amerika dan persetujuan Israel. Tentara Suriah mendukung kaum Kristen Maronit, berbalik melawan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Fatah, serta memberikan perlindungan kepada pasukan Kristen yang mengepung kamp-kamp Palestina.

Salah satu tragedi besar terjadi setelah perjanjian antara pihak yang mengepung dan penghuni kamp Palestina di Tel al-Zaatar. Kamp tersebut diserbu, dan sekitar 3.000 orang Palestina dibantai pada 12 Agustus 1976. Setelah babak-babak penuh darah dan penderitaan di mana kaum Kristen dan tentara Suriah menumpahkan darah Palestina dan Lebanon, konflik ini berakhir dengan Perjanjian Riyadh yang dimediasi oleh Arab Saudi. Perjanjian ini mengizinkan masuknya pasukan Arab untuk menstabilkan Lebanon, tetapi mayoritas negara-negara Arab menolak mengirim pasukan. Praktis, hal ini berarti menyerahkan kontrol Lebanon kepada tentara Suriah, yang keberadaannya menjadi sah secara hukum dengan dukungan dunia Arab.

Di perbatasan Israel, Israel berhasil merekrut seorang perwira Kristen Lebanon, Saad Haddad, yang pasukannya membentuk "sabuk pengaman" untuk melindungi Israel. Sementara itu, perlawanan Palestina melanjutkan operasi melawan Israel dari Lebanon selatan. Sebagai respons, tentara Israel melakukan invasi ke selatan Lebanon pada Maret 1978. Meski gagal menghancurkan perlawanan, mereka memperkuat sabuk pengaman di bawah kendali Saad Haddad.

Tiga tahun kemudian, setelah serangkaian operasi Palestina dan serangan balasan brutal Israel terhadap warga sipil, serta keluarnya Mesir dari konflik setelah menandatangani perjanjian damai, Israel melancarkan invasi besar-besaran ke selatan Lebanon pada Juni 1982. Hampir seluruh tentara Israel (120.000–150.000 dari total 170.000) dikerahkan, dan mereka mencapai Beirut hanya dalam lima hari (4–9 Juni 1982). Di Beirut, terjadi pertempuran sengit antara tentara Israel melawan perlawanan Palestina dan Lebanon, yang bertahan lebih dari dua bulan. Akhirnya, melalui mediasi, tercapai kesepakatan yang memaksa perlawanan Palestina keluar dari Lebanon.

Namun, setelah keluarnya para pejuang Palestina, Israel dan sekutu Kristen Maronitnya melakukan pembantaian besar-besaran di kamp Sabra dan Shatila (16–18 September 1982), menewaskan sekitar 3.500 warga Palestina, termasuk wanita, lansia, dan anak-anak. Pengusiran dari Lebanon menjadi pukulan besar bagi perlawanan Palestina. Dengan tertutupnya semua negara di sekitar Palestina, perlawanan kehilangan basis operasionalnya. Para pejuang (sekitar 12.000 orang) tersebar di tempat-tempat jauh seperti Tunisia, Sudan, dan Yaman, yang melemahkan kekuatan mereka secara signifikan. PLO memindahkan pusat komandonya ke Tunis.

Israel melanjutkan operasi intelijennya untuk membunuh tokoh-tokoh penting Palestina. Salah satu yang terkenal adalah pembunuhan Abu Jihad, orang kedua di Fatah, di Tunisia pada 16 April 1988.

Meskipun perlawanan Palestina menunjukkan keberanian dan semangat juang yang tinggi, keseimbangan kekuatan tetap tidak menguntungkan mereka. Mereka melawan sendirian melawan negara

militer yang kuat, sementara negara-negara Arab di sekitarnya tidak memberikan dukungan berarti. Sebagian besar negara Arab telah menjalin hubungan damai terbuka atau rahasia dengan Israel, seperti Mesir, Yordania, dan Suriah, sementara yang lain seperti Lebanon dan Maroko menjalin kerja sama keamanan dan intelijen. Dukungan internasional terhadap Israel—baik berupa uang, senjata, posisi politik, maupun bantuan operasional—juga memperkuat posisi Israel.

Sebagian operasi perlawanan Palestina, seperti pembajakan pesawat dan serangan ke bandara, menciptakan persepsi negatif di kalangan negara-negara Arab dan Barat terhadap organisasi Palestina. Akibatnya, mereka mengalami tekanan yang besar dan kehilangan banyak pemimpin politik dan militer akibat pembunuhan, sehingga suara yang mendorong solusi politik dan perdamaian semakin kuat di dalam organisasi.

Gerakan perlawanan Palestina pada akhirnya mengacu pada ideologi sekuler, dengan tujuan politik untuk mendirikan negara Palestina yang bersatu—bukan negara Yahudi maupun Islam—tetapi negara sekuler di mana semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Mayoritas penduduknya adalah Palestina dan Arab, dengan pengembalian para pengungsi dan penghentian pembangunan permukiman Yahudi.

Sekularisme PLO adalah hasil dari dominasi ideologi sekuler global pada era 1950-an hingga 1970-an, yang menyebabkan banyak generasi muda menjauhi agama, bahkan menentangnya. Selain itu, sekularisme ini dianggap sebagai cara untuk menghindari permusuhan dari rezim-rezim Arab dan kekuatan internasional. Dalam konteks tersebut, sekularisme menjadi alat kompromi politik di tengah berbagai tekanan regional dan global.

Dengan demikian, semboyan "negara sekuler tunggal" berhasil menciptakan kompromi di antara berbagai hal: antara landasan sekuler faksi-faksi perlawanan Palestina, penolakan nasionalis Arab terhadap entitas Zionis yang menginginkan negara Yahudi, dan dominasi sekuler global—baik liberal maupun komunis—pada masa itu, yang mendukung gagasan negara kebangsaan yang tidak membedakan warganya berdasarkan agama. Ini memberikan peluang bagi Palestina untuk menarik simpati kekuatan besar Timur dan Barat

dengan merujuk pada ide dan legitimasi yang sama yang menjadi dasar hukum internasional dan institusi global sejak akhir Perang Dunia II.

Namun, jika kekuatan besar tersebut benar-benar tulus dalam sekularismenya, seharusnya mereka mendukung Palestina melawan Zionis, yang dengan ide dan negara mereka mencerminkan rasisme agama yang bertentangan dengan sekularisme! Akan tetapi, proyek Israel bukan hanya sekadar proyek sekuler kolonial, tetapi juga proyek salibis yang berakar pada komponen agama yang kuat dan tak terpisahkan dari peradaban Barat.

Penerimaan ide negara sekuler tunggal yang menyatukan Arab dan Yahudi dalam kesetaraan adalah langkah awal dari konsesi yang mulai muncul dalam retorika PLO pada akhir 1960-an. Konsesi ini merupakan pengakuan bahwa para penjajah Yahudi tidak perlu kembali ke tanah asal mereka. Setelah Perang Oktober dan dampaknya yang mengejutkan, PLO dipaksa untuk "mengambil keputusan berani (!) yang mengakhiri kebijakan 'semua atau tidak sama sekali'." Maka, dalam Konferensi Nasional ke-12 (1974), muncul konsesi lain yang menganggap bahwa upaya politik adalah salah satu cara untuk membebaskan Palestina, menggantikan slogan bahwa perjuangan bersenjata adalah satu-satunya jalan pembebasan. Ini membuka pintu bagi solusi transisional dan bertahap untuk mendirikan negara Palestina di wilayah mana pun yang dapat dibebaskan.

Konsesi lainnya muncul ketika PLO didesak untuk menerima inisiatif yang diajukan oleh Pangeran Fahd bin Abdul Aziz (putra mahkota Arab Saudi saat itu), yang menawarkan pengakuan terhadap Israel dengan syarat Israel mundur ke perbatasan tahun 1967. Inisiatif ini diadopsi oleh KTT Arab di Maroko pada tahun 1982, yang pada dasarnya mengakui wilayah yang diduduki pada tahun 1948.

Seiring dengan kemunduran militer dan lapangan, terjadi pula kemunduran politik. Dekade 1980-an menjadi masa kemerosotan bagi PLO, dan ide negara sekuler tunggal yang menyatukan Arab dan Yahudi tidak memberikan hasil yang diinginkan. Namun, keadaan berubah drastis dengan munculnya perlawanan rakyat terbesar dalam setengah abad terakhir, yaitu Intifada Pertama tahun 1987.

Intifada Pertama 1987 dan Kemunculan Perlawanan Islam

Pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, sejumlah faktor internal dalam gerakan Islam, baik di Palestina maupun di luar Palestina, menciptakan kondisi yang mendukung kebangkitan perlawanan Islam. Faktor-faktor ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Normalisasi dan Pengkhianatan Arab

Masuknya Mesir dalam jalur perdamaian dan normalisasi dengan Israel membuktikan bahwa harapan pada rezim Arab telah berakhir. Siapa pun yang ingin membebaskan Yerusalem dan Palestina harus mengandalkan dirinya sendiri, sebagaimana pepatah mengatakan, *"Tidak ada yang menggaruk punggungmu seperti kukumu sendiri."*

Negara-negara Arab lain pun memperlihatkan berbagai bentuk pengkhianatan:

- Beberapa tetap diam terhadap agresi Israel (seperti Suriah).
- Sebagian menjalin hubungan rahasia (seperti Yordania dan Maroko).
- Ada yang hanya memberikan dukungan ekonomi dan politik yang semakin menurun (seperti negara-negara Teluk).
- Beberapa bahkan memanfaatkan faksi-faksi Palestina untuk kepentingan mereka sendiri, yang melemahkan persatuan Palestina (seperti Irak dan Libya).

2. Kebangkitan Islam

Pada awal 1970-an, gelombang kiri mulai surut, dan kebangkitan Islam mulai menyebar di banyak negara. Terlepas dari penyebab dan faktor yang melatarbelakangi kebangkitan ini, yang penting adalah bahwa kebangkitan Islam ini meningkat pesat, terutama di Mesir dan negara-negara Teluk.

Mesir, dengan seperempat populasi Arab, memiliki pengaruh luas karena tingkat pendidikannya yang tinggi. Setiap tahun, Mesir meluluskan banyak individu yang mengisi posisi di bidang pendidikan, hukum, dan profesi lainnya di banyak negara Arab, sehingga pengaruhnya meluas. Sementara itu, negara-negara Teluk, yang menikmati lonjakan pendapatan dari minyak, menggunakan kekayaan mereka untuk mendukung penyebaran kebangkitan Islam melalui

penerbitan buku, pendirian institusi pendidikan Islam, dan berbagai kegiatan lainnya.

Akhir 1970-an ditandai oleh tiga peristiwa besar yang memperkuat kebangkitan Islam:

1. Revolusi Iran.
2. Insiden Juhayman di Mekkah.
3. Invasi Soviet ke Afghanistan.

Ketiga peristiwa ini terjadi pada tahun 1979, ditambah dengan satu peristiwa lain yang hampir berhasil tetapi digagalkan, yaitu kebangkitan Islamis di Turki di bawah pimpinan Necmettin Erbakan, yang dihentikan oleh kudeta militer brutal pada tahun 1980.

Adapun revolusi Iran, itu adalah revolusi Islam Syiah yang berhasil menggulingkan Shah, salah satu sekutu utama Amerika Serikat di kawasan tersebut. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, para ulama religius berhasil menduduki posisi kekuasaan, menguasainya, dan mengalahkan semua upaya untuk menggulingkan atau melakukan kudeta terhadap mereka. Hal ini memberikan dampak kejut di seluruh kawasan; Amerika Serikat merasa mulai kehilangan pengaruhnya, sementara kaum Islamis merasa bahwa mereka sedang mengambil kembali kendali dan membebaskan diri dari era penjajahan. Pada awalnya, revolusi Iran mengambil pendekatan yang berhati-hati agar tidak bertentangan dengan umat Sunni dan menghindari konflik mendalam yang telah lama terpendam selama era sekularisme. Revolusi ini memutus hubungan dengan Israel dan mendukung Palestina serta para wakilnya. Pengaruh terpenting revolusi ini terhadap sejarah Palestina adalah bahwa kaum Islamis mulai bertanya: Mengapa kita tidak melawan? Mengapa kita tidak bangkit? Revolusi ini membuktikan bahwa keberhasilan Islam mungkin terjadi. Tidak hanya berhenti pada pertanyaan, tetapi roda aksi mulai berputar—aksi perlawanan Islam.

Adapun insiden Juhayman, itu adalah pemberontakan kecil yang dilakukan oleh sekelompok warga Saudi di Masjidil Haram, dengan tujuan mengumumkan bahwa Mahdi telah muncul di awal abad kelima Hijriah. Meskipun insiden ini berhasil dihentikan dalam waktu singkat oleh pasukan keamanan Saudi yang dibantu oleh pasukan

Prancis dan asing lainnya, dampak signifikan dari insiden tersebut adalah terungkapnya simpati yang kuat dari umat Islam—termasuk banyak yang berada di Masjidil Haram—terhadap gerakan ini. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam merasakan kebutuhan mendesak untuk keluar dari era kekalahan dan penghinaan, sehingga mereka dengan cepat mendukung bahkan bergabung sebagai pejuang dalam gerakan ini. Insiden ini juga mengungkapkan bahwa rakyat di Jazirah Arab tidak puas dengan kebijakan Saudi (yang pada waktu itu cenderung sekuler dan ditandai dengan kemerosotan moral yang mencolok), dan mereka siap untuk memberontak. Oleh karena itu, insiden ini menjadi titik balik dalam kebijakan Saudi, yang kemudian berbalik dari pendekatan sekuler dan kembali merangkul Islam dan Salafisme secara lahiriah, meskipun secara batiniah tetap melanjutkan sekularisme, westernisasi, dan ketergantungan pada kekuatan asing. Pola ini mengulang model yang diterapkan oleh pendiri Kerajaan, Abdulaziz, yang secara lahiriah sangat religius namun secara politik dan sistemik sangat sejalan dengan kepentingan asing. Pola ini bertahan selama sekitar empat dekade, hingga era Raja Salman bin Abdulaziz dan putranya, Mohammed bin Salman, yang membuka pintu bagi liberalisasi dan kebebasan moral secara ekstrem.

Adapun pendudukan Uni Soviet di Afghanistan, hal ini menyalakan api jihad di dunia Islam, terutama setelah rakyat Afghanistan menunjukkan keteguhan dan ketabahan yang luar biasa dan mengejutkan. Hal ini mendorong Amerika Serikat untuk mendukung jihad tersebut dengan memungkinkan migrasi umat Islam untuk berjihad, serta menyelundupkan beberapa senjata dan peralatan melalui negara-negara Arab, terutama Mesir, Saudi, dan negara-negara Teluk. Situasi ini memperbarui pertanyaan tentang jihad di Palestina dan memungkinkan sejumlah orang untuk mendirikan kamp pelatihan di Pakistan dan Afghanistan dengan tujuan mempersiapkan pemuda untuk berjihad di Palestina. Jika rakyat Afghanistan yang sedikit jumlahnya, lemah, dan miskin dapat bertahan melawan kekuatan besar Soviet, mengapa rakyat Palestina tidak dapat melakukannya melawan Israel?

Peristiwa-peristiwa besar ini, bersama dengan gelombang kebangkitan Islam yang muncul pada 1970-an dan 1980-an, membawa perubahan besar dalam perjuangan untuk Palestina dan Al-Quds.

Redupnya Gerakan Perlawanan Sekuler

Pada pertengahan 1980-an, sudah jelas bahwa gerakan perlawanan non-Islam telah kehilangan momentum, atau sedang berada pada ambang kejatuhan. Puncaknya terjadi ketika Gerakan Fatah keluar dari Lebanon setelah invasi Israel pada tahun 1982, dan para anggotanya terpaksa mengungsi ke Yaman, Libya, dan Aljazair. Kelompok pimpinan Fatah kemudian pindah ke Tunisia, negara yang jauh dari Palestina dan tidak bisa dianggap sebagai tempat perlawanan. Ini secara praktis berarti bahwa perlawanan telah diusir dari Palestina, lalu diusir pula dari negara-negara tetangga: Yordania pertama (1970) dan kemudian Lebanon (1982). Mengingat hasil yang dicapai oleh gerakan-gerakan ini selama dua puluh tahun (1965-1985), mereka terlihat sangat lemah meskipun memiliki sumber daya berupa tanah, uang, kamp pelatihan, dan beberapa dukungan dari negara Arab dan internasional pada beberapa kesempatan.

Selain itu, skandal finansial, moral, dan perselisihan internal yang muncul dalam gerakan-gerakan ini mempersiapkan suasana hati dan kondisi untuk beralih menjauh darinya dan tidak lagi berharap banyak pada mereka. Gerakan-gerakan ini juga mengalami perjuangan ideologis kiri yang membawanya menuju bentrokan dengan rezim yang berkuasa di Yordania dan Lebanon, serta pembentukan wilayah-wilayah yang didominasi secara militer. Hal ini membawa mereka dalam konflik dengan banyak orang, termasuk mereka yang mendukung Palestina, serta dengan rezim yang berkuasa. Meskipun rezim-rezim tersebut tidak nasionalis dan tidak benar-benar mendukung Arabisme dan Palestina, keadaan perlawanan yang disusun oleh gerakan ini memberi alasan yang sah dan diterima untuk menyerang dan menghancurkannya dengan bantuan orang-orang yang tidak puas dengan mereka dari negara-negara tersebut.

Selanjutnya, ideologi sekuler yang dipegang oleh gerakan ini—baik ideologi kiri maupun nasionalis—telah mengalami pukulan intelektual yang mengurangi daya tariknya yang pernah dimiliki pada 1950-an dan 1960-an. Proyek nasionalisme menerima pukulan fatal setelah kekalahan 1967, dan kemudian gerakan kiri dan komunisme merosot pada 1970-an dan 1980-an seiring dengan munculnya kebangkitan Islam, terutama di Mesir dan Jazirah Arab. Hal ini se-

makin memperbesar jurang pemisah dan rasa antipati masyarakat terhadap gerakan-gerakan ini, yang beberapa anggotanya terlalu terjebak dalam sekularisme, kekufuran, dan perilaku seperti menari, minum alkohol, dan pembunuhan, antara lain.

Akhirnya, kompromi politik yang dilakukan oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) semakin meningkat, mulai dari menerima negara Palestina dan pengembalian Yahudi ke tanah mereka, hingga menerima solusi dua negara di sebagian wilayah, serta dari perjuangan bersenjata sebagai satu-satunya solusi menjadi salah satu dari banyak solusi yang diusulkan. Bahkan bagi mereka yang masih berpikiran baik tentang PLO, menjadi jelas bahwa organisasi ini dan gerakannya telah lelah, kehabisan tenaga, dan telah menyelesaikan potensinya!

Pengalaman gerakan perlawanan sekuler memberikan rasa sakit dan kritik di kalangan gerakan Islam. Sebab, kenyataannya pendiri besar Gerakan Fatah berasal dari Ikhwan Muslimin dan mereka meninggalkan gerakan itu hanya karena hasrat untuk melawan, dan mereka berhasil melakukan apa yang telah mereka capai dalam Fatah. Seandainya jamaah Ikhwan Muslimin merespon keinginan mereka untuk berjuang, hasilnya pasti akan lebih baik, dan mereka bisa menghindari kerusakan sekuler dan moral serta pengalaman-pengalaman gagal yang menyakitkan. Kegagalan Fatah dan dominasi kaum sekuler dalam gerakan perlawanan memberi tekanan terus-menerus dan rasa sakit bagi mereka yang melihat pengalaman ini sebagai bentuk kegagalan Islam yang tidak mengerti kewajiban saat itu dan tidak menghargai momen bersejarah yang telah terlewatkan.

Faktor-faktor ini—normalisasi hubungan Arab, kebangkitan Islam, dan kejatuhan gerakan perlawanan sekuler—bersama-sama menciptakan suasana yang mendukung kemunculan dan kebangkitan gerakan perlawanan Islam.

Gerakan Islam pertama kali muncul dengan dipelopori oleh Dr. Fathi al-Shiqaqi, yang menyadari bahwa sekarang ini kelompok Islamis sudah siap untuk terlibat dalam perlawanan. Ia merasa bahwa tidak pantas bagi mereka untuk tidak terlibat, dan ia merasa prihatin dengan perpecahan yang ada, yang ia ungkapkan dengan mengatakan: "Nasionalis tanpa Islam, dan Islamis tanpa Palestina." Maka ia mendirikan Gerakan Jihad Islam (1980) setelah berpisah

dari Ikhwanul Muslimin, karena ia melihat bahwa mereka masih berpegang pada keputusan lama mereka. Ia mulai membentuk sayap militer pada musim panas 1981, dengan operasi pertamanya pada tahun 1986, yaitu operasi Bab al-Maghariba, yang berhasil menyerang sekitar 80 tentara Israel, dan operasi lainnya mengikuti.

Pemisahan al-Shiqaqi dari Ikhwanul Muslimin adalah salah satu pemisahan terakhir yang terjadi. Kelompok yang akan membawa gerakan ini menuju perlawanan sebenarnya lahir dalam tubuh atau dekat dengan tubuh Ikhwanul Muslimin, meskipun informasi tentang pendirian Hamas dan hubungan antara Hamas dan Ikhwan di Palestina, terutama di Gaza yang menjadi pusat gerakan Islam, masih terbatas. Namun yang ada menunjukkan bahwa Hamas merupakan semacam kudeta halus atau pengambilalihan diam-diam terhadap Ikhwanul Muslimin di Palestina, karena ide yang dibawa oleh Sheikh Ahmad Yassin bertentangan dengan metode yang diikuti Ikhwan di Palestina, dan mereka menerima serta menyesuaikan diri dengan itu. Maka, beberapa pemimpin yang mendirikan Hamas berhasil dengan cerdik melaksanakan pengambilalihan ini, sambil mempertahankan label Ikhwanul Muslimin, serta dengan diam-diam mengisolasi pemimpin yang menolak pendekatan perlawanan. Tentunya, beberapa pemimpin ini memiliki keikhlasan dan kesucian jiwa, sehingga mereka memilih untuk mundur dan melepaskan posisi mereka tanpa menimbulkan masalah besar yang dapat memicu perpecahan terbuka. Mereka memberikan kontribusi besar bagi gerakan Islam di Palestina.

Meskipun Sheikh Ahmad Yassin kemudian memimpin perlawanan terhadap sikap Ikhwan, pada awalnya ia tidak bergabung dengan Fatah, bahkan menolak konsep kerja yang dikembangkan oleh Fatah. Ia menjelaskan bahwa metode ini tidak akan mencapai hasil apa-apa, karena memulai perlawanan dari negara-negara Arab yang lemah akan memungkinkan Israel untuk memperluas wilayahnya dan mengambil lebih banyak tanah dari negara-negara lain, serta mengarahkan kekuatan rezim-rezim ini untuk menekan perlawanan. Oleh karena itu, ia lebih memilih agar perlawanan dimulai dari dalam wilayah yang diduduki, dan jika ini tidak memungkinkan saat ini, maka perjuangan untuk mencapainya harus dimulai.

Meskipun periode ketika kelompok Islamis tidak terlibat dalam perlawanan telah menghabiskan peluang berharga yang tak ternilai, namun itu tidak sia-sia sepenuhnya. Sifat Islam dan pengaruhnya yang mendorong gerakan dan aktivitas umat Islam telah mengarahkan mereka untuk terlibat dalam kegiatan amal, dakwah, pendidikan, dan kegiatan mahasiswa. Dengan gelombang kebangkitan Islam pada 1970-an dan 1980-an, umat Islam telah tersebar dan menanamkan banyak benih sosial, dakwah, amal, pendidikan, dan kegiatan mahasiswa di Palestina dan di luar negeri di kalangan orang Palestina. Persatuan mahasiswa Palestina didominasi oleh kelompok Islam, dan perlahan-lahan masyarakat Palestina mulai menghasilkan pemimpin-pemimpin Islam yang menentang Fatah dan PLO dalam pendekatan sekuler mereka. Maka gerakan perlawanan Islam yang akan lahir akan didukung oleh akar sosial yang banyak dan tersebar, yang membuat kebangkitannya mendadak menjadi sangat kuat.

Ciri-ciri awalnya adalah pengiriman beberapa pemuda untuk pelatihan militer di luar negeri (1980), kemudian dimulailah kerja Hamas dengan membentuk unit keamanan (1981) untuk mengumpulkan informasi dan melacak agen-agen Zionis yang bekerja untuk mereka, serta merekrut agen-agen Palestina untuk mereka. Mereka berhasil mengungkap beberapa agen dan mengadili mereka tanpa pengumuman. Kemudian mereka mulai membentuk unit militer yang memiliki tanggung jawab untuk merekrut pemuda dan mencari senjata, yang keduanya sangat berisiko di bawah lingkungan penjajahan, apalagi jika penjajahan itu didasarkan pada teori keamanan! Dan bagaimana jika dimulai dengan pengalaman terbatas dan berdasarkan eksperimen dan kesalahan? Namun, segala sesuatunya berjalan dengan cepat dan diam-diam, dan unit militer ini berhasil melakukan sejumlah operasi yang menyebabkan beberapa tentara penjajah tewas dan tertangkap, sehingga beberapa sel militer yang telah dibentuk terbongkar, dan Sheikh Ahmad Yassin ditangkap pada tahun 1984.

Pada paruh pertama tahun 1980-an, terdapat penurunan signifikan dalam pemikiran perlawanan, terutama di dalam Palestina, yang disertai dengan penurunan tajam dalam operasi perlawanan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya penyesuaian dan

pembiasaan antara sektor-sektor luas masyarakat Palestina dan orang Yahudi, hingga mungkin terjadi hubungan yang hampir alami antara keduanya. Pihak administrasi Israel bekerja untuk menguras kekuatan finansial dan moral rakyat Palestina melalui berbagai cara. Banyak orang Palestina yang bekerja di wilayah Israel, bahkan bisa tinggal selama seminggu atau lebih di tempat kerja mereka di wilayah yang diduduki sejak 1948. Pedagang Israel juga sering mengunjungi pasar di Gaza dan Tepi Barat. Dengan semakin banyaknya hubungan dan waktu yang berlalu, serta semakin berkurangnya ancaman, kehadiran orang Yahudi mulai berkembang di dalam masyarakat Palestina, dimulai dari sisi perdagangan, lalu sosial. Hal ini menjadikan pekerjaan perlawanan itu sendiri kadang-kadang terpinggirkan secara sosial, terutama di beberapa kalangan masyarakat.

Kondisi ini tidak mengejutkan, karena ini adalah bagian dari dinamika sosial, dan kita harus ingat keadaan sulit yang terjadi pada periode ini setelah Israel, dengan bantuan pemerintah-pemerintah Arab, berhasil melaksanakan serangan fatal terhadap gerakan-gerakan perlawanan. Salah satu serangan terbesar terjadi di Yordania (1970), lalu di Lebanon (1982), selain rangkaian pembunuhan terhadap para pemimpin gerakan tersebut di Eropa, Lebanon, Tunisia, dan negara lainnya, sehingga tampak bahwa perlawanan menjadi pilihan yang mustahil dan tidak bermanfaat, bahkan penuh dengan kerugian yang tidak bisa ditanggung, terutama karena negara-negara Arab mulai terlibat dalam perdamaian dan normalisasi dengan Israel.

Kondisi Palestina yang mulai terbiasa dengan kehadiran orang Yahudi ini, mendorong Israel untuk pertama kalinya berpikir untuk memanfaatkan beberapa tokoh dan membentuk entitas administratif kecil di desa-desa untuk mengelola kehidupan sehari-hari masyarakat Palestina, setelah mereka berhasil menghancurkan dan menghapuskan kepemimpinan PLO di luar negeri.

Karena itulah, salah satu prioritas utama dari kerja Sheikh Yasin dan rekan-rekannya adalah untuk memerangi pembiasaan ini yang mulai berkembang di dalam masyarakat Palestina, terutama antara pemuda Yahudi dan pemuda Palestina. Kerja dakwah dan gerakan berusaha keras untuk menegaskan bahwa mereka adalah orang

Yahudi, bahwa mereka adalah penjajah, dan bahwa tidak mungkin ada koeksistensi dengan mereka!

Namun, kebangkitan Islam ini tidak lepas dari berbagai rintangan; namun yang paling berat adalah dua hal: Pertama: Apa yang dialami oleh masyarakat akibat jauhnya mereka dari kerja Islam dan gaya hidup Islami, serta berkembangnya ideologi kiri dan penyimpangan moral, hingga salah satu pemimpin pendiri Brigadir Qassam menyebutkan bahwa desanya, "Salfit," dijuluki "Moskow Kecil" karena dominasi komunisme dan atheisme, hilangnya jilbab, serta minimnya pemuda yang datang ke masjid dan kebencian terhadap kaum Islamis. Kedua: Apa yang dilakukan oleh Gerakan Fatah yang merasa kepemimpinannya terancam dan mulai goyah, yang bahkan sampai melakukan pembunuhan, persekusi, dan melemparkan bom ke rumah-rumah pemimpin Islam, serta bentrokan-bentrokan antara mahasiswa. Bahkan, kekerasan dan penindasan terjadi di dalam penjara Israel terhadap tahanan Hamas, dan Sheikh Ahmad Yasin berhasil menjaga keseimbangan antara menghindari konflik internal dan tidak membiarkan gerakan ini melemah atau dipermalukan, yang pada akhirnya berhasil menghindari pertikaian internal.

Setelah serangan pada tahun 1984, organisasi militer Hamas diperbaiki. Beruntungnya, Front Populer berhasil menangkap tiga tentara Israel dalam Perang Lebanon, dan menukarnya dengan seribu dua ratus tahanan, termasuk Sheikh Yasin yang saat itu hanya menjalani sebelas bulan dari hukumannya yang seharusnya tiga belas tahun. Dia mulai bekerja pada tahun 1986, namun Hamas baru mengungkapkan eksistensinya ketika Intifadah pertama pecah pada Desember 1987.

Seorang pemukim Zionis yang mengendarai truk dengan sengaja menabrak sekelompok pekerja Palestina, yang memicu gelombang kemarahan di masyarakat Palestina. Namun, masyarakat yang tidak bersenjata dan hanya memiliki batu untuk melempar, dikenal dengan nama "Intifadah Batu." Gerakan ini dimulai dengan para mahasiswa dari Universitas Islam di Gaza, dan kemudian gerakan Islam memutuskan untuk terlibat langsung dalam peristiwa ini, memperluas intifadah dari kampus yang telah ditutup oleh Israel, ke jalan-jalan, alun-alun, dan masjid.

Gerakan ini segera menyebar di seluruh Palestina, dan masyarakat yang sebelumnya tampak lelah dan tertekan, serta yang terlihat seolah-olah telah kehilangan semangat perlawanan, kembali bangkit untuk melawan penjajahan, bahkan dengan cara yang mengejutkan yang membuat Israel dan para pemimpin Palestina tercengang. Gerakan revolusioner ini muncul di berbagai lapisan masyarakat untuk memperbesar perlawanan ini, termasuk melalui pemogokan, penolakan membayar pajak dan biaya, serta memboikot otoritas sipil Israel. Untuk pertama kalinya, masyarakat yang sebelumnya terlihat pasif dan terbiasa dengan penjajahan kembali mengambil inisiatif, setelah hilangnya perlawanan yang berasal dari luar negeri.

Namun, intifadah ini membawa hal baru yang berbahaya bagi Israel dan sekutunya, yakni munculnya organisasi-organisasi Islam yang membawa ide baru dalam pertempuran. Jika sebelumnya PLO berharap akan terwujud solusi satu negara yang di dalamnya ada co-existence antara Yahudi dan Arab, kini organisasi-organisasi Islam menghidupkan kembali ide untuk membebaskan Palestina dari laut hingga sungai, bahkan menjadikannya sebagai ide yang suci yang tidak bisa ditawar, berbeda dengan organisasi sekuler yang lebih mengutamakan pragmatisme!

Penjajahan Israel menerapkan kebijakan hukuman yang beragam, mulai dari mematahkan tulang, di mana pemuda Palestina ditangkap dan tangan atau lengan mereka dipatahkan, hingga penangkapan, penyiksaan, dan penembakan dengan peluru. Selama enam tahun intifadah, jumlah syahid lebih dari seribu lima ratus, sekitar seratus tiga puluh ribu terluka, dan sekitar seratus dua puluh ribu ditahan!

Tindakan protes massal disertai dengan operasi-operasi strategis lainnya, seperti penculikan tentara Israel, serta meningkatnya jumlah eksekusi terhadap para kolaborator. Beberapa serangan bersenjata juga terjadi terhadap pemukiman dan situs-situs Yahudi, yang menjadi perkembangan yang membingungkan bagi pihak Israel. Keadaan ini semakin kabur karena tidak ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas operasi-operasi tersebut, termasuk Hamas sendiri.

Dengan diumumkannya keberadaan Hamas, Israel melancarkan kampanye sengit untuk menangkap anggotanya dan siapa saja yang

dicurigai memimpin atau mengorganisirnya. Pada awalnya, Israel berhasil menangkap banyak pemimpin Hamas di Gaza dan Tepi Barat, namun operasi lapangan dalam mendukung intifadah dan mengeluarkan pernyataan tetap berlanjut.

Di sisi lain, rejim Yordania mengambil langkah berbahaya dengan mengumumkan untuk melepaskan Tepi Barat (31 Juli 1988) dan menyerahkannya kepada rakyat Palestina, yang berarti menyerahkannya kepada Israel yang sudah menguasainya sejak 1967. Keputusan ini menyebabkan kekacauan dan perselisihan di antara orang Palestina tentang siapa yang akan memimpin mereka dan bagaimana mereka akan dipimpin di bawah pendudukan. Ini menjadi bentuk tambahan penguatan pendudukan di masa yang sangat sulit.

Beberapa analisis berpendapat bahwa Raja Hussein mengambil langkah ini untuk menghindari dua tekanan yang saling bertentangan yang tidak lagi bisa dia hadapi bersama-sama. Ada masyarakat Arab Yordania yang terdiri dari banyak orang Palestina yang telah mengungsi ke Yordania selama bencana-bencana sebelumnya, yang menekan untuk mendukung intifadah dan berperan lebih besar dalam melawan pendudukan, terutama karena Tepi Barat telah terlepas dari Yordania, yang menurut konstitusi Yordania adalah tanah Yordania. Ini adalah tekanan pertama. Sedangkan tekanan kedua adalah dari pihak Israel yang meminta langkah-langkah lebih besar dari Raja Yordania dalam kerjasama politik, keamanan, dan mungkin militer, yang dapat mengancam keberadaan rejim Yordania itu sendiri meskipun ia tetap memiliki hubungan erat dengan Zionis namun selalu mengedepankan retorika Arab di depan rakyatnya.

Namun, serangkaian kejadian ini menunjukkan tujuan yang lebih jahat. Keputusan untuk memutuskan hubungan tersebut memberikan peluang baru bagi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), karena hal itu membuka ruang bagi PLO untuk menjadi wakil rakyat Tepi Barat. Setelah tiga bulan, organisasi ini mengadakan konferensi nasional kesembilan belas, yang menunjukkan perubahan besar dalam posisi Fatah dan PLO, bahkan merupakan pembalikan atas posisi mereka sebelumnya. Di sinilah Fatah dan PLO mulai mempersiapkan diri sebagai pengkhianat yang akan menyerang intifadah Palestina.

Dalam konferensi ini, PLO mengakui keputusan pembagian Palestina (1947) dan menyerukan penyelesaian politik untuk masalah ini, yang berarti pengakuan terhadap Israel dan pengunduran diri dari wilayah yang diduduki pada tahun 1948. Untuk tidak terlihat hanya memberikan konsesi, konferensi ini juga mengumumkan apa yang disebut "Kemerdekaan Palestina," meskipun tanpa kemampuan praktis untuk mencapai kemerdekaan. Ini menjadi kesempatan bagi banyak negara untuk mengakui Palestina, atau lebih tepatnya mengakui kepemimpinan Palestina yang menyimpang dari jalur dan masuk ke dalam proses penyerahan dan penyelesaian, sementara negara-negara Barat tetap tidak mengakui Palestina atau organisasi tersebut.

Dengan demikian, masalah Palestina dihantam dua kali, pada dua tahap yang berbeda, dengan dua semboyan yang bertentangan. Palestina dihantam dengan semboyan pan-Arabisme dan nasionalisme untuk mencegah orang Palestina memiliki kepemimpinan dan wakil yang independen, dengan alasan bahwa ini adalah masalah militer bukan masalah kelompok gerilya, yang mencegah orang Palestina dan perlawanan bersenjata. Ketika rezim-rezim Arab akhirnya menyerahkan Palestina kepada Zionis, mereka kembali menusuknya dengan semboyan nasionalisme, mengklaim bahwa orang Palestina lebih berhak memperjuangkan tanah mereka dan melindungi kemerdekaan mereka, namun hanya setelah mereka memastikan jalur yang akan diambil oleh kepemimpinan PLO yang telah lelah dan lemah.

Sementara itu, di lapangan, intifadah terus berkobar. Di jantung intifadah ini, perlawanan bersenjata mulai menemukan jalannya dan mengembangkan pengalamannya. Operasi sayap militer Hamas dimulai dengan penculikan dua tentara Israel pada tahun 1989, kemudian sayap militer ini dihantam dan dibentuk kembali dengan nama "Brigade Izz ad-Din al-Qassam" pada tahun 1990. Organisasi ini mulai menguat, dengan sekitar seratus empat puluh operasi yang menghasilkan delapan puluh tentara Israel tewas dan lebih dari dua ratus terluka pada tahun 1993. Apa yang sangat mengagumkan adalah sebagian besar dari operasi ini dilakukan dengan metode coba-coba, belajar dari kesalahan, dan bahkan melalui pengorbanan

para korban, yang menunjukkan betapa cepatnya mereka mencapai hasil ini meskipun berada di lingkungan yang sangat terbatas dan tanpa pengalaman sebelumnya.

Seperti halnya disebut sebagai "Intifadah Batu," intifadah ini juga dikenal sebagai "Intifadah Masjid" karena dimulai dari masjid, dengan aksi-aksi yang terjadi setiap Jumat setelah shalat Jumat. Karena para pemimpin intifadah ini beridentitas Islam, mengangkat semboyan Islam, dengan banyak khatib dan tokoh Islam, serta gerakan-gerakan Islam yang muncul di dalamnya, maka ini adalah intifadah yang jelas beridentitas Islam. Meskipun demikian, berbagai kelompok dari gerakan kiri dan nasionalis juga terlibat dalam kegiatan dan operasi ini, yang tidak mengurangi identitas Islam yang mendominasi.

Dalam serangan besar dan luas, Israel menangkap lebih dari empat ratus pemimpin Islam di Tepi Barat dan Gaza, dan kemudian memutuskan untuk mengasingkan mereka ke luar Palestina, ke Lebanon.

Namun, para pemimpin yang diasingkan ini, yang dibawa dari penahanan ke perbatasan Lebanon, menciptakan pendekatan baru dalam menghadapi situasi ini. Mereka tidak menyerah pada keputusan pengasingan, melainkan bertahan di tempat mereka dipaksa tinggal, di daerah "Marj al-Zuhur" di selatan Lebanon, mendirikan kamp di tengah dingin dan salju, di tempat yang tidak layak huni. Tindakan ini membawa sejumlah keuntungan penting bagi mereka:

1. Menunjukkan perbedaan antara para pemimpin Islam baru ini dengan pemimpin faksi-faksi PLO yang terlibat dalam politik negara dan mencari keuntungan di pengasingan mereka di luar Palestina.
2. Menunjukkan betapa kuatnya keterikatan para pemimpin ini dengan Palestina, karena mereka berada di perbatasan dalam kondisi yang sangat sulit sambil berusaha kembali, bahkan dengan ancaman bahaya yang mengancam mereka, yang merupakan pemandangan heroik yang sangat mengagumkan.
3. Pertemuan semua pemimpin ini di satu tempat memberikan kesempatan yang sangat berharga yang tidak bisa mereka dapatkan di dalam Palestina, karena mereka dapat bertemu, ber-

kumpul, dan merencanakan langkah-langkah mereka. Seolah-olah mereka dipertemukan oleh pendudukan dalam pertemuan yang tidak mungkin mereka dapatkan jika mereka tetap waspada dengan langkah-langkah keamanan.

4. Protes ini di Marj al-Zuhur menjadi perhatian media Arab dan internasional, yang tertarik untuk mempelajari fenomena baru ini (protes di perbatasan) dari para pemimpin Islam baru ini, yang berbeda dari gaya kepemimpinan PLO.
5. Semua ini menyebabkan lonjakan mendalam dalam popularitas Hamas dan memperkuat simbolisme para pemimpin Islam baru ini.

Salah satu hasil penting dari intifadah adalah bahwa ia memindahkan pertempuran dan pusat perlawanan Palestina ke dalam negeri. Sebelumnya, pusat perlawanan terletak di luar negeri: kadang di Yordania, kadang di Lebanon, namun kini pusat itu beralih ke dalam negeri, yang berarti meningkatnya tingkat bahaya perlawanan, karena mereka lebih mengenal tanah mereka dan lebih mampu "mengendalikan jalannya pertempuran serta menentukan kebutuhan operasional. Seorang tentara di dalam negeri lebih berharga daripada seratus di luar negeri, dan sebuah senapan di dalam negeri lebih berharga daripada seratus di luar negeri." Selain itu, perlawanan ini bergerak di dalam lingkungan rakyat Palestina yang mendukungnya, tanpa batasan politik seperti halnya sistem-sistem dan kalkulasi politik mereka. Perlawanan ini juga tidak memiliki keuntungan yang mereka takutkan akan hilang, seperti yang dialami organisasi yang berada di luar negeri. Lebih dari itu, perlawanan ini adalah gerakan cair yang belum terorganisir dalam lembaga-lembaga publik atau struktur yang dapat ditangani dan dihentikan, dan ia bersifat rahasia, tersembunyi di antara gelombang dukungan rakyat yang marah namun mendukung. Situasi seperti inilah yang paling sulit untuk dihadapi.

Perjanjian Oslo dan Pembentukan Otoritas Palestina

Telah berulang kali dalam sejarah kontemporer kita bahwa penjajah asing, jika gagal menekan dan memadamkan pemberontakan,

akan mencari jalan lain yang lebih licik, di antaranya: menciptakan atau memperluas jalur untuk kepemimpinan yang setia kepada mereka, atau kepemimpinan yang dianggap lemah atau korup, untuk menjadi pemimpin yang mewakili pemberontakan ini. Jika ini terjadi, maka revolusi kehilangan maknanya, dan bisa saja tercerai-berai, terpecah, atau kalah dengan alasan yang sepele.

Pada saat itu, Yasser Arafat, yang telah menjadi Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), berada dalam keadaan yang sangat buruk. Hidupnya adalah rangkaian kegagalan besar, ini jika kita memberikan pandangan baik dan mengabaikan kecurigaan yang beredar tentang dirinya. Dia dipaksa keluar dari Yordania (1970), kemudian dari Lebanon (1982), lalu para pemimpin kuat di sekitarnya dibunuh, termasuk banyak kader PLO dan gerakan Fatah, sementara intensitas operasi yang dilakukan oleh gerakannya atau PLO sangat menurun. Negara-negara Arab pun mulai meninggalkan perjuangan Palestina, dimulai dengan Mesir (1979) dan kemudian dengan inisiatif Pangeran Fahd, Putra Mahkota Saudi (1982), yang diadopsi oleh KTT Arab di Fes, Maroko. Bahkan negara-negara yang menolak normalisasi dan perdamaian tidak memberinya bantuan yang dibutuhkan. Hafez al-Assad (presiden Suriah) meninggalkannya di Lebanon, begitu pula Muammar Gaddafi (presiden Libya), yang semuanya berusaha menjadikan Arafat sebagai orang yang bergantung pada mereka, sementara Palestina dijadikan alat tawar untuk menyelesaikan urusan mereka sendiri. Dia juga melakukan kesalahan besar ketika mendukung posisi Presiden Irak Saddam Hussein dalam invasi ke Kuwait, yang menimbulkan kemarahan dari Kuwait dan negara-negara Teluk lainnya, yang dulunya adalah donor utama. Ketika Saddam Hussein kalah dan pasukan Amerika turun tangan di Teluk, posisi Arafat sangat terpuruk baik di dunia Arab maupun di Palestina sendiri.

Hingga saat ini, sepengetahuan saya, belum terungkap siapa yang berpikir untuk memanfaatkan Yasser Arafat untuk memimpin pemberontakan Palestina. Ini adalah kali pertama dalam sejarah Palestina bahwa penjajah mengizinkan terbentuknya kepemimpinan Palestina, padahal sejak awal pendudukan Inggris hal ini dilarang! Semua upaya sebelumnya hanya menghasilkan pemimpin-pemimpin

kecil yang mengelola dewan-dewan kota dan fasilitas lainnya, bukan kepemimpinan yang mewakili rakyat secara politik.

Intifadah besar yang berbasis Islam menunjukkan bahwa sebuah bangsa tanpa kepemimpinan bisa menjadi ancaman, dan keluasannya bisa menjadi sumber kekhawatiran dan gangguan yang berkelanjutan. Setiap kali sebuah sel dihancurkan, yang lain muncul. Dari sini muncul ide bahwa kepemimpinan Palestina yang setia kepada penjajah akan lebih baik bagi penjajah daripada mengelola urusan Palestina sendiri. Tidak diragukan lagi bahwa perilaku negara-negara Arab dan kemampuannya mengendalikan rakyat mereka membuat ide ini lebih kuat dan menggoda. Melihat apa yang dicapai oleh negara-negara yang berbatasan dengan Israel dalam melindungi negara tersebut sambil mengekang rakyat mereka, meyakinkan bahwa membentuk sebuah pemerintahan Palestina seperti itu adalah solusi yang tepat.

Persamaan yang berlaku di negara-negara Arab sejak pendirian Israel adalah peran mereka dalam melindungi Israel sebagai imbalan atas dukungan internasional yang memungkinkan mereka bertahan di kursi kekuasaan. Ini menciptakan persaingan di antara calon penguasa yang berusaha mendapatkan dukungan Israel untuk meraih dukungan AS.

Pada titik ini, datanglah giliran Yasser Arafat untuk menjadi pemimpin Palestina yang akan memikul tugas tersebut. Bagi Arafat, ini adalah kesempatan hidup yang tak bisa disia-siakan setelah perjalanan panjang kegagalan yang membuatnya hampir menjadi salah satu pemimpin Palestina yang terpinggirkan dan dilupakan oleh sejarah dan realitas.

Arafat selama kariernya menunjukkan kepribadian yang fleksibel, licik, dan licin, bahkan direktur CIA menyebutnya sebagai "orang paling kompleks yang pernah saya hadapi". Dengan kecenderungan otoriter untuk mengontrol senjata dan uang di dalam gerakan Palestina, masih banyak bagian dari perjalanan hidupnya yang misterius dan belum terungkap, dan tidak cukup tempat di sini untuk membahasnya. Namun yang jelas, Arafat adalah sosok yang tepat untuk membuat konsesi pada saat itu.

Selain situasi lokal tersebut, perubahan signifikan dalam situasi

internasional juga berperan besar; Uni Soviet runtuh, dan Amerika menjadi satu-satunya kekuatan besar yang mendominasi kawasan ini, menghancurkan kekuatan Irak setelah kegagalan invasi Kuwait oleh Saddam Hussein. Semua ini memunculkan beberapa hasil krusial, di antaranya:

1. Kerapuhan negara-negara Arab yang sekali lagi tampak lemah; mereka dihadapkan pada sistem yang tidak mampu melindungi diri mereka sendiri dan terpaksa mendekat ke Amerika.
2. Kekuatan besar yang melindungi negara-negara yang berada di bawah pengaruh Uni Soviet, seperti Suriah, Irak, dan Libya, mulai terkikis, dan ini membuat mereka lebih lemah dalam menghadapi Israel atau mendukung Palestina secara efektif.
3. Terjadinya pemindahan gelombang kedua ratusan ribu orang Palestina dari Kuwait (salah satu negara Teluk dengan jumlah besar warga Palestina) dan Irak setelah invasi Irak ke Kuwait dan pengusiran pasukan internasional, yang semakin memperburuk keadaan dan menghentikan banyak dana serta menghancurkan banyak potensi Palestina.
4. Arus migrasi besar-besaran orang Yahudi dari Uni Soviet yang runtuh, hingga jumlah mereka mencapai satu juta dalam sepuluh tahun setelah kejatuhannya, dengan banyak di antaranya adalah elemen-elemen ilmiah dan militer terkemuka.
5. Semua ini mengarah pada hasil yang lebih besar: masalah Palestina semakin terpinggirkan, dan pengaruh Israel semakin kuat.

Yasser Arafat berada di pihak yang kalah, karena mendukung Saddam Hussein, yang memperburuk kebutuhannya akan kesempatan penyelamatan. Di sisi lain, kemenangan Amerika dan runtuhnya Uni Soviet mendorong Amerika dan Israel untuk mempertimbangkan usulan ini: usulan tentang pemerintahan yang lemah dan tergantung yang dapat menangani "sakit kepala" yang ditimbulkan oleh Palestina.

Di tengah peristiwa ini, Arafat telah membuat konsesi besar lainnya, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, pada tahun 1988, ia meninggalkan slogan lama tentang perjuangan untuk negara

sekuler satu, baik Yahudi maupun Islam, dan menerima solusi dua negara: negara Palestina berdampingan dengan negara Yahudi, dengan negara Palestina yang terletak di Tepi Barat dan Gaza, yakni pada batasan sebelum 1967. Ini adalah pengkhianatan pertama terhadap Palestina secara historis, dan langkah pertama menuju pengakuan terhadap negara Israel.

Kekuatan internasional terbukti mengkhianati prinsip sekularisme yang mereka dukung, mendukung negara Yahudi dan mengabaikan organisasi Palestina sekuler yang menyerukan satu negara sekuler! Bahkan mereka menekan para pendukung negara sekuler untuk menerima keberadaan negara Yahudi di sebelah mereka! Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, jika Israel hanya merupakan proyek kolonial sekuler, maka mendirikan satu negara sekuler adalah tujuan utamanya. Namun, Israel adalah proyek yang tidak dapat dipisahkan dari doktrin Kristen yang terhubung erat dengan Barat dan yang menjadi salah satu pilar peradabannya.

Begitulah gambaran yang terbentuk sekarang: Arafat, pemimpin Palestina yang kalah secara militer, dikhianati secara politik, dan mengorbankan prinsip-prinsip lamanya, yang telah mengambil langkah besar menuju pengakuan atas Israel kini siap menjadi kuda Troya yang digunakan untuk menipu intifada Palestina!

Mulailah fase komunikasi dan negosiasi, yang diinginkan oleh Israel dengan beberapa tujuan: memastikan bahwa otoritas Palestina ini akan tunduk, tidak akan menjadi ancaman bagi Israel, akan menjalankan tugasnya dalam mengontrol rakyat Palestina dan menyerang gerakan perlawanan, serta akan menarik intifada ini ke ruang perundingan untuk meredakannya. Sebagai gantinya, Arafat ingin memperkuat dirinya dengan kekuasaan nyata yang memberikan tempat baginya baik di Palestina atau dalam wilayah Arab secara lebih luas, dan memperoleh keuntungan semaksimal mungkin untuk menghapuskan aib pengakuannya terhadap Israel dan haknya untuk ada di lebih dari tiga perempat tanah Palestina, serta untuk membuktikan bahwa ia tidak akan menjadi penjaga keamanan yang melindungi Israel dan meredam perlawanan rakyatnya.

Semua ini berlangsung dalam sejumlah pertemuan rahasia dan terbuka, yang puncaknya adalah Perjanjian Oslo (1993).

Dengan menilai keseimbangan kekuatan, karakter para pihak yang terlibat, dan pihak-pihak pendukung masing-masing, hasilnya tidaklah sulit untuk diprediksi: perjanjian ini menghasilkan pembentukan Otoritas Palestina yang mengakui hak Israel untuk eksis, berjanji untuk menjaga keamanannya, memerangi perlawanan, dan menyerahkan semua wilayah yang diduduki sebelum 1967, sementara yang diperoleh hanya pengakuan terhadap otoritas ini dan janji penarikan bertahap dari Gaza dan sekitar seperlima wilayah Tepi Barat, dengan penundaan untuk masalah penting lainnya ke perundingan berikutnya. Masalah penting ini adalah: status Yerusalem, kembalinya pengungsi, batas negara Palestina, sumber daya air, dan pemukiman Yahudi yang dibangun di wilayah yang diduduki 1967.

Selain itu, masalah para tahanan tidak mendapatkan tempat dalam perjanjian ini, yang berdampak besar pada para tahanan itu sendiri dan pada nilai-nilai yang dipegang oleh para anggota Gerakan Fatah.

Dengan demikian, Israel hanya memberikan Arafat kekuasaan terbatas yang memungkinkannya untuk mengambil alih tugas administratif dan keamanan yang memungkinkannya mengendalikan masyarakat Palestina dan meredam perlawanan mereka. Israel tidak memberikan apa pun selain janji untuk melanjutkan putaran perundingan di masa depan. Ini adalah pengorbanan terbesar yang terlihat dalam perjalanan perjuangan Palestina, yang direbut oleh "pemimpin Palestina" yang dihadirkan untuk meredam intifada yang kuat!

Sebagai gantinya, Israel melanjutkan kebijakan pendudukannya, memperkuat keberadaannya di tanah Palestina, memperluas pemukiman, dan mengeksploitasi Yerusalem. Tidak ada kesepakatan final yang tercapai dalam masalah-masalah penting ini, sehingga tidak ada kewajiban bagi mereka. Seolah-olah, Perjanjian Oslo memberi pendudukan Israel pelindung legal dan pintu masuk yang mempermudah kegiatan pendudukan yang kini tidak lagi dianggap ilegal, karena telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak! Dengan kata lain, Israel mendapatkan pendudukan yang tidak memerlukan biaya.

Jika **Janji Balfour** disebutkan sebagai *"pemberian yang diberikan oleh pihak yang tidak memiliki hak kepada pihak yang tidak berhak,"* maka hal

itu lebih tepat jika diterapkan pada Arafat dalam **Perjanjian Oslo**, karena *ia memberikan apa yang bukan miliknya kepada pihak yang tidak berhak*. Tanah Palestina bukan miliknya dalam pengertian apapun, baik dalam pengertian Islam yang menjadikannya wakaf bagi umat Islam seluruhnya, maupun dalam pengertian demokrasi sekuler, karena ia bukan pemimpin yang dipilih oleh rakyat Palestina. Apa yang dapat dikatakan adalah bahwa ia hanya diakui sebagai pemimpin oleh organisasi yang diakui oleh rejim Arab resmi, yang semuanya tidak datang ke kekuasaan dengan cara yang sah menurut hukum Islam, atau bahkan dengan pemilihan demokratis yang adil. Maka, rejim politik yang tidak sah mengakui organisasi yang tidak sah, untuk kemudian menandatangani perjanjian yang tidak sah dan mendirikan otoritas lain yang tidak sah di wilayah Arab yang tertindas ini.

Ini adalah masalah mendasar, selain bencana lain yang ada dalam isi perjanjian tersebut. Perjanjian Oslo tidak membawa keuntungan bagi rakyat Palestina atau perjuangan mereka. Masalah-masalah penting (seperti negara Palestina, wilayah dan kedaulatannya, status ibukota Yerusalem, pengungsi, pemukiman, dan air) ditunda, sementara kontrol keamanan dan militer Israel atas semua wilayah tetap ada, dan Israel diberikan hak untuk menanggapi undang-undang yang diterbitkan oleh otoritas Palestina. Tanah di Tepi Barat dan Gaza tidak lagi disebut "terjajah"!

Ini berujung pada hasil yang sangat berbahaya yang dihasilkan oleh otoritas Palestina: perpecahan besar di kalangan orang Palestina. Sebagian dari mereka mulai mendukung solusi melalui perundingan, perdamaian, normalisasi, dan koeksistensi, menerima apa yang bisa diperoleh, sementara sebagian lainnya melihat ini bukan sebagai solusi, melainkan sebagai pembiusan, tipuan, dan pengkhianatan baru!

Bukan hanya masalah perbedaan prinsip dan ideologi, namun Arafat dan otoritasnya juga terlibat dalam banyak uang, banyak posisi yang diincar, dan peluang untuk naik status sosial, yang membuat banyak orang tertarik untuk berpihak kepadanya. Ini bukan hal yang mengejutkan di sebuah masyarakat yang sudah lelah dan dilemahkan selama bertahun-tahun, dengan banyak orang yang hidup dalam kamp-kamp pengungsian yang menyedihkan. Arafat

dan otoritasnya bukan sekadar pandangan yang bisa diterima atau ditinggalkan oleh siapa pun, seperti halnya sebuah partai politik; tidak, itu adalah benih dari sebuah sistem yang merombak kembali masyarakat Palestina, yang melakukan pendekatan dan pengucilan berdasarkan ideologi dan faksi, sehingga pendukung perlawanan, jihad, dan intifada diubah menjadi penjahat yang diburu dan dianggap melanggar hukum, kali ini bukan hukum pendudukan Zionis, tetapi hukum otoritas "nasional"! Penderitaan para pejuang semakin meningkat, dan mereka berada dalam situasi yang mirip dengan keadaan saudara-saudara mereka di negara-negara Arab lainnya yang menderita penindasan dari otoritas nasional.

Selain itu, otoritas nasional Palestina ini juga menjadi pusat interaksi dengan Israel. Otoritas yang lemah dan terbatas ini bergantung pada Israel dalam segala hal: mulai dari pergerakan pejabat Palestina melalui pos-pos pemeriksaan militer Israel, hingga transfer keuangan dan koordinasi harian untuk memasukkan dan mengeluarkan barang serta orang, hingga apa yang disebut "koordinasi dan kerjasama keamanan," yang sebenarnya merupakan bentuk pengkhianatan yang terang-terangan. Otoritas ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi Israel untuk membangun hubungan yang sampai mengakibatkan jatuhnya banyak pejabat otoritas ini, yang kemudian menjadi benar-benar bergantung pada Israel dan lebih mewakili kepentingannya daripada loyalitas mereka kepada Arafat atau otoritas Palestina.

Orang kedua di otoritas ini, Mahmoud Abbas, yang juga arsitek Oslo, adalah contoh kuat dari anggota otoritas ini yang dianggap sebagai "penemuan brilian" untuk melayani Israel. Mahmoud Abbas, dalam setiap tahapannya, adalah salah satu orang yang paling berbahaya bagi Israel dalam isu Palestina, dan akhirnya ia membelot dari Arafat sendiri, kemudian dibawa setelah kematian Arafat untuk melanjutkan perjuangan dan menyerahkan apa yang tidak bisa diserahkan oleh Arafat. Perjuangan Palestina dan rakyatnya merasakan akibat dari tindakan ini, yang tidak bisa mereka bayangkan jika dia bukan presiden mereka. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin badan keamanan yang, seperti agen-agen paling berbahaya, melakukan tindakan pengkhianatan, seperti Jibril Rajoub,

kepala dinas keamanan pencegahan di Tepi Barat, dan rekannya, Muhammad Dahlan, kepala dinas yang sama di Gaza, serta tim mereka. Mereka memberikan layanan keamanan dan intelijen kepada Zionis yang bahkan tidak bisa mereka peroleh sendiri, dan di ruang bawah tanah mereka, banyak pejuang yang mati akibat penyiksaan, sementara informasi yang diambil dengan cara itu mengungkapkan banyak pejuang, membatalkan banyak operasi *fida'i* dan syahid, serta menyebabkan hilangnya banyak nyawa, uang, dan persiapan yang besar.

Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa meskipun otoritas ini lemah dan terbatas, dan presiden serta menteri-menterinya tidak bisa bergerak tanpa dokumen Israel yang memungkinkan mereka melewati pos pemeriksaan, jumlah badan keamanan yang ada di dalamnya meningkat pesat: mulai dari polisi, keamanan umum, intelijen, hingga keamanan pencegahan dan intelijen presiden. Beberapa peneliti bahkan berbeda pendapat mengenai jumlah badan keamanan yang ada di bawah otoritas ini, yang semakin menegaskan sifat dan tujuan otoritas ini. Jumlah polisi yang ada dalam otoritas ini mencapai 40 ribu, menjadikannya angka tertinggi di dunia jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, dan anggaran badan keamanan serta kantor Arafat mencapai tujuh puluh persen dari anggaran otoritas!

Meskipun ada banyak tanda-tanda korupsi, pembusukan, pengkhianatan, dan bencana yang dibawa oleh otoritas ini terhadap kondisi masyarakat Palestina yang semakin menderita, Arafat bertaruh pada kelangsungannya dengan cara yang berbeda. Arafat tahu bahwa tugas utamanya sebagai presiden otoritas ini adalah meredam perlawanan Palestina. Dalam pidato pertama yang ia berikan setelah tiba di Gaza, ia menyatakan bahwa: jika Nelson Mandela tidak menembak suku Zulu, maka (Arafat) akan menembak (Hamas).

Jika Arafat berhasil menghentikan demonstrasi besar-besaran dan aktivitas sipil yang protes, ia tidak berhasil sepenuhnya menghentikan perlawanan bersenjata yang telah berkembang selama intifada dan setelahnya. Dimulai dari hanya melempar batu, muncul operasi penusukan tentara Israel dengan pisau, yang memaksa mereka untuk mundur dari daerah padat penduduk, dan menarik diri

ke basis militer yang lebih aman dengan pos-pos pemeriksaan, serta memperketat pengamanan pemukiman Yahudi.

Kemudian senjata api seperti pistol dan senapan mulai digunakan, dan operasi penyelundupan serta pembelian senjata pun meningkat. Para insinyur Palestina kemudian berhasil membuat bahan peledak dari bahan-bahan yang tersedia di lingkungan Palestina, yang memungkinkan mereka untuk menyiapkan perangkap dan meledakkan kendaraan militer serta menargetkan beberapa pejabat, hingga akhirnya mereka memiliki cara yang lebih berbahaya: operasi bom bunuh diri, di mana pejuang meledakkan dirinya sendiri di tengah kerumunan warga Israel. Dengan cara ini, perlawanan Palestina dapat membalas beberapa pembantaian dan serangan, seperti yang mereka lakukan sebagai balasan atas Pembantaian Al-Haram Al-Ibrahimi, dengan lima serangan yang menyebabkan sekitar empat puluh orang Israel tewas dan sekitar seratus enam puluh lainnya terluka.

Pelopor perubahan ini adalah seorang insinyur muda yang hampir tidak diperhatikan, Yahya Ayash, yang dijuluki "Insinyur Pertama," dan dia sangat terampil dalam penyamaran, selain jenius dalam merancang dan merakit bahan peledak, serta memiliki kemampuan luar biasa dalam bergerak dan mengamankan operasinya. Kemampuan penyamarannya membantunya untuk berpindah dari Tepi Barat ke Gaza tanpa terdeteksi. Namun, ia menjadi korban kerjasama keamanan antara otoritas ini dan Israel, dan akhirnya dibunuh melalui ledakan ponsel yang telah dipersiapkan oleh agen Palestina yang bekerja sama dengan Zionis pada Januari 1996.

Sebagai balasan atas pembunuhan Ayash, perlawanan membalas dengan serangkaian serangan bom bunuh diri yang signifikan, yang menunjukkan bahwa situasi semakin berbahaya. Sebuah konferensi internasional untuk memerangi "terorisme" diadakan di Sharm El-Sheikh, Mesir (13 Maret 1996), yang bertujuan untuk mengoordinasikan upaya negara-negara tersebut dalam meredam perlawanan Palestina. Ini adalah salah satu momen paling penting yang menunjukkan konspirasi antara rezim Arab dan Israel dalam melindungi kepentingan Israel. Dalam konferensi ini, Arafat diberitahu secara tegas: *"Proses perdamaian akan berakhir jika Anda tidak melakukan apa-apa*

dalam masalah keamanan. Anda tidak bisa memalsukan situasi ini, ini harus benar-benar nyata."

Arafat kembali dari Sharm El-Sheikh dengan lebih garang dan tekad yang kuat untuk menekan perlawanan Palestina. Dia kembali didukung oleh dukungan Israel, teknologi Amerika, dan dukungan resmi dari negara-negara Arab, melancarkan kampanye keamanan yang sangat brutal yang berhasil memberikan pukulan besar terhadap operasi perlawanan. Kampanye tersebut berhasil membunuh sejumlah tokoh dan pemimpin perlawanan, seperti: Moheyedine Sharif, yang dijuluki sebagai insinyur kedua dan dibunuh di bawah penyiksaan oleh keamanan pencegahan Palestina (29 Maret 1998), serta saudara-saudara Imad dan Adel Awadallah, pemimpin dari Brigadir Izz ad-Din al-Qassam, yang dimartir melalui pembunuhan setelah Adel ditangkap, disiksa oleh aparat keamanan otoritas, dan pembunuhannya dikoodinasikan dengan Israel (10 September 1998). Kampanye ini menyebabkan ribuan orang ditahan yang mengalami penyiksaan mengerikan, seperti patahnya tulang dan dicabutnya janggut, dan beberapa di antaranya dimartir.

Di luar negeri, Israel membunuh Fathi Shiqaqi (26 Oktober 1995), berusaha membunuh Khaled Mashaal, kepala biro politik Hamas, di Yordania (25 September 1997), dan menutup kantor Hamas di Yordania (Agustus 1997), menahan para pemimpin mereka selama dua bulan sebelum mengusir mereka ke Qatar.

Otoritas Palestina berkembang pesat dalam hal alat pemaksaan, penyiksaan, dan pelacakan, dan berhasil mengungkap operasi penangkapan seorang tentara Israel hanya tiga bulan setelah pembentukannya (Oktober 1994), yang mengarah pada serbuan Israel ke lokasi tersebut dan membunuh tentara tersebut beserta para penangkapnya. Aparatnya menembaki demonstrasi yang muncul dari sebuah masjid, menewaskan 18 martir dan melukai ratusan orang, hingga akhirnya kerumunan mengepung markas keamanan otoritas di Gaza dan hampir membantai mereka. Otoritas ini sendiri mendirikan 24 pusat penahanan dan penjara di Gaza, dan dalam satu bulan (pertengahan 1995), mereka menyerbu 57 masjid sebanyak 138 kali. Pada awal tahun 1997, mereka memenjarakan 1.600 orang Palestina, separuhnya tanpa tuduhan atau pengadilan! Tidak jarang

dua anggota dari keluarga yang sama dipenjara dengan tuduhan yang sama "berafiliasi dengan Hamas," satu oleh Israel dan yang lainnya oleh Otoritas Palestina. Begitu pula tidak aneh jika para tahanan Hamas dan keluarga mereka diabaikan dan dihina oleh Menteri Urusan Tahanan di Otoritas Palestina ini.

Semua ini mengarah pada penurunan signifikan dalam gerakan perlawanan Palestina antara 1996 hingga 2000, yang disambut baik oleh kepala badan intelijen AS, yang tidak menyembunyikan peran agensinya dalam keberhasilan ini yang dilakukan oleh Arafat dan aparat keamanan Otoritas. Usaha-usaha ini mencapai puncaknya dengan didirikannya pusat operasi bersama antara aparat keamanan Israel dan Palestina sebelum rakyat Palestina mendapatkan imbalan politik apa pun.

Secara bersamaan, Yordania juga melancarkan kampanye terhadap anggota Hamas, karena kantor politik mereka berada di Amman, menangkap enam puluh pemuda mereka, menyiksa mereka, menyita dana gerakan tersebut, dan mengusir beberapa pemimpin dan tokoh mereka ke luar negeri.

Meski Arafat berhasil mencapai banyak keberhasilan dalam menggagalkan perlawanan, ini tidak membantunya dalam jalur politik, yang justru mengalami kemunduran besar di tangan Israel, yang mengalami pembagian lebih lanjut di antara dua faksi:

Faksi pertama diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Yitzhak Rabin, Shimon Peres, dan Ehud Barak yang memimpin pemerintahan dari Partai Buruh. Mereka percaya bahwa perjanjian perdamaian yang terbuka dan negosiasi dengan Otoritas yang tidak bersenjata dan terbatas kemampuannya, dalam situasi keseimbangan kekuatan yang sangat menguntungkan Israel, pada akhirnya akan mengamankan Israel, memperkuat keberadaannya, meringankan banyak beban politik, keuangan, keamanan, dan administratif, serta memberi peluang bagi Israel untuk fokus pada negara-negara lain yang belum tunduk atau terlibat dalam proses perdamaian, seperti Irak, Suriah, dan Iran. Mereka juga percaya bahwa solusi dua negara akan melindungi Israel dari bahaya yang ditimbulkan oleh kesuburan warga Palestina dan tingkat kelahiran yang tinggi di kalangan mereka. Jika itu adalah negara tunggal, keseimbangan demografis akan segera

berubah menguntungkan Palestina, baik dalam jangka pendek atau panjang.

Faksi lainnya diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Benjamin Netanyahu dan Ariel Sharon, yang memimpin pemerintahan dari Partai Likud atau nama-nama lain, yang percaya bahwa tidak ada negara Palestina yang boleh dibentuk dalam kondisi apa pun atau dalam bentuk apa pun. Mereka melihat keberadaan Otoritas Palestina sebagai potensi jebakan yang bisa digunakan oleh Palestina untuk persenjataan, pelatihan, dan menerima pendanaan, yang mungkin dimanipulasi oleh rezim seperti Irak, Suriah, Iran, dan lainnya untuk mengancam keamanan Israel. Bagi mereka, ide negara Palestina pada dasarnya adalah kemunduran dari proyek Zionis untuk negara Yahudi dari Sungai Nil hingga Efrat! Berdasarkan alasan inilah, Yitzhak Rabin dibunuh (1994), dan Likud memenangkan pemilu 1996, menghentikan negosiasi selama tiga tahun (hingga 1999), di mana pemukiman-pemukiman yang mengelilingi Yerusalem berkembang dan realitas di lapangan berubah. Pada tahun 1999, Partai Buruh memenangkan pemilu lagi dan Ehud Barak menjadi kepala pemerintahan.

Tiga tahun ini membuktikan bahwa semua janji yang diberikan di Oslo hanyalah ilusi, yang tidak dipenuhi oleh politisi Israel, dan Otoritas tidak memiliki jaminan atau cara untuk menekan Israel agar memenuhi kewajibannya. Sementara itu, selama tahun-tahun ini, Otoritas telah berhasil menekan intifada rakyat, meninggalkan hanya gerakan perlawanan Islam yang asli di lapangan. Gerakan-gerakan ini menderita akibat meredanya intifada dan berkurangnya dukungan rakyat, serta lebih menderita lagi akibat aparat keamanan Otoritas yang semakin kejam! Tiga tahun ini menjadi bukti kegagalan besar—bahkan bisa dibilang: pengkhianatan terang-terangan—dari Otoritas Palestina. Setelah Israel berhasil menghilangkan intifada, mereka kembali menghindari Perjanjian Oslo yang telah membebaskan mereka dari pemberontakan tersebut!!

Masa pemerintahan Barak, yang bersamaan dengan kepresidenan Bill Clinton di Amerika, menunjukkan dengan jelas apa yang bisa terjadi dari jalur penyelesaian dan perjanjian perdamaian. Barak, yang bisa dibilang adalah salah satu politisi Israel yang paling lunak,

dan Clinton, yang bisa dibilang adalah orang yang paling serius dalam mencari solusi akhir untuk masalah ini, serta Yasser Arafat yang telah mengakui hak Israel untuk ada dan sudah berusaha menekan perlawanan.

Namun, mereka semua berakhir dengan negosiasi yang gagal lainnya (Juli 2000). Israel tidak pernah setuju dengan kembalinya para pengungsi, atau dengan kedaulatan Arab atas Yerusalem, atau dengan kembalinya batas-batas 1967, yang merupakan isu-isu pokok utama, dan Arafat tidak bisa berkompromi dengan semua ini. Dia mengatakan bahwa dia "akan dibunuh" jika menerima perjanjian yang ditawarkan. Usahanya untuk keluar dengan wajah yang terhormat juga gagal, seperti usahanya untuk memberikan kedaulatan atas Al-Aqsa kepada Organisasi Konferensi Islam (sebuah badan resmi untuk negara-negara pemerintah yang tidak memiliki pengaruh nyata), dan juga gagal dalam mendapatkan sebidang tanah yang tidak terputus oleh pemukiman Israel. Negosiasi itu pun gagal! Bahkan politisi Israel yang paling lunak pun tidak mengizinkan dasar-dasar paling minimal untuk pembentukan negara Palestina, sementara politisi Palestina yang paling kompromis pun tidak memperoleh keuntungan yang bisa dia jual kepada rakyat Palestina!

Selama periode tersebut, ketika slogan penyelesaian terus dikumandangkan, serangan terhadap Masjid Al-Aqsa tidak pernah berhenti. Pada masa Barak sendiri (September 1996), orang-orang Yahudi membuka terowongan di bawah tembok barat Masjid Al-Aqsa, yang menyebabkan bentrokan yang menewaskan lebih dari enam puluh orang dan melukai lebih dari seratus enam puluh.

Intifada Al-Aqsa

Jelas terlihat bahwa sejauh mana seorang pemimpin Palestina seperti Arafat dapat berkompromi tidak pernah cukup bagi pemimpin Israel yang paling mengalah sekalipun, dan negosiasi kembali gagal. Pada saat yang sama, jenderal Israel yang telah pensiun, **Ariel Sharon**, telah memimpin partai Likud yang menjadi oposisi, dan dia adalah salah satu tentara Israel yang paling keras dan paling radikal, baik dalam perang maupun dalam politik. Pada tanggal **28 September 2000**, ia memasuki Masjid Al-Aqsa, yang memicu

protes besar yang menjadi awal dari **intifada Palestina kedua** yang dikenal sebagai "Intifada Al-Aqsa".

Demonstrasi dan pelemparan batu menjadi satu-satunya cara yang dimiliki oleh rakyat Palestina, yang tidak ragu untuk membela diri dan mengorbankan jiwa mereka di hadapan mesin kekuatan militer Zionis yang kejam, yang tidak pernah ragu untuk membunuh, menyiksa, dan menangkap. Jumlah syuhada meningkat dengan cepat, mencapai seratus, kemudian seribu, dan terus meningkat. Sementara itu, kelompok-kelompok perlawanan mulai mengembangkan operasi dan aksi mereka, yang semakin intensif. Seiring berjalannya waktu dan memburuknya situasi keamanan dan militer, intensitas demonstrasi dan bentrokan massal mulai berkurang, sementara operasi kelompok perlawanan semakin meningkat dan menjadi semakin berbahaya, terutama operasi-operasi syahid yang menjadi senjata paling kuat dan paling mematikan bagi masyarakat Palestina.

Keadaan semakin tidak terkendali, hingga pada akhirnya pemerintah Israel berubah setelah beberapa bulan terjadinya intifada, dan Ariel Sharon sendiri menjadi pemimpin pemerintahan baru. Dia berjanji untuk mengakhiri intifada ini dalam seratus hari setelah menjabat, dan melancarkan kampanye militer dan keamanan yang keras terhadap berbagai wilayah. Meskipun gagal mengakhiri intifada seperti yang dijanjikan, sebuah perang sengit pecah antara rakyat yang tak bersenjata dan mesin militer yang brutal. Sharon menerapkan kebijakan untuk menghancurkan kepemimpinan kelompok perlawanan militer, dan kemudian memperluas pembunuhan untuk mencakup pemimpin-pemimpin politik juga.

Pada awalnya, Yasser Arafat berusaha untuk mengabaikan intifada, berusaha menghambat hingga batas tertentu operasi aparat keamanannya dalam melacak dan menargetkan para pejuang, untuk menjadikannya sebagai alat tekanan yang akan menghasilkan negosiasi lain dengan syarat yang lebih baik. Namun, situasinya justru berbalik. Sharon memimpin pemerintahan, dan dia adalah orang yang menolak jalur negosiasi sama sekali, dan percaya bahwa Israel harus mengambil alih seluruh wilayah dengan kekuatan penuh.

Situasi di dalam Palestina semakin buruk ketika masa jabatan Bill Clinton sebagai presiden Amerika yang berasal dari Partai

Demokrat berakhir dan George Bush (putra) dari Partai Republik menang dalam pemilihan presiden Amerika. Ini menguatkan posisi Sharon dan semakin melemahkan posisi Arafat. Tak lama kemudian, pada tahun berikutnya, terjadi pukulan besar bagi Amerika di tanah kelahirannya, yaitu serangan 11 September 2001, yang menggun-cang seluruh dunia dan menghantam kebanggaan Amerika. Setelah itu, Amerika meluncurkan apa yang dikenal dengan "Perang Dunia Melawan Terorisme," mengirimkan pasukannya untuk menyerbu Afghanistan (Oktober 2001), kemudian Irak (Maret 2003), serta melancarkan perburuan besar-besaran terhadap aktivitas Islam di seluruh dunia: pertama yang berorientasi jihad, kemudian yang ber-orientasi amal dan bantuan, dan juga banyak aktivitas politik Islam. Sharon mengambil peluang ini dengan mengadopsi kebijakan dan retorika media yang menggambarkan dirinya sebagai pejuang me-lawan terorisme Islam di Palestina, terorisme yang dipimpin oleh Yasser Arafat sendiri!

Tidak diragukan lagi bahwa kegagalan negosiasi dan pecahnya intifada menyebabkan banyak ketegangan di dalam aparat keamanan Otoritas Palestina. Banyak orang muncul yang berusaha mendu-kung dan membantu perlawanan, atau setidaknya mengabaikan ke-beradaannya, namun itu hanya sebagian kecil saja. Sebagian besar aparat Otoritas tetap berpegang pada jalur dan posisi yang telah mereka rencanakan dan desain. Banyak pemimpin dari aparat ini, terutama dari jajaran pimpinan kedua, memiliki hubungan langsung dengan pihak Israel, dan banyak di antaranya berharap untuk menjadi presiden Palestina yang baru dalam kerangka pemikiran Barat yang ingin menggantikan Arafat dan menyingkirkannya. Oleh karena itu, Otoritas Palestina dan aparat keamanannya bekerja dengan keras dan gigih dalam mengejar, menangkap, dan menyiksa para pejuang untuk mengungkap organisasi dan sel-sel mereka. Banyak dari mereka yang mati di bawah penyiksaan, dan banyak informasi berharga diberikan kepada aparat Israel yang memungkinkan mereka untuk membunuh banyak pemimpin perlawanan, baik di ranah politik maupun militer. Kadang-kadang aparat ini menangkap pejuang dan menyerahkannya ke Israel, atau menangkap mereka dan kemudian menarik diri dari markas-markas mereka agar pasukan Israel dapat

mengambil alih. Aparat ini berhasil menggagalkan banyak operasi besar terhadap Israel, serta menghancurkan banyak infrastruktur perlawanan yang memaksa perlawanan untuk memulai dari awal di banyak hal. Otoritas Palestina dan aparat keamanannya menjadi beban yang sangat besar dan tidak terhingga bagi rakyat Palestina!

Demikian pula, Yasser Arafat dengan cepat kembali dari kebijakan mengabaikan ini. Setelah sebelumnya dia berpikir bahwa hal tersebut bisa menjadi alat tekanan untuk kembali ke meja perundingan dengan syarat yang lebih baik, ia terkejut karena merasa dirinya terancam dalam segi keamanan, nyawanya, dan jabatannya. Oleh karena itu, ia melakukan apa yang bisa dilakukannya untuk menyelamatkan diri dari nasib ini. Ia kembali menegaskan dan memperkuat keyakinannya pada proses perdamaian, mengutuk keras operasi perlawanan dan mengutuknya dengan kata-kata yang paling tegas, dan ia bangga bahwa aparat keamanannya telah menggagalkan ratusan operasi terhadap Israel, serta bangga atas apa yang telah dilakukan oleh aparat tersebut dalam menangkap para pemimpin perlawanan dan anggotanya, serta informasi berharga yang telah mereka ungkap.

Namun, semua ini tidak membantu dirinya, bahkan Sharon memberlakukan pengepungan terhadap kantornya di Ramallah, dan pasukan Zionis menginvasi kota itu hingga menghancurkan beberapa bagian dari markasnya. Terlihat jelas bahwa dirinya sudah tidak diterima lagi, dan pemimpin Palestina lain yang diminta untuk memulai kompromi dan bekerja sama di tempat Arafat berhenti, dan alternatif yang diajukan adalah Mahmoud Abbas. Tekanan diterapkan padanya untuk menunjuk seorang Perdana Menteri dengan kekuasaan luas.

Arafat berusaha menghindari penunjukan seorang Perdana Menteri yang akan bersaing dengan kekuasaannya, yang pada kenyataannya akan menjadi pemimpin sesungguhnya, tetapi ancaman pembunuhan akhirnya membuatnya menerima permintaan tersebut, dan ia menunjuk Mahmoud Abbas sesuai permintaan mereka, yang kemudian menjabat sebagai Perdana Menteri pada 29 April 2003. Lalu, pertempuran internal pun terjadi antara Arafat dan Abbas mengenai kekuasaan dan pengaruh, yang membuat Abbas ter-

paksa mengundurkan diri sebelum menyelesaikan lima bulan masa jabatannya. Setelah itu, Arafat menunjuk Perdana Menteri lain, yaitu Ahmad Qurei (5 Oktober 2003), yang lebih loyal kepadanya daripada Abbas yang lebih dekat dengan para Zionis. Namun, Sharon membalasnya dengan cara praktis, yaitu dengan membunuh Yasser Arafat (November 2004) menggunakan racun lambat yang diberikan oleh salah satu orang dekatnya, yang tidak sulit dilakukan dalam pemerintahan yang pada dasarnya didirikan dan dirancang untuk berada di bawah pengaruh Israel. Akhirnya, Abbas kembali memimpin Otoritas Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina, didukung oleh keinginan Israel dan Amerika.

Pemilihan presiden yang bersifat simbolis (Januari 2005) dilakukan dengan tujuan untuk menobatkan Mahmoud Abbas. Tujuh orang calon yang tidak memiliki popularitas atau kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan Abbas, yang merupakan anak didik kekuasaan dan agen utama penjajahan, akhirnya berakhir dengan kemenangan Abbas yang diperkirakan, menjadikannya Presiden Otoritas Palestina.

Arafat bukanlah yang pertama dalam deretan pembunuhan terhadap para pemimpin, melainkan yang terakhir. Sharon menargetkan pembunuhan terhadap para pemimpin politik faksi Palestina, yang merupakan perluasan dari kebijakan sebelumnya yang hanya menargetkan pemimpin militer. Rakyat Palestina kehilangan para pemimpin terbaik mereka, baik di bidang militer maupun politik, dalam perjuangan mereka. Beberapa pemimpin militer yang gugur antara lain: Mahmoud Abu Hanoud, pemimpin Brigadir *Izz al-Din al-Qassam* di Tepi Barat (November 2001), dan Salah Shehadeh, komandan umum Brigadir Izz al-Din al-Qassam (Juli 2002). Beberapa pemimpin politik yang gugur antara lain: Abu Ali Mustafa, Sekjen *Front Populer* (Agustus 2001), dari Hamas: Jamal Mansour dan Jamal Slim (Juli 2001), Ismail Abu Shanab (Juli 2002), serta Sheikh Ahmad Yassin, pendiri Hamas (Maret 2004), dan wakilnya serta penerusnya Dr. Abdel Aziz al-Rantisi (April 2004). Selain itu, sejumlah pemimpin dan tokoh terkemuka lainnya juga ditangkap, seperti Abdullah al-Borghouti yang dijuluki *Pangeran Bayangan* (Maret 2003).

Meski mengalami kerugian besar dalam barisan perlawanan, mereka tetap mampu memperbaharui barisan mereka dan melanjutkan perjuangan, serta menciptakan taktik dan metode keamanan serta militer yang membuat Israel kelelahan dan tak berdaya. Mereka terus terkejut meskipun dengan pengamanan yang ketat, para pejuang mampu menembusnya dan melaksanakan serangan-serangan syahid di dalam Israel. Bahkan beberapa wanita juga terlibat dalam operasi-operasi syahid ini. Total operasi syahid yang dilakukan antara tahun 2000 hingga 2005 tercatat sebanyak 135 operasi, dengan 61 di antaranya dilakukan oleh Hamas.

Demikian pula, perlawanan berhasil mengembangkan persenjataannya, hingga mulai memproduksi roket-roket buatan lokal yang dimulai dengan roket jarak pendek (10 km), kemudian (12 km), dan menggunakan komponen-komponen lokal di dalam lingkungan Palestina. Hal ini menjadi langkah besar dalam meningkatkan ancaman terhadap keamanan pemukiman-pemukiman Israel!

Militer Israel mencatat serangan, tembakan, dan peluncuran roket selama masa intifada dalam lima tahun, yang mencapai lebih dari 22.000 serangan! Di antaranya adalah operasi-operasi penting seperti pembunuhan Menteri Pariwisata Rehavam Ze'evi oleh Front Populer (17 Oktober 2001).

Gaza dan Tepi Barat masing-masing memiliki keunggulan dalam medan perlawanan:

- Gaza memiliki kepadatan penduduk yang tinggi akibat banyaknya kamp-kamp pengungsi, serta kekuatan gerakan Islam yang aktif di dalamnya dan bersembunyi di tengah kepadatan ini, terutama di kamp-kamp pengungsi.
- Sementara itu, Tepi Barat memiliki medan yang sulit dengan banyak gua dan jalan-jalan pegunungan yang memungkinkan para pejuang untuk menyusup ke dalam Israel, meskipun banyaknya penghalang keamanan di jalan-jalan yang sudah diratakan.

Dengan kondisi ini, operasi di Gaza ditandai dengan intensitas dan keragamannya serta kesulitan dalam menemukan dan mengejar pelakunya di tengah banyaknya orang. Sementara itu, operasi di Tepi Barat lebih bersifat selektif dan berdampak signifikan, terutama

karena kedekatannya dengan pusat-pusat penting Israel di Yerusalem dan Tel Aviv, serta sulitnya menguasai jalur-jalur pegunungannya.

Intifada dan operasi-operasi syahid berhasil memukul teori keamanan Israel dan meningkatkan jumlah emigrasi mereka ke negara lain, serta menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Sharon, untuk menghentikan kerugian ini, akhirnya mengambil dua keputusan penting yang tidak mungkin diambil oleh Perdana Menteri Israel lain kecuali oleh Sharon dengan kekuatan dan sejarah militernya yang panjang: **penarikan dari Gaza** dan **pembangunan tembok pemisah di Tepi Barat**.

Tujuan dari tembok pemisah adalah untuk menutup setiap kemungkinan infiltrasi para pelaku bom syahid, sementara penarikan dari Gaza dimaksudkan untuk menjauhkan orang Israel dari sumber ancaman dan menyerahkan kontrol internal Gaza kepada aparat keamanan Palestina, menjadikannya sebagai pertempuran internal antara Palestina.

Penarikan dari Gaza dan pembangunan tembok pemisah di banyak wilayah Tepi Barat merupakan hal yang tidak bisa dibayangkan oleh orang Israel sebelumnya, karena hal ini berarti pengurangan batasan Israel dan pengakuan atas kekalahan di hadapan perlawanan Palestina yang kekuatannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan Israel. Hal ini bisa memicu penarikan lebih lanjut dari Tepi Barat, termasuk pembongkaran pemukiman-pemukiman yang ada sejak 1967. Namun, Sharon tetap melanjutkan keputusannya dan mengatasi setiap penolakan dari dalam Israel.

Dalam jangka menengah, Sharon berhasil menghentikan operasi-operasi bom syahid dan memaksa perlawanan Palestina untuk menggunakan metode lainnya, namun ia tidak menyangka bahwa Gaza yang bebas akan menjadi benteng perlawanan yang tangguh, platform peluncuran roket yang padat, dan basis yang luas untuk membangun tentara besar yang akan mengubah seluruh situasi.

Penarikan Israel dari Gaza menjadi hasil terbesar dari intifada heroik ini, yang menyebabkan lebih dari empat ribu syahid sepanjang lima tahun (2000–2005), termasuk sekitar delapan ratus anak-anak dan sekitar tiga ratus wanita. Lebih dari 45.000 orang terluka,

sekitar sepuluh ribu ditangkap, dan lebih dari tujuh puluh ribu rumah hancur. Sementara itu, lebih dari 1500 orang Israel tewas, lebih dari 3000 terluka, dan tahun 2002 menjadi tahun terburuk secara ekonomi dalam sejarah negara tersebut, dengan kerugian ekonomi mencapai delapan miliar dolar selama dua tahun pertama intifada, setara dengan 11 juta dolar per hari! Israel juga mengalami guncangan psikologis yang kuat, kehilangan kepercayaan pada keamanan dan kemakmuran yang mereka janjikan, dan mulai ada gelombang emigrasi balik sejak tahun tersebut.

Melihat angka-angka ini saja mungkin tampak seperti kekalahan bagi rakyat Palestina dan kemenangan bagi Israel, namun dengan memperhitungkan ketimpangan kekuatan yang runtuh, ini kembali menegaskan keberanian dan ketangguhan rakyat Palestina.

Selain hasil material, terdapat juga hasil moral yang lebih penting, seperti yang dinyatakan oleh Menteri Yahudi yang sangat fanatik, Tzipi Livni, bahwa impian Israel Raya telah berakhir, dan ia menyadari bahwa orang Israel tidak mungkin bisa memerintah Palestina, dan mereka harus melakukan konsesi yang menyakitkan.

PEMBEBASAN JALUR GAZA

Salah satu perbedaan utama antara gerakan perlawanan di Tepi Barat dan Gaza adalah bahwa para Islamis di Tepi Barat hidup di bawah pemerintahan Yordania hingga 1967, yang umumnya menerapkan pendekatan kontrol dan pengendalian yang lembut, sementara saudara-saudara mereka di Gaza hidup di bawah pemerintahan Mesir yang keras dan sangat brutal, yang memiliki dampak besar pada sifat gerakan Islam dan pendekatannya dalam bergerak, merekrut, dan beroperasi.

Selain itu, sifat geografi Gaza yang datar dan sempit membuatnya menjadi tempat bagi banyak pengungsi, dengan populasi yang padat, serta menciptakan situasi sosial yang tertinggal, di mana masyarakat saling terikat dan rumah-rumah dekat satu sama lain, jalan-jalan sempit dan banyaknya gang serta lorong, yang membuat Gaza sulit dikendalikan dan diawasi dengan metode yang biasa digunakan oleh pemerintahan modern.

Karena keadaan ini dan faktor-faktor lainnya, kaum Islamis di Gaza menjadi lebih kuat dibandingkan dengan yang ada di Tepi Barat, yang menjadi sumber masalah besar bagi penjajah Israel, sampai-sampai Rabin berharap suatu hari Gaza akan ditelan oleh laut. Wilayah ini menjadi salah satu masalah paling rumit dalam teori keamanan Israel, dan menjadi yang pertama kali mencoba me-

mindahkan pengelolaannya ke Otoritas Arafat, sebelum akhirnya Sharon menarik diri dari Gaza.

Secara internal, para Islamis di Gaza lebih berani, lebih proaktif, dan lebih gagah daripada yang lainnya, dan sejak Otoritas Palestina dibentuk, mereka sudah melihat pentingnya berpartisipasi dalam pemilu (1996), berbeda dengan pendapat saudara-saudara mereka di Tepi Barat dan di luar negeri. Dari Gaza lah intifada pertama dimulai, dari sana juga dimulai perjuangan bersenjata, dan dari sana pula muncul pimpinan-pimpinan utama perlawanan.

Penarikan Israel dari Gaza Penarikan Israel dari Gaza diputuskan pada tahun 2005, sementara itu Otoritas Palestina mengumumkan bahwa mereka siap dan mampu untuk mengelola wilayah tersebut, dan faksi-faksi perlawanan juga menyatakan tidak keberatan jika Otoritas mengambil alih pengelolaan Gaza, untuk menghindari alasan apapun yang bisa menghambat keputusan penarikan ini, serta dengan harapan bahwa keadaan bisa diperbaiki dengan Otoritas di masa depan.

Mohammad Dahlan, pemimpin Badan Keamanan Preventif di Gaza, mewakili harapan besar Israel dalam pengelolaan dan pengendalian keamanan Gaza, karena ia adalah salah satu orang yang paling setia kepada Israel, dengan upayanya yang besar dalam memburu dan menangkap serta menyiksa para pejuang. Dahlan adalah orang yang bercita-cita menggantikan Yasser Arafat dan menjadi penerusnya di Otoritas Palestina, namun peluang ini terlewat karena adanya pesaing sebayanya seperti Abbas. Dahlan tetap muda dan belum diterima oleh pemimpin senior lainnya di Otoritas Palestina.

Meskipun ia kehilangan kesempatan untuk memimpin Otoritas, Gaza menjadi peluang besar baginya untuk membuktikan kemampuannya, atau bahkan mungkin berusaha mengontrol Gaza secara independen dari Otoritas. Dari sini, ketegangan antara Dahlan dan Abbas mulai muncul. Sharon mendukung Dahlan dengan menghilangkan pemimpin-pemimpin penting Gaza seperti Syeikh Ahmad Yassin dan Abdel Aziz al-Rantisi.

Sebagaimana penarikan Israel dari Gaza menjadi momen yang signifikan dalam konflik ini, serta membuktikan kemampuan perlawanan Palestina mencapai apa yang tidak bisa dilakukan oleh

tentara negara-negara Arab, ini juga menjadi tantangan yang sangat berat, terutama dalam dua hal: pertama, yaitu dengan keberadaan Otoritas Palestina yang diwakili oleh Dahlan dan Abbas beserta aparat keamanannya yang penuh dengan agen dan yang akan memulai serangan sengit terhadap faksi-faksi perlawanan dengan slogan *"Satu senjata sah, yaitu senjata Otoritas Palestina."* Kedua, yaitu bagaimana mengelola wilayah Gaza yang padat penduduk dan miskin sumber daya ekonomi, serta tanpa kedalaman geografis dan dukungan politik yang memadai.

Solusi realistis untuk masalah-masalah ini datang dari berbagai hal yang semuanya terjadi di luar Gaza: Setelah peristiwa 11 September 2001, Amerika Serikat mengalami kejutan besar yang belum pernah terjadi sejak Perang Dunia II, dan muncul gagasan di kalangan politikus Amerika untuk '**mendemokratisasi dunia Islam**'. Meskipun gagasan ini bukanlah hal baru dalam kalangan akademisi dan lembaga-lembaga intelijen, gagasan ini tidak terlalu menarik bagi politisi, karena selama para penguasa tirani di dunia Arab menjaga kepentingan Amerika dan Israel, tidak ada alasan untuk mengganti mereka atau menyebarkan demokrasi di negara-negara tersebut dan mempertaruhkan hasilnya. Namun, setelah 11 September, jelas bahwa penguasa-penguasa tirani di dunia Arab telah menciptakan bom waktu dari kemarahan dan ketidakpuasan, yang kini meledak tidak hanya di dunia Arab dan Islam, tetapi juga di Amerika dan Eropa.

Dua pengalaman di dunia Islam yang menarik perhatian politik Amerika pada waktu itu adalah pengalaman Turki dan Pakistan. Dalam kedua negara ini, meskipun ada proses demokratisasi dengan pergantian partai yang berkuasa, inti negara dan kekuasaannya tetap terletak pada militer, yang juga bergantung pada Amerika. Militer mampu melakukan kudeta kapan saja jika hasil demokrasi tidak sesuai dengan keinginan mereka atau Amerika. Oleh karena itu, Turki dikenal sebagai negara dengan kudeta militer setiap sepuluh tahun, sementara di Pakistan, rata-rata kudeta militer terjadi setiap delapan tahun. Hal menarik dari kedua pengalaman ini adalah bahwa proses demokrasi telah menyerap energi kaum Islamis dan mengarahkannya ke dalam pertempuran politik, sehingga tidak ada

gerakan jihad yang muncul di kedua negara tersebut karena jalur perubahan politik yang terbuka memberi harapan yang lebih mudah dan murah. Dengan demikian, kebijakan Amerika beralih ke arah 'penyebaran demokrasi' di dunia Arab, bukan karena cinta terhadap demokrasi atau rakyat Arab, melainkan untuk mencegah energi Islamis berkembang menjadi gerakan jihad dan mengulang peristiwa seperti 11 September. Palestina menjadi medan awal untuk eksperimen ini, terlebih lagi dengan adanya alasan lain yang diyakini oleh Israel dapat membantu mereka dalam jenis demokrasi ini.

Yasser Arafat memimpin Otoritas Palestina dan mewakili rakyat Palestina tanpa dipilih oleh mereka atau melalui pemilu, melainkan karena ia memimpin gerakan Fatah. Ketika Fatah bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang didirikan dengan dukungan rezim Nasser di Mesir, Fatah menguasainya dan Arafat menjadi presiden organisasi tersebut, yang kemudian mewakili rakyat Palestina, meskipun bukan karena keputusan rakyat tetapi atas keputusan negara-negara Arab. Ia kemudian menjadi pemimpin Palestina setelah intifada tanpa pemilihan. Jika keadaan ini memungkinkan Arafat menjadi presiden tanpa pemilu atau pemilihan, maka keadaan serupa tidak akan dibiarkan terjadi lagi, terutama dengan Mahmoud Abbas, yang tidak dikenal karena perjuangannya dan bahkan tidak pandai berbicara, apalagi dengan rekam jejaknya yang meragukan karena ia adalah arsitek dari perjanjian Oslo.

Oleh karena itu, Amerika dan Israel merasa perlu mengadakan pemilu di Palestina untuk membangun legitimasi bagi Mahmoud Abbas sebagai presiden Otoritas, yang dapat diandalkan untuk memberikan konsesi yang diperlukan dalam masalah-masalah besar seperti Yerusalem, pengungsi, dan pemukiman. Pemilihan ini juga akan memberinya legitimasi untuk memimpin kampanye penghancuran terhadap faksi-faksi perlawanan, dengan alasan bahwa ia adalah presiden yang sah terpilih dalam pemilu yang jujur, dengan mayoritas dari gerakan Fatah di dewan legislatif (yang berfungsi sebagai parlemen Palestina).

Di sini, faksi-faksi perlawanan Palestina merasa ketakutan, mereka merasakan getaran yang menunjukkan bahwa penyelesaian masalah Palestina dan pengakhiran perjuangannya akan terjadi de-

ngan mudah melalui pemilu yang akan datang. Menambah krisis ini, faksi-faksi telah membangun diri mereka dan mengatur struktur serta perangkat mereka sebagai gerakan perlawanan, bukan sebagai partai politik yang mengikuti pemilu. Sejak awal, tidak terbayangkan dan tidak terduga bahwa Israel akan mengizinkan pemilu bagi rakyat Palestina. Oleh karena itu, ini menjadi tantangan besar, dan terjadi perpecahan antara dua faksi perlawanan besar Islam, Hamas dan Jihad. Hamas memutuskan untuk ikut serta dalam pemilu untuk berusaha menghalangi penyelesaian masalah Palestina dan mencegah penguasaan sepihak oleh Fatah dalam pengambilan keputusan besar terkait masa depan Palestina, sementara Jihad memilih untuk memboikot pemilu, karena mereka percaya pemilu tidak akan memberikan legitimasi untuk mengorbankan hak-hak sejarah, dan gerakan perlawanan akan terus berjuang dengan cara militer dan perjuangan di lapangan, terlepas dari keputusan apa pun dari Otoritas dalam masalah-masalah ini.

Dari sudut pandang Amerika, Israel, dan rezim Arab, bahkan gerakan Fatah, masuknya Hamas ke dalam pemilu tidak dianggap sebagai ancaman nyata. Keberhasilan Fatah sudah terjamin dengan kontrol atas kekuasaan, dana, dan administrasi yang mereka kuasai selama tiga belas tahun. Sementara itu, meskipun gerakan perlawanan memiliki popularitas, mereka tidak memiliki kader yang berpengalaman dalam pemerintahan dan administrasi, juga tidak memiliki pengalaman politik dan hubungan internasional, serta gerakan-gerakan ini adalah gerakan Islam yang tidak diterima oleh lingkungan Arab regional! Meskipun sebagian besar merasa cemas, yaitu Israel, rezim, dan Otoritas Palestina, tangan Amerika tetap lebih kuat, dan mereka meyakini pentingnya mengadakan pemilu untuk membangun legitimasi dan memperkuat jalur pemerintahan Abbas.

Pemilu akhirnya dilaksanakan dengan harapan bahwa pemilu akan jujur agar tidak ada keraguan terhadap legitimasi Mahmoud Abbas dan pemerintahan Otoritas Palestina. Namun, hasilnya mengejutkan semua pihak: Hamas menang dengan mayoritas yang sangat besar, memperoleh 74 kursi dari 132 kursi, sebuah kejutan yang tidak diharapkan oleh siapa pun, bahkan oleh Hamas sendiri, yang awalnya merencanakan untuk menjadi oposisi kuat yang

dapat menghalangi kesepakatan yang akan mengorbankan hak-hak Palestina, bukan menjadi pemerintahan itu sendiri! Sedangkan Fatah hanya meraih 45 kursi.

Kejutan ini mengguncang Palestina, dunia Arab, dan dunia Barat, karena pemilu yang jujur malah membawa Hamas, yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh mereka. Kini mereka terjebak dalam kebingungan; jika mereka mengakui hasil pemilu yang sah, mereka harus menghormati keputusan rakyat Palestina, tetapi jika mereka tidak mengakuinya, mereka akan menghancurkan klaim dan slogan mereka tentang demokrasi dan hak-hak rakyat. Namun, kebohongan dan penolakan tidak kehilangan cara: mereka mengakui integritas pemilu, tetapi menolak untuk berurusan dengan hasilnya, dan mulai berusaha menghalangi dan menggagalkan hasil pemilu tersebut sebagai persiapan untuk membalikkan keputusan ini.

Penyelesaian Militer di Gaza Hal terpenting yang dicapai dari hasil pemilu ini adalah terkuburnya proyek yang telah direncanakan untuk menyelesaikan masalah Palestina jika Fatah menang, yang berarti akhir dari rencana membawa seorang presiden Palestina dengan legitimasi penuh untuk menyerahkan Palestina historis dan mengorbankan masalah Yerusalem, pengungsi, negara, air, dan pemukiman. Itu sudah merupakan langkah besar dan menghindari ancaman yang sangat berbahaya. Namun, pada saat yang sama, pemilu ini membuka tantangan politik dan administratif bagi gerakan perlawanan yang kini menghadapi masyarakat yang terjebak dan terkepung, di mana banyak pihak di seluruh dunia Arab bersatu untuk melemahkan, melelahkan, dan menundukkan mereka. Mengelola negara adalah tantangan yang sangat berat di semua masyarakat, namun bagi masyarakat Palestina, ini adalah cobaan yang jauh lebih besar dan lebih berat.

Hamas mencoba membentuk pemerintahan persatuan nasional yang melibatkan semua faksi Palestina untuk mengurangi beban memikul tanggung jawab sendiri dan mengurangi gelombang permusuhan yang datang dari Otoritas, rezim Arab, dan negara-negara Barat. Namun, usaha mereka gagal. Salah satu cara pertama untuk menggagalkan mereka adalah dengan mengancam pihak-pihak yang akan bergabung dalam pemerintahan Hamas. Oleh karena itu,

Hamas terpaksa membentuk pemerintahan sendiri dengan Ismail Haniyeh sebagai perdana menteri, Mahmoud al-Zahar sebagai menteri luar negeri, dan Saeed Siyam sebagai menteri dalam negeri, yang semuanya adalah pemimpin gerakan tersebut.

Berbagai cara dan kebijakan digunakan oleh pihak-pihak yang menentang Hamas, terutama Otoritas Palestina dan Fatah. Salah satu tindakan pertama untuk menggagalkan Hamas adalah Mahmoud Abbas mengadakan sidang Dewan Legislatif sebelumnya yang masa jabatannya telah berakhir, untuk mengeluarkan amandemen konstitusi yang menarik kekuasaan pemerintah dan menyerahkannya kepada presiden saja. Abbas juga mengeluarkan dekrit untuk merestrukturisasi badan-badan dan kementerian untuk memindahkan kewenangannya ke dirinya, terutama badan-badan keamanan, media, dan lembaga pengelola perbatasan dan kedutaan.

Namun yang paling berbahaya dan paling kuat adalah apa yang dilakukan oleh aparat keamanan Otoritas Palestina sendiri. Menteri-menteri pemerintahan terkejut ketika mereka mendapati bahwa kementerian yang mereka pimpin kosong, tanpa dana, dan seluruh aparat administrasi dipenuhi oleh anggota Fatah. Ketika seorang menteri mengeluarkan perintah, perintah tersebut tidak dilaksanakan, termasuk oleh Menteri Dalam Negeri Saeed Siyam yang mengalami kesulitan berat dengan Wakil Menteri, Rashid Abu Shbak, yang ditunjuk oleh Abbas untuk mengawasi semua badan keamanan, serta anggota kementerian yang tidak menjalankan tugas mereka. Ini menyebabkan ketidakstabilan keamanan yang meluas yang dipicu oleh elemen-elemen Fatah di jalan-jalan, ditambah dengan ketidakmauan aparat keamanan di kementerian untuk menjalankan tugas mereka dalam menjaga keamanan. Akibatnya, Menteri Saeed Siyam terpaksa membentuk pasukan eksekutif yang dipilih dari faksi-faksi yang langsung berada di bawah kendalinya untuk melaksanakan tugasnya, yang dipimpin oleh Jamal Abu Samhadana, pendiri kelompok Komite Perlawanan Rakyat, tetapi tidak lama setelah itu, ia dibunuh oleh pesawat-pesawat tempur Israel (Juni 2006).

Dan ini bukanlah satu-satunya intervensi untuk menghalangi dan menghambat pemerintahan baru, namun pasukan Israel di Tepi Barat melancarkan kampanye penangkapan terhadap anggota

legislatif Palestina yang terpilih dari Hamas untuk mengurangi jumlah mereka, sehingga mayoritas Dewan Legislatif akan dikuasai oleh Fatah, atau agar kuorum Dewan tidak tercapai jika anggota Fatah memutuskan untuk tidak hadir, yang menyebabkan terganggunya kerja Dewan Legislatif.

Sedangkan negara-negara Arab dan Barat menghentikan bantuan yang mereka berikan kepada Otoritas Palestina, yang merupakan lebih dari separuh anggaran, dan Israel menolak untuk menyerahkan pendapatan pajak yang mereka kumpulkan dari Palestina untuk kepentingan Otoritas, yang sekitar sepertiga dari anggaran. Keinginan Barat terwakili dalam apa yang disebut kuartet internasional (Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, dan PBB), yang menetapkan syarat-syarat untuk berurusan dengan Hamas: pengakuan Hamas terhadap Israel, penolakan terhadap terorisme, penghentian perlawanan, dan persetujuan atas semua perjanjian yang telah ditandatangani oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)!

Kemudian, ketidakstabilan keamanan yang dipicu oleh elemen-elemen Fatah semakin meningkat, dengan demonstrasi yang menuntut gaji, protes, aksi mogok, dan berlanjut hingga penggunaan peluru dan pembunuhan. Keamanan Otoritas Palestina meningkatkan tingkat ketidakstabilan ini hingga mencapai tingkat yang berbahaya, di mana menteri-menteri Hamas dan para pemimpin mereka menjadi sasaran pembunuhan. Beberapa tokoh-tokoh agama dan militer Hamas dibunuh, seperti Abdul Karim al-Qouqa (31 Maret 2006), Muhammad al-Tatar (16 Mei 2006), dan Hussein al-Aouja (6 Juli 2006). Kelompok-kelompok Fatah melakukan pembunuhan terhadap pemuda Hamas dengan cara-cara yang menghinakan, seperti menembak kaki mereka lalu membiarkan mereka berdarah sampai mati tanpa mengizinkan ambulans datang, atau membawa mereka ke gedung tinggi dan melemparkan mereka dari lantai atas, sementara Hamas berusaha keras untuk menahan diri agar tidak terjerumus ke dalam pertempuran internal dan perang saudara.

Beberapa upaya perdamaian dilakukan, di antaranya dengan rilis dokumen oleh tahanan di penjara-penjara Israel yang disepakati oleh kedua belah pihak (Juni 2006), dan beberapa pertemuan yang berlangsung di Kairo dan Mekkah yang akhirnya menghasilkan

Perjanjian Mekkah (7 Februari 2007), namun semuanya berakhir dengan kegagalan, karena baik Otoritas Fatah maupun Israel tidak menginginkan hal tersebut terjadi dan tidak ingin Hamas bisa memerintah. Dampak dari ketidakstabilan keamanan tahun itu mencapai sekitar tujuh ratus orang tewas dan lebih dari tiga ribu terluka. Abbas mengumumkan beberapa kali bahwa ia berencana untuk mengadakan pemilu awal, seolah-olah ini adalah permainan sesuai keinginannya!

Kondisi ini berlanjut selama setahun yang penuh tantangan, di mana tidak ada tanda-tanda perdamaian atau kesepakatan, dan aparat Otoritas tidak akan menyerahkan apa yang mereka miliki atau menerima pemerintahan Hamas. Bahkan Abbas membentuk pasukan khusus yang disebut "Pengawal Presiden", yang didukung oleh Amerika Serikat dengan lebih dari delapan puluh juta dolar, menyediakan seorang ahli militer untuk melatih mereka, dan mengangkat Muhammad Dahlan—musuh besar Hamas—sebagai penasihat urusan keamanan dan menjadikannya menteri dalam negeri yang sesungguhnya, sementara Menteri Dalam Negeri yang independen, Hani al-Qawasmi, dihentikan hingga terpaksa mengundurkan diri. Jumlah pos pemeriksaan aparat keamanan di jalan-jalan meningkat, dan jumlah pembunuhan pun melonjak, dengan 22 anggota Hamas dibunuh dalam satu minggu. Hamas mencatat nama-nama dan peristiwa sebanyak 76 syahid dari anggotanya dan mereka yang terhitung sebagai bagian dari mereka akibat tembakan aparat keamanan Fatah antara awal 2006 hingga pertengahan 2007. Hamas juga mencatat 462 serangan dalam empat bulan setelah Perjanjian Mekkah ditandatangani!

Pada titik ini, Brigade Izz ad-Din al-Qassam memutuskan untuk mengakhiri situasi abnormal ini, dan jauh dari biro politik, mereka memutuskan untuk menyerang markas besar Badan Keamanan Preventif yang dipimpin oleh Muhammad Dahlan di daerah Tel al-Hawa, tempat pusat kekuasaan mereka, dan dalam beberapa jam saja, markas tersebut runtuh. Anggota-anggota badan ini pun menjadi buronan dan pelarian!

Keputusan militer ini menjadi salah satu keputusan paling penting dalam sejarah perjuangan Palestina, karena itu adalah pem-

bebasan sejati bagi Gaza. Sejak saat itu, Gaza adalah satu-satunya wilayah yang benar-benar merdeka di Palestina, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Gaza adalah satu-satunya wilayah merdeka di dunia Arab.

Segera setelah itu, Otoritas Palestina dan Fatah di Tepi Barat membalas dengan gelombang balas dendam yang kejam terhadap Hamas dan lembaga-lembaganya di Tepi Barat. Abbas mengumumkan pemecatan pemerintahan Haniyeh dan menunjuk pemerintahan baru yang dipimpin oleh Salam Fayyad (salah satu tokoh yang dikenal sangat dekat dengan Israel dan Amerika Serikat), tanpa pemilu, referendum, atau persetujuan Dewan Legislatif, yang bertentangan dengan konstitusi, dan sejak saat itu dimulailah apa yang dikenal sebagai perpecahan Palestina, dengan Hamas memerintah Gaza yang bebas, sementara Otoritas Palestina yang mewakili Fatah memerintah Tepi Barat yang masih berada di bawah pendudukan Israel.

Pemerintahan Abbas di Tepi Barat kembali melanjutkan jalur negosiasi dan kolaborasi keamanan, menindak semua bentuk kegiatan keagamaan, lembaga-lembaga amal, dan kegiatan sosial dengan dalih "memerangi Hamas"! Mereka memulai era baru kerjasama dengan Israel untuk menghancurkan perlawanan, menangkap anggotanya, bertukar informasi, dan melakukan penyelidikan, yang menjadi babak yang sangat sulit bagi warga Palestina di Tepi Barat!

Dalam fenomena yang aneh dan belum pernah terjadi sebelumnya, Fatah memutuskan untuk membayar gaji pegawai di Gaza dengan syarat mereka tidak pergi ke tempat kerja mereka. Jika mereka pergi, maka dengan pergi mereka membantu Hamas dalam mengelola sektor ini, dan gaji mereka akan dipotong! Situasi ini yang bisa disebut sebagai 'mogok paksa' melemahkan kemampuan Hamas untuk mengelola Gaza, namun di sisi lain, hal itu membebaskan mereka dari pendukung Fatah di aparat administratif, hanya menyisakan mereka yang setia dari kalangan anggota Hamas atau warga lain yang tidak menerima pemaksaan ini.

Negara-negara Arab juga berkontribusi dalam menanggapi Hamas, seperti Mesir yang menutup perbatasan Rafah sepenuhnya dan memberlakukan blokade total di Gaza, sementara Arab Saudi

melarang warga Gaza untuk melakukan ibadah haji pada tahun pertama setelah keputusan militer. Di sisi lain, pemerintah Arab dan Barat kembali memberikan dukungan finansial kepada Pemerintahan Salam Fayyad dengan uang, hibah, dan bantuan untuk mendanai pemerintahan Abbas dan pemerintahannya, serta untuk mendukung penumpasan perlawanan di Tepi Barat.

Israel juga memperkeras serangannya terhadap Gaza. Pembebasan ini merupakan langkah yang mengejutkan dan tidak terduga, karena tidak ada yang menyangka bahwa penarikan dari Gaza akan menyebabkan Hamas menguasainya, sementara mereka diperlengkapi dengan legitimasi dari pemilu yang mereka menangkan dengan kemenangan telak. Ini adalah pertama kalinya sejak pendudukan Inggris bahwa orang Palestina memiliki sepetak tanah yang mereka kuasai sendiri, dengan pemimpin-pemimpin mereka berasal dari kalangan pejuang perlawanan, bukan dari pengkhianat yang menjual prinsip dan melepaskan hak-hak mereka.

Abbas mencoba untuk merebut kembali Gaza, dan menyerukan pasukan internasional untuk mendarat di Gaza dan menduduki nya, namun ia tidak menemukan dukungan, dengan dua alasan utama: kompleksitas posisi dan wewenang pasukan ini di bawah pemerintah Mesir dan Israel, serta situasi kekerasan yang dihadapi Gaza yang membuat banyak pihak berharap bahwa blokade total ini akan memaksa Hamas untuk menyerah dan runtuh, yang tidak terjadi.

Meski Hamas tidak runtuh atau menyerah, gerakan ini dan rakyat Gaza mengalami kesulitan yang sangat berat akibat blokade total. Perekonomian, kesehatan, dan pendidikan mengalami kemerosotan yang cepat, dan proyek-proyek yang ada hancur. Dampaknya sangat terasa pada kondisi sosial yang memburuk, dengan meningkatnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, kekurangan air, serta meluasnya penyakit akibat kekurangan obat-obatan dan penghentian impor peralatan medis, yang menjadikan Gaza sebagai penjara terbuka terbesar di dunia!

Lima Perang di Gaza

Sejak keputusan militer, Gaza telah mengalami lima perang dengan Israel, yang pertama terjadi pada akhir 2008 dan berlanjut

hingga 2009, kemudian perang kedua pada 2012, ketiga pada 2014, dan keempat pada 2021. Selain itu, terjadi beberapa bentrokan dan peningkatan ketegangan yang tidak mencapai tingkat pertempuran.

Israel menyatakan tujuan mereka dalam setiap perang adalah untuk menghancurkan Hamas atau menggulingkannya dari pemerintahan Gaza, namun semua perang tersebut gagal mencapai tujuan tersebut. Bahkan Israel terkejut dengan tingkat perkembangan senjata dan teknologi yang dicapai oleh kelompok perlawanan dalam setiap perang. Salah satu tuntutan utama Hamas untuk menghentikan perang adalah pengangkatan blokade Gaza, terutama membangun dan mengoperasikan pelabuhan Gaza. Semua perang tersebut juga gagal mencapai tujuan ini.

Kita juga bisa menyebutkan perang kelima yang terjadi sebelum keputusan militer di Gaza, yang terjadi pada 2006, yang menjadi bukti kuat bahwa gerakan yang mengikuti pemilu dan bergabung dalam pemerintahan tidak meninggalkan perlawanan, berbeda dengan Fatah yang mundur dan menikmati kekuasaannya dalam pengkhianatan, bahkan berfungsi sebagai agen polisi untuk membantu penjajah Israel. Perlawanan melakukan operasi militer (Juni 2006) yang berhasil menangkap seorang tentara Israel, Gilad Shalit, yang merupakan keputusan berani dan berisiko tinggi. Israel kemudian melancarkan serangan ke Gaza dengan tujuan untuk merebut Shalit kembali, menghancurkan infrastruktur militer yang meluncurkan roket ke pemukiman-pemukiman di selatan, dan menghancurkan jaringan terowongan, namun gagal dalam semua itu, dan akhirnya tercapai kesepakatan gencatan senjata pada November 2006.

Melihat keseluruhan perang ini, kita melihat bahwa jumlah korban tewas dari pihak Palestina jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah korban dari pihak Israel, begitu juga dengan kerusakan infrastruktur, fasilitas, dan bangunan lainnya. Ukuran materi langsung menunjukkan hal ini seolah-olah ini adalah kekalahan yang berulang, namun kenyataannya tidak demikian. Perbedaan besar dalam keseimbangan kekuatan antara kedua belah pihak, dan tujuan yang ditetapkan oleh keduanya, menjadikan perang-perang ini sebagai keberanian yang sesungguhnya dan kemenangan cemerlang bagi kelompok-kelompok perlawanan yang mampu tetap teguh,

melawan musuh mereka, dan menghalangi mereka untuk mencapai tujuan mereka, meskipun mereka berada dalam posisi militer dan politik yang sangat lemah dan terpuruk.

Pemerintah Mesir yang berperan sebagai mediator dalam negosiasi menjadi musuh utama perlawanan Palestina, dan ia adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas bencana yang terjadi di Gaza karena kekerasannya dalam blokade Gaza dan penutupan perbatasan Rafah, yang merupakan satu-satunya jalur untuk memasukkan barang dan orang, termasuk bahan bakar untuk mengoperasikan pembangkit listrik serta alat dan peralatan medis. Akibatnya, rakyat Gaza hidup dalam kondisi yang sangat buruk, banyak dari mereka yang meninggal karena kekurangan pengobatan, beberapa rumah sakit berhenti beroperasi karena kekurangan listrik, dan beberapa ruang operasi juga berhenti karena kekurangan obat-obatan dan peralatan medis. Banyak yang meninggal menunggu izin untuk pergi ke luar negeri untuk pengobatan.

Penduduk Gaza, dengan dukungan dari pemerintah, mulai menggali terowongan yang menghubungkan kota Rafah Palestina dengan kota Rafah Mesir (yang awalnya merupakan satu kota hingga dibagi oleh garis perbatasan yang digambar oleh penjajah Inggris). Terowongan ini menjadi satu-satunya saluran hidup bagi warga Gaza untuk menyelundupkan barang-barang. Seharusnya pemerintah Mesir mendukung Palestina, tetapi mereka secara terang-terangan berperan sebagai mediator netral, padahal pada kenyataannya, mereka berpihak pada Israel dan memberi tekanan pada gerakan perlawanan. Sejak keputusan militer, media Mesir—untuk pertama kalinya dalam sejarahnya—melancarkan serangan brutal terhadap Hamas dan kelompok-kelompok perlawanan, sementara badan intelijen Mesir menangkap sejumlah anggota Hamas yang melintas di Mesir dan menyiksa beberapa di antaranya hingga mati. Di antara yang meninggal akibat penyiksaan adalah saudara Samy Abu Zuhri, juru bicara Hamas, dan yang ditangkap serta disiksa dengan sangat kejam adalah Ayman Nofal, salah satu anggota dewan militer Brigade Izz ad-Din al-Qassam. Dia dipenjara hingga Revolusi Januari 2011 di Mesir, yang memungkinkannya melarikan diri ke Gaza. Di antara yang juga ditangkap adalah syahid Qur'ani Noor Baraka, pemimpin

al-Qassam, yang bekas penyiksaannya masih terlihat di pundaknya hingga ia syahid pada 2018.

Pemerintah Mesir juga menjadi penjamin gencatan senjata antara Hamas dan Israel, yang diharapkan dapat mencabut blokade Gaza, namun Israel tidak mematuhi ketentuan tersebut, dan faksi-faksi Palestina menolak untuk memperbarui gencatan senjata. Sementara itu, pemerintah Mesir berusaha untuk memperbaharui gencatan senjata dan menyampaikan kepada faksi-faksi bahwa Israel ingin melanjutkannya. Sementara upaya ini berlanjut, Israel melancarkan serangan mendadak (27 Desember 2008), mengebom dengan 63 pesawat dalam satu waktu, menargetkan sekelompok lulusan polisi Palestina, dan membunuh lebih dari 200 orang. Pemerintah Mesir menjadi alat tipu daya dalam perang ini, mengingat bahwa Menteri Luar Negeri Israel baru saja mengunjungi Hosni Mubarak sehari sebelumnya!

Dampak dari kejutan ini sangat besar, karena ini adalah 'perang pertama dalam konteks modern sejak Intifada pertama', yang membuat beberapa orang merasa bahwa harapan telah berakhir dan kekalahan telah datang, terutama karena tidak ada persiapan yang sebanding dengan perang ini. Yang terjadi hanyalah serangan biasa. Namun keteguhan para pejuang dan keteraturan urusan mereka dalam perang yang ingin menghabisi perlawanan dan pemerintahan Hamas adalah keajaiban dalam kondisi tersebut.

Perang ini berlangsung selama 21 hari, mengakibatkan lebih dari 1.300 orang Palestina syahid, termasuk lebih dari 400 anak, lebih dari 100 wanita, dan lebih dari 5.000 luka-luka. Sebaliknya, Israel mengklaim bahwa 9 tentara mereka tewas, sementara perlawanan mengklaim telah membunuh 80 tentara.

Namun hasil paling penting dari perang ini adalah kegagalan Israel untuk merebut kembali Gaza dan terpaksa mundur tanpa syarat karena perlawanan yang tak terduga. Mereka kembali pada kebijakan blokade. Tentu saja, mereka gagal menggulingkan pemerintahan Hamas, yang menjadi perubahan signifikan dalam posisi Gaza di hadapan penjajah Israel yang bersenjata lengkap.

Selama perang ini, Emir Qatar berusaha mengadakan pertemuan puncak Arab untuk membahas situasi di Gaza, tetapi pemerintah Mesir berusaha keras untuk mencegah pertemuan tersebut dan

berhasil menggagalkannya, sehingga hanya menjadi pertemuan khusus, bukan puncak Arab darurat. Bahkan Mahmoud Abbas sendiri menolak untuk hadir, sebagai protes terhadap kehadiran Khaled Meshaal, Presiden Hamas dalam pertemuan tersebut! Hal ini bertentangan dengan klaimnya sebagai satu-satunya wakil sah rakyat Palestina, dan ini menjadi pertempuran utama Abbas sejak keputusan militer.

Namun yang lebih berbahaya adalah hasil dari perang ini, yang memperlihatkan sejauh mana pemerintahan Palestina dan rejim Mesir bermusuhan dengan perlawanan Islam, khususnya Hamas:

Pemerintah Palestina kemudian terungkap terlibat dalam '**skandal Goldstone**', di mana Richard Goldstone mengajukan laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel dalam perang Gaza, namun seluruh dunia terkejut ketika pemerintah Palestina menentang laporan tersebut! Ternyata, Israel mengancam Mahmoud Abbas bahwa jika pemerintah mendukung laporan tersebut, mereka akan mempublikasikan rekaman video dari pertemuan antara Abbas dan Ehud Barak, di mana Abbas meminta agar perang dilanjutkan hingga Hamas jatuh! Juga terungkap sebuah rekaman suara antara Tayeb Abdel Rahim—Sekretaris Jenderal Presiden Palestina—dan Dov Weissglass, Kepala Staf Kantor Perdana Menteri Israel, di mana Tayeb Abdel Rahim mengatakan bahwa kondisi sudah tepat bagi tentara Israel untuk menyerbu kamp-kamp Jabalya dan Ash-Shati di Gaza untuk menggulingkan pemerintahan Hamas, sementara respon Israel mengatakan itu akan menyebabkan ribuan warga sipil tewas, yang dijawab oleh Tayeb: *'Mereka semua memilih Hamas, dan dengan demikian mereka telah memilih nasib mereka!'*

Adapun pemerintah Mesir, dimulai dari penipuan yang terlibat oleh rejim pemerintah sebelum dimulainya perang, kemudian serangan sengit dari media Mesir terhadap Hamas, beberapa saksi mata mengaitkan perkembangan ini dengan keinginan Kepala Intelijen Mesir, Jenderal Omar Suleiman, untuk menggantikan Hosni Mubarak. Sejak 2005 setidaknya, dia berusaha keras melayani Israel, berharap hal ini dapat meningkatkan popularitasnya di kalangan Amerika dalam pencarian mereka akan pengganti bagi presiden yang sudah berusia lebih dari 80 tahun!

Salah satu peran paling berbahaya yang dimainkan oleh Omar Suleiman demi kepentingan Israel adalah keteguhannya dalam merundingkan kesepakatan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel. Badan intelijen Mesir, dengan pimpinan Omar Suleiman, berusaha keras untuk mengetahui keberadaan Gilad Shalit, untuk mengakhiri satu-satunya tawarannya Hamas dalam menukar tahanan Palestina. Lalu dia berusaha menggagalkan kesepakatan yang dapat meningkatkan posisi Hamas di mata rakyat Palestina dan dunia Arab, bahkan berhasil menghambat kesepakatan tersebut dengan memaksakan syarat yang lebih berat dari yang diterima oleh pihak Zionis. Usaha mediasi dari Perancis, Jerman, dan negara lainnya gagal total.

Kemudian, kegembiraan datang untuk semua pihak ketika Revolusi Mesir (Januari 2011) terjadi dan menggulingkan Hosni Mubarak, bersamaan dengan Omar Suleiman yang telah menjadi wakilnya pada hari-hari terakhir pemerintahannya. Wilayah Arab seluruhnya tergerak oleh gempa besar, dan Israel merasakan ancaman terhadap keberadaannya dengan hilangnya Mubarak, yang menurut Menteri Israel, Benjamin Ben-Eliezer, adalah *'harta strategis bagi Israel'*, dan yang menurut Direktur CIA George Tenet adalah *'salah satu mitra paling dapat diandalkan dalam memerangi terorisme dan berusaha mencapai perdamaian di Timur Tengah'*. Tidaklah sulit untuk mengetahui bahwa dalam kamus keamanan Amerika, '**terorisme' berarti: Islam**, dan '**mencapai perdamaian' berarti: memberdayakan Israel!**

Gempa ini semakin kuat dengan ledakan lainnya yang tak kalah berbahaya, yaitu pecahnya Revolusi Suriah (Maret 2011), yang mengancam rezim Bashar al-Assad yang selama 40 tahun menjaga stabilitas garis depan Golan. Yang penting untuk kita saat ini adalah bahwa jatuhnya rezim Mubarak berarti hilangnya hambatan utama yang memungkinkan Hamas menandatangani kesepakatan yang terhormat untuk menukar seorang tentara yang ditawan dengan seribu tahanan Palestina, termasuk dua puluh wanita tahanan (Oktober 2011).

Sepertinya pembebasan Palestina semakin dekat dengan dimulainya revolusi-revolusi Arab, dan harapan ini mencapai puncaknya ketika Ikhwanul Muslimin memenangkan pemilihan presiden

di Mesir, dengan Muhammad Mursi menjadi presiden, seolah-olah waktu telah berhenti dan cita-cita menjadi kenyataan, dengan kedatangan para pemimpin Hamas di Istana Presiden Mesir.

Namun, Mursi yang memegang jabatan presiden (Juli 2012) belum dapat mengatasi krisis pemerintahan, dan masih banyak perjalanan panjang untuk menguasai mesin negara yang berakar pada kebijakan memusuhi Islam dan umat Islam, serta mengejar dan menangkap kaum Islamis. Mursi juga tidak siap untuk terlibat dalam konflik dengan Amerika atau Israel, karena kebijakan Ikhwanul Muslimin adalah menenangkan kekuatan internasional dan bergerak dalam reformasi bertahap. Namun demikian, banyak kendala yang diletakkan oleh rejim terhadap rakyat Palestina mulai mencair, terutama dalam hal pergerakan melalui perbatasan Rafah yang menjadi urat nadi kehidupan bagi Gaza yang terisolasi dan terkepung. Meskipun perbatasan tersebut tetap berada di bawah kontrol keamanan Mesir dan tidak ada senjata atau bahan yang dapat digunakan untuk memproduksi senjata yang melewatinya, tahun pertama pemerintahan Mursi sebelum ia digulingkan oleh kudeta militer menjadi tahun emas bagi Gaza. Hamas berhasil menyelundupkan sejumlah besar senjata, yang datang dari berbagai sumber, terutama dari gudang senjata Gaddafi yang jatuh akibat revolusi Libya, dan penyelundupan menjadi lebih mudah seiring dengan melemahnya aparat keamanan Mesir akibat getaran revolusi Mesir. Terdapat dugaan bahwa situasi telah berubah dan era baru akan menjadi milik kaum Islamis.

Pada tahun emas ini, Israel melakukan pembunuhan terhadap Ahmed Jabari, orang kedua di Brigade Izz ad-Din al-Qassam (14 November 2012), yang memulai perang kedua di Gaza sejak pembebasannya yang sejati pada tahun 2007. Ini adalah perang pertama yang terjadi di bawah rejim baru Mesir yang mendukung Gaza secara politis, dengan gerakan rakyat Arab yang besar, serta kelemahan pada aparat negara Mesir, yang berarti jika perang ini berlangsung lama, semuanya akan semakin tak terkendali. Maka, kebijakan Amerika Serikat bergegas untuk menghentikan perang ini secepat mungkin, dan dalam waktu satu minggu, kesepakatan gencatan senjata tercapai! Perang ini pun menjadi yang terpendek dan

paling murah, dengan 105 syahid dan hampir seribu terluka, sementara Israel mengklaim empat tentara mereka tewas dan 219 terluka.

Namun, tahun emas ini segera berakhir dengan kudeta militer berdarah yang menggulingkan pemerintahan Muhammad Mursi (3 Juli 2013), dan pemimpin kudeta melancarkan kampanye brutal terhadap Ikhwanul Muslimin, yang sebanding dengan kekerasan kampanye Nasser enam puluh tahun sebelumnya! Sekitar seribu orang terbunuh dalam satu hari (14 Agustus 2013) dalam pembantaian Rabaa, yang dinamai dari lapangan tempat terjadinya pembantaian. Tetapi yang penting bagi kita saat ini terkait dengan Gaza adalah bahwa pemerintahan militer baru ini memperlakukan Hamas dan Gaza seolah-olah mereka adalah musuh utama, melakukan upaya besar untuk memecah dan menundukkan mereka, mulai dari memperketat blokade hingga menutup perbatasan Rafah sekeras mungkin. Kemudian mereka melancarkan serangan militer yang dahsyat untuk menghancurkan semua terowongan yang menghubungkan Rafah Palestina dengan Rafah Mesir, yang telah digali dan diperluas untuk mengatasi blokade darat yang telah diberlakukan sejak era Mubarak. Mereka menghancurkannya dengan berbagai cara seperti peledakan, penggenangan dengan air asin yang tercemar, dan penyemprotan gas beracun. Bahkan, rezim Abdel Fattah al-Sisi menghapus desa Rafah Mesir sama sekali untuk mengakhiri semua jalur penyelundupan! Mereka juga membangun tembok baja besar yang tertanam di tanah dan menjulang tinggi di langit untuk memblokir segala kemungkinan untuk membangun terowongan, dan Gaza mengalami sebelas tahun yang sangat buruk sejak kudeta ini hingga saat ini.

Hanya satu tahun setelah kudeta militer ini, Israel melancarkan perang ketiganya (2014), yang jauh lebih parah daripada perang-perang sebelumnya. Pada saat itu, pemerintah Mesir sangat bertekad untuk menghancurkan Hamas, bahkan lebih bersemangat daripada Israel. Mereka menutup perbatasan Rafah untuk pertama kalinya bagi para korban luka yang membutuhkan perawatan medis yang tidak tersedia di Gaza, dan politik Mesir berdiri teguh mendukung agresi Zionis secara politik dan media, dengan cara yang lebih keras dari sebelumnya. Namun, salah satu kejutan dari perlawanan dalam

perang ini adalah bahwa jangkauan roket Hamas mencapai Tel Aviv! Ibu kota Israel sendiri! Meskipun kemampuan penghancuran roket tersebut terbatas dan sederhana, roket ini mampu menghentikan aktivitas ekonomi, termasuk bandara, sekolah, dan kegiatan lainnya. Manfaat roket-roket ini lebih kepada dampak psikologis dan ekonomi daripada militer.

Seperti halnya perang ini merupakan yang terberat, perang ini juga merupakan yang terpanjang, dengan durasi lebih dari lima puluh hari. Pasukan Israel berusaha untuk melakukan invasi darat setelah intensitas tembakan yang sangat tinggi, namun upaya tersebut gagal. Mereka menemui perlawanan yang luar biasa keras dari pihak Hamas, yang menggagalkan tujuan mereka. Para mediator berusaha untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata, namun perlawanan Hamas bersikeras agar blokade Gaza dihentikan, dan mereka tetap bertahan dalam posisi ini. Israel pun mulai menghancurkan bangunan-bangunan hunian tanpa tujuan atau arti lain selain untuk menekan perlawanan, hingga akhirnya tercapai kesepakatan gencatan senjata.

Setelah perang ini, seolah-olah tidak ada perang yang dapat menyelesaikan masalah Gaza, yang semakin berkembang menjadi kekuatan yang semakin meningkat. Semua pihak pun memilih jalur tekanan politik; dan muncul tiga teori politik untuk menangani Gaza, yang kadang berlawanan namun saling melengkapi, dan semuanya dilaksanakan: terkadang secara bersamaan, terkadang secara bergantian, sebagai berikut:

1. Teori pertama berpendapat untuk **memperketat blokade sampai ke tingkat maksimum** dan menutup semua kemungkinan jalur penyelundupan senjata dengan segala cara yang mungkin. Mereka juga berusaha untuk memicu ketegangan dari dalam melalui elemen-elemen Fatah, atau merekrut anggota dari kelompok Negara Islam (ISIS) untuk melakukan pembunuhan terarah, dengan tujuan menimbulkan masalah bagi pemerintah perlawanan dan mengguncang dukungan rakyat terhadapnya.
2. Teori kedua adalah **memberikan sedikit kelonggaran dalam hal memasukkan barang dan komoditas**, serta dalam pergerakan keluar masuk, sehingga perlawanan di Gaza memperoleh keun-

tungan yang mereka khawatirkan akan hilang. Di sisi lain, pihak penjajah dan pemerintah Mesir memiliki kartu yang dapat mereka gunakan untuk menekan pemerintah Gaza dan rakyatnya, dengan harapan rakyat Gaza tidak akan mampu bertahan jika hal-hal terbatas ini dicabut.

3. Teori ketiga adalah **mengabaikan Gaza sepenuhnya**, menganggapnya sebagai tempat yang bermasalah, dan menuju untuk menyelesaikan masalah ini dengan terus membangun pemukiman, mengubah status Jerusalem, dan merancang rencana pemindahan penduduk dari Tepi Barat, sehingga terjadi pemisahan antara masalah Gaza dan masalah Palestina.

Tidak dapat dipungkiri bahwa ketiga teori ini tidak akan terlaksana tanpa pelaksanaan yang tekun dan serius dari pemerintah Mesir, yang menggunakan seluruh kemampuan dan potensinya dalam upaya menundukkan dan merendahkan Hamas, serta memanfaatkan perbatasan Rafah sebagai alat untuk memblokir dan menundukkan Gaza.

Dalam situasi berbahaya ini, yang muncul dari kebijakan lembut tanpa perang, Hamas melakukan beberapa langkah penting, yang paling menonjol adalah tiga langkah berikut:

Pertama: Mencoba untuk mencapai kesepakatan dengan otoritas Palestina dan membentuk pemerintah kesatuan nasional, di mana Hamas bersedia menyerahkan kekuasaan atas Gaza. Hamas menunjukkan konsesi besar dalam hal ini, namun otoritas Palestina menetapkan syarat yang mustahil, yaitu penyerahan senjata Hamas, yang merupakan syarat menyerah yang tidak dapat diterima. Upaya membentuk pemerintahan kesatuan gagal, dan Gaza tetap berada di bawah tanggung jawab Hamas, atau Hamas terus terlibat dalam pemerintahan Gaza.

Kedua: Untuk mengatasi upaya memicu ketegangan rakyat terhadap pemerintahan Hamas, Hamas menciptakan ide 'Aksi Kembali' sebagai cara untuk mengarahkan kemarahan dan perasaan rakyat terhadap penjajah, serta untuk mencoba menghidupkan kembali perjuangan Palestina dan mencegah pengabaian Gaza. Aksi ini adalah protes damai yang dilakukan oleh rakyat yang bergerak

menuju perbatasan dengan wilayah yang dikuasai Zionis, dengan upaya-upaya rakyat yang semi-damai dan non-militer untuk melanggar batas tersebut, serta untuk mengganggu pasukan yang ditugaskan untuk mengamankannya. Aksi ini berhasil memberikan semacam kebangkitan isu Palestina, meskipun dengan pengabaian media dan politik internasional terhadap Gaza. Aksi ini juga berhasil mengalihkan energi kemarahan rakyat kepada penjajah yang merupakan penyebab utama masalah.

Ketiga: Meningkatkan ketegangan di Tepi Barat dan bekerja untuk membentuk kembali sel-sel perlawanan serta mengaktifkannya. Tepi Barat telah berada di bawah pengawasan keamanan Israel yang sangat ketat, kemudian diikuti oleh pengawasan keamanan otoritas Palestina. Sejak 2006, Amerika Serikat memilih sejumlah anggota otoritas Palestina yang dilatih di Yordania oleh Jenderal Amerika terkenal, Keith Dayton. Pasukan ini dimaksudkan untuk menjadi tangan kanan otoritas Palestina yang sangat terlibat dalam pengkhianatan, tanpa sedikit pun pengecualian seperti yang terjadi pada era Yasser Arafat. Mereka melawan perlawanan dengan keras, bahkan lebih kejam daripada pasukan penjajah itu sendiri. Mereka berhasil membongkar jaringan perlawanan di Tepi Barat dan menghancurkan struktur dasar kerja perlawanan. Dalam situasi yang menekan ini, beberapa pelaku syahid muncul yang melakukan aksi pembacokan atau tembakan, yang mungkin menyebabkan kematian atau luka, namun yang pasti adalah bahwa mereka akan dibunuh di tempat atau beberapa jam setelah pengejaran, atau dalam waktu maksimum beberapa hari setelahnya. Tidak ada yang bisa lebih dari ini di bawah hegemoni keamanan Israel dan otoritas Palestina. Namun, serangkaian serangan ini memberi sedikit harapan bagi perlawanan di Tepi Barat setelah sekian lama hening.

Penilaian terhadap langkah-langkah ini akan berbeda, bagi mereka yang melihatnya dari sudut pandang kemampuan yang tersedia, mereka akan melihat bahwa langkah-langkah tersebut berhasil mencapai hasil yang kuat. Namun, bagi mereka yang melihatnya dari sudut pandang tujuan yang diinginkan, mereka akan melihat bahwa langkah-langkah tersebut gagal dalam menggerakkan isu Palestina atau menghubungkan situasi Gaza dengan situasi Palestina secara

keseluruhan. Bahkan tuntutan dasar Gaza, yaitu pengakhiran blokade, tidak tercapai, dan tampaknya tidak ada harapan bahwa itu akan tercapai di masa depan.

Selama periode ini, aparat keamanan Hamas berhasil menggagalkan upaya provokasi dan pembunuhan, serta perekrutan anggota Fatah dan kelompok Negara Islam (ISIS), sehingga rencana Zionis dan pemerintah Palestina gagal di bidang ini.

Dengan demikian, Israel gagal mencapai tujuannya di Gaza, dan Hamas juga gagal dalam tujuan utamanya untuk mematahkan blokade atau mencegah pemisahan yang semakin kuat, atau mencegah upaya untuk mengabaikan Gaza dan kasusnya dalam konteks Palestina. Oleh karena itu, Hamas kali ini memulai perang pertama kalinya, yang disebut dengan "Pedang Al-Quds" pada tahun 2021.

Ini adalah pertama kalinya Hamas memulai perang, yang dilakukan sebagai reaksi terhadap ancaman pemaksaan Yudaisme yang semakin meningkat dari Israel, termasuk pawai bendera yang direncanakan Israel. Hamas mulai meluncurkan roket setelah ancaman dari komandan Brigade Izz ad-Din al-Qassam, Muhammad Deif, yang tidak diindahkan oleh Israel, dan perang pun pecah antara kedua belah pihak, berlangsung selama sebelas hari. Perang ini berakhir dengan lebih dari dua ratus syuhada di pihak Palestina dan 13 orang Yahudi tewas. Namun, pesan terakhir yang disampaikan oleh perang ini adalah bahwa Gaza bisa memulai perang untuk membela Al-Aqsa, dan bahwa Al-Quds kini memiliki pedang yang bisa dihunus dari Gaza! Inilah yang ingin ditegaskan oleh Pertempuran Pedang Al-Quds!

Badai Al-Aqsa

Sejak berakhirnya Pertempuran Pedang Al-Quds, Israel berusaha untuk terus melanggar kesucian Masjid Al-Aqsa beberapa kali untuk menggagalkan tujuan yang ingin dicapai oleh perlawanan dalam "**Pedang Al-Quds**", termasuk dengan menyerbu masjid di bulan Ramadan, menyerang para jamaah, dan membatasi mereka bahkan saat salat tarawih. Namun, reaksi perlawanan di Gaza tidak seperti yang diharapkan, meskipun ekspektasi meningkat setelah Pedang Al-Quds. Reaksi yang ada hanya berupa kecaman dan

ancaman, yang tidak dihiraukan oleh Israel, yang berusaha memperkuat penguasaan dan dominasi mereka atas Masjid Al-Aqsa, dan menunjukkan bahwa mereka berhak untuk bertindak sesuka hati terhadapnya.

Dengan demikian, kesimpulan yang diambil oleh Israel adalah bahwa Hamas telah dipatahkan, dan bahwa mereka adalah musuh yang rasional yang tidak akan bertindak gegabah. Bahkan, Israel mengirim beberapa pasukan dari posisi mereka di sekitar Gaza untuk mendukung operasi militer dan keamanan mereka di Tepi Barat.

Namun, dua minggu setelah pernyataan ini, dunia dikejutkan dengan serangan ratusan pejuang perlawanan pada Sabtu pagi (7 Oktober 2023), yang menyerbu garis pembatas Gaza di bawah hujan roket yang menghujani berbagai wilayah Israel. Mereka berhasil menembus puluhan pemukiman, membunuh lebih dari seribu orang Israel, sebagian besar di antaranya adalah militer, menghancurkan pasukan Divisi Gaza, menguasai markas komando mereka, dan membawa ratusan tahanan Israel kembali ke Gaza. Serangan ini kebetulan terjadi saat sebuah acara oleh kelompok teater Israel yang dekat dengan perbatasan Gaza, yang membuat penahanan para tahanan menjadi lebih mudah.

Menurut sumber yang dekat dengan perlawanan, operasi ini diperkirakan akan berlangsung selama sehari, tetapi semua tujuannya tercapai dalam waktu hanya enam jam. Enam jam inilah yang membuat aparat Israel terkejut, tidak mengerti apa yang terjadi, dan bagaimana mereka bisa terkejut oleh serangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah mereka!

Perlawanan ini, meskipun dengan kemampuan yang terbatas, di wilayah yang terkepung dan terisolasi selama 17 tahun, berhasil memberikan pukulan yang tidak mampu dilakukan oleh seluruh pasukan Arab bersama-sama. Ini adalah jumlah korban terbanyak yang pernah dialami Israel dalam satu hari! Yang lebih parah lagi, sistem keamanan Israel yang canggih, yang mengawasi Gaza setiap saat, tidak menerima informasi mengenai serangan besar ini. Bahkan, pagar keamanan mereka yang dilengkapi dengan banyak lapisan sensor dan pengamanan tampak seperti fatamorgana yang tidak berfungsi dan tidak bisa mencegah serangan ini.

Tujuan perlawanan dalam operasi ini adalah untuk melaksanakan pertukaran tahanan yang akan membebaskan semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel, namun ukuran serangan ini, kekuatannya, dan kejutan yang ditimbulkan memicu balas dendam dari Israel yang didukung oleh semua negara Barat, terutama Amerika Serikat. Presiden AS langsung mengunjungi Israel, begitu pula Menteri Pertahanan dan Luar Negeri, serta pejabat tinggi militer dan keamanan lainnya. Bahkan, Amerika mengirim dua kapal induk terbesarnya ke Laut Tengah sebagai ancaman terhadap semua pihak yang mungkin berpikir untuk terlibat dalam pertempuran pada saat yang jelas menunjukkan bahwa Israel tidak sekuat yang mereka kira dan bisa dipukul mundur oleh sekelompok pejuang dengan senjata ringan di wilayah yang terkepung dan lemah!

Perang ini, yang dikenal sebagai Badai Al-Aqsa, belum selesai, tetapi sudah dimulai perang besar di Gaza. Hingga saat penulisan ini, lebih dari 36.000 warga Gaza telah syahid, dan sekitar 90.000 lainnya terluka (saat penerjemahan buku ini sudah lebih dari 51.000 warga Gaza syahid dan lebih dari 100.000 yang terluka, pen.). Perang ini dengan jelas menunjukkan semua kenyataan yang sebelumnya kabur dan tidak diketahui oleh banyak orang, kecuali mereka yang hatinya tertutup dan matanya dibutakan oleh Tuhan:

Dalam perang ini terlihat betapa kejam, brutal, dan bengisnya Zionis dan Yahudi, yang tanpa ragu membombardir rumah sakit, masjid, gereja, pusat pengungsian, tenda pengungsi, organisasi kemanusiaan, bahkan sumur-sumur air dan pembangkit energi yang digunakan untuk desalinasi atau untuk rumah sakit, melakukan pembantaian lapangan dan mengubur korban dalam kuburan massal, bahkan menggali kembali makam-makam, meninggalkan bayi dan balita mati kelaparan dan kedinginan di tempat tidur rumah sakit.

Dalam perang ini juga terlihat betapa negara-negara Barat, dipimpin oleh Amerika Serikat, sepenuhnya mendukung Israel dengan segala kekuatannya, menyuplai senjata, amunisi, roket, serta ahli dan spesialis, serta perangkat pemantauan dan intelijen untuk mencari tahanan dan pimpinan perlawanan. Mereka juga mengerahkan upaya politik, media, dan hukum di tingkat internasional

dan domestik, dengan sikap yang tak termaafkan dan sangat vulgar, menunjukkan wajah buruk yang belum pernah terlihat sebelumnya.

Selain itu, dalam perang ini juga terlihat betapa rendahnya pengkhianatan dan kebusukan rezim-rezim Arab, terutama Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, yang tidak dapat dibicarakan sepenuhnya dalam tulisan ini. Negara-negara ini menggunakan seluruh sumber daya mereka untuk memberikan perlindungan bagi Israel dan menciptakan alternatif jalur laut dan darat untuk kapal-kapal yang datang ke Israel dari Laut Merah, yang menjadi sasaran serangan oleh Houthi yang menguasai Yaman di Selat Bab al-Mandab. Banyak sikap mereka terungkap, yang menginginkan Israel segera menghancurkan Hamas dan perlawanan di Gaza. Pemerintah Yordania menjaga lapisan pengamanan kuat di perbatasan mereka dengan Israel, demikian pula pemerintah Mesir di pos perbatasan Rafah, yang beroperasi sesuai izin dari Israel dalam hal pergerakan orang dan barang. Bahkan, orang Mesir yang terjebak di Gaza pun harus mendapatkan izin dari Israel untuk masuk ke Mesir, dan warga Palestina yang keluar hanya bisa melakukannya setelah membayar sejumlah besar uang (antara 5.000 hingga 10.000 dolar per orang), yang merupakan salah satu contoh pengkhianatan dan kejahatan yang paling keji!

Dalam perang ini terlihat betapa tak berdayanya lembaga-lembaga internasional atau bahkan adanya konspirasi di dalamnya. PBB dan lembaga-lembaga kemanusiaan, kesehatan, dan hukum yang ada hanya mampu menghitung jumlah korban, membuat laporan, dan memberikan kecaman yang lemah, sementara mereka tidak dapat melakukan apa-apa di lapangan kecuali sesuai dengan kehendak Israel.

Begitu pula terlihat ketidakmampuan rakyat Arab dan Muslim dalam memberikan bantuan kepada saudara-saudara mereka, dan bagaimana mereka hanya dapat bergerak sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh rezim-rezim mereka. Mereka berdemonstrasi jika diperbolehkan, menulis di media sosial jika diizinkan, dan sebagian dari mereka bahkan tidak bisa berbicara atau menulis di media sosial. Hal ini menjadi salah satu gambaran jelas tentang se-

jauh mana kemampuan mereka dan seberapa besar kontrol yang dimiliki oleh rezim-rezim tersebut atas mereka. Tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah yang Maha Agung.

POIN-POIN PENTING DALAM SEJARAH PALESTINA MODERN DAN KONTEMPORER

Halaman sejarah Palestina penuh dengan pelajaran dan hikmah, dan semakin dalam seseorang mempelajarinya, semakin banyak pengalaman dan wawasan yang didapat mengenai sifat dunia pada dua abad ini. Mungkin tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa isu ini menggabungkan inti dari berbagai pertempuran dunia: keagamaan, historis, pemikiran, politik, dan hukum.

Namun, kita akan mengambil dari halaman sejarah ini hal-hal yang paling penting untuk kita fokuskan.

Ringkasan Sejarah dan Pemikiran

Halaman sejarah tetaplah narasi yang tidak jelas atau terhubung, seperti kamus bahasa, panduan wisata, atau database, jika kita tidak menarik pelajaran dan hikmah yang menjelaskan dan menghubungkannya. Dan hal-hal yang paling penting yang dapat kita ambil dari peristiwa ini menurut pandangan kami adalah sebagai berikut:

1

Tidak diragukan lagi bahwa **pertempuran atas Al-Quds adalah pertempuran keagamaan**, dan motivasi keagamaan dalam hal ini

adalah yang terkuat dan paling jelas. Mereka yang berperang untuk isu ini, di semua zaman sebelumnya, sesungguhnya berperang untuk agama yang mereka anut, baik itu Muslim, Kristen, atau Yahudi. Mungkin ada pejuang yang mencintai dunia, atau ada politikus, penguasa, dan raja yang mencari kemuliaan atau perluasan wilayah, tetapi semua itu harus menyelubungi tujuannya dengan jubah agama dan kesucian, karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa menggerakkan para pejuang dari tanah mereka, dan tidak akan bisa menarik energi dari para pejuang kecuali jika mereka membangkitkan rasa kesucian agama yang dimiliki oleh Al-Quds.

Herzl, pendiri Zionisme, siap untuk memberikan tempat bagi bangsa Yahudi di berbagai tempat, namun ia segera menyadari kenyataan bahwa orang Yahudi hanya akan bergerak dengannya jika kepulangan mereka terbatas pada Al-Quds. Mungkin sebagian raja Eropa ketika mereka datang dalam Perang Salib menginginkan sungai susu dan madu dari Timur, namun mereka tidak akan menggerakkan pasukan-pasukan besar kecuali dengan membangkitkan di kalangan umat Kristen rasa untuk membela makam Kristus. Muslim juga demikian, jika Al-Quds tidak menjadi tanda dalam Kitab Allah, dan jika itu bukan kiblat pertama umat Muslim serta tempat Nabi Muhammad SAW naik ke langit, maka hal itu akan jauh lebih mudah.

Seolah-olah Allah SWT telah menjadikan kebenaran ini jelas, karena tanah Palestina bukanlah tanah yang paling subur atau yang memiliki banyak air dan sungai seperti Mesir, Irak, atau Sudan, dan juga bukan tanah yang kaya akan minyak dan mineral seperti negara-negara Teluk Arab. Namun, hati-hati orang-orang tertambat padanya, dan mata mereka menatapnya lebih dari yang mereka arahkan ke Baghdad, Kairo, Riyadh, atau kota-kota lainnya.

Sungguh merupakan hal yang sia-sia, bahkan pengkhianatan yang nyata, ketika orang Yahudi mengangkat slogan agama mereka, sementara umat Muslim mengangkat slogan sekuler yang berbicara tentang hak atas tanah secara historis atau tentang hak asasi manusia dan hak penentuan nasib sendiri, yang hampir tidak dapat menggugah siapa pun dan tidak berguna dalam dunia yang penuh kekerasan ini!

Mitos 'Bangsa Pilihan Tuhan' membuat mereka menempatkan diri mereka di atas semua manusia, menjadikan diskriminasi rasial sebagai ideologi yang tertanam dalam diri mereka, dan mereka meyakini dengan penuh fanatisme bahwa Allah menciptakan umat manusia selain Yahudi (Goyim) untuk melayani bangsa Yahudi, sebagaimana kita umat Muslim percaya bahwa Allah menciptakan binatang dan ternak untuk kita naiki dan makan.

Para pemimpin proyek Zionis telah mengungkapkan pandangan mereka tentang masalah hak agama mereka atas tanah ini;

Weizmann berkata: *"Tujuan dari Janji Balfour adalah untuk mengembalikan tanah Yehuda kepada orang Yahudi dan mengembalikan orang Yahudi ke tanah Yehuda,"*

Ben Gurion mengatakan: *"Hak orang Yahudi atas Palestina bukan berasal dari Piagam Mandat atau Janji Balfour, hak ini lebih tua dari keduanya. Taurat adalah Piagam Mandat, dan hak kami sudah ada sejak bangsa Yahudi ada. Janji Balfour dan Piagam Mandat hanyalah pengakuan atas hak ini."*

Dalam memoarnya, Menachem Begin mengungkapkan bahwa *"Yerusalem adalah ibu kota kami dan akan tetap demikian selamanya, dan tanah Israel akan kembali lagi ke bangsanya: seluruh tanah dan selamanya."*

Ketika orang Yahudi menguasai Masjid Al-Aqsa, Moshe Dayan berkata: *"Jika Taurat adalah milik kami, dan kami adalah bangsa Taurat, maka kami adalah pemilik tanah Taurat, tanah para imam dan leluhur di Yerusalem, Hebron, Jericho, dan sekitarnya, dan kami tidak akan meninggalkan tempat ini. Mungkin ini bukan ucapan politik, tetapi lebih dari itu, ini adalah pemenuhan impian nenek moyang kami."*

Apakah pidato seperti ini bisa dihadapi dengan pidato yang berbicara tentang piagam-piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan, dan rekomendasi Mahkamah Internasional?!!

Namun, agama memberikan kita suatu hal yang sangat diperlukan dalam pertempuran ini, yang tidak bisa digantikan atau ditiadakan, dan hanya agama yang mampu memberikannya kepada kita, yaitu harapan.

Eric Hoffer dengan benar memperhatikan bahwa orang-orang Yahudi yang dibawa ke kamar gas dan dibantai secara massal tanpa perlawanan di Jerman Nazi adalah orang-orang yang sama yang berjuang dengan sengit di Palestina. Banyak dari mereka terbunuh

sebelum melihat harapan mereka terwujud, tetapi mereka berjuang untuk harapan yang ada dalam imajinasi mereka. Sementara itu, orang lain terbunuh dalam keadaan pasrah dan tidak mempertahankan kenyataan yang mereka miliki!

Harapan ini yang membuat Vladimir Jabotinsky, pemikir keamanan Israel, terkejut. Ia mengakui bahwa tidak ada masa depan bagi Israel selama masih ada secercah harapan di hati orang-orang Arab. Dengan secercah harapan ini, mereka akan berjuang untuk mencegah Palestina berubah menjadi Israel. Oleh karena itu, ia membangun teori keamanan dasar yang memastikan bahwa harapan itu dihancurkan dari pihak Arab dan Palestina, dengan membuat kemampuan Israel untuk menanggapi, menghukum, dan mendahului: sangat menghancurkan dan cepat, tanpa memberi peluang untuk lolos.

Sebenarnya, jika Israel berhadapan dengan bangsa non-Muslim dalam kondisi yang sama, mereka pasti akan berhasil dengan teori keamanannya tanpa keraguan. Namun, bagaimana bisa mereka melakukannya jika mereka berhadapan dengan orang-orang yang mempercayai dan menganut agama yang memberi tahu mereka bahwa mereka pasti akan menang, bahwa mereka akan memasuki masjid lagi, menghancurkan bangunan-bangunan tinggi yang dibangun oleh orang Yahudi, dan bahwa mereka akan berjuang dengan pertolongan dari pohon dan batu?

Kekuatan agama dan iman adalah satu-satunya yang mampu menghancurkan teori keamanan Israel, dan satu-satunya yang mampu mengatasi jurang teknologi yang besar. Bahkan seorang sekuler atau ateis yang berkomitmen pada perjuangan Palestina karena alasan nasional, etnis, atau hak asasi manusia, akan merasa dipaksa untuk menggunakan dorongan agama dalam pertempuran ini, karena tidak ada dorongan lain yang bisa melakukan seperti itu!

2

Tinjauan sejarah menunjukkan bahwa **nasib Al-Quds (Yerusalem) ditentukan di luar kota itu, bukan di dalamnya. Kota ini seperti jantung dari tulang rusuk, dan seperti indikator atau standar kekuatan umat Muslim.** Seiring dengan kekuatan umat Muslim,

negara mereka, dan kekhalifahan, kondisi kota ini berubah, terutama ibukota-ibukota penting yang dekat di Syam dan Mesir. Oleh karena itu, kondisi Kairo dan Damaskus tercermin di Al-Quds.

Para sahabat Nabi saw pergi untuk menaklukkan Damaskus sebelum mereka pergi menaklukkan Al-Quds, meskipun Al-Quds lebih suci dari Syam dan lebih dekat secara geografis, namun para sahabat tahu bahwa pusat kekuatan Bizantium ada di ibukota Damaskus. Ketika ibukota (Rabi'ul Awal 14 H) ditaklukkan, Al-Quds bisa dengan mudah ditaklukkan (Rabi'ul Akhir 16 H), dengan jarak antara kedua kota yang dibuka sekitar satu setengah tahun.

Penaklukan Al-Quds oleh tentara Salib terjadi pada Perang Salib pertama hanya ketika umat Islam terpecah menjadi dua kekhalifahan: Sunni di Baghdad dan Syiah Ismailiyah di Kairo, dan garis perpecahan ini terjadi di Syam. Damaskus berada di bawah kekuasaan Seljuk yang setia kepada kekhalifahan Sunni Abbasiyah di Baghdad, sementara Kairo berada di bawah Fatimiyah Syiah Ismailiyah. Oleh karena itu, tentara Salib dengan mudah merebutnya (492 H).

Al-Quds baru bisa dibebaskan dari tentara Salib ketika umat Muslim menyatukan Mesir dan Syam, yang merupakan usaha yang dijalankan oleh Imaduddin Zanki, kemudian anaknya Nuruddin, dan akhirnya Saladin Al-Ayyubi. Ketika Mesir dan Syam bersatu, dibutuhkan waktu tiga tahun untuk membebaskan Al-Quds (Rabi'ul Awal 583 H).

Namun, Al-Quds tidak pernah direbut oleh tentara Salib lagi kecuali setelah perpecahan baru terjadi antara Syam dan Mesir, ketika Sultan Al-Kamil Ayyubi dari Mesir beraliansi dengan tentara Salib melawan saudaranya, Sultan Al-Mu'azzam Isa dari Syam. Al-Kamil menyerahkan Al-Quds kepada Frederick II (624 H), dan penaklukan ini terulang kembali oleh Nasir Daud (641 H).

Al-Quds hanya dibebaskan dengan kembalinya persatuan Mesir dan Syam oleh Najmuddin Ayyub (642 H). Kemudian, Al-Quds tetap aman selama enam abad di bawah pemerintahan Mamluk dan Ottoman.

Al-Quds tidak jatuh lagi ke tangan penjajah (1917 M) kecuali setelah kekalahan kekhalifahan Ottoman dalam Perang Dunia I, dan Kairo telah jatuh ke dalam penjajahan (1882 M).

Sangat sulit, bahkan hampir mustahil, setelah meninjau sejarah ini, untuk berpendapat bahwa Palestina dapat membebaskan Al-Quds hanya dengan kekuatan mereka sendiri. Palestina tidak memiliki cukup pria atau sumber daya untuk berperang melawan Zionis dalam pertempuran besar. Apalagi, jika Zionis didukung oleh kekuatan dan kekejaman negara-negara Barat yang merupakan bagian dari dominasi dan penjajahan Barat terhadap negara-negara Islam!

Ini bukan untuk meremehkan kekuatan dan keberanian orang Palestina, yang hingga saat ini telah memberikan apa yang mirip dengan keajaiban dan legenda dalam kesabaran mereka, perjuangan mereka, dan kemampuan mereka untuk bertahan dan melanjutkan jihad, menjaga isu ini tetap hidup meskipun menghadapi banyak pengkhianatan. Namun, ini adalah tinjauan terhadap sifat solusi dan pemahaman tanggung jawab seluruh umat, terutama orang-orang Mesir dan Syam.

3

Salah satu alasan keberhasilan Herzl dalam **proyek "negara Yahudi"** adalah bahwa ia **memanfaatkan kekuatan alami yang ada pada zamannya, dan tidak mencoba untuk menciptakan kekuatan baru yang bergantung pada dirinya sendiri** untuk mencapai proyek ini. Herzl membentuk organisasi Zionis agar ia bisa mempengaruhi kekuatan internasional yang ada untuk melibatkan mereka dalam proyek ini, dan bukan agar organisasi ini yang mengambil beban untuk mewujudkan proyek ini dan mendirikan negara tersebut.

Ia melakukan banyak upaya agar dia dan organisasinya dapat menggerakkan kekuatan internasional yang ada untuk melaksanakan proyek negara Zionis, dan tidak membentuk organisasi ini sebagai kekuatan baru yang harus bergerak sendiri untuk mendirikan negara. Ia perlu banyak bekerja dan berkorban untuk mencapai para pembuat keputusan dan meyakinkan mereka, kadang dengan kepentingan, kadang dengan kecenderungan agama, kadang dengan infiltrasi, dan kadang dengan ancaman, konspirasi, bahkan pembunuhan. Namun, jalannya sangat jelas baginya; ia tidak akan mencoba bertentangan langsung dengan kekuatan yang ada—termasuk Ottoman—dan tidak akan membiarkan orang Yahudi tampil sebagai pemberontak

terhadap kekhalifahan.

Sebaliknya, **salah satu alasan utama kegagalan gerakan Islam dalam abad terakhir adalah penolakan mereka terhadap cara ini dalam memanfaatkan kekuatan alami dan kekuatan yang sudah ada**. Mereka mencoba menciptakan organisasi yang kuat dengan cara yang dibuat-buat, bukan dengan mengadaptasi kekuatan yang ada, dengan harapan organisasi tersebut bisa mengatasi tantangan atau berperang untuk mendirikan negara atau membebaskan wilayah. Oleh karena itu, gerakan-gerakan ini menghadapi banyak rintangan alami yang tidak dapat mereka atasi, dan dengan mudah mereka dijebol dan dihancurkan.

Bahkan hasil terbaik yang dicapai oleh gerakan-gerakan Islam sepanjang abad ini terjadi ketika mereka bekerja dengan cara ini, dengan menembus sistem pemerintahan (seperti di Turki) atau infiltrasi ke dalam tentara yang merupakan inti negara (seperti di Sudan), atau ketika mereka berhasil bergantung pada suku dan klan di masyarakat yang berbasis suku (seperti di Yaman).

Jika kita merenungkan **siroh Nabi Muhammad** ﷺ, kita akan melihat hal yang sama. Nabi ﷺ tidak membentuk organisasi yang mengklaim memegang kendali sendiri, dan beliau tidak berusaha untuk menjadikan dirinya dan para sahabatnya sebagai kelompok yang terputus dari hubungan sosial, tetapi beliau berusaha **mengajak kekuatan-kekuatan alami yang ada di zamannya untuk menjadikan kekuatan mereka sebagai kekuatan dakwah, dan agar keberanian mereka menjadi kekuatan negara, serta agar tanah mereka menjadi ibu kota agama**. Kita melihat beliau ﷺ sangat berusaha untuk mengislamkan pemimpin-pemimpin Mekah, dan ketika beliau mengetahui bahwa mereka akan menolak dan tidak akan beriman, beliau mencari mereka di Tha'if dan pergi menemui para pemimpin mereka. Ketika mereka menolaknya dengan cara yang kasar dan mengirimkan orang-orang bodoh untuk menyakitinya, beliau terus menawarkan dakwahnya kepada suku-suku lain selama musim haji dan meminta pertolongan dari mereka, hingga beliau berhasil mengislamkan pemimpin-pemimpin Anshar. Lalu beliau berpindah ke kota mereka, dan kekuatan kebangsaan, keturunan, dan suku mereka menjadi kekuatan umat Islam.

Tidak ada keraguan bahwa Herzl akan gagal jika ia mencoba mendirikan negara Yahudi dengan kekuatan sendiri melalui organisasi Yahudi baik secara rahasia maupun terbuka.

4

Tidak ada masyarakat yang bebas dari perselisihan antar individu dan kelompok-kelompok di dalamnya, dan sebuah masyarakat tidak akan maju kecuali para pemimpinnya mampu memanfaatkan perselisihan-perselisihan alami atau pemikiran yang ada di antara mereka.

Salah satu **alasan utama keberhasilan Israel, terutama pada tahap awal pendirian, adalah kemampuan Chaim Weizmann dan Ben Gurion untuk memanfaatkan perpecahan yang ada di kalangan kaum Zionis dan mengendalikannya**. Contoh dari hal ini adalah:

Perselisihan antara Ben Gurion dan Moshe Sharett. Yang pertama lebih mementingkan tindakan yang dianggapnya bermanfaat untuk kepentingan Israel dalam jangka panjang tanpa peduli dengan opini publik atau apa yang akan ditulis media, dan bahwa sejarah akan menilai Israel berdasarkan apa yang telah dicapainya, bukan berdasarkan jumlah artikel yang mendukungnya. Sementara itu, diplomat Sharett sangat peduli dengan citra Israel di media dan memastikan bahwa tidak ada tindakan yang dapat memalukan Israel, serta penting untuk memperhatikan cara segala sesuatunya disampaikan. Meskipun perbedaan ini, keduanya bekerja sama dan tidak berpisah hingga tujuh tahun setelah berdirinya negara.

Begitu juga dengan kelompok Haganah, yang kemudian menjadi inti dari tentara Israel. Kelompok ini mengalami perpecahan menjadi kelompok-kelompok yang lebih ekstrem seperti Irgun, dan kemudian Irgun terpecah lagi menjadi kelompok yang lebih ekstrem yaitu Lehi (Stern). Meskipun demikian, Ben Gurion mampu memanfaatkan kelompok-kelompok ekstrem ini, melindungi aksi mereka, dan mengalihkan perhatian Inggris dari upaya untuk menindak mereka. Terkadang, Ben Gurion bahkan mengecam tindakan mereka. Irgun dan Lehi bekerja sama dalam pembantaian Deir Yassin, dan Lehi bahkan sempat mencoba bekerja sama dengan Nazi Jerman (yang sedang menindas orang Yahudi di Jerman) untuk melawan Inggris di

Palestina. Anggota Lehi kemudian melakukan pembunuhan terhadap Count Bernadotte (utusan PBB), yang akhirnya menyebabkan pihak berwenang Israel menahan mereka untuk waktu terbatas, namun mereka kemudian dibebaskan dengan pengampunan khusus. Tentara Israel kemudian menerima para pejuang Lehi ke dalam pasukan mereka, dan bagi mereka yang tidak diterima diberikan tunjangan pensiun atau bahkan penghargaan. Beberapa anggota Lehi bahkan mencapai posisi tinggi, seperti Yitzhak Shamir yang menjadi Perdana Menteri Israel. Para politisi Israel merayakan setiap tahun pembunuhan Stern dan mengeluarkan perangko untuk menghormati mereka.

Gerakan Zionis, seperti gerakan manusiawi lainnya, juga mengalami perbedaan yang mengarah pada perpecahan, kudeta, dan bahkan pembunuhan. Ada yang bergabung dengan gerakan ini dengan tujuan mengembalikan orang Yahudi ke Palestina dalam kerangka negara yang sudah ada, bukan negara yang terpisah, apalagi menjadi basis kolonial dan alat dominasi Barat, di mana orang Yahudi hidup berdampingan dengan orang Arab seperti yang terjadi di banyak daerah lainnya. Namun, ada pula yang bergabung dengan gerakan ini dengan pemahaman bahwa itu adalah penggantian total yang mengusir penduduk asli dan menguasai tanah tersebut, tidak hanya Palestina yang kita kenal sekarang, tetapi juga harus mencakup Yordania Timur. Pandangan ini diterjemahkan oleh partai yang dipimpin oleh pemikir terkenal Jabotinsky, yang mendirikan teori pencegahan cepat yang kini menjadi inti dari sistem keamanan Israel, dan yang menentang Biro Zionis karena hanya berfokus pada batas-batas Palestina yang ada sekarang.

Allah SWT telah memberitahukan kita bahwa salah satu sifat orang Yahudi adalah:

... بَأۡسُهُمۡ بَيۡنَهُمۡ شَدِيدٞۚ تَحۡسَبُهُمۡ جَمِيعٗا وَقُلُوبُهُمۡ شَتَّىٰۚ ...

... Permusuhan antar sesama mereka sangat hebat. Kamu mengira bahwa mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah.... (Al-Hashr: 14)

Sifat ini menunjukkan betapa mereka berusaha menunjukkan persatuan meskipun hati mereka terpecah, meskipun kekuatan mereka di antara mereka sangat besar! Allah SWT juga memberitahu-

kan bahwa pada masa jahiliyah, meskipun mereka saling bertempur dan terbagi dalam aliansi politik, jika perang dimulai, orang Yahudi akan berusaha untuk menebus tawanan mereka, bahkan yang telah berperang melawan mereka. Allah berfirman:

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَاۤءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاِنْ يَّأْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ۗ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ ...

Kemudian, kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (sesamamu) dan mengusir segolongan darimu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu (menghadapi) mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman pada sebagian Kitab (Taurat) dan ingkar pada sebagian (yang lain)? ... (**Al-Baqarah: 85**)

Ini adalah salah satu alasan mengapa mereka tetap bersatu sebagai satu kelompok meskipun sepanjang sejarah mereka hidup terpisah, dibenci, dan terbuang, seperti yang Allah firmankan:

وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا ۚ ...

Kami membagi mereka di bumi ini menjadi beberapa golongan.... (**Al-A'raf: 168**)

5

Orang-orang Yahudi, **di masa-masa keputusasaan, kelemahan, dan penindasan mereka**, mengalami situasi yang serupa dengan yang dialami oleh sebagian umat Islam saat ini: perasaan putus asa, kehilangan harapan, menyalahkan diri sendiri atas kemalasan, kebodohan, dan sikap pasif. Sebagian dari mereka bahkan mengejek gagasan menunggu kedatangan Mesias sebagai penyelamat, juga mengejek keterikatan mereka pada Palestina dan kerinduan untuk kembali ke sana. Sebaliknya, mereka mulai **mencari solusi berupa kemandirian dengan inisiatif dari para pemuka dan tokoh Yahudi, yang diupayakan di tempat lain yang memungkinkan**, bukan di Palestina yang tampaknya sulit untuk didapatkan.

Leon Pinsker mempublikasikan ide ini pada tahun 1882, pada saat banyak faktor, rencana, dan proyek sedang dikoordinasikan untuk menetapkan orang-orang Yahudi di Palestina. Pada tahun yang sama, Inggris telah menduduki Mesir, sehingga mimpi itu pada waktu itu sebenarnya sudah semakin dekat untuk menjadi kenyataan!

Saya menyampaikan contoh ini untuk mengatakan bahwa fenomena seperti menyalahkan diri sendiri, seruan untuk memperbarui wacana keagamaan, mencari solusi yang realistis daripada harapan besar, dan segala diskusi serupa di kalangan umat Islam saat ini, tidak lain hanyalah ekspresi dari perasaan lemah, tidak berdaya, dan kegagalan. Padahal, kemenangan mungkin sudah sangat dekat, tetapi mereka yang kalah mentalnya tidak dapat merasakannya, sehingga mulai berpikir seperti ini.

Namun, Leon Pinsker bukanlah orang yang pasif atau putus asa. Ia adalah salah satu pendiri kelompok "Pecinta Zion," pendiri dasar pemikiran gerakan tersebut, dan terpilih sebagai pemimpin kelompok itu. Meski demikian, gerakan yang dipimpinnya adalah salah satu dari banyak upaya yang pada akhirnya tidak mencapai tujuan akhir, tetapi tetap berkontribusi dalam membangkitkan kesadaran Yahudi dan mengarahkannya ke Palestina. Betapa miripnya ini dengan kelompok Islam yang berdiri, berjuang, lalu berakhir sebelum mencapai tujuannya, tetapi tetap menjadi bagian dari bangunan dan tahapan penting dalam perjalanan.

Sebagian orang Yahudi juga memiliki banyak prediksi tentang waktu kembalinya mereka ke Palestina, meskipun sebagian besar prediksi itu meleset. Prediksi seperti itu, serta metode menghitung tahun dan hari berdasarkan isyarat dalam warisan tradisi mereka, adalah metode yang lazim di kalangan mereka yang tertindas namun berharap untuk menang.

Dalam gerakan Zionisme sendiri, bahkan di antara para pemimpinnya, ada yang terombang-ambing oleh situasi hingga akhirnya menjadi agen bagi rezim yang berkuasa. Salah satu contoh penting adalah **Alfred Nossig**, seorang pemimpin Zionis yang pernah bernegosiasi dengan Talat Pasha mengenai status orang Yahudi di Palestina pada tahun 1918. Ia kemudian **bekerja untuk rezim Nazi**

Jerman dan menyusun rencana pemusnahan orang-orang Yahudi di Eropa.

Umat Islam harus percaya bahwa jika suatu kaum yang terbuang dan dimurkai seperti orang Yahudi dapat berhasil mewujudkan mimpi yang tampaknya mustahil selama tiga ribu tahun—dan mereka hanya berhasil dengan bantuan dari manusia lainnya—maka kemampuan kita untuk meraih kemenangan dan kekuatan jauh lebih dekat. Apalagi kita adalah umat yang dijanjikan kemenangan dan keberhasilan. Kita adalah umat pilihan yang diberi warisan kitab setelah mereka menyia-nyiakannya.

Kesimpulan dalam Situasi Internasional dan Regional

Jika kita melihat sejarah Palestina dan mencoba memahami sifat situasi internasional dan regional dari sudut pandang ini, saya pikir poin-poin utama yang dapat kita simpulkan adalah sebagai berikut:

1

Banyak perdebatan tentang **siapa yang mengendalikan siapa**: apakah Yahudi dan Zionisme mengendalikan Barat dan kebijakannya, ataukah Barat yang menjadi pihak dominan yang memanfaatkan orang Yahudi dan Zionis untuk mencapai tujuan kolonial dan pendudukan mereka, mendirikan Israel sebagai pangkalan militer Barat di wilayah Muslim, sementara orang Yahudi menjadi alat manusia yang murah dan dapat dikorbankan dalam pertempuran ini untuk menyelamatkan orang-orang kulit putih Kristen Barat?

Pendapat pertama mengatakan bahwa Yahudi, melalui organisasi rahasia yang mereka dirikan, dominasi keuangan mereka, infiltrasi di bidang media, seni, dan budaya, serta melalui cara-cara tidak etis seperti manipulasi seksual, uang, kebohongan, pengkhianatan, dan konspirasi, telah berhasil mengendalikan kebijakan Barat. Sementara pendapat kedua mengatakan bahwa Barat tidak bodoh atau naif. Yahudi telah hidup di antara mereka selama berabad-abad tetapi tidak mampu mencapai apa-apa dengan cara-cara tersebut, dan tetap menjadi kaum yang terbuang dan tertindas. Sebenarnya, keinginan kedua belah pihak bersesuaian, sehingga Barat menggunakan kekuatan mereka untuk mendukung Zionis dan negara mereka,

bukan karena tunduk kepada Zionis, tetapi memanfaatkannya. Barat adalah pihak yang dominan, dan kekuatan Yahudi tidak akan berarti tanpa dukungan Barat yang membuka jalan, membangun, dan melindungi Israel hingga saat ini.

Saya cenderung kepada pendapat kedua ini: **Barat adalah pihak dominan yang memanfaatkan Zionis untuk tujuan kolonialnya**. Barat, terutama Amerika Serikat, masih menjadi pihak yang mampu mengendalikan Israel, mengatur kebijakannya, dan menghentikannya jika mereka mau.

Meskipun bukan tempatnya untuk memperluas bukti dari politik dan sejarah tentang ini, saya menemukan dalam Al-Qur'an dukungan untuk pendapat ini, seperti dalam firman Allah:

"(Ingatlah) ketika Allah berfirman: Wahai Isa, sesungguhnya Aku akan mewafatkanmu, mengangkatmu kepada-Ku, dan membersihkanmu dari orang-orang yang kafir. Aku menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat." (Ali 'Imran: 55).

Sebagian mufassir mengatakan bahwa mereka yang mengikuti Isa (orang Nasrani) dan bangsa Romawi akan tetap berada di atas orang-orang kafir kepada Isa (Yahudi) hingga hari kiamat.

Demikian pula, dalam firman-Nya:

"Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (perlindungan) Allah dan tali (perlindungan) manusia." (Ali 'Imran: 112).

Ayat ini menunjukkan bahwa kehinaan adalah sifat mereka, dan keberadaan dukungan dari manusia lain menghalangi mereka untuk menjadi pihak dominan pada waktu tertentu.

Terlepas dari perdebatan ini, **poin penting yang harus dipahami adalah bahwa Barat tidak akan pernah melepaskan Israel.** Mereka akan terus mendukung dan melindunginya, baik melalui politik maupun perang, entah mereka adalah orang Kristen evangelis yang mencintai Yahudi karena keyakinan mereka, Kristen yang membenci Yahudi karena melihat mereka sebagai pembunuh Yesus, atau kaum sekuler yang melihat melindungi Israel sebagai cara untuk menjaga kepentingan duniawi dan tujuan kolonial Barat.

Ini menjelaskan bagaimana negara-negara Barat, terutama kekuatan besar, dapat mentoleransi tindakan Israel yang tidak dapat

diterima jika dilakukan oleh pihak lain. Sebagai contoh, pada tahun 1940-an, orang-orang Zionis memerangi Inggris di Palestina, melakukan serangkaian serangan, ledakan, dan pembunuhan yang menyebabkan puluhan tentara dan perwira Inggris tewas. Namun, Inggris menelan semua ini dan menyerahkan Palestina kepada mereka.

Selain itu, terdapat banyak insiden di mana mata-mata yang bekerja untuk Israel ditemukan di dalam badan intelijen Amerika Serikat. Bahkan, Presiden AS dan pejabat pemerintahannya sering kali dihina secara langsung oleh para politisi Zionis, baik melalui ucapan maupun tindakan. Namun, semua penghinaan ini diabaikan seolah-olah tidak pernah terjadi.

Yang lebih ironis, model Israel sebagai negara berbasis agama Yahudi dan bersifat etnosentris bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara-negara Barat. Barat mendirikan negara-negara mereka berdasarkan prinsip sekularisme, keterbukaan liberal yang menentang rasisme dan diskriminasi, serta prinsip negara 'Westphalia' yang berdaulat dalam batas-batas teritorialnya. Sementara itu, Israel adalah negara yang menolak menetapkan batas wilayahnya dan secara terang-terangan menyatakan ambisi ekspansionisnya (dari Sungai Nil hingga Sungai Efrat). Meskipun terdapat kontradiksi ini, Barat tetap menjadi sekutu Israel. Bahkan, mereka menentang Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan otoritas Palestina, yang sebetulnya lebih sejalan dengan prinsip-prinsip sekuler liberal Barat seperti negara kewarganegaraan multietnis dengan batas-batas yang jelas.

Hal ini menunjukkan bahwa **Barat tidak keberatan dengan kontradiksi ini**. Mereka bahkan tidak merasa perlu memberikan pembenaran atas tindakan mereka, termasuk pembenaran atas pembantaian berdarah yang seringkali dianggap sebagai "kebutuhan tak terelakkan".

Memahami dinamika ini sangat penting untuk menyadari kerasnya medan konflik, intensitasnya, dan batas-batasnya. Jika Israel hanya dianggap sebagai proyek Yahudi, maka itu adalah satu hal. Namun, jika Israel dilihat sebagai proyek kolonial Kristen Barat sekaligus Yahudi-Zionis, maka itu adalah hal yang sangat berbeda. **Zionisme Kristen adalah ideologi yang tertanam kuat dalam lapisan**

elite Barat, baik di ranah politik, budaya, maupun ekonomi. Ini adalah versi modern dari Perang Salib di Abad Pertengahan.

Pemahaman ini membantu kita melepaskan diri dari ilusi bahwa masyarakat Barat hanya memerlukan "pencerahan" tentang keadilan Palestina. Tidaklah benar bahwa mereka tidak memahami kenyataan di lapangan. Sebaliknya, mereka sepenuhnya memahami dan mengimani keyakinan bahwa tanah ini adalah milik Yahudi sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan, dan bahwa Yahudi, bersama dengan dukungan dari kaum Kristen, memiliki misi ilahi untuk "memulihkan" tanah ini dari orang Arab.

Selain itu, kita juga harus menyadari skala konflik ini, yang membutuhkan sumber daya keuangan dan manusia dalam jumlah besar. Di sisi lain, salah satu kesalahan fatal yang terus ada dalam beberapa kelompok Palestina adalah keyakinan bahwa mereka dapat membebaskan Palestina sendirian. Beberapa bahkan bermimpi bahwa setelah membebaskan Palestina, mereka dapat membebaskan negara-negara lain. Pandangan seperti ini tidak memperhitungkan kenyataan mendalam dari konflik ini, baik dari segi skala maupun kekuatannya.

Tidaklah benar membandingkan perjuangan Palestina dengan perjuangan Aljazair melawan penjajahan Prancis. Situasi Aljazair pada masa itu sangat berbeda. Prancis saat itu adalah negara yang lemah setelah kalah dalam Perang Dunia II, dan berada di bawah tekanan dari Amerika dan Uni Soviet untuk meninggalkan koloninya. Sebaliknya, Israel memiliki dukungan yang kuat dan konsisten dari Barat, baik secara finansial maupun militer.

Pernyataan dari beberapa pemimpin Barat menunjukkan dengan jelas bahwa **Israel adalah kepentingan strategis vital bagi mereka**. Mereka menganggap bahwa **tanpa Israel, Barat harus mengeluarkan biaya yang tidak terbayangkan untuk mendirikan pangkalan militer di Timur Tengah**. Oleh karena itu, dukungan untuk Zionisme dan Israel telah menjadi kebijakan tetap yang dipegang oleh berbagai partai politik di Barat, terlepas dari ideologi atau persaingan politik di antara mereka.

Bahkan, Benjamin Netanyahu dalam memoarnya mencatat bahwa seorang anggota parlemen AS pernah berkata kepadanya:

"Jika kami memiliki Israel di Afghanistan, kami akan menghemat triliunan dolar dan memiliki sekutu nyata melawan musuh." Pernyataan ini menunjukkan keberhasilan visi Theodor Herzl yang lebih dari seabad lalu menulis bahwa negara Yahudi "akan menjadi bagian dari tembok pertahanan Eropa di Asia." Dengan demikian, beberapa ahli percaya bahwa konflik global pada dasarnya terpusat pada konflik di Palestina.

Yang lebih mengejutkan, pada saat pengusiran besar-besaran orang-orang Palestina, Parlemen Inggris justru mengesahkan undang-undang yang melarang perburuan rubah! Ini menunjukkan standar ganda yang ekstrem dari Barat. Mereka sering kali melanggar prinsip-prinsip yang mereka anut dengan wajah dingin, dan memperlakukan bangsa lain seolah-olah lebih rendah dari hewan. Setelah tragedi terjadi, mereka mungkin akan datang sebagai "sejarawan objektif" untuk mendokumentasikan peristiwa tersebut dan memberikan simpati simbolis kepada para korban, tetapi semuanya sudah terlambat.

Orang-orang Barat adalah ahli dalam hal kemunafikan; mereka melanggar slogan-slogan yang mereka agung-agungkan dengan senyuman dingin di wajah mereka! Faktanya, mereka memperlakukan orang lain seolah-olah lebih rendah daripada binatang. Tidak ada masalah bagi mereka, setelah tragedi terjadi, pembantaian selesai, dan bencana mencapai puncaknya, untuk datang sebagai sejarawan yang mendirikan "tenda belasungkawa," memberikan hak kepada para korban dalam bentuk dokumentasi, dan mengutuk peristiwa tersebut dalam lembaran sejarah!

Namun, ini **tidak berarti bahwa Yahudi atau Zionis hanyalah "agen Barat" seperti pegawai yang mendengar dan menaati perintah**. Sebaliknya, mereka adalah kaum dengan gagasan, proyek, dan kemandirian. **Mereka bekerja untuk memperkuat negara mereka, memperluas pengaruh mereka, dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menembus dan memanfaatkan kekuatan Barat**. Namun, hubungan ini menunjukkan bahwa 'tangan atas' (penentu) dalam hubungan tersebut adalah Barat, bukan Zionis. Segala perselisihan antara keduanya diatasi dalam kerangka kerja sama mereka untuk tujuan-tujuan besar yang sama.

Pemahaman tentang kesimpulan ini mengarahkan kita pada kesimpulan berikutnya:

2

Jika Israel adalah bagian dari proyek dominasi Barat di wilayah kita, bahkan bagian terpentingnya, maka secara logis dan rasional, tanpa memerlukan bukti lebih lanjut dari peristiwa sejarah dan politik, **rejim-rejim pemerintahan Arab yang ada adalah bagian dari proyek Barat yang sama, baik secara langsung melayani kepentingan Barat maupun dalam mendukung bagian terpenting dari proyek ini, yaitu Israel**.

Hal ini pertama kali dipahami oleh rezim-rezim Arab itu sendiri, sehingga setiap calon penguasa berusaha sebaik mungkin untuk membuktikan bahwa mereka layak memerintah dengan cara melayani kepentingan Barat, termasuk melindungi Israel. Meskipun ada perbedaan tajam di antara rezim-rezim ini—apakah mereka berbentuk kerajaan atau republik, komunis atau kapitalis, sipil atau militer—mereka sepakat dalam menjalankan peran yang dibutuhkan untuk melindungi Israel. Bahkan, persaingan di antara para penguasa dan elit mendorong sebagian dari mereka untuk menawarkan diri sebagai yang paling mampu memajukan hubungan dengan Israel dan memperluas normalisasi dengannya. Ketika salah satu rezim ini terancam, terutama di negara-negara yang berbatasan langsung dengan Israel, mereka sering memperingatkan bahwa jatuhnya mereka akan menjadi bencana bagi Israel.

Karena itu, jelas bahwa sejak pendirian Israel, tidak ada satu pun negara Arab yang pernah menyerangnya terlebih dahulu. Bahkan, mereka tidak pernah membuat rencana untuk membebaskan Palestina, baik atas dasar solidaritas agama, kehormatan Arab, atau bahkan demi kepentingan pragmatis mereka sendiri, yaitu menghilangkan ancaman besar terhadap keamanan nasional! Padahal, rezim-rezim ini sering berbicara atas nama Islam, nasionalisme Arab, atau keamanan nasional dan menjaga tanah air.

Sebagaimana diketahui secara luas, Gamal Abdel Nasser pernah berkata kepada Dewan Nasional Palestina di Gaza: *"Siapa pun yang mengatakan kepada Anda bahwa dia memiliki rencana untuk membebaskan*

Palestina adalah pembohong. Dan jika saya mengatakan bahwa saya punya rencana, maka saya juga membohongi Anda."

Lebih dari itu, rezim-rezim ini tidak hanya mengabaikan perlawanan, tetapi juga menekan mereka yang ingin melawan Israel, bahkan sampai menangkap, memenjarakan, atau menyiksa mereka dengan kejam! Hal ini terjadi baik dalam masa perang maupun masa damai. Para pejuang Palestina sering menghadapi penderitaan yang tak terbayangkan di penjara-penjara rezim Arab.

Jika kita menelusuri sejarah Palestina, kita akan menemukan fakta lain yang penting: **perlawanan Palestina hanya bisa muncul dan bertahan dalam rezim-rezim yang lemah.** Di bawah rezim-rezim yang kuat, perlawanan tidak pernah bisa beroperasi. Misalnya, rezim-rezim kuat seperti Mesir dan Suriah tidak pernah memulai atau merencanakan perang pembebasan Palestina. Sebaliknya, rezim-rezim lemah, seperti Yordania dan Lebanon, sempat menjadi basis bagi perlawanan Palestina. Namun, setelah rezim-rezim ini menguat, mereka melawan perlawanan Palestina dan mengusirnya, seperti yang terjadi di Yordania (1970) dan Lebanon (1982).

Beberapa orang merangkum hubungan rezim-rezim ini dengan Palestina dengan mengatakan: *"Semua revolusi yang lahir di Palestina digagalkan di ibu kota-ibu kota Arab."* Atau: *"Nasib Palestina adalah bahwa intervensi negara-negara Arab menjadi sumber malapetakanya."*

Kesimpulan tentang Situasi Perlawanan

Jika takdir memperkenankan saya memberikan nasihat kepada para pejuang perlawanan, atau jika saya mengetahui bahwa mereka membaca tulisan saya, hal pertama yang akan saya tekankan adalah pemahaman atas kesimpulan berikut ini:

1

Jika kita menelusuri **sejarah Palestina dan Baitul Maqdis, kita akan melihat bahwa mereka jatuh ketika pusat-pusat kekuatan besar seperti Kairo, Damaskus, dan Istanbul melemah. Sebaliknya, mereka berada dalam keadaan aman dan makmur ketika pusat-pusat ini kuat dan berjaya.** Dalam hal Israel, kita menemukan bahwa negara ini didirikan ketika kekuatan besar di London, Washington,

dan Moskow memutuskan untuk mendirikannya. Tidak ada keraguan bahwa jika dukungan Barat kepada Israel terhenti, negara itu akan runtuh, baik dengan sendirinya maupun dengan sedikit dorongan perlawanan.

Ini menunjukkan bahwa terbatasnya aktivitas perlawanan hanya di dalam Palestina adalah sesuatu yang perlu ditinjau ulang, meskipun kita memahami alasan-alasan historis yang mendorongnya, seperti keyakinan bahwa rezim-rezim Arab akan mendukung perlawanan berdasarkan solidaritas Arab atau kepentingan nasional. Namun, keyakinan ini terbukti hanyalah ilusi.

Kunci pembebasan Baitul Maqdis terletak di Kairo, Amman, dan Damaskus. Mengubah rezim-rezim di pusat-pusat ini akan membalikkan keseimbangan kekuatan dalam perjuangan. Tidak ada harapan untuk membebaskan Palestina selama rezim-rezim ini tetap ada.

Kita juga harus mengakui kesalahan historis gerakan Islam ketika meninggalkan perjuangan jihad dan mengadopsi ide bahwa pembentukan negara Islam harus didahulukan sebelum membebaskan Palestina. Akibatnya, kesempatan berharga terlewatkan, dan banyak anggota aktif bergabung dengan gerakan-gerakan perlawanan sekuler dan nasionalis seperti Fatah, yang percaya bahwa Palestina dapat dibebaskan tanpa harus menunggu persatuan negara-negara Arab.

Meski begitu, gerakan Islam berhasil memperbaiki arah ini pada awal tahun 1980-an, ketika mereka mulai terlibat dalam perjuangan pembebasan tanpa menunggu pembentukan negara Islam. Langkah ini menghasilkan pencapaian luar biasa meskipun dihadapi dengan kekuatan yang tidak seimbang. Namun, ide awal bahwa bangsa Palestina tidak dapat membebaskan Palestina sendirian tetap benar. Jihad tidak menunggu persatuan sempurna; perjuangan dan pengorbanan adalah jalan menuju tujuan tersebut.

2

Mencapai kekuasaan adalah kewajiban yang tidak bisa dihindari, baik melalui pemilu maupun cara lain, di Palestina sendiri atau di ibu kota-ibu kota dunia Arab dan Islam lainnya.

Sebagian besar gerakan perlawanan dan Islam awalnya terorganisasi sebagai kelompok perlawanan atau dakwah. Namun, situasi memaksa Hamas untuk ikut serta dalam pemilu pada tahun 2006. Alhamdulillah, keputusan ini diambil, karena jika tidak, persoalan Palestina mungkin sudah selesai di tangan Mahmoud Abbas. Dengan mengikuti pemilu, Hamas mampu menghambat upaya penyelesaian yang merugikan, melawan pengkhianatan, dan akhirnya mengambil alih Gaza. Gaza pun berubah menjadi benteng perlawanan yang kokoh meskipun berada dalam kondisi yang sangat sulit.

Pemilu adalah mekanisme legitimasi di era modern. Tanpa kekuasaan, gerakan perlawanan atau Islam akan menghadapi kehancuran cepat atau lambat. Sebuah gerakan yang tidak berusaha mencapai kekuasaan atau menciptakan peluang untuk mencapainya akan mengutuk dirinya sendiri pada kemunduran, penyimpangan, dan akhirnya kehancuran.

Bandingkan kondisi Gaza, di mana gerakan Islam memegang kendali, dengan kondisi Tepi Barat, di mana perlawanan ditekan. Di Gaza, pengembangan roket dan pembebasan tanah menjadi tujuan. Di Tepi Barat, perjuangan maksimal seorang pejuang adalah melakukan serangan tunggal sebelum menghadapi kematian.

Juga bandingkan pemerintahan singkat Morsi di Mesir dengan era Mubarak sebelumnya dan Sisi setelahnya. Meski kekuasaan Morsi lemah dan terancam, pemerintahannya jauh lebih baik dibandingkan penguasa lain. Ini menunjukkan pentingnya kekuasaan, meskipun lemah, jika berada di tangan orang yang benar.

3

Tidak diragukan bahwa salah satu masalah mendalam yang memengaruhi jalannya perlawanan Palestina sejak masa pendudukan Inggris adalah perselisihan internal yang sulit dikendalikan di antara para pemimpin Palestina. Perselisihan ini telah dieksploitasi oleh penjajah dan juga oleh rezim-rezim Arab sejak saat itu. Perselisihan ini menyedot banyak waktu, tenaga, dan sumber daya.

Namun, kita tidak boleh melupakan bahwa perjuangan Palestina tidak mengalami lompatan besar hingga terjadi penyelesaian militer di Gaza. Langkah ini menyingkirkan Otoritas Palestina, yang se-

belumnya bertindak sebagai "tentara pengkhianat" lain yang menikam jantung perlawanan. Bahkan, dalam beberapa hal, Otoritas Palestina mampu melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh penjajah Israel sendiri.

Setiap gerakan perlawanan menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan dua hal: menjaga kesatuan barisan (atau, jika tidak memungkinkan, mengelola perbedaan secara baik) dan memerangi pengkhianat serta proyek-proyek kolaborasi yang berlindung di balik perbedaan. Dalam situasi seperti ini, strategi tetap tidak selalu efektif; diperlukan fleksibilitas dan tindakan cepat sesuai dengan keadaan.

Salah satu kritik terhadap Hamas adalah kecenderungannya untuk terus bersabar dan menyerap semua provokasi dari Fatah. Bahkan, keputusan penyelesaian militer yang terjadi di Gaza bukanlah hasil keputusan politik, melainkan keputusan lapangan. Pendekatan Hamas terhadap Fatah dan Otoritas Palestina—yang cenderung menahan diri dan mencari kompromi—telah melewatkan banyak peluang untuk merongrong legitimasi Otoritas Palestina, mengeksploitasi kelemahannya, dan memaksanya pada posisi defensif.

Pendekatan serupa juga berlaku dalam hubungan dengan rezim-rezim Arab. Meski menghindari konfrontasi langsung dengan rezim-rezim ini telah membantu Hamas menghindari beberapa masalah besar, strategi ini juga melewatkan peluang besar, terutama selama era Musim Semi Arab.

Menghadapi rezim-rezim yang jelas-jelas bermusuhan dengan perlawanan dan tidak peduli pada kepentingan nasional, menjaga sikap menghindari permusuhan atau bahkan berusaha menarik simpati mereka adalah kesalahan historis. Penting bagi perlawanan untuk memanfaatkan setiap peluang yang muncul untuk melemahkan atau bahkan menggulingkan rezim-rezim ini.

Saya perlu menekankan bahwa kebijakan yang diambil terhadap Otoritas Palestina dan rezim Arab harus fleksibel, bukan kaku. Kebijakan ini harus didasarkan pada upaya merebut peluang, bukan pada asumsi bahwa konflik internal adalah garis merah atau bahwa permusuhan terhadap rezim Arab melanggar prinsip perjuangan.

4

Ada pengamatan penting dalam sejarah perlawanan Palestina, yaitu bahwa organisasi-organisasi Palestina pada tahun 1950-an dan 1960-an bersifat modern atau berorientasi pada ide-ide modernis. Organisasi-organisasi ini tidak terlalu peduli pada hubungan tradisional seperti keluarga, suku, atau komunitas lokal. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama:

1. Gempa sosial yang melanda masyarakat Palestina akibat pengungsian besar-besaran, yang mengubah struktur sosial mereka di daerah pengungsian.
2. Pandangan negatif terhadap model perlawanan pada tahun 1930-an dan 1940-an, yang dianggap bergantung pada konsep "faza'ah" (aksi spontan masyarakat untuk membantu mereka yang membutuhkan). Meski konsep ini memiliki nilai solidaritas sosial, organisasi-organisasi modern menganggapnya tidak terorganisasi, tanpa perencanaan jangka panjang, dan tanpa kepemimpinan sentral, yang dianggap sebagai salah satu penyebab kekalahan masa lalu.

Pandangan ini, meski berakar pada pengalaman masa lalu, menciptakan kelemahan mendasar: **kurangnya keterlibatan rakyat dalam perlawanan.**

Pengamatan ini membawa kita pada salah satu kelemahan mendasar yang menyebabkan berbagai bencana berulang di Palestina, yaitu: ketiadaan keterlibatan rakyat dalam perjuangan.

Masalah ini memiliki beberapa cabang:

1. Konsep negara modern, yang mendominasi budaya dan sistem hingga memengaruhi para pemimpin gerakan perlawanan. Pandangan ini menempatkan pertempuran sebagai tugas eksklusif tentara bersenjata yang terorganisasi dengan berbagai divisi dan spesialisasi. Akibatnya, rakyat dianggap sebagai beban dalam pertempuran, sehingga keberadaan mereka dikesampingkan atau bahkan ditakuti oleh tentara yang merasa keberadaan perlawanan rakyat dapat mengganggu strategi militer.
2. Teknologi persenjataan modern, yang telah berubah dari alat

sederhana seperti pedang, tombak, atau panah menjadi proses produksi yang kompleks untuk menghasilkan senjata dasar seperti pistol, senapan, atau peluru. Masalah ini terkait dengan konsep negara modern, yang mencerminkan ketergantungan pada mekanisme produksi senjata yang sulit diakses. Akibatnya, meskipun banyak pejuang siap bertempur, mereka kekurangan senjata dan perlengkapan. Hal ini menjadi penyebab utama kehancuran, karena musuh dan rezim yang berkolaborasi dengannya berhasil melucuti rakyat Palestina, memaksa mereka untuk mengungsi atau menyerah pada keunggulan persenjataan musuh.

3. Superioritas teknologi dan militer musuh, yang meliputi Israel dan dukungan Barat di belakangnya. Superioritas ini menjadikan keberanian, jumlah pejuang, dan semangat juang sering kali tidak cukup untuk mengimbangi kekuatan musuh yang jauh lebih maju secara teknologi, logistik, dan persenjataan.

Faktor-faktor ini menuntut adanya solusi berbasis konsep "rakyat bersenjata", yaitu melibatkan sebanyak mungkin rakyat dalam perjuangan, mempersenjatai mereka, dan memastikan akses luas terhadap senjata sesuai dengan kondisi yang tersedia.

Proyek ini membutuhkan kerja keras, kesabaran, serta inovasi dalam menciptakan jenis senjata yang dapat diproduksi secara lokal dan dapat diproduksi massal sehingga dapat dimiliki oleh sebanyak mungkin orang. Banyak ide yang telah muncul dari berbagai pemikir untuk mewujudkan hal ini.

Pertanyaan sentralnya adalah: Bagaimana kita dapat mengubah sumber daya alam dan alat-alat sipil yang ada menjadi senjata yang dapat digunakan untuk bertempur? Pertanyaan ini memerlukan kontribusi dari para insinyur, teknisi, dan inovator.

Selain itu, pertanyaan lain yang sama pentingnya adalah: Bagaimana kita dapat mengembangkan senjata penangkal? Misalnya, jika kita tidak mampu memproduksi atau memperoleh senjata anti-pesawat, maka serangan udara musuh tetap menjadi masalah besar yang memengaruhi hasil konflik selama satu abad terakhir. Jika masalah ini dapat diatasi, sejarah pertempuran akan sangat berbeda.

Oleh karena itu, jika anti-pesawat tidak tersedia, mungkinkah menciptakan senjata penangkal sederhana yang mampu menghasilkan dampak besar? Misalnya, rudal atau drone perlawanan yang dilengkapi dengan bahan peledak atau bahan kimia inovatif untuk menimbulkan kerugian besar bagi musuh.

Penting untuk mendorong para insinyur, ahli kimia, dan teknisi dari berbagai bidang untuk memikirkan solusi ini guna menutup kesenjangan besar dan memungkinkan rakyat memiliki sarana untuk membela diri.

Ada kekhawatiran bahwa penyebaran senjata di kalangan rakyat dapat menimbulkan masalah. Namun, **sejarah menunjukkan bahwa rakyat bersenjata adalah rakyat yang sulit—bahkan mustahil—untuk dijajah**. Melucuti senjata rakyat selalu menjadi langkah pertama penjajah di wilayah kita. Kehancuran dan kekalahan kita sering kali dimulai saat rakyat kehilangan senjata mereka, yang kemudian dimonopoli oleh musuh atau rezim boneka.

Penyebaran senjata di kalangan rakyat juga menciptakan keseimbangan sosial, baik antara kelompok masyarakat, antara rakyat dan otoritas, maupun antara rakyat dan penjajah. Hal ini menjadi kebutuhan strategis—secara militer, politik, psikologis, dan sosial. Masyarakat bersenjata cenderung lebih rendah tingkat kriminalitasnya dibandingkan masyarakat yang tidak bersenjata. Sebab, dalam masyarakat tanpa senjata, pelanggar hukum yang bersenjata cenderung mendominasi.

Selain itu, rakyat bersenjata lebih percaya diri, lebih memiliki rasa harga diri, dan lebih siap melawan penjajahan. Mereka juga cenderung menjadi pendukung yang lebih kuat bagi gerakan perlawanan.

Ketakutan terhadap potensi masalah yang mungkin timbul dari konsep rakyat bersenjata dapat diatasi dengan pengaturan dan organisasi yang baik. Mengatur "pasukan singa" dalam sebuah tentara adalah hal yang mungkin dilakukan. Yang mustahil adalah mengubah "kawanan domba" menjadi pasukan perang!

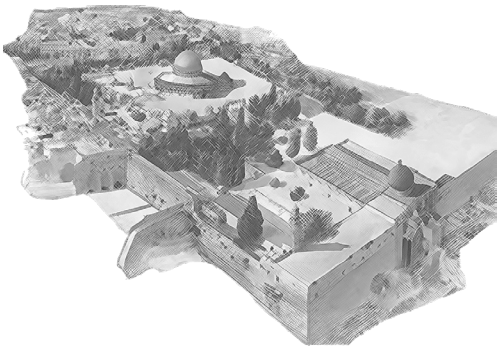

REFERENSI

Referensi Bahasa Arab

١. ديفيد رآوبيني، يوميات ديفيد رآوبيني، ترجمة ودراسة: د. مصطفى وجيه، ط١ (اسطنبول: دار الأصول العلمية، ٢٠٢١م)

٢. طبرية: تاريخ موسوعي، ط١ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢٠٠٩م)

٣. إبراهيم عبد اللطيف، "من وثائق التاريخ العربي"، مجلة جامعة القاهرة بالخرطوم، العدد ٢، ١٩٧١م

٤. ريجينا الشريف، الصهيونية غير اليهودية: جذورها في التاريخ الغربي، ترجمة: أحمد عبد الله عبد العزيز، سلسلة عالم المعرفة ٩٦ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة، ديسمبر ١٩٨٥م)

٥. عبد الوهاب الكيالي (تحرير)، الموسوعة السياسية، (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بدون تاريخ)

٦. المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ط١ (القاهرة: دار الشروق، ١٩٩٩م)

٧. إلياس الأيوبي، تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل، ط٢ (القاهرة: مكتبة مدبولي، ١٩٩٦ م)

٨. ميخائيل فنتر، "علاقات اليهود مع السلطات والمجتمع غير اليهودي"، ضمن: يعقوب لانداو (تحرير)، تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية، ترجمة: جمال الرفاعي وأحمد حماد، (القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠٠٠م)

٩. أسد رستم، المحفوظات الملكية المصرية: بيان بوثائق الشام وما يساعد على فهمها ويوضح مقاصد محمد علي الكبير، (بيروت: الجامعة الأمريكية، ١٩٤٠ م)

١٠. قسطنطين بازيلي، سورية وفلسطين تحت الحكم العثماني، ترجمة: طارق معصراني، (موسكو: دار التقدم، ١٩٨٩م)

١١. داود بركات، البطل الفاتح إبراهيم، (القاهرة: مؤسسة هنداوي، ٢٠١٤م)

١٢. لطيفة سالم، الحكم المصري في الشام، ط٢ (القاهرة: مكتبة مدبولي، ١٩٩٠م)

١٣. كارين أرمسترونج، القدس: مدينة واحدة عقائد ثلاث، ترجمة: د. فاطمة نصر ود. محمد عناني، (القاهرة: سطور، ١٩٩٨م)

١٤. محمد فريد، البهجة التوفيقية في تاريخ مؤسس العائلة الخديوية، تحقيق: د. أحمد زكريا الشلق، ط ٢ (القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، ٢٠٠٥ م)

١٥. مجهول، مذكرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا على سوريا، تحقيق وتقديم: أحمد غسان سبانو، (نسخة إلكترونية)

١٦. محمد إلهامي، في أروقة التاريخ، ط١ (اسطنبول: دار الأصول العلمية، ٢٠٢٢م)

١٧. إيلي ليفي أبو عسل، يقظة العالم اليهودي،

١٨. ملف وثائق فلسطين، (القاهرة: وزارة الإرشاد القومي، ١٩٦٩م)

١٩. رفيق شاكر النتشة، السلطان عبد الحميد الثاني وفلسطين، ط٣ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٩١م)

٢٠. ديفيد فرومكين، سلام ما بعده سلام: ولادة الشرق الأوسط، ترجمة: كمال إلياس، ط١ (لندن: رياض الريس للكتب، ديسمبر ١٩٩٢م)

٢١. لورنس أوليفانت، أرض جلعاد: رحلات في لبنان وسورية والأردن وفلسطين ١٨٨٠م، ترجمة: أحمد عويدي العبادي، ط١ (عمان: دار مجدلاوي، ٢٠٠٤م)

٢٢. ثيودور هرتزل، يوميات هرتزل، ترجمة: هلدا شعبان الصايغ، سلسلة كتب فلسطينية رقم ١٠، ط١ (بيروت: مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية، ١٩٦٨م)

٢٣. أمين عبد الله، مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، سلسلة عالم المعرفة ٧٤ (الكويت: المجلس

الأعلى للثقافة، فبراير ١٩٨٤م)
٢٤. جورج أنطونيوس، يقظة العرب: تاريخ حركة العرب القومية، ترجمة: ناصر الدين الأسد وإحسان عباس، ط٨ (بيروت: دار العلم للملايين، يناير ١٩٨٧م)
٢٥. مايكل أورين، القوة والإيمان والخيال: أمريكا في الشرق الأوسط منذ ١٧٧٦ حتى اليوم، ترجمة: آسر حطيبة، (لندن: مؤسسة هنداوي، ٢٠٠٩م)
٢٦. عيسى القدومي، "الأرشيف العثماني وكنوز تاريخ القدس"، سلسلة بيت المقدس للدراسات، العدد الخامس، شتاء ٢٠٠٨م.
٢٧. نائلة الوعري، دور القنصليات الأجنبية في الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين: ١٨٤٠ – ١٩١٤م، ط١ (عمان: دار الشروق، ٢٠٠٧م)
٢٨. أحمد آق كوندز، الدولة العثمانية المجهولة، ط١ (اسطنبول: وقف البحوث العثمانية، ٢٠٠٨م)
٢٩. عبد العزيز عوض، "هجرة اليهود إلى فلسطين وموقف الدولة العثمانية منها"، مجلة كلية الآداب، جامعة الرياض، ١٩٤٧م
٣٠. أورخان محمد علي، السلطان عبد الحميد الثاني، ط٤ (القاهرة: دار النيل، ٢٠٠٨م)
٣١. مروان أبو شمالة، الاستراتيجية الصهيونية تجاه مدينة القدس، رسالة ماجستير (غزة: الجامعة الإسلامية - كلية الآداب، ٢٠١٢م)
٣٢. محمد شعبان صوان، السلطان والتاريخ: لماذا نقرأ التاريخ العثماني، ط١ (الجزائر – بيروت: ابن النديم – روافد، ٢٠١٦م)
٣٣. د. حسان حلاق، موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية.
٣٤. شاهين مكاريوس، تاريخ الإسرائيليين، (القاهرة، مؤسسة هنداوي، ٢٠١٤م)
٣٥. جارودي، الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية
٣٦. عوني فرسخ، التحدي والاستجابة في الصراع العربي الصهيوني: جذور الصراع وقوانينه الضابطة (١٧٩٩ – ١٩٤٩م)، ط١ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، يونيو ٢٠٠٨م)
٣٧. ابن الأثير، الكامل في التاريخ، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، ط١ (بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٩٧م)
٣٨. أحمد قدري، مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى، ط١ (دمشق: مطابع ابن زيدون، ١٩٥٦م)
٣٩. أحمد الشقيري، الأعمال الكاملة، ط١ (بيروت: مركز دراسات الوحدة

العربية، ٢٠٠٦م)،
٤٠. الرسائل المتبادلة بين الشريف حسين ومكماهون (المندوب السامي الإنجليزي في مصر) في: ملف وثائق فلسطين
٤١. بهجت أبو غربية، في خضم النضال العربي الفلسطيني، (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٩٣م)
٤٢. ميخائيل فنتر، علاقات اليهود مع السلطان والمجتمع غير اليهودي، ضمن: "تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية" تحرير: يعقوب لاندوا، ترجمة: جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حماد، (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٠م)
٤٣. كارل بروكلمان، تاريخ الشعوب الإسلامية، ترجمة: نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي، ط٥ (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٦٨م)
٤٤. هاملتون جب وهارولد باون، المجتمع الإسلامي والغرب، ترجمة ودراسة: أحمد إيبش، ط١ (أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، ٢٠١٢م)
٤٥. توماس أرنولد، الدعوة إلى الإسلام: بحث في تاريخ نشر الدعوة الإسلامية، ترجمة: حسن إبراهيم حسن وآخران، (القاهرة: مكتبة النهضة الوطنية، ١٩٨٠م)
٤٦. مصطفى كامل باشا (الزعيم المصري الشهير)، المسألة الشرقية، ط٢ (مصر: مطبعة اللواء، ١٩٠٩م)
٤٧. عارف العارف، المفصل في تاريخ القدس، ط٩ (القدس: مطبعة المعارف، ١٩٩٩م)
٤٨. مذكرات أريل شارون، ترجمة: انطوان عبيد، (بيروت: مكتبة بيسان، ١٩٩٢م)
٤٩. أحمد حسين، نصف قرن مع العروبة وقضية فلسطين، (بيروت: المكتبة العصرية، ١٩٧١م)
٥٠. ليدل هارت، الاستراتيجية وتاريخها في العالم، ترجمة: الهيثم الأيوبي، ط٤ (بيروت: دار الطليعة، ٢٠٠٠م)
٥١. إشادات الإنجليز وقادة الحلفاء بعمل الشريف حسين ودوره في انتصار الحلفاء على العثمانيين عند: صالح أبو يصير، جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن، ط٥ (بيروت: دار الفتح، ١٩٨٨م)
٥٢. محمد أبو الغار، الفيلق المصري: جريمة اختطاف نصف مليون مصري،

ط١ (القاهرة: دار الشروق، ٢٠٢٢م)
٥٣. كايل أندرسون "فرقة العمال المصرية"، وقد صدرت ترجمته العربية مؤخرا في (القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠٢٣م).
٥٤. محسن صالح، القضية الفلسطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة، (بيروت: مركز الزيتونة، ٢٠١٢م)
٥٥. يوجين روجان، العرب: من الفتوحات العثمانية إلى الحاضر، ترجمة: محمد إبراهيم الجندي، ط١ (القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ٢٠١١م)
٥٦. عبد الله التل، كارثة فلسطين: مذكرات عبد الله التل قائد معركة القدس، ط٢ (كفر قرع: دار الهدى، ١٩٩٠م)
٥٧. خليل الوزير، "حركة فتح: البدايات" (مذكرات خليل الوزير)، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد ١٠٤ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، خريف ٢٠١٥م)
٥٨. لابيدس، تاريخ المجتمعات الإسلامية، ترجمة: فاضل جتكر، ط٢ (بيروت: دار الكتاب العربي، ٢٠١١م)
٥٩. صلاح خلف (أبو إياد)، فلسطيني بلا هوية، (بدون بيانات نشر)
٦٠. فتحي الشقاقي، الأعمال الكاملة: رحلة الدم الذي هزم السيف، إعداد: رفعت سيد أحمد، ط١ (القاهرة: مركز يافا للدراسات، ١٩٩٧م)
٦١. مصطفى السباعي، جهادنا في فلسطين، ط١ (بيروت: دار الوراق، ٢٠٠٠م)
٦٢. طارق البشري، الحركة السياسية في مصر، ط٢ جديدة (القاهرة: دار الشروق، ٢٠٠٢م)
٦٣. عواطف عبد الرحمن، مصر وفلسطين، سلسلة عالم المعرفة ٢٦ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة، فبراير ١٩٨٠م)
٦٤. سوزان طه حسين، معك (مذكرات زوجة طه حسين)، ترجمة: بدر الدين عروكي، ط١ (القاهرة: مؤسسة هنداوي، ٢٠١٥م)
٦٥. شكيب أرسلان، عروة الاتحاد بين أهل الجهاد، ط١ (الشوف: الدار التقدمية، ٢٠٠٩م)
٦٦. محمود عبد الحليم، الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، ط٥ (الإسكندرية: دار الدعوة، ١٩٩٤م)
٦٧. ماري ويلسون، عبد الله وشرق الأردن بين بريطانيا والحركة الصهيونية، ترجمة: فضل الجراح، ط١ (بيروت: قدمس للنشر، ١٩٨٧م)

٦٨. الأمير عادل أرسلان، المذكرات، تحقيق: د. يوسف أيبش، ط٢ (الشوف: الدار التقدمية، ٢٠٠٩م)
٦٩. مذكرات فوزي القاوقجي، ط٢ (دمشق: دار النمير، ١٩٩٥م)
٧٠. محمود الصباغ، حقيقة التنظيم الخاص
٧١. مذكرات أمين الحسيني
٧٢. عبد الله عزام، الذخائر العظام
٧٣. إبراهيم غوشة، المئذنة الحمراء: سيرة ذاتية، ط٢ (بيروت: مركز الزيتونة، ٢٠١٥)
٧٤. عوني فرسخ، التحدي والاستجابة،
٧٥. طه الهاشمي، مذكرات طه الهاشمي، تحقيق: خلدون ساطع الحصري، ط١ (بيروت: دار الطليعة، ١٩٧٨م)
٧٦. كامل الشريف، الإخوان المسلمون في حرب فلسطين، ط٣ (الزرقاء: مكتبة المنار، ١٩٨٤م)
٧٧. قاسم الريماوي، داخل السور القديم: نصوص قاسم الريماوي عن الجهاد المقدس، تحقيق: بلال شلش، ط١ (الدوحة: المركز العربي للأبحاث، ٢٠٢٠م)
٧٨. عارف العارف، نكبة فلسطين والفردوس المفقود، (كفر قرع [فلسطين المحتلة]، دار الهدى، ١٩٥٦م)
٧٩. محمود شيت خطاب، إرادة القتال في الجهاد الإسلامي، ط٢ (دمشق: دار الفكر، ١٩٧٣م)
٨٠. أحمد منصور، أحمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة، (القاهرة: المكتب المصري الحديث، ٢٠٠٤م)
٨١. حرب فلسطين: الرواية الإسرائيلية الرسمية، ترجمة: أحمد خليفة، ط٢ (مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٨٦م)
٨٢. جولدا مائير، اعترافات جولدا مائير، ترجمة: عزيز بيومي، (القاهرة: دار التعاون، د. ت)
٨٣. عبد الله عزام، الذخائر العظام، ط١ (بيشاور: مركز الشهيد عزام الإعلامي، ١٩٩٧م)
٨٤. أحمد جبريل، ذاكرة الثورة الفلسطينية، ط١ (دمشق: دار دلمون، ٢٠٢٢م)
٨٥. إيلان بابه، التطهير العرقي في فلسطين

٨٦. سليمان أبو ستة، حق العودة، (غزة: المركز القومي للدراسات والتوثيق، ١٩٩٩م)

٨٧. مذكرات الرنتيسي، إعداد: عامر شماخ، ط١ (القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية، ٢٠٠٤م)

٨٨. جلال كشك، ثورة يوليو الأمريكية، ط٢ (القاهرة: الزهراء للإعلام العربي، ١٩٨٨م)

٨٩. محمد حسنين هيكل، قصة السويس: آخر المعارك في عصر العمالقة، ط٢ (بيروت: شركة المطبوعات، ١٩٨٢م)

٩٠. الملك حسين، مهنتي كملك، ترجمة: غالب عارف طوقان، (الشركة العربية للطباعة، ١٩٧٨م)

٩١. محمد حسنين هيكل، كلام في السياسة: قضايا ورجال، ط٧ (القاهرة: المصرية للنشر، نوفمبر ٢٠٠٢م)

٩٢. محمد فوزي، حرب أكتوبر دراسة ودروس، ط مكتبة الأسرة (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠١٥م)

٩٣. موشيه ساسون، ٧ سنوات في بلاد المصريين، ط١ (القاهرة – دمشق: دار الكتاب العربي، ١٩٩٤م)

٩٤. من أوراق فتحي البلعاوي، "بين تأسيس رابطة طلاب فلسطين ومقاومة الإسكان والتوطين"، تحقيق: معين الطاهر، مجلة أسطور، عدد ٥ (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يناير ٢٠١٧م)

٩٥. يحيى السنوار، الشوك والقرنفل، ط١ (أطمة: المركز الثقافي الإسلامي، ٢٠٢٤م)

٩٦. غازي القصيبي، الوزير المرافق، ط١ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢٠١٠م)

٩٧. فهمي هويدي، إيران من الداخل، ط١ (القاهرة: مؤسسة الأهرام، ١٩٨٧م)

٩٨. زاهر جبارين، حكاية الدم: من شرايين القسام، ط١ (دمشق: مؤسسة فلسطين للثقافة، ٢٠١٢م)

٩٩. جورج تينيت، في قلب العاصفة: السنوات التي قضيتها في السي آي إيه، ترجمة: عمر الأيوبي، (بيروت: دار الكتاب العربي، ٢٠٠٧م)

١٠٠. أنيس صايغ، عن أنيس صايغ، ط١ (بيروت: رياض الريس للنشر، مايو ٢٠٠٦م)

١٠١. وليد سيف، الشاهد المشهود، ط١ (عمان: الأهلية، ٢٠١٦م)
١٠٢. هيلاري كلينتون، خيارات صعبة: مذكرات هيلاري رودهام كلينتون، ترجمة: ميراي يونس وآخران، ط١ (بيروت: شركة المطبوعات، ٢٠١٥م)
١٠٣. كوندااليزا رايس، أسمى مراتب الشرف: ذكريات من سني حياتي في واشنطن، ترجمة: وليد شحادة، (بيروت: دار الكتاب العربي، مايو ٢٠١٢م)
١٠٤. أحمد سعيد نوفل ومحسن صالح، "موقف حماس من منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها"، ضمن: محسن صالح (محرر)، حركة المقاومة الإسلامية حماس: دراسات في الفكر والتجربة، ط٢ (بيروت: مركز الزيتونة، ٢٠١٥م)
١٠٥. المكتب الإعلامي حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الكتاب الأبيض: عملية الحسم في قطاع غزة اضطرار لا اختيار، ط١ (غزة: نسخة إلكترونية، نوفمبر ٢٠٠٧ م)
١٠٦. المكتب الإعلامي حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الكتاب الأسود: كشف للحقائق ورصد بالوثائق لممارسات سلطة "دايتون" وانتهاكات أجهزتها الأمنية في الضفة الغربية من ٢٠٠٧/٦/١٤ إلى ٢٠٠٨/٦/١٥، ط١ (غزة: نسخة إلكترونية، ٢٠٠٨م)؛
١٠٧. محسن صالح (محرر)، صراع الإرادات: السلوك الأمني لفتح وحماس والأطراف المعنية ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧، ط١ (بيروت: مركز الزيتونة، ٢٠٠٨م)؛
١٠٨. إسراء لافي، سياسات محاربة المقاومة: حماس الضفة نموذجا، المعهد المصري للدراسات، بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٨م.
١٠٩. روبرت جيتس، الواجب: مذكرات وزير الدفاع الأمريكي ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سابقا، ط١ (بيروت: شركة المطبوعات، ٢٠١٧م)
١١٠. لوي كارديك؛ الموريسكيون الأندلسيون والمسيحيون: المجابهة الجدلية، ترجمة: د. عبد الجليل التميمي، (تونس - الجزائر: المجلة التاريخية المغربية - ديوان المطبوعات الجزائرية، ١٩٨٣م)
١١١. الطبري، تفسير الطبري، تحقيق: محمود شاكر وأحمد شاكر، ط١ (القاهرة: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٠م)
١١٢. ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، تحقيق: أسعد الطيب، ط٣ (السعودية: مكتبة نزار مصطفى، ١٤١٩هـ)

١١٣. الثعلبي، تفسير الثعلبي، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، ط١ (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ٢٠٠٢م)
١١٤. المحلي والسيوطي، تفسير الجلالين،
١١٥. مجموعة، موسوعة التفسير بالمأثور، إشراف: د. مساعد الطيار، ط١ (بيروت: دار ابن حزم، ٢٠١٧م)،
١١٦. هنري كيسنجر، النظام العالمي: تأملات حول طلائع الأمم ومسار التاريخ، ترجمة: د. فاضل جتكر، ط١ (بيروت: دار الكتاب العربي، ٢٠١٥م)
١١٧. جمال حمدان، استراتيجية الاستعمار والتحرير، ط١ (القاهرة: دار الشروق، ١٩٨٣م)
١١٨. عدنان أبو عامر، "علاقات حركة حماس مع العالم العربي"، ضمن: محسن صالح (محرر)، حركة المقاومة الإسلامية حماس
١١٩. باسل الأعرج، وجدت أجوبتي، ط١ (بيروت: دار بيسان، مارس ٢٠١٨م)

Referensi Bahasa Inggris:

1. Stanford J. Shaw, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, (Hampshire: Macillan Press LTD, 1991)
2. Ben Halpern and Jehuda Reinharz , Zionism and the Creation of a New Society, (Oxford: Oxford University Press, 1998)
3. Jonathan Frankel, The Damascus Affair,
4. Harold Temperley, England and the Near East, (London: Longmans green co, 1936)
5. Menachem Begin, The Revolt, (New York: Dell book, May 1987)
6. Benjamin Netanyahu, BIBI: My Story, 3rd edition (New York: oct. 2022)

Catatan

Catatan

TIDAK INGIN TERJERUMUS KE DALAM PENAFSIRAN ALIRAN-ALIRAN MENYIMPANG DI ERA INI?

BACA DULU BUKU INI

AL FAHMU INSTITUTE

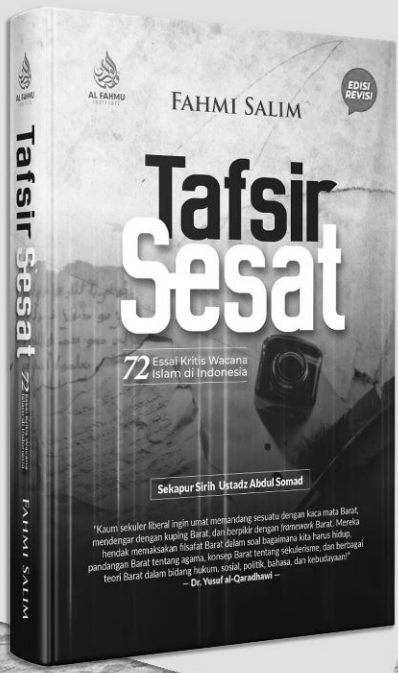

TAFSIR SESAT

IDR 200K

Tingkatkan Literasi Beragama Anda dengan buku Ustadz Fahmi Salim!

ORDER NOW

www.fahamalquran.com/buku-pilihan/
or WA **+62-877-7063-7192**

INGIN TAHU KONSEP REVOLUSI MENTAL DALAM ISLAM? INGIN MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BANGSA? BACA DULU BUKU INI

AL FAHMU INSTITUTE

Tingkatkan Literasi Beragama Anda dengan buku Ustadz Fahmi Salim!

PENYUCIAN JIWA UNTUK PEMAJUAN BANGSA

IDR 175K

ORDER NOW

www.fahamalquran.com/buku-pilihan/
or WA **+62-877-7063-7192**

AL FAHMU INSTITUTE

JAMAAH
JANGAN SAMPAI
KANTUK KARENA BOSAN,
JANGAN BERANI KHUTBAH JUMAT
SEBELUM MEMBACA BUKU INI

Tingkatkan Literasi Beragama Anda dengan buku Ustadz Fahmi Salim!

KHUTBAH-KHUTBAH PENYUCIAN JIWA BANGSA

IDR 250K

ORDER NOW

www.fahamalquran.com/buku-pilihan/
or WA **+62-877-7063-7192**

OPEN ORDER

AL FAHMU INSTITUTE

Buku Karya Ustadz Fahmi Salim, Lc. MA

WAHAI ANAKKU,
BENAHI ADABMU, BERSIHKAN HATIMU

IDR 125.000

Pemesanan 0877-7063-7192

UFS OFFICIAL | FAHMI SALIM | @Fahmisalim2 | @alfahmumedia | www.fahamalquran.com

OPEN ORDER

Buku Karya Ustadz Fahmi Salim, Lc. MA

BAITUL MAQDIS INSTITUTE
Pusat Studi Peradaban Islam

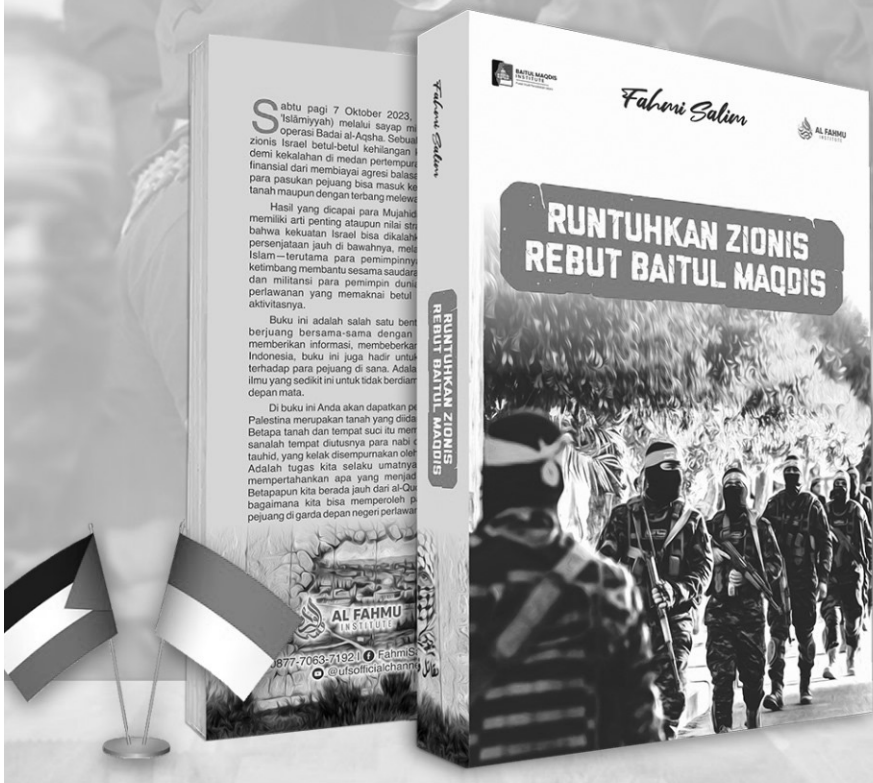

RUNTUHKAN ZIONIS REBUT BAITUL MAQDIS **IDR 200.000**

Pemesanan 0877-7063-7192

UFS OFFICIAL | FAHMI SALIM | @Fahmisalim2 | @alfahmumedia | www.fahamalquran.com